

**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DAERAH**  
**(RKPD)**  
**KOTA BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2018**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOTA BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2017**



**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

BAB I.....

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

14. Rencana.....

14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berpedoman kepada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, yang mengacu kepada RKP Tahun 2018, serta memperhatikan visi, misi dan program Walikota Terpilih.

### Pasal 3

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

1. Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018;
2. Rancangan PPAS Tahun 2018; dan
3. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

BAB IV.....

BAB IV  
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018  
Pasal 5

- (1) RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH  
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH  
BAB VI : PENUTUP

- (2) RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 23 Mei 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

  
M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR.....

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 17 TAHUN 2017  
TANGGAL : 23 Mei 2017

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	x
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	I - 1
1.1.      Latar Belakang .....	I - 1
1.2.      Dasar Hukum Penyusunan .....	I - 4
1.3.      Hubungan Antar Dokumen .....	I - 6
1.4.      Sistematika Penulisan .....	I - 7
1.5.      Maksud dan Tujuan .....	I - 9
<b>BAB II</b> <b>EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b> .....	II - 1
2.1.      Kondisi Umum Daerah .....	II - 1
2.1.1.    Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1
2.1.2.    Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II - 19
2.1.3.    Aspek Pelayanan Umum .....	II - 37
2.1.4.    Aspek Daya Saing Daerah .....	II - 113
2.2.      Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah .....	II - 133
2.3.      Evaluasi Kinerja Tahun Lalu .....	II - 162
2.4.      Penelaahan Terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi untuk Kota Bukittinggi .....	II - 197
2.5.      Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	II - 199
2.6.      Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II - 201
<b>BAB III</b> <b>RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	III - 1
3.1.      Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III - 1
3.1.1.    Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2016 .....	III - 1
3.2.      Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III - 6
3.2.1.    Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III - 6
3.2.2.    Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III - 7
3.2.3.    Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III - 12
3.2.4.    Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III - 15
<b>BAB IV</b> <b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	IV - 1
4.1.      Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV - 1
4.1.1.    Tema Pembangunan.....	IV - 1
4.1.2.    Tujuan dan sasaran Pembangunan.....	IV - 2
4.2.      Prioritas Pembangunan .....	IV - 5
<b>BAB V</b> <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH</b> .....	V - 1
<b>BAB VI</b> <b>PENUTUP</b> .....	VI - 1

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat..... I – 3
Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi ..... II - 2
Tabel 2.2.	Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya Bukittinggi ..... II - 5
Tabel 2.3.	Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi ..... II - 11
Tabel 2.4.	Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah longsor..... II - 14
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin ..... II - 16
Tabel 2.6.	Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi ..... II - 17
Tabel 2.7.	Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Kelompok Umur ..... II - 19
Tabel 2.8.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d. 2016 Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta) ..... II - 21
Tabel 2.9.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d. 2016 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta)..... II - 22
Tabel 2.10.	Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2011 s.d. 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi ..... II - 24
Tabel 2.11.	Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Harga Berlaku Tahun 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 25
Tabel 2.12.	Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2011 s.d. 2015 Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi ..... II – 26
Tabel 2.13.	Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d. 2015 ..... II - 27
Tabel 2.14.	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi ..... II - 29
Tabel 2.15.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi ..... II - 30
Tabel 2.16.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi ..... II - 32
Tabel 2.17.	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi ..... II – 33

Tabel 2.18.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi .....	II - 34
Tabel 2.19.	Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi .....	II - 35
Tabel 2.20.	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016 .....	II - 36
Tabel 2.21.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 38
Tabel 2.22.	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 38
Tabel 2.23.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 40
Tabel 2.24.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 41
Tabel 2.25.	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 42
Tabel 2.26.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi.....	II - 42
Tabel 2.27.	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 43
Tabel 2.28.	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 44
Tabel 2.29.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 45
Tabel 2.30.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 46
Tabel 2.31.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2011 s.d 2016 Kota Bukittinggi.....	II - 47
Tabel 2.32.	Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan tahun 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 48
Tabel 2.33.	Jumlah Dokter Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 48
Tabel 2.34.	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 49
Tabel 2.35.	Jumlah Tenaga Medis Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 50
Tabel 2.36.	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 51
Tabel 2.37.	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Sumbernya Tahun 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 52

Tabel 2.38.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 53
Tabel 2.39.	Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Kota Bukittinggi tahun 2012 s.d 2016 .....	II - 54
Tabel 2.40.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 55
Tabel 2.41.	Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi Tahun 2012 s.d 2016 .....	II - 56
Tabel 2.42.	Rasio Tempat Ibadah Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d 2015 .....	II - 57
Tabel 2.43.	Ruang Terbuka Hijau Tahun 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 58
Tabel 2.44.	Ruang Terbuka Hijau Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 60
Tabel 2.45.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Terminal Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 56
Tabel 2.46.	Rasio Ijin Trayek Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 61
Tabel 2.47.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 62
Tabel 2.48.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 63
Tabel 2.49.	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 64
Tabel 2.50.	Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 65
Tabel 2.51.	Jumlah BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 65
Tabel 2.52.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2012 s.d. 2016	II - 66
Tabel 2.53.	Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d 2016.....	II - 67
Tabel 2.54.	Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d 2016.....	II - 69
Tabel 2.55.	Rasio Penduduk Yang Telah Memiliki KTP dan Penduduk Yang Wajib Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 70
Tabel 2.56.	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2015 Kota Bukittinggi .....	II - 71
Tabel 2.57.	Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d. 2015 Kota Bukittinggi.....	II - 72
Tabel 2.58.	Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 75
Tabel 2.59.	Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2016 .....	II - 76
Tabel 2.60.	Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai tahun 2016	

	Kota Bukittinggi .....	II – 76
Tabel 2.61.	Festival Seni dan Budaya yang Diikuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi .....	II - 78
Tabel 2.62.	Kelompok Seni Tradisi yang Ada di Kota Bukittinggi .....	II - 78
Tabel 2.63.	Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 81
Tabel 2.64.	Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 82
Tabel 2.65.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 83
Tabel 2.66.	Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 84
Tabel 2.67.	Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 85
Tabel 2.68.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 86
Tabel 2.69.	Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi .....	II – 88
Tabel 2.70.	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Bukittinggi Tahun 2012 s.d. 2016.....	II – 89
Tabel 2.71.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2012-2015 .....	II - 90
Tabel 2.72.	Jumlah KK Miskin Berdasarkan Data Susenas Tahun 2012 s.d 2015 .....	II - 91
Tabel 2.73.	Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 92
Tabel 2.74.	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 93
Tabel 2.75.	Ketersediaan Pangan Utama Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016 .....	II - 95
Tabel 2.76.	Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II – 97
Tabel 2.77.	Jumlah LSM di Kota Bukittinggi Tahun 2012 s.d. 2016 .....	II – 98
Tabel 2.78.	Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 99
Tabel 2.79.	Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 100
Tabel 2.80.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2012 s/d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 101
Tabel 2.81.	Kegiatan Pameran Dalam Negeri yang Diikuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi .....	II – 103

Tabel 2.82.	Jumlah Perpustakaan Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 105
Tabel 2.83.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 106
Tabel 2.84.	Produktivitas Padi Tahun 2011 s.d. 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 107
Tabel 2.85.	Produktivitas Jagung Tahun 2011 s.d. 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 108
Tabel 2.86.	Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2011 s.d. 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 108
Tabel 2.87.	Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2011 s.d. 2016 Kota Bukittinggi .....	II - 109
Tabel 2.88.	Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011s.d. 2015 .....	II - 109
Tabel 2.89.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2011 s.d. 2015 .....	II - 110
Tabel 2.90.	Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2012 s.d. 2016 .....	II - 111
Tabel 2.91.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2011 s.d. 2015 .....	II - 111
Tabel 2.92.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015 .....	II - 112
Tabel 2.93.	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 s.d 2015 .....	II - 113
Tabel 2.94.	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2011 s.d 2015 .....	II - 113
Tabel 2.95.	PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah) Tahun 2011 s.d. 2015 .....	II - 114
Tabel 2.96.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d. 2015 atas Dasar Harga Konstran (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (juta).....	II - 115
Tabel 2.97.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kota Bukittinggi .....	II - 118
Tabel 2.98.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya Kota Bukittinggi .....	II - 119
Tabel 2.99.	Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kota Bukittinggi .....	II - 119
Tabel 2.100.	Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Bukittinggi .....	II - 120
Tabel 2.101.	Angka Kriminalitas Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d. 2015 .....	II - 121
Tabel 2.102.	Lama Proses Perijinan Kota Bukittinggi .....	II - 122
Tabel 2.103.	Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Bukittinggi .....	II - 125
Tabel 2.104.	Rasio Ketergantungan Kota Bukittinggi Tahun 2010-2016 .....	II - 126
Tabel 2.105.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi.....	II - 126

Tabel 2.106.	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2013-2017 .....	II - 134
Tabel 2.107.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 s.d 2015.....	II - 136
Tabel 2.108.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2011 s.d 2016 .....	II - 137
Tabel 2.109.	Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuda RKPD Tahun 2017 Kota Bukittinggi.....	II - 139
Tabel 2.110.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi.....	II - 143
Tabel 2.111.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kota Bukittinggi.....	II - 145
Tabel 2.112.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah.....	II - 152
Tabel 2.113.	Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi .....	II - 154
Tabel 2.114.	Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah.....	II - 155
Tabel 2.115.	Proyeksi Pendapatan Kota Bukittinggi.....	II - 156
Tabel 2.116.	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Bukittinggi .....	II - 158
Tabel 2.117.	Realisasi dan Proyeksi/Target Penerimaan Kota Bukittinggi .....	II - 160
Tabel 2.118.	Realisasi Belanja daerah 2015 s.d. 2017 dan Proyeksi/Target Belanja Daerah 2018-2019 Kota Bukittinggi .....	II - 161
Tabel 2.119.	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s.d. 2017 dan Proyeksi/Target Tahun 2018 dan 2019 Kota Bukittinggi.....	II - 162
Tabel 2.120.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2016 Kota Bukittinggi.....	II - 162
Tabel 2.121.	Capaian kinerja Misi I RPJMD 2016-2021 Kota Bukittinggi .....	II - 165
Tabel 2.122.	Capaian kinerja Misi II RPJMD 2016-2021 Kota Bukittinggi .....	II - 167
Tabel 2.123.	Capaian kinerja Misi III RPJMD 2016-2021 Kota Bukittinggi .....	II - 168
Tabel 2.124.	Capaian kinerja Misi IV RPJMD 2016-2021 Kota Bukittinggi.....	II - 170
Tabel 2.125.	Capaian kinerja Misi V RPJMD 2016-2021 Kota Bukittinggi.....	II - 172
Tabel 2.126.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDSampai dengan tahun 2017.....	II - 175
Tabel 2.127.	Identifikasi Kebijakan Nasional Pemerintah Kota Bukittinggi.....	II - 197
Tabel 2.128.	Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kota Bukittinggi .....	II - 200
Tabel 3.1.	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi .....	III - 2
Tabel 3.2.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019 .....	III - 7
Tabel 3.3.	Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2012 – 2017 .....	III – 10

Tabel 3.4.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi Realisasi Tahun 2011 s.d. 2015, APBD 2016 dan Target Tahun 2017-2018 ....	III - 10
Tabel 3.5.	Realisasi Belanja Daerah 2015 s.d. 2016, APBD 2017 serta Proyeksi Belanja Daerah 2017 – 2018 .....	III - 16
Tabel 3.6.	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s/d 2016 dan Proyeksi/Target Tahun 2017 dan 2018 .....	III - 15
Tabel 4.1.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	IV – 3
Tabel 4.2.	Tabel Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	IV – 9
Tabel 4.3.	Rencana Prioritas Pembangunan tahun 2018.....	IV – 10
Tabel 5.1.	Daftar Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017.....	V - 3
Tabel 5.2.	Jumlah Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Belanja Langsung SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 16
Tabel 5.3.	Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	V - 18
Tabel 5.4.	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 28
Tabel 5.5.	Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	V - 46
Tabel 5.6.	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	V - 51
Tabel 5.7.	Program dan Kegiatan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	V - 54
Tabel 5.8.	Program dan Kegiatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 57
Tabel 5.9.	Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 59
Tabel 5.10.	Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 61
Tabel 5.11.	Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 65
Tabel 5.12.	Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 69
Tabel 5.13.	Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 76
Tabel 5.14.	Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	V – 80

Tabel 5.15.	Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 84
Tabel 5.16.	Program Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	V - 88
Tabel 5.17.	Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 93
Tabel 5.18.	Program Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 98
Tabel 5.19.	Program Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 .....	V - 101
Tabel 5.20.	Program Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 106
Tabel 5.21.	Program Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 113
Tabel 5.22.	Program Kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 116
Tabel 5.23.	Program dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 .....	V - 121
Tabel 5.24.	Program dan Kegiatan Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 124
Tabel 5.25.	Program Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 128
Tabel 5.26.	Program Kegiatan Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 132
Tabel 5.27.	Program Kegiatan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 134
Tabel 5.28.	Program Kegiatan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 143
Tabel 5.29.	Program Kegiatan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 151
Tabel 5.30.	Program Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2018 .....	V - 158

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya sebagai Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan .....	I - 6
Gambar 2. Peta Administrasi Kota Bukittinggi.....	II - 3
Gambar 3. Peta Topografi Kota Bukittinggi.....	II - 6
Gambar 4. Peta Kerawanan Gempa Bumi Kota Bukittinggi.....	II - 15
Gambar 5. Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi.....	II - 35
Gambar 6. Jumlah Penumpang Angkutan Umum.....	II - 60
Gambar 7. Jumlah Uji KIR Angkutan umum.....	II - 62
Gambar 8. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus.....	II - 63
Gambar 9. Jumlah KK Miskin Berdasarkan Data Susenas Tahun 2012 s.d 2015.....	II - 91



# Bab 1

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) yaitu **“memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 dilakukan melalui (1) Memperbaiki Kualitas Belanja; (2) Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif; (3) Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri; (4) Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur.

Pada RKP tahun 2018 telah disepakati 10 (sepuluh) prioritas nasional yaitu: (1) pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Perumahan dan Permukiman, (4) Pengembangan dunia usaha dan Pariwisata, (5) Ketahanan energi, (6) Ketahanan Pangan, (7) Penanggulangan Kemiskinan, (8) Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, (9) Pembangunan wilayah dan (10) Politik hukum, pertahanan dan keamanan.

Provinsi Sumatera Barat memiliki visi “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera” sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran dan penetapan Tema RKP Tahun 2018 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat yaitu:

**“Memajukan Kualitas SDM, Infrastruktur dan Iklim Investasi untuk Menurunkan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat”**.

Penyelarasan Antara prioritas Nasional Tahun 2018 dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat**

No.	Prioritas Pembangunan RKP	Prioritas Pembangunan RKP Provinsi Sumatera Barat
1.	Pendidikan	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
		Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
2.	Kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3	Perumahan dan Permukiman	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi
5	Ketahanan Energi	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
6	Ketahanan Pangan	- Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis. - Peningkatan Pemanfaatan Potensi
7	Penanggulangan Kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
8	Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur.
9	Pembangunan Wilayah	- Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur - Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
10.	Politik, hokum, Pertahanan dan Kemanan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018 selanjutnya disebut dengan RKP Kota Bukittinggi tahun 2018 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Pada tahun kedua ini tema RKP Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah **“Pengembangan Pariwisata dengan meningkatkan Kualitas Sektor Pendukung untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Bukittinggi Berlandaskan Agama dan Budaya”**.

Sejalan dengan tema RKP Kota Bukittinggi tahun 2018, terdapat 10 prioritas pembangunan tahun 2018 yaitu: (1) Pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya, (2) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, (3) Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, (4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, (5) Pengembangan pariwisata, (6) Pengembangan ekonomi kerakyatan (koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah), (7) Penanggulangan kemiskinan, (8) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, (9) Pelestarian lingkungan hidup, dan (10) Pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya.

Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh SKPD. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui musrenbang, Pendekatan politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah. Hasil Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 telah dilaksanakan melalui musrenbang yang diawali oleh musrenbang kelurahan pada 24 kelurahan dari tanggal 13 hingga 16 Februari 2017, Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2017 hingga 2 maret 2017 dan Musrenbang RKPD dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2017 dengan menghasilkan 300 total usulan kegiatan untuk dimasukkan pada renja SKPD.

Adapun tahapan penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pembangunan;
5. Peraturan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

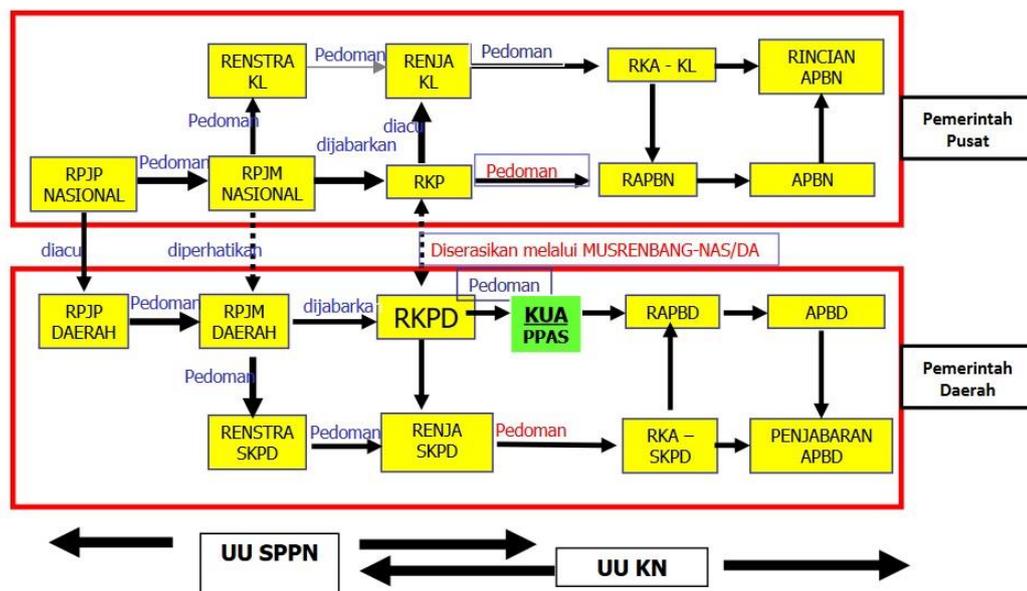
### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Bukittinggi tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. RKPD Kota Bukittinggi disusun dengan mengacu pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, RPJMD Provinsi, RPJMN serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2018, RKPD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 serta memperhatikan masterplan tingkat kota dan rencana induk pengembangan sektoral yang dimiliki Pemerintah Kota Bukittinggi.

RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan kota. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana pada gambar berikut:

**Gambar 1**  
hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode RPJMD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Uraian ringkas dasar hukum yang digunakan/dipedomani dalam penyusunan RKPD, baik hukum nasional maupun produk hukum daerah yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

##### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJMD, RTRW dll.

##### **1.4. Sistematika Dokumen RKPD**

Menjelaskan sistematika penyusunan, pengaturan bab serta garis besar isi di dalam dokumen.

##### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD bagi daerah.

#### **BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

##### **2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Memuat Kondisi Geografis dan Demografis Kota Bukittinggi, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah Kota Bukittinggi

##### **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menguraikan tentang Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, identifikasi permasalahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

**BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat tentang Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016, Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan tentang Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

**BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

## **BAB VI. PENUTUP**

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Bukittinggi, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun dengan maksud Pedoman dalam penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan instrumen untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah:

1. Untuk mewujudkan program pembangunan yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2018;
3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun Anggaran 2018;
4. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



## **Bab II**

# **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

### **2.1. Kondisi Umum Daerah**

Kota Bukittinggi merupakan daerah tujuan wisata utama di Provinsi Sumatera Barat, disamping sebagai kota pendidikan, kota pelayanan kesehatan dan kota perdagangan dan jasa serta tempat peristirahatan. Kota Bukittinggi menjadi pusat pengembangan pariwisata di Sumatera Barat karena karakteristik alam dan budayanya serta lokasinya yang strategis dan menjadi *home base* bagi wisatawan yang hendak mendatangi objek- objek wisata yang ada di Sumatera Barat yang jaraknya relatif dekat dan mudah dicapai dari Kota Bukittinggi. Penetapan Kota Bukittinggi sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat diawali dengan pencanangannya sebagai kota wisata pada tanggal 11 Maret 1984, hingga saat ini berkembang menjadi Daerah Tujuan Wisata Utama di Sumatera Barat yang ditetapkan melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Data dan informasi yang berhubungan dengan gambaran umum kondisi daerah mencakup data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Kota Bukittinggi.

#### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi dan demografi menggambarkan tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi Kota Bukittinggi.

##### **2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah**

Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan Kota Bukittinggi.

### 2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,239 Km<sup>2</sup>, yang merupakan 0,06 persen luas Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Bukittinggi sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukittinggi - Kota Padang Panjang dan Kota Padang, serta Kota Bukittinggi – Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Disamping itu Kota Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah, Bukittinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km<sup>2</sup> (683,10 Ha) atau 27,07 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan.
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km<sup>2</sup> (1.215,60 Ha) atau 48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan.
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km<sup>2</sup> (625,20 Ha) atau 24,77 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.

**Tabel 2.1.**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi**

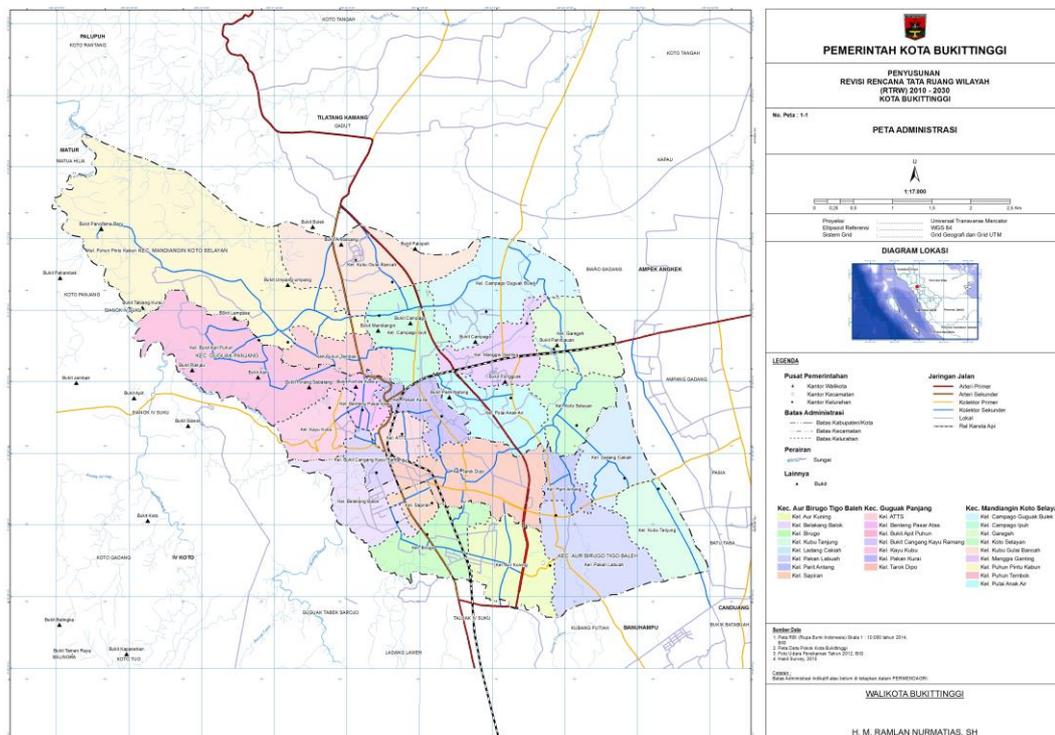
No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
<b>I</b>	<b>GUGUK PANJANG</b>	<b>683,10</b>	<b>27,07</b>
1.	Bukit Cengang K. Ramang	47,00	1,86
2.	Tarok Dipo	148,00	5,86
3.	Pakan Kurai	87,00	3,45
4.	Aur Tajungkang T. Sawah	69,00	2,73
5.	Benteng Pasar Atas	56,00	2,22
6.	Kayu Kubu	91,00	3,61
7.	Bukit Apit Puhun	185,10	7,33
<b>II</b>	<b>MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>	<b>1.215,60</b>	<b>48,16</b>
1.	Pulai Anak Air	88,20	3,49
2.	Koto Selayan	73,00	2,89
3.	Garegeh	65,00	2,58
4.	Manggis Ginting	65,10	2,58
5.	Campago Ipuh	139,30	5,52
6.	Puhun Tembok	71,00	2,81
7.	Puhun Pintu Kabun	361,00	14,30

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
8.	Kubu Gulai Bancah	181,00	7,17
9.	Campago Guguk Bulek	172,00	6,81
<b>III</b>	<b>AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>	<b>625,20</b>	<b>24,77</b>
1.	Belakang Balok	50,40	2,00
2.	Sapiran	25,70	1,02
3.	Birugo	94,00	3,72
4.	Aur Kuning	90,00	3,57
5.	Pakan Labuah	118,00	4,68
6.	Kubu Tanjung	91,10	3,61
7.	Ladang Caklah	74,00	2,93
8.	Parit Antang	82,00	3,25
<b>JUMLAH</b>		<b>2.523,90</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2016

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan *Tuff* dari lereng Gunung Marapi sehingga tanahnya subur, namun luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel, dan pasar. Lokasi pasar yang terluas terdapat di Kecamatan Guguk Panjang yaitu Pasar Simpang Aur Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah.

**Gambar 2**  
**Peta Administrasi Kota Bukittinggi**



Secara administratif, Wilayah Kota Bukittinggi dikelilingi oleh Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Sebelah Barat dengan Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; dan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

#### **2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kota Bukittinggi berada dalam lingkup Kabupaten Agam, serta terletak pada posisi sentral dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat maupun antar provinsi terdekat. Letak geografis ini cukup strategis terhadap lintasan regional, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru. Kota Bukittinggi telah menjadi kota titik perlintasan dari Jalur Lintas Tengah Sumatera serta jalur penghubung antara Jalur Lintas Tengah dengan Jalur Lintas Timur Sumatera.

##### **a) Posisi Astronomis**

Secara astronomis, Kota Bukittinggi membentang antara  $100^{\circ}20'$  -  $100^{\circ}25'$  BT dan antara  $00^{\circ}16'$  -  $00^{\circ}20'$  LS.

##### **b) Posisi Geostrategis**

Bukittinggi dengan posisi geostrategisnya, mempunyai dataran yang tinggi dan bergelombang serta mempunyai udara yang sejuk, memungkinkan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Bukittinggi. Oleh karena itu dalam lingkup Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi menjadi orientasi pelayanan utama perdagangan, dan pariwisata.

##### **c) Kondisi/Kawasan Kota Bukittinggi**

Bukittinggi dengan wilayah yang dimilikinya merupakan kategori Kota Kecil, dan dari segi jumlah penduduk merupakan kategori Kota Sedang, sehingga dapat dikatakan cukup padat untuk sebuah kota kecil. Kota Bukittinggi tidak mempunyai daerah Pedalaman, Terpencil, Pesisir, Pegunungan dan Kepulauan.

### 2.1.1.1.3. Topografi

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 756-960 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan kemiringan yang sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit dan terjal. Wilayah yang berada di kawasan Ngarai Sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,79%) berada disekitar ngarai, kawasan Gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguak Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Lahan yang memiliki kemiringan relatif datar (74,83%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur. Adapun proporsi luasan lahan di Kota Bukittinggi berdasarkan klasifikasi kelerengan adalah sebagai berikut:

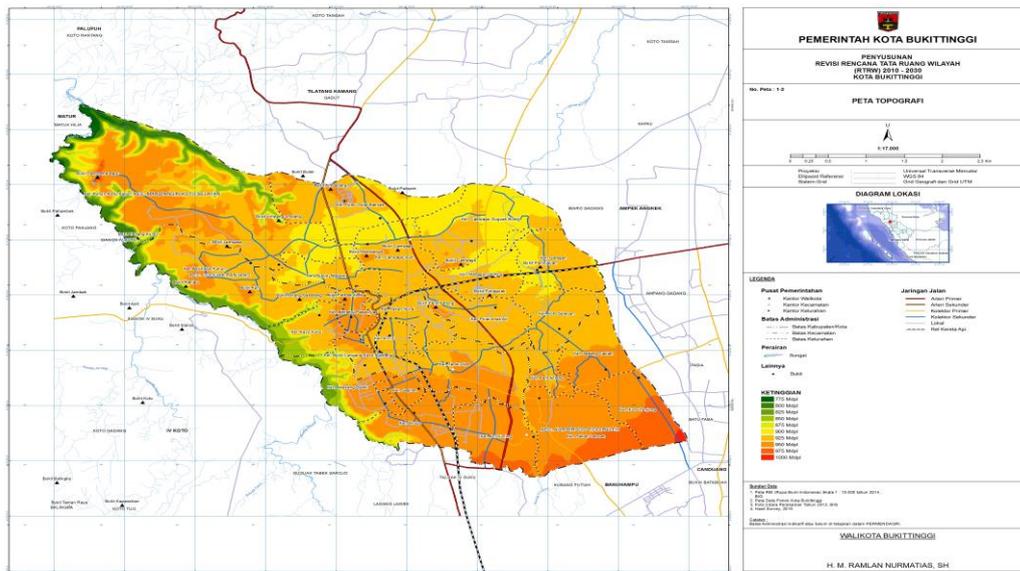
**Tabel 2.2.**  
**Proporsi luasan lahan di Kota Bukittinggi**  
**Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya**

No	Lereng	Kecamatan						Jumlah (Ha)	%
		ABTB		GP		MKS			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
1.	0-2%	430,22	68,81	369,77	54,313	584,27	49,06	1.384,26	54,59
2.	3-8%	88,57	14,17	96,70	14,16	71,47	5,88	256,74	9,79
3.	9-15%	25,60	4,09	52,95	7,75	180,63	14,86	259,18	10,60
4.	16-25%	9,73	1,56	23,66	3,46	94,74	7,79	128,13	5,27
5.	26-40%	4,86	0,78	29,93	4,38	73,75	6,07	108,54	4,37
6.	>40%	66,22	10,59	110,09	16,12	210,75	17,34	387,05	15,38
<b>JUMLAH</b>		<b>625,20</b>	<b>100</b>	<b>683,10</b>	<b>100</b>	<b>1.215,60</b>	<b>100</b>	<b>2.523,90</b>	<b>100</b>

Kota Bukittinggi dikelilingi oleh perbukitan di sebelah Utara, Timur dan Barat, serta pegunungan di sebelah Selatan dengan topografi wilayah pada umumnya bergelombang. Dengan kondisi demikian, berakibat terhadap terbatasnya pemanfaatan ruang kota untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai topografi Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta Topografi Kota Bukittinggi di bawah ini:

**Gambar 3**  
**Peta Topografi Kota Bukittinggi**



Berdasarkan kemampuan umum morfologinya, Kota Bukittinggi dan sekitarnya dapat dibedakan menjadi empat satuan morfologi, yaitu :

1. Satuan Morfologi Dataran  
Kemiringan lereng umumnya 10%, dengan ketinggian berkisar antara 865-920 mdpl. Penggunaan lahan umumnya untuk persawahan, kebun/ladang dan permukiman, daerah ini dibentuk oleh endapan vulkanik muda berupa tufa apung.
2. Satuan Morfologi Berelief Halus  
Kemiringan lereng antara 10-15 % dengan ketinggian 850-920 mdpl, umumnya merupakan kebun/ladang belukar, permukiman dan perwasahan. Daerah ini dibentuk oleh batuan tufa apung dan sebagian oleh metamorf.
3. Satuan Morfologi Berelief Kasar  
Dibentuk oleh batuan tufa apung dengan ketinggian daerah antara 650-900 mdpl, medan cukup terjal, kemiringan lebih dari 60% satuan morfologi ini merupakan tebing Ngarai Sianok.
4. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi  
Kemiringan medan antar 10 -20% dengan kemiringan tempat 900 mdpl, penggunaan lahan pada satuan ini berupa semak/belukar, dan sebahagian persawahan. Daerah dengan satuan morfologi ini sangat subur, karena dibentuk oleh hasil endapan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang berupa lava.

#### 2.1.1.1.4. Geologi

Kota Bukittinggi terletak pada suatu zona yang dikenal sebagai jalur utama Sistem Sesar Sumatera yaitu pada Segmen *Central Barisan Fault Zone (CBFZ, Possavec et al, 1973 & Hahn & Weber, 1981)*. CBFZ merupakan komponen utama dari Sistem Sesar Sumatera dan kerap juga disebut sebagai "Patahan Semangko" yang membentang sepanjang tengah daratan Pulau Sumatera. Kota Bukittinggi terletak 1250 meter di timur dari jalur CBFZ. Untuk skala regional, jarak tersebut relatif dekat. Segmen CBFZ itu satu-satunya struktur geologi yang signifikan untuk dinamika tektonik Kota Bukittinggi masa kini, karena jalur secara sesar aktif itu kerap merupakan lokasi dari episentrum gempa bumi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan tinjauan geologi, wilayah Bukittinggi dan sekitarnya didominasi oleh kelompok batuan beku yang berasal dari aktifitas Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikek serta dari kaldera Danau Maninjau. Umumnya batuan tersebut bersifat andesitic. Jenis batuan yang terdapat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya yaitu :

- a. Batuan Fillit, kwarsit serta batu lanau metamorf (pTu) berwarna merah sekisan, menunjukkan laminasi dan lineasi yang biasanya mendasari bukit-bukit serta merupakan batuan yang paling tua.
- b. Batu Gamping hablur (pTIs) berwarna putih sampai keabu-abuan pada singkapan segar dan kelabu kotor pada yang lapuk, besar butir 0,5-5 mm, umumnya pejal dan berongga. Mempunyai ciri khas membentuk punggung-punggungan tajam dan bukit terisolir.
- c. Batuan lanau bergradasi ke batuan pasir meta lunak yang sebahagian yang terdiri dari butir-butir kwarsa dalam masa lempungan. Batuan ini dijumpai di daerah Timur Laut Kota Bukittinggi.
- d. Kwarsit bersifat kompak yang terdapat di beberapa tempat.
- e. Batuan granit dijumpai dibagian Barat Bukittinggi, berupa stok berkompensasi antara granit dan diorite kawarsa.
- f. Andesit dari profit dasit, umumnya mengandung *horn blende*.

Batuan tuft batu apung mempunyai penyebaran sangat luas hampir 65 % kawasan Ngarai Sianok dan merupakan batuan penyusun utama dataran tinggi Agam. Secara umum batuan ini mempunyai sifat fisik rapuh/retas dan mudah tergerus, sehingga daya dukungnya kurang mantap dan mudah runtuh bila mengalami gangguan terutama oleh aliran air hujan dan air tanah. Dengan karakteristik batuan seperti ini, maka pembangunan

khususnya di kawasan sekitar Ngarai Sianok perlu secara hati-hati dengan perhitungan yang akurat.

Struktur dan karakteristik tufa batu apung terdapat sebagai tebing Ngarai Sianok, batuan ini berwarna putih hingga coklat muda. Dalam keadaan kering bersifat cukup kompak dan agak padat, sehingga mampu membentuk tebing yang hampir vertikal setinggi puluhan meter. Di bagian atas tebing sering dijumpai kekar yang terbuka lebar terutama bila ada aliran air yang masuk kedalamnya. Berdasarkan data laboratorium pengembangan bebas (swelling) batuan ini melebihi 70%. Angka ini merupakan salah satu faktor yang menunjukkan mudah terganggunya kestabilan lereng/tebing jika dirembesi oleh air. Dalam keadaan tidak tersingkap atau terganggu, batuan ini mempunyai daya dukung cukup besar lebih dari 3.75 kg/cm<sup>2</sup>. Sedangkan tanah pelapukan berupa peralihan lempung, lanau dan lempung pasir, kurang lulus air dengan orde lebih kecil dari 10-6 cm/dt. Air yang mengalir diatas tanah ini akan lebih banyak mengalir pada permukaan. Selanjutnya dibawah kedalaman 2 meter, biasanya berupa tufa halus sampai kasar, sangat lapuk dengan orde kelulusan berkisar antara 10-3–10-4 cm/dt.

#### **2.1.1.1.5. Hidrologi**

Kota Bukittinggi terletak di dalam dua Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Masang Hulu dan DAS Batang Agam. Garis pemisah air kedua DAS tersebut mengikuti tebing Ngarai Sianok dibagian Barat dan bermuara di Samudera Indonesia, sedangkan disebelah Timur bagian DAS Batang Agam yang mengalir ke daerah Timur.

Kota Bukittinggi termasuk dalam akuiveler dengan aliran melalui ruang antara butir dan tekanan batuan/tanah. Berdasarkan peta hidrologi lembar Padang, Sumatera Barat dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan, daerah Bukittinggi termasuk daerah dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi, dimana pengambilan air tanah dapat mencapai 5-10 l/dt. Kedalaman muka air tanah bebas dapat mencapai kurang dari 3 m dari muka tanah setempat, akuifer produktif mencapai kedalaman lebih 100 m. Pemunculan air tanah (mata air) yang berasal dari batuan tufa batu apung banyak terdapat di kaki Gunung Singgalang dan Gunung Marapi yaitu di daerah dataran Timur Laut Kota Bukittinggi, diantaranya Mata Air Sungai Talang (150 l/dt), Sarik (70 l/dt), Taro (62 l/dt), Galang (50 l/dt) dan Mata Air Bulan Gadang yang memiliki debit 150 l/dt.

Daerah sungai yang terdapat di Kota Bukittinggi merupakan sungai-sungai dengan lebar 6 m hingga 12 m serta sungai-sungai yang relatif lebih kecil. Sungai-sungai / batang yang mengalir yaitu :

**a. Wilayah Kota Bukittinggi**

- Batang Tambuo dengan lebar sungai 7 m.
- Batang Agam dengan lebar sungai 6 m
- Batang Sianok dengan lebar 12 m

**b. Daerah sekitar Kota Bukittinggi**

- Sungai Batang Air Katiak
- Sungai Batang Serasah
- Sungai Batang Agam

**2.1.1.1.6. Klimatologi**

Kondisi iklim Kota Bukittinggi termasuk tropis basah dengan Hidrologi dan reaksinya dengan lingkungan Kota Bukittinggi diuraikan sebagai berikut :

**a. Daerah Aliran Sungai**

Kota Bukittinggi dialiri sungai kecil, yaitu Batang Tambuo di sebelah timur dengan lebar 5-7m, Batang Sianok di sebelah Barat dengan lebar 12-15m, dan Batang Agam di wilayah Kota dengan lebar 5-7m. Sepanjang perbatasan sebelah Barat Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam membentang lembah dalam yang disebut dengan Ngarai Sianok, yang dibawahnya mengalir Sungai Batang Sianok. Kondisi air semakin mempercantik Kota Bukittinggi untuk menjadi Kota kunjungan dengan objek wisata alamnya.

**b. Tipe**

Kota Bukittinggi beriklim basah yang termasuk tipe iklim B yang menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat sejuk dan sangat cocok untuk pertanian terutama untuk tanaman hias, disamping juga untuk tempat peristirahatan.

**c. Curah Hujan**

Curah hujan Kota Bukittinggi berkisar antara 2.300 - 2.500 mm/tahun, pada umumnya rata-rata berkisar 2.381 mm/tahun dengan jumlah hujan rata-rata 193 hari/tahun.

**d. Suhu**

Kota Bukittinggi terkenal sebagai kota wisata yang berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara suhu udara minimum 16,10° C dan maksimum mencapai 24,90° C dan tekanan udara berkisar antara 22–25 knots. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat cocok untuk tempat peristirahatan.

**e). Kelembaban**

Bukittinggi mempunyai kelembaban minimum 63% dan maksimum 90,8%, dengan kelembaban rata-rata 82% setiap tahunnya.

**2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan**

Pengembangan pola ruang Kota Bukittinggi didasarkan beberapa pendekatan utama, yaitu :

- a) Struktur ruang yang dikembangkan;
- b) Evaluasi kesesuaian dan daya dukung lahan;
- c) Kondisi penggunaan lahan saat ini serta kecenderungan perkembangannya.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ketetapan UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 dengan batasan sebagai berikut :

- a. Kawasan Lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia.

Alokasi rencana pola ruang di Kota Bukittinggi secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.3.**  
**Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi**

POLA RUANG	ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)	%
Semua Kawasan	646,89	572,054	1.298,128	2.523,902	100%
Kawasan Lindung	89,974	146,588	320,706	557,268	22%
1. Kawasan Lindung Setempat	56,687	77,103	195,654	329,444	13%
1.1 Kawasan Ngarai Sianok	56,687	77,103	195,654	329,444	13%
2. Ruang Terbuka Hijau	33,287	69,485	125,052	227,824	9%
2.1 RTH Taman Kota	3,279	20,725	48,030	72,034	3%
Hutan Kota	1,047	14,197	26,837	42,081	2%
Taman Kota	2,232	6,528	21,193	29,953	1%
2.2 RTH Fungsi Tertentu	24,063	47,56	86,587	158,21	8%
Sempadan Ngarai Sianok	13,858	31,693	56,285	101,836	4%
Sempadan Sungai	5,032	4,913	15,291	25,236	1%
Taman Bawah Jalan Layang	1,325	3,043	3,072	7,44	2%
Taman Pemakaman Umum	3.124	6.399	10,177	19.7	1%
2.3 RTH Jalur Hijau dan Pejalan Kaki	1,6	1,2	2,37	5,17	0%
<b>Kawasan Budidaya</b>	<b>563,619</b>	<b>417,347</b>	<b>982,068</b>	<b>1.963,032</b>	<b>78%</b>
1. Kawasan Perumahan	297.299	222,869	612,898	1.133,066	45%
1.1 Perumahan Kepadatan Tinggi	110,290	114,778	290,209	515,278	20%
1.2 Perumahan Kepadatan Sedang	174,129	98,025	322,688	594.842	24%
1.3 Perumahan Kepadatan Rendah	12,879	10,067	0	22,946	1%
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa	40.338	122,266	103,406	266,009	11%
3. Kawasan Perkantoran	6,865	6,938	20.309	34,111	1%
4. Kawasan Pariwisata	0	4,021	0	4,021	0%
5. Kawasan Peruntukan Lainnya	219,117	61,253	245,455	525,825	21%
5.1 Pertanian Lahan Basah	199,802	0	104,423	304,224	12%
5.2 Pertanian Lahan Kering	0	21.714	106,214	127,928	5%
5.3 Sarana Pelayanan Umum	17,655	39,469	32,215	89,339	4%
5.4 Pertahanan dan Keamanan	1,660	0,070	2,610	4,340	0%

Sumber : Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

Ada dua penggolongan terhadap pola ruang yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya, luas kawasan lindung 22% dan luas kawasan budidaya 78% dari luas wilayah Kota Bukittinggi. Kawasan lindung di Kota Bukittinggi terdiri dari kawasan lindung setempat dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pengembangan kawasan budidaya Kota Bukittinggi pada dasarnya bergantung pada arahan kepadatan Kota Bukittinggi, dimana arahan kepadatan tersebut ditetapkan sebagai kawasan kepadatan tinggi, kawasan kepadatan sedang serta kawasan kepadatan rendah.

#### **2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Kota Bukittinggi dengan luas 25,239 Km<sup>2</sup>, daerah yang efektif untuk dibangun hanya sekitar 18 Km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan karena kondisi kota yang berbukit dan memiliki jurang atau yang lebih dikenal dengan Ngarai Sianok. Untuk itu sangat diperlukan kebijakan dalam pengembangan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.

Ada dua pendekatan terhadap pengembangan potensi wilayah yaitu :

- **Potensi Lansekap Kota**

Kondisi topografi yang berbukit dapat memberi warna bagi pengembangan Kota Bukittinggi kedepan, yaitu potensi pemandangan lansekap kota. Kawasan perbukitan di Kota Bukittinggi memiliki potensi pandang ke arah perkotaan yang memiliki ketinggian yang lebih rendah. Keberadaan bukit-bukit tersebut dapat menjadi titik-titik pengembangan yang memberikan nilai *view* yang terbaik di Kota Bukittinggi.

- **Potensi Pengembangan Ekonomi**

- Kepadatan Penduduk

Ada perbedaan jumlah penduduk Kota Bukittinggi antara siang hari dan malam hari, dimana penduduk siang hari 2-3 kali lebih banyak dari pada malam hari. Hal ini dikarenakan Kota Bukittinggi merupakan destinasi perjalanan dan perdagangan bagi wilayah-wilayah *hinterland* Kota Bukittinggi yang pada umumnya adalah wilayah administrasi Kabupaten Agam yang sangat berpengaruh terhadap potensi pengembangan ekonomi Kota Bukittinggi.

- Sosial Budaya Masyarakat

Walaupun sampai saat ini Kota Bukittinggi telah menjadi kawasan urban, namun secara budaya masyarakat Bukittinggi masih memegang teguh adat-istiadat yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini dengan adanya gerakan kembali ke Nagari, hal ini akan berimbas pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan agama akan semakin menguat. Karakteristik tatanan kehidupan masyarakat Kurai Limo Jorong yang menjadi dasar filosofis budaya Kota Bukittinggi.

- Perekonomian Kota

Secara regional, Kota Bukittinggi merupakan pusat ekonomi bagi wilayah *hinterland*-nya, dalam hal ini wilayah Kabupaten Agam. Karakteristik ekonomi Kota Bukittinggi tercermin dari dominasi kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bukittinggi, yang menjadi orientasi bagi wilayah *hinterland*-nya. Dalam hal ini Kota Bukittinggi berperan sebagai pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa bagi wilayah di Kota Bukittinggi itu sendiri maupun wilayah regionalnya.

Dari sisi potensi sumber daya alam, Bukittinggi tidak memiliki potensi galian tambang, mineral, gas bumi, perikanan laut serta hutan yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya di Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah.

### **2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Kota Bukittinggi yang memiliki morfologi permukaan yang berbukit serta berada pada jalur Patahan Sesar Semangko, mengakibatkan kota ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam (gempa bumi dan tanah longsor). Dengan kondisi tersebut, maka harus ada kebijakan yang tepat dalam pembangunan wilayah kota serta perencanaan terhadap mitigasi bencana. Kawasan rawan bencana longsor berada sepanjang bibir Ngarai Sianok meliputi ketiga kecamatan yang ada seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4.**  
**Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah longsor**

Rawan Gempa Bumi					
No	Zona	Rawan	Kecamatan		
			ABTB	GP	MKS
1.	Zona Rawan Tinggi		Belakang Balok Birugo Ladang Cakiah Kubu Tanjung Pakan Labuah Sapiran Aur Kuning Parit Antang	Kayu Kubu BCKR Pakan Kurai ATTS Tarok Dipo Benteng Pasar Atas Bukit Apit Puhun	Koto Selayan Garegeh Campago G.Bulek Campago Ipuh Kubu Gulai bancah Puhun Tembok Manggis Ganting Pulai Anak Air Puhun P.Kabun
Kerawanan Goncangan Tanah					
1.	Zona Rawan rendah		Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Sapiran Parit Antang Ladang Cakiah	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Pakan Kurai Bukit Apit Puhun ATTS	Koto Selayan Campago Ipuh Puhun Tembok Puhun Pintu Kabun
2.	Zona Rawan Sedang		Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Belakang Balok Sapiran Parit Antang	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Bukit Apit Puhun ATTS	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Campago Ipuh Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah
3.	Zona Rawan Tinggi		Birugo Belakang Balok	BCKR Tarok Dipo ATTS Kayu Kubu ATTS	Pulai Anak Alr Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah

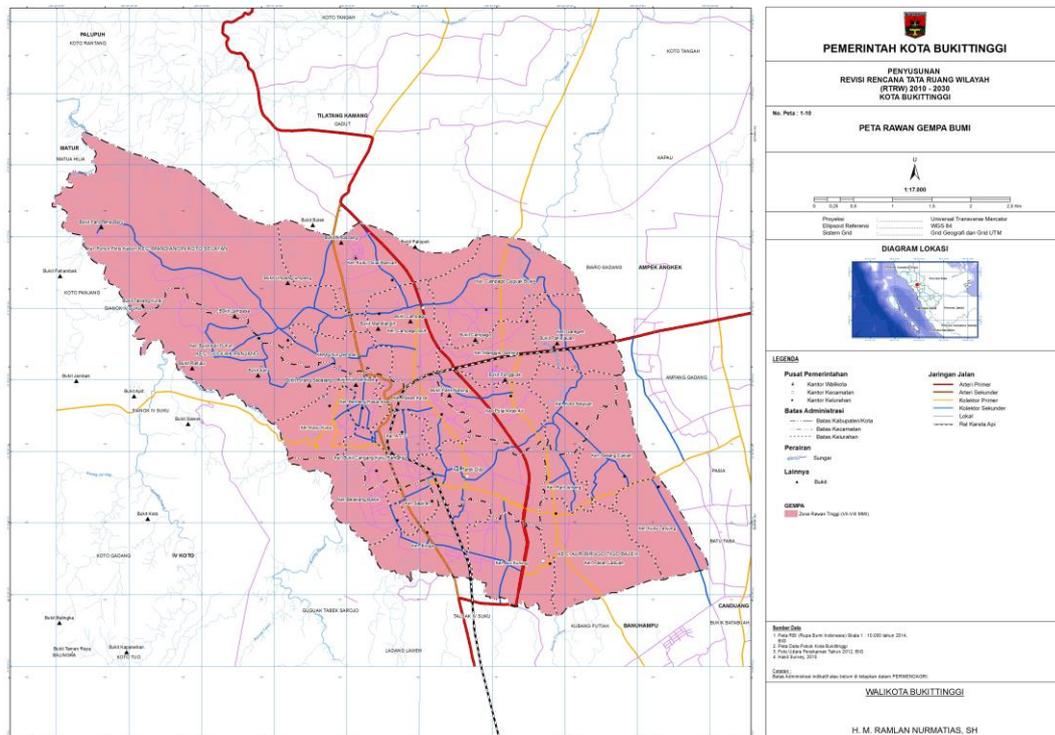
Sumber : Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa seluruh wilayah yang berada dalam Kota Bukittinggi sangat berisiko terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi. Kategorinya mulai dari zona rawan bencana rendah, sedang dan tinggi. Menyikapi hal tersebut, maka Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2017 telah menuangkan kebijakan terhadap penanganan kawasan bencana ini dalam Draf Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 yang menetapkan bahwa sepanjang Kawasan Ngarai Sianok dan sempadan Ngarai Sianok yaitu

dari Bibir Ngarai sampai dengan 50 Meter merupakan kawasan rawan bencana dengan zona rawan tinggi.

**Gambar 4**  
**Peta Kerawanan Gempa Bumi Kota Bukittinggi**



Gempa Bumi merupakan pelepasan energi kejut yang merambat sebagai gangguan (*disturbances*) pada material pembentuk bumi. Perambatan gangguan (*propagation of disturbances*) sebagai pola gelombang tekanan (kompresi) tinggi bergonta ganti dengan tekanan rendah melalui masa material di dalam bumi, sehingga di permukaan bumi timbul getaran menghentak-hentak (*stick-slip*). Respon dari suatu area di permukaan bumi terhadap gempa, terkait ke 4 faktor, yaitu; sifat fisik dari material pembentuk area, kemiringan area, kekuatan gempa bumi dan struktur geologi area (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2007). Kota Bukittinggi, meskipun terletak di luar jalur sesar aktif, namun akan menerima perambatan getaran seismik jika terjadi gempa bumi yang berhiposentrum pada jalur sesar tersebut.

#### 2.1.1.4. Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah.

Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Penduduk Kota Bukittinggi dapat dianalisis menurut struktur umurnya, sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan resiko dan kebutuhan yang berbeda-beda pada setiap kelompok. Jumlah penduduk usia kerja (25-55) tahun 2015 di Kota Bukittinggi sebanyak 83.055 jiwa (67,73%), dari total jumlah penduduk Kota Bukittinggi, sedangkan usia sekolah berjumlah 45.908 jiwa (38,102%). Jadi dari uraian di atas bahwa usia penduduk yang lebih menonjol adalah usia produktif yaitu usia 25-55 tahun, artinya penduduk usia produktif relatif besar yang merupakan modal dasar bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang akan mendapat pendidikan dasar dan menengah (5-10) tahun mendatang akan meningkat sehingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah harus dipersiapkan.

Sebaran penduduk di Kota Bukittinggi terbesar adalah di Kecamatan Mandiangin Kota Selayan, yaitu 40,98% dari seluruh penduduk Kota Bukittinggi, diikuti oleh Kecamatan Guguk Panjang, yaitu 36,75% dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebesar 22,27%. Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi secara umum semakin lama semakin naik, ini dapat dibuktikan, dimana pada tahun 2011 adalah 4.500 jiwa/km<sup>2</sup>, Tahun 2012 sebesar 4.533 jiwa/km<sup>2</sup>, dan pada Tahun 2013 sebesar 4.607 jiwa/km<sup>2</sup>, Tahun 2014 sebesar 4.774 jiwa/km<sup>2</sup> dan pada tahun 2015 sebesar 4.898 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	2016	61.163	63.552	124.715	1,71
2.	2015	59.419	63.202	122.621	1,77
3.	2014	58.408	62.083	120.491	1,88
4.	2013	57.261	60.999	118.260	1,88
5.	2012	55.287	59.128	114.415	1,93
6.	2011	54.933	58.636	113.569	1,93

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dirinci dan dikaji lagi tentang jumlah penduduk sebagaimana terlihat pada tabel diatas, maka dapat dilakukan pemilahan data tersebut tentang kondisi kepadatan penduduk, berdasarkan lokasi dan tempat tinggal. Dengan luas Kota Bukittinggi hanya 25,239 Kilometer persegi (Km<sup>2</sup>) dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 sejumlah 122.621 jiwa berarti kepadatan penduduk adalah sejumlah 4.898 jiwa/Km<sup>2</sup>. Ini Artinya disetiap 1 Km<sup>2</sup> terdapat penduduk sebanyak 4.898 jiwa. Namun sebaran penduduk tersebut tidak merata disetiap wilayah kecamatan. Dari data Statistik 2016, jumlah penduduk di Kota Bukittinggi tahun 2016 berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Guguk Panjang dengan kepadatan 6.596 Jiwa/Km<sup>2</sup>;
- Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan kepadatan 4.367 Jiwa/Km<sup>2</sup>;
- Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan kepadatan 4.134 Jiwa/Km<sup>2</sup>

Padatnya penduduk di Kecamatan Guguk Panjang, disebabkan karena wilayah Guguk Panjang adalah pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Hal ini memang sudah harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah, sebab jika persebaran penduduk tidak merata walaupun laju penduduk terkendali, maka akan menimbulkan masalah baru.

Untuk melakukan pemerataan sebaran dan kepadatan penduduk terlebih dahulu harus memperhatikan tentang pengaturan kawasan pemukiman. Langkah yang dilakukan antara lain adalah memperhatikan kawasan pemukiman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW). Jika kepadatan penduduk tidak dikendalikan akan berdampak kepada peningkatan masalah sosial, kurangnya keamanan dan ketertiban, kemungkinan terjadi wilayah daerah kumuh, serta meningkatnya tingkat kemiskinan. Selanjutnya tingkat kepadatan penduduk dapat kita lihat sebagai tabel berikut :

**Tabel 2.6.**  
**Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi**

No.	Tahun	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa)
1.	2015	25.239	122.621	4.898
2.	2014	25.239	120.491	4.774
3.	2013	25.239	118.260	4.607
4.	2012	25,239	114.415	4.533
5.	2011	25,239	113.569	4.500
6.	2010	25,239	111.312	4.410

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2016

Hal lain yang harus dikaji dalam demografi adalah komposisi penduduk yang dikelompokkan menurut tingkat umur. Pada tahun 2015, kelompok peringkat tertinggi dari total jumlah penduduk adalah kelompok umur 20-24 tahun sejumlah 13.406 jiwa, disusul kelompok umur 15-19 tahun sejumlah 13.226 jiwa dan kelompok umur 0-4 tahun sejumlah 12.649 jiwa. Sedangkan kelompok umur lainnya dapat dikatakan kondusif.

Banyak hal yang harus disiapkan dalam menghadapi 3 kelompok umur tertinggi dimaksud. Pada usia 0-4 tahun kita harus banyak meningkatkan dan memprioritaskan pada program kegiatan kesehatan ibu, bayi dan anak. Selain itu Pemerintah daerah bersama masyarakat harus menghitung tersedianya PAUD yang berimbang dengan jumlah anak-anak usia 0-4 tahun tersebut.

Usia 15-19 tahun adalah usia produktif dan kreatif. Penduduk pada usia ini yang lazim disebut anak-anak remaja yang penuh imajinasi untuk memanfaatkan masa remajanya. Banyak kemungkinan yang akan terjadi dalam usia ini. Bagi para remaja yang produktif dan kreatif maka pemerintah daerah dan masyarakat harus dapat membaca kemana arah kreatifitas mereka dan harus menyediakan sarana dan prasarana mereka dalam mewujudkan kreatifitasnya, sehingga jangan sampai kreatifitas mereka menjadi tidak berkembang dan yang penting dijaga agar mereka tidak berpengaruh pada lingkungan yang negatif. Selain itu, juga harus mengkaji jumlah ruang kelas yang tersedia, baik ditingkat SLTP ataupun SLTA, untuk menampung mereka yang dalam usia sekolah dan dalam usia wajib belajar. Disisi lain Pemerintah daerah juga harus meningkatkan sekolah yang telah memenuhi kriteria Standar Nasional Pendidikan. Rasio jumlah guru dan murid serta upaya untuk meningkatkan prestasi anak agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada usia 20-24 tahun adalah usia dimana penduduk tersebut telah mulai memasuki masa kedewasaan dan telah duduk di perguruan tinggi ataupun telah mulai terjun ke masyarakat untuk kelangsungan hidupnya atau dunia kerja. Pengaruh lingkungan sangat tinggi. Jika anak-anak pada usia tersebut tidak dibekali dengan ilmu dan agama yang kuat, maka tentunya kita khawatir akan berpengaruh pada kenakalan bahkan kejahatan, seperti pencandu narkoba, dan lainnya. Untuk itu pada usia ini pemerintah harus menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak yang belum mampu untuk melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi. Memperbanyak kegiatan dan program pelatihan untuk ketenagakerjaan sesuai dengan bakat yang dimiliki. Penyaluran tenaga kerja, melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk penyaluran tenaga kerja. Bagi mereka yang telah mampu membuka usaha

dan lapangan kerja sendiri, maka peran Pemerintah daerah adalah menekan jumlah pengangguran dan melakukan pembinaan kepada mereka salah satunya dengan memberikan bantuan permodalan.

Lebih lengkapnya jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut kelompok umur dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.7.**  
**Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Kelompok Umur**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	6.400	6.249	12.649
2.	5-9	5.871	5.767	11.638
3.	10-14	5.083	5.005	10.088
4.	15-19	5.921	7.305	13.226
5.	20-24	5.731	7.676	13.406
6.	25-29	5.251	5.180	10.431
7.	30-34	4.655	4.612	9.267
8.	35-39	4.390	4.336	8.726
9.	40-44	3.966	4.071	8.037
10.	45-49	3.628	3.479	7.107
11.	50-54	2.941	2.863	5.804
12.	55-59	2.490	2.548	5.038
13.	60-64	1.788	1.798	3.586
14.	65 +	1.074	1.200	2.274

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

#### 2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan suatu negara dan daerah. Adapun indikator kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi diantaranya dapat dilihat dari data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PDRB perkapita dan indeks Gini / Koefisien Gini.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah. Dengan demikian PDRB dapat menggambarkan kegiatan roda

perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi belum menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan sifat kegiatan perekonomiannya.

#### **a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Dalam pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi / deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Perkembangan PDRB atas dasar harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 secara nominal PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi sebesar Rp. 3.819.053,61, pada tahun 2015 PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka Rp. 4.872.533,23. Perkembangan PDRB atas

dasar harga konstan Kota Bukittinggi dari tahun 2011 s.d. 2015 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.8.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015**  
**Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta)**

No.	LAPANGAN USAHA	2011		2012		2013		2014*		2015**	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	64.519,44	1.69	63.085,41	1.55	62.852,17	1.45	65.029,82	1.42	66.735,50	1,37
2.	Pertambangan dan Penggalian	132,40	0.003	130,38	0.003	128,67	0.003	126,47	0.003	125,80	0,07
3.	Industri Pengolahan	315.644,51	8.26	333.237,40	8.19	345.281,39	7.98	358.082,78	7.80	369.144,12	0,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	27.626,29	0.72	30.068,71	0.74	31.017,94	0.72	33.471,30	0.73	34.132,11	7,58
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.956,64	0.18	7.064,47	0.17	7.291,24	0.17	7.318,00	0.16	7.656,82	0,70
6.	Konstruksi	241.729,68	6.33	259.393,76	6.37	282.104,07	6.52	295.207,09	6.43	312.926,81	0,16
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.229.884,23	32.20	1.318.471,97	32.40	1.397.993,08	32.32	1.501.989,36	32.70	1.501.989,36	32,81
8.	Transportasi dan Pergudangan	420.251,19	11.00	445.233,46	10.94	476.307,24	11.01	507.448,07	11.05	545.167,31	11,19
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	154.809,96	4.05	173.152,35	4.26	188.882,26	4.38	203.479,56	4.45	220.500,54	4,53
10.	Informasi dan Komunikasi	279.755,23	7.33	310.289,26	7.63	326.688,81	7.55	348.117,66	7.58	376.058,61	7,72
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	222.494,84	5.83	238.504,78	5.86	260.162,30	6.02	277.515,62	6.04	288.410,49	5,92
12.	Real Estat	139.346,97	3.65	143.173,18	3.52	150.936,24	3.49	159.133,65	3.47	167.519,99	3,44
13.	Jasa Perusahaan	28.593,29	0.75	29.669,77	0.73	30.836,42	0.71	32.074,94	0.70	33.461,26	0,69
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	257.896,26	6.75	259.464,72	6.38	267.142,74	6.18	270.863,46	5.90	281.454,22	5,78
15.	Jasa Pendidikan	180.976,29	4.74	192.306,56	4.73	209.062,17	4.83	222.940,31	4.86	239.477,97	4,91
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.595,52	2.84	119.994,62	2.95	129.345,21	2.99	139.852,95	3.05	151.302,29	3,11
17.	Jasa lainnya	139.840,87	3.66	145.776,70	3.58	158.391,63	3.66	168.813,70	3.68	179.989,16	3,69
<b>PDRB</b>		<b>3.819.053,61</b>	<b>100</b>	<b>4.069.017,51</b>	<b>100</b>	<b>4.324.423,59</b>	<b>100</b>	<b>4.591.464,72</b>	<b>100</b>	<b>4.872.533,23</b>	<b>100</b>

\*Angka Diperbaiki

\*\*Angka Sementara

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2015

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwasanya sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp. 1.501.989,36 atau

dengan persentase sebesar 32,81%, dan diikuti oleh sektor Transportasi dan Perdagangan sebesar Rp. 545.167,31 atau dengan persentase 11,19%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2011. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

Sejalan dengan PDRB atas dasar Harga Konstan, PDRB atas dasar Harga Berlaku juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d. 2015 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.9.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d. 2015**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta)**

NO	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014*		2015**	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	69.327,5	1,72	70.993,93	1,58	74.648,84	1,49	82.178,97	1,48	87.489,66	1,43
2.	Pertambangan dan Penggalian	139,47	0,00	146,03	0,00	155,55	0,00	180,19	0,00	194,86	0,00
3.	Industri Pengolahan	337.594,15	8,39	367.933,43	8,20	389.352,93	7,76	409.898,56	7,28	419.403,13	6,86
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	25.072,61	0,62	24.047,25	0,54	22.630,7	0,45	28.734,46	0,51	38.839,95	0,63
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.036,04	0,17	7.261,01	0,16	7.652,06	0,15	8.211,77	0,15	9.144,44	0,15
6.	Konstruksi	256.821,79	6,38	288.407,17	6,43	330.562,35	6,59	353.907,48	6,29	388.141,23	6,34
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.147.706,29	32,36	1.302.724,57	32,39	1.453.493,89	32,23	1.617.180,98	32,75	1.843.230,93	33,64
8.	Transportasi dan Pergudangan	403.814,94	10,79	434.328,61	10,49	470.869,05	10,78	541.005,26	10,97	617.352,39	10,90
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140.902,56	4,13	166.186,05	4,43	199.034,83	4,74	237.772,93	4,94	277.747,52	5,46
10.	Informasi dan Komunikasi	257.482,95	7,06	284.395,72	7,18	322.384,11	6,61	331.846,55	6,60	371.189,36	5,99
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	208.112,60	5,86	235.902,53	5,86	266.976,32	6,15	308.688	6,17	347.132,05	6,13
12.	Real Estat	146.662,69	3,64	157.439,34	3,64	176.444,95	3,52	197.955,11	3,52	219.265,82	3,58

NO	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014*		2015**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
13.	Jasa Perusahaan	29.453,95	0,73	32.248,32	0,73	34.791,09	0,69	37.922,89	0,67	41.544,01	0,68
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	272.521,69	6,77	310.039,9	6,91	339.609,24	6,77	364.380,58	6,47	360.102,40	5,89
15	Jasa Pendidikan	194.524,35	4,83	215.446,8	4,80	257.329,05	5,13	295.104,65	5,24	324.925,94	5,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115.953,13	2,88	137.423,29	3,06	156.455,56	3,12	175.148,84	3,11	189.125,92	3,09
17	Jasa lainnya	146.986,57	3,65	163.734,54	3,65	192.217,92	3,83	217.786,15	3,87	238.891,06	3,91
	<b>PDRB</b>	<b>4.025.631,57</b>	<b>100,00</b>	<b>4.487.879,23</b>	<b>100,00</b>	<b>5.018.343,96</b>	<b>100,00</b>	<b>5.628.061,9</b>	<b>100,00</b>	<b>5.642.931,3</b>	<b>100,00</b>

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2015

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 masih berkontribusi 1,72% namun pada tahun 2015 hanya berkontribusi sebesar 1,43%. Jika dilihat secara nominal sektor pertanian memang mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian yang tidak terlalu berkontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi.

Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan. Dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2015 berkontribusi sebesar Rp. 1.843.230,93 dan Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 617.352,39, dimana kedua sektor ini membentuk PDRB Kota Bukittinggi sebesar 44,54%.

Guna melihat peranan masing-masing sektor dalam perekonomian suatu daerah, maka penyajian PDRB dalam bentuk persentase distribusi sektoral terhadap total PDRB sangat penting. Persentase distribusi sektoral terhadap total PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.10.**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2011 s.d. 2015**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi**

NO	Kategori	2011		2012		2013		2014		2015	
		Hb	Hk								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,72	1,69	1,58	1,55	1,49	1,45	1,48	1,42	1,43	1,37
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,003	0,00	0,003	0,00	0,003	0,00	0,003	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	8,39	8,26	8,20	8,19	7,76	7,98	7,28	7,80	6,86	7,58
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,62	0,72	0,54	0,74	0,45	0,72	0,51	0,73	0,63	0,70
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,18	0,16	0,17	0,15	0,17	0,15	0,16	0,15	0,16
6.	Konstruksi	6,38	6,33	6,43	6,37	6,59	6,52	6,29	6,43	6,34	6,42
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,36	32,20	32,39	32,40	32,23	32,32	32,75	32,70	33,64	32,81
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,79	11,00	10,49	10,94	10,78	11,01	10,97	11,05	10,90	11,19
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,13	4,05	4,43	4,26	4,74	4,38	4,94	4,45	5,46	4,53
10.	Informasi dan Komunikasi	7,06	7,33	7,18	7,63	6,61	7,55	6,60	7,58	5,99	7,72
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,86	5,83	5,95	5,86	6,15	6,02	6,17	6,04	6,13	5,92
12.	Real Estate	3,64	3,65	3,51	3,52	3,52	3,49	3,52	3,47	3,58	3,44
13.	Jasa Perusahaan	0,73	0,75	0,72	0,73	0,69	0,71	0,67	0,70	0,68	0,69
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,77	6,75	6,91	6,38	6,77	6,18	6,47	5,90	5,89	5,78
15.	Jasa Pendidikan	4,83	4,74	4,80	4,73	5,13	4,83	5,24	4,86	5,31	4,91
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,88	2,84	3,06	2,95	3,12	2,99	3,11	3,05	3,09	3,11
17.	Jasa lainnya	3,65	3,66	3,65	3,58	3,83	3,66	3,87	3,68	3,91	3,69
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>									

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2011-2015

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari tahun 2011 s.d. 2015 kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya. Baik dilihat berdasarkan atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan. Seiring dengan sektor primer, sektor sekunder pun terjadi penurunan kontribusi dalam pembentukan PDRB setiap tahunnya. Sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi dari tahun 2011 s.d. 2015 adalah pada sektor tersier khususnya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Transportasi dan Pergudangan.

Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing lapangan usaha pada tahun 2015 atas dasar Harga Konstan, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan kecuali pada kategori Pertambangan dan Penggalian. Jika dilihat dari PDRB atas dasar Harga Berlaku perkembangan masing-masing kategori terjadi pertumbuhan dan juga penurunan. Perkembangan kontribusi masing-masing sektor DPRD sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11.**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB**  
**atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Kategori	Pertumbuhan	
		Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3	-20,7
2.	Pertambangan dan Penggalian	-6	-14,6
3.	Industri Pengolahan	21	-19,0
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	31	-12,2
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10	-22,5
6.	Konstruksi	33	-3,3
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	39	5,5
8.	Transportasi dan Pergudangan	35	-2,9
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56	39,5
10.	Informasi dan Komunikasi	46	-16,3
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	39	6,0
12.	Real Estate	24	-4,5
13.	Jasa Perusahaan	23	-10,0
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19	-10,6
15.	Jasa Pendidikan	41	12,2
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49	9,8
17.	Jasa lainnya	37	7,0
<b>PDRB</b>		-	-

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2011-2015 dan BDA (diolah)

Melihat tabel diatas, kategori pembentuk PDRB tahun 2015 atas dasar Harga Konstan yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan 56% dan yang mengalami penurunan adalah kategori Pertambangan dan penggalian dengan angka penurunan sebesar -6%. Jika dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, pertumbuhan tertinggi berada pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yakni dengan kenaikan sebesar 39,5%. Sedangkan kategori yang mengalami pertumbuhan negatif adalah pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan penurunan kontribusi sebesar -22,5%.

Melihat angka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2015 baik atas dasar Harga Konstan maupun atas dasar Harga Berlaku, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB adalah pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini merupakan hasil dari semakin berkembangnya usaha akomodasi serta rumah makan dan restoran yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan pariwisata di Kota Bukittinggi.

#### **b. PDRB Perkapita**

PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. PDRB Perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi tahun 2011 s.d. 2015 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

**Tabel 2.12.**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2011 s.d. 2015**  
**Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kota Bukittinggi**

<b>Uraian</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Nilai PDRB (dalam juta Rp)	4.025.631	4.487.879	5.023.308	5.642.931	6.117.430.75
Jumlah Penduduk (jiwa)	113.547	114.393	118.260	120.575	122.621
PDRB perkapita (Rp/jiwa)	35.453.436	39.232.112	42.476.817	46.800.061	49.888.932

*Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2011-2015*

PDRB Perkapita Kota Bukittinggi selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011 s.d. 2015. Pada tahun 2012 PDRB Perkapita Kota Bukittinggi tumbuh sebesar 10,66% kemudian pada tahun 2013 naik sebesar 8,27%, dan tahun 2014 sebesar 10,18%, serta pada tahun 2015 kenaikannya sebesar 6,60%. PDRB Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2015 sebesar Rp.49.888.932,- perjiwa berada diatas PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat yang hanya Rp.34.410.000,- perjiwa.

### c. Indeks Gini/Koefisien Gini

Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. *Gini Ratio* berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dihitung dengan Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. "0" berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan "1" berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2011 s.d. 2015 berada pada ketimpangan sedang. Dimana pada kurun waktu tersebut, hanya pada tahun 2013 ketimpangan Kota Bukittinggi yang mencapai 0,37, dimana pada tahun 2014 dan 2015 kembali meningkat pemerataan pendapatan yang mencapai angka 0,34. Perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari tahun 2011 s.d. 2015 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13.**  
**Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d. 2015**

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Gini	0,33	0,31	0,37	0,34	0,34

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

## **2.1.2.2 Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.1.2.2.1 Pendidikan**

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui 4 (empat) sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti pembangunan gedung sekolah dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

#### **a. Angka Melek Huruf (AMH)**

Dengan didukung 45 Sekolah Dasar Negeri dan 11 sekolah Dasar Swasta, 8 SMP dan 5 SMA, serta sekolah madrasah baik ditingkat SD, SMP atau SMA. Pada tahun 2016 memang terjadi Pemindehan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun yang beralih hanyalah kewenangan penyelenggaraan SMA saja sedangkan Kota Bukittinggi tetap menjadi Kota Pendidikan dengan semua fasilitas sekolah yang ada pada wilayah administratifnya.

Tentunya diharapkan setiap penduduk Kota Bukittinggi dalam usia sekolah, agar tepat waktu mengikuti pendidikan di bangku sekolah sesuai dengan umur yang ditetapkan. Salah satu alat ukur atau indikator tingkat kecerdasan siswa didik adalah sejauh mana kemampuan mereka untuk dapat membaca dan menulis, atau yang lebih dikenal dengan angka melek huruf. Angka melek huruf ini juga merupakan proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca. Semakin tinggi Angka Melek Huruf, membuktikan semakin tinggi mutu pendidikan di daerah tersebut .

Sesuai dengan data yang diperoleh tahun 2015, angka melek huruf di Kota Bukittinggi mencapai 99,94 %. Ini artinya hampir 100 persen penduduk Bukittinggi di usia sekolah telah mampu tulis baca. Hal ini juga menggambarkan bahwa masyarakat dapat paham dan mengerti atas informasi atau pesan yang disampaikan serta dapat mengembangkan pengetahuan. Data-data Angka Melek Huruf ini dapat juga digunakan dalam mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media, serta mampu berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Pada tahun 2015 dan 2016 Angka Melek Huruf

di Kota Bukittinggi sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu 99,41 dan 99,77. Artinya Penduduk usia 10 tahun keatas di kota Bukittinggi tetap hampir 100 % telah mampu tulis baca.

Perkembangan Angka Melek Huruf dari tahun ke tahun di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.14.**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk usia diatas 10 tahun yang bisa membaca dan menulis	80.207	94.341	96.580	97.598	99.771
2.	Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas	80.247	94.742	96.639	98.534	100.428
3.	Angka melek huruf	99,95	99,58	99,94	99,41	99,77

*Sumber : BPS, Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kota Bukittinggi*

#### **b. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni atau APM juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program pendidikan di suatu daerah. APM ini diukur berdasarkan pengelompokan umur penduduk menurut jenjang pendidikan dan berdasarkan jumlah siswa di kelompok jenjang pendidikan tersebut. Kelompok APM tersebut adalah Tingkat SD untuk kelompok di usia 7-12 tahun, tingkat SMP untuk kelompok usia 13-15 tahun dan tingkat SLTA kelompok usia 16-18 tahun. Semakin tinggi prosentasi APM di suatu wilayah, maka semakin tinggi mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Dari data yang ada, di Kota Bukittinggi pada tingkat SD untuk kelompok usia 7-12 tahun, Angka Partisipasi Murni pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015 dimana terlihat 124,74%. Hal ini berarti seluruh penduduk diusia sekolah tingkat SD telah terdaftar dan tepat usia sebagai pelajar yang tersebar di 45 Sekolah Dasar di Kota Bukittinggi. Kesadaran dan ketepatan waktu sesuai usia wajib belajar diusia 7-12 tahun di tingkat dasar telah sepenuhnya dimengerti oleh para orang tua, sehingga mereka mendaftarkan anak anak mereka ke sekolah formal. Hal ini telah terlihat pada data selama 5 (lima) tahun terakhir, APM kelompok usia ini sukses terlaksana di Kota Bukittinggi.

APM pada tingkat SMP / MTs menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Meskipun masih rendah dibanding APM pada tingkat SD namun secara rata-rata sudah baik dan mengindikasikan bahwa angka partisipasi penduduk pada usia pendidikan SMP/MTs untuk sekolah sudah bagus. APM tingkat pendidikan SMP pada tahun 2016 APM adalah 118.20% dan naik dari tahun 2015 yang berada pada angka 110.30%.

Pada kelompok usia SMA, adalah tingkat yang sangat membanggakan tentang APM di Kota Bukittinggi. Walaupun pada usia ini disebut usia yang remaja yang kadang-kadang mempunyai emosional yang belum stabil, namun kesadaran seluruh siswa untuk menimba ilmu di jenjang pendidikan sangat tinggi pada tahun 2015 kebawah. Namun APM pada tingkat SMA / MA / SMK ini pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan yaitu menjadi 119.90 dari sebelumnya 123.48 pada tahun 2015. Meskipun terjadi penurunan tetapi secara umum APM di Kota Bukittinggi pada semua jenjang pendidikan sudah bagus. Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.15.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SD / MI</b>					
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	14.449	14.021	18.808	15.207	15.565
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.997	13.906	11.759	12.472	12.478
1.3.	APM SD / MI	111,17	100,83	159,95	121,93	124.74
<b>2</b>	<b>SMP /MTs</b>					
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	5.972	6.827	9.181	7.175	5.592
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.355	6.982	6.189	6.505	6.610
2.3.	APM SMP / MTs	93,97	97,78	148,34	110,30	118.20
<b>3</b>	<b>SMA / MA / SMK</b>					
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	9.430	10.632	10.632	9.792	8.656
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	7.276	8.268	7.454	7.930	8.049
3.3.	APM SMA / MA / SMK	129,60	128,59	142,63	123,48	119.97

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi

Dari data diatas, terlihat angka yang sangat membanggakan untuk menilai keberhasilan program pendidikan di Kota Bukittinggi pada semua jenjang pendidikan, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA.

### c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD / SLTP / SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar juga merupakan indikator dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan semaksimal mungkin, agar seluruh masyarakat jadi cerdas. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas di setiap tingkat pendidikan, salah satunya adalah dengan menghitung Angka Partisipasi Kasar ( APK ), yakni presentase angka dimana jumlah penduduk yang sedang sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah.

Dari data yang ada APK di tingkat SD di Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 136,75% atau dari jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yakni 12.472 jiwa, namun kenyataannya jumlah siswa yang duduk dibangku sekolah sejumlah 17.056 jiwa. APK ini juga semakin meningkat pada tahun 2016 yaitu sebesar 140,98. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan capaian presentase tersebut melebihi 100%, yaitu karena adanya anak didik yang melebihi usia hal ini dikarenakan terlambat masuk sekolah, atau karena tinggal kelas, dan anak yang berasal dari luar Kota Bukittinggi. Namun yang terpenting anak-anak kita duduk dibangku sekolah tetap menuntut ilmu.

Untuk jenjang pendidikan SMP / MTs adalah 142,97. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015. Hal mengembirakan juga terjadi pada tingkat SLTA dimana APK pada jenjang pendidikan ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar pada jenjang ini mencapai 169,59. Sebuah angka yang cukup mengindikasikan betapa besarnya minat dan perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap kemajuan pendidikan. Data ini pun membuktikan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pendidikan dimana terlihat bahwa angka partisipasi melebihi jumlah penduduk pada masing-masing usia sekolah. Data perkembangan angka partisipasi kasar di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.16.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	16.676	14.619	16.596	17.056	17.592
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.997	13.9906	11.759	12.472	12.478
1.3.	APK SD/MI	128,31	105,13	141,13	136,75	140,98
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	7.588	6.235	8.989	9.108	9.450
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.355	6.982	6.189	6.505	6.610
2.3.	APK SMP/MTs	119,40	89,30	145,24	140,02	142,97
<b>3</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	10.387	9.419	10.632	13.117	13.650
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.194	7.276	7.454	7.930	8.049
3.3.	APK SMA/MA/SMK	126,76	129,45	142,63	165,41	169,59

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi

#### **d. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)**

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Angka pendidikan yang ditamatkan ini selain melihat keberhasilan seseorang menyelesaikan pendidikannya, yang dibuktikan dengan ijazah, juga berguna untuk melihat perencanaan tenaga kerja. Perusahaan atau industri dapat mempedomani angka pendidikan yang ditamatkan ini untuk mengembangkan usahanya pada suatu daerah. Jika pada suatu industri membutuhkan banyak tenaga tamatan SD atau SMP, maka salah satu indikator untuk pengembangan usahanya adalah melihat angka partisipasi yang ditamatkan ini. Selain itu juga melihat secara keseluruhan tingkat pendidikan yang ada di suatu daerah, sehingga keberhasilan wajib belajar juga dapat dicermati dari data ini.

Angka pendidikan yang ditamatkan tertinggi di Kota Bukittinggi terdapat pada tingkat SMA. Dimana sebanyak 33,83 % penduduk Bukittinggi memiliki ijazah SLTA, ini juga berarti pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun telah terlaksana dengan baik dan siswa tersebut telah melanjutkan ke SMA, dengan presentase tamatan yang tinggi. Secara lengkap dapat dilihat dari data berikut :

**Tabel 2.17.**  
**Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	APT	2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD / MI	1.538	1.638	2.638	2.636	2.538
2.	SMP / MTS	1.453	1.497	1.586	2.660	2.846
3.	SMA / MA	2.663	2.934	2.974	2.589	2.582

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Dari data diatas terlihat bahwa suksesnya program wajib belajar 9 tahun di Kota Bukittinggi salah satunya dilihat dari angka pendidikan ditamatkan ini. Semoga kedepan Kota Bukittinggi dapat menetapkan program wajib belajar 12 tahun, sehingga penduduk Bukittinggi mempunyai tingkat intelektual yang semakin baik.

#### **2.1.2.2.2 Kesehatan**

Pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan semata melainkan juga sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2016 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Gambaran umum tentang mortalitas, usia harapan hidup, status gizi akan memberikan penjelasan dan mencerminkan status kesehatan masyarakat.

##### **a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)**

Angka kelangsungan hidup bayi merefleksikan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan tempat tinggal, ketersediaan layanan kesehatan. Indikator yang terkait langsung dengan angka kelangsungan hidup bayi adalah angka kematian bayi (*infant mortality rate*) yaitu suatu angka yang menunjukkan jumlah bayi yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka kematian bayi Kota Bukittinggi dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.18.**  
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi**

Tahun	Jumlah Kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran hidup	AKB *)	AKHB*)
2012	10	2320	4	996
2013	19	2338	8	992
2014	19	2405	8	992
2015	26	2407	11	989
2016	13	2465	5	995

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas terlihat bahwa kelangsungan hidup bayi selalu bervariasi dari tahun ketahun. Angka kelangsungan hidup bayi ini mengalami sedikit naik turun namun variasi ini tetap dalam rentang dan katogori baik. Artinya ibu-ibu melahirkan telah mampu menjaga kehamilannya dengan baik serta memberikan asupan gizi yang baik kepada bayi, baik selama masa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Sebagaimana telah diuraikan diatas, hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan penduduk di Kota Bukittinggi secara umum juga telah meningkat.

#### **b. Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup adalah salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang dicapai oleh seseorang. Semakin lama harapan hidup yang dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kehidupan seseorang.

Dari data terlihat bahwa angka harapan hidup Kota Bukittinggi semakin tinggi. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan selama 4 (empat) tahun terakhir, dimana pada tahun 2014 berkisar 72 tahun dan angka ini semakin terus meningkat. Pada tahun 2016 angka harapan hidup penduduk mencapai 73 tahun lebih. Hal ini menunjukkan bahwa derajat hidup masyarakat sudah semakin baik. Secara rata-rata terlihat harapan untuk hidup penduduk di kota Bukittinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir sudah melebihi umur 71 tahun. Selengkapnya terlihat dari tabel berikut ini:

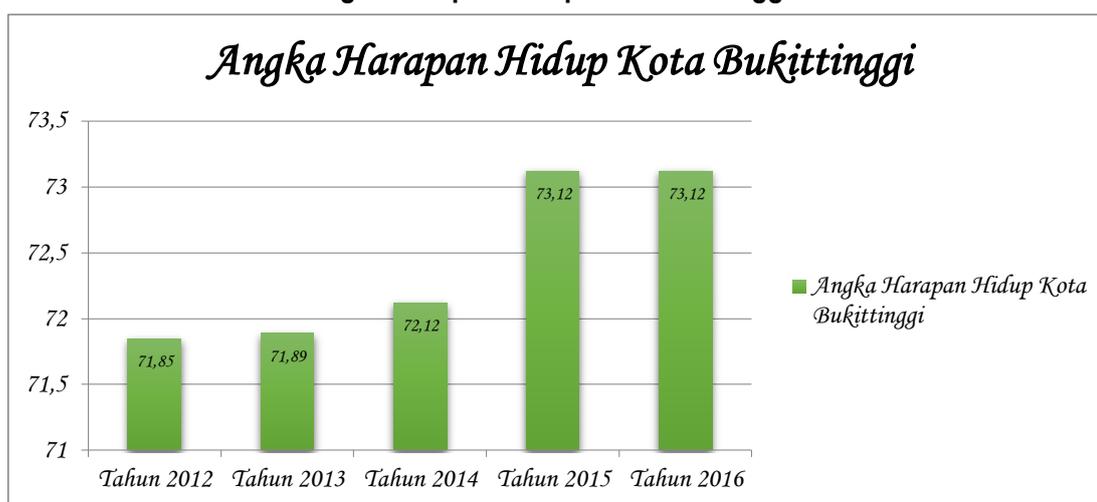
**Tabel 2.19.**  
**Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi**

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
71,85	71,89	72,12	73,12	73,12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

Angka harapan hidup di kota Bukittinggi dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

**Gambar 5**  
**Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi**



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

### 2.1.2.2.3 Kesempatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja aktif dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan yang merupakan pengangguran terbuka. Diluar dari itu adalah merupakan bukan angkatan kerja yang merupakan penduduk yang masih bersekolah, rumah tangga, purnakarya dan lain-lain. Untuk pembangunan kesempatan kerja sasaran yang ingin dicapai adalah terbukanya informasi seluas luasnya mengenai ketenagakerjaan dan ketersediaan lapangan kerja yang dapat diisi bagi masyarakat Kota Bukittinggi yang belum mendapatkan pekerjaan/tenaga kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran.

### 2.1.2.2.4 Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)

Adalah tugas Pemerintah Daerah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakatnya, salah satunya dalam bentuk penjagaan keamanan, ketertiban, ketentraman, sehingga diharapkan jauh dari kriminalitas. Beberapa kasus kriminal yang dapat ditangani

dengan baik dari waktu ke waktu akan berpengaruh terhadap ketenangan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupan.

Dilihat dari perkembangannya, selama 5 (lima) tahun kebelakang pada tahun 2012 sampai keadaan tahun 2016, terjadi naik turun angka kriminalitas di lingkungan wilayah Polres Bukittinggi. Pada tahun 2016 tercatat angka kriminal yang terjadi dan dapat ditangani sebanyak 549 kasus dari jumlah penduduk 124.715, atau angka kriminalitas yang tertangani 44.02. Dilihat dari perkembangannya kasus kriminal yang tertangani telah terjadi penurunan sejumlah 89 kasus dari tahun 2015. Penurunan kriminalitas ini juga tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pengawasan keamanan lingkungan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah senantiasa menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjaga dan menindak kejahatan di Kota Bukittinggi. Kedepan, tentunya kita berharap angka kriminalitas di Kota Bukittinggi dapat ditekan terus. Mengingat Kota Bukittinggi adalah kota tujuan wisata maka tentunya sedikit banyak kondisi keamanan dan ketertiban kota akan mempengaruhi kunjungan wisata yang datang ke Kota Bukittinggi.

**Tabel 2.20.**  
**Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kriminal yang tertangani	425	470	440	638	549
Jumlah penduduk	114.415	118.260	120.469	122.621	124.715
Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk.	37,14	39,735	37,29	52,03	44,02

*Sumber: Polres Bukittinggi*

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

#### **A. Fokus Layanan Urusan Wajib**

##### **A.1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

###### **2.1.3.1. Pendidikan**

###### **2.1.3.1.1 Pendidikan Dasar**

###### **2.1.3.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Namun hal ini bukan berarti bahwa jika APS tinggi maka daya serap dan partisipasi sekolah juga tinggi. Namun kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Berikut ini pada periode tahun 2012-2016 terlihat bahwa angka partisipasi sekolah pada tahun 2014 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya namun pada tahun 2015 APS untuk tingkat SD/MI kembali turun menjadi 121.93. Pada tahun 2016 APS tingkat SD/MI kembali naik menjadi 124.74. Hal berbeda terjadi pada tingkat SMP/MTsN dimana APS pada jenjang pendidikan ini meningkat dari tahun ke tahun. APS untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2016 adalah 110.00 sampai tahun 2015. Kondisi ini perlu dicermati dan dicari langkah-langkah sehingga APS ini hendaknya meningkat dan diharapkan semua siswa pada usia pendidikan ini dapat semuanya diserap pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Bukittinggi.

Terlepas dari adanya sedikit naik turun APS pada tingkat SD/MI, sebenarnya angka ini sudah cukup bagus untuk melihat partisipasi Penduduk usia 7-12 tahun untuk bersekolah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah sudah semakin baiknya kebijakan dan tingginya perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan sehingga daya serap siswa pada jenjang pendidikan ini juga meningkat.

**Tabel 2.21.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	14.124	14.021	14.408	15.207	15.565
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.997	13.906	11.759	12.472	12.478
1.3.	APS SD/MI	108,67	100,83	122,53	121,93	124,74
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	5.958	6.827	6.798	7.175	7.271
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.355	6.982	6.189	6.505	6.610
2.3.	APS SMP / MTs	93,75	97,78	109,84	110,30	110,00

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga

#### 2.1.3.1.1.2.Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program Wajib Belajar 9 tahun. Dinamika ini dapat dilihat dari rasio dalam pelayanan penduduk usia sekolah sebagai berikut :

**Tabel 2.22.**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SD / MI</b>					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	65	65	65	61	66
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.997	13.906	11.759	12.472	12.478
1.3.	Rasio	50,01	46,74	55,28	48,91	52,89
<b>2</b>	<b>SMP / MTs</b>					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	16	16	16	17	14
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.355	6.982	6.189	6.505	6.610
2.3.	Rasio	25,18	22,92	25,85	26,13	28,74

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Sarana pendidikan di Kota Bukittinggi pada tingkat SD / SDLB / MI dari 61 pada tahun 2015 telah menjadi 66 sekolah pada tahun 2016, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2016. Dari sejumlah sekolah tersebut hampir semuanya telah memenuhi kewajiban dalam pemenuhan standar minimum terhadap

pengadaan sarana dan prasarana yang diwajibkan undang-undang. Walaupun hanya ditargetkan sebesar 57 persen, namun realisasi pemenuhan sarana dan prasarana adalah sebesar 89,70 persen. Artinya Pemerintah Kota Bukittinggi telah melampaui standar yang diwajibkan bagi sarana pendukung pendidikan di tingkat SD / MI.

Pada tingkat SLTP / SMPLB, pemenuhan syarat wajib sarana dan prasarana terhadap 9 sekolah telah terpenuhi di tahun 2015, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dari target 60% dapat dicapai sebesar 136%, hal ini dapat dilihat dari 11 SLTP / SMPLB yang ada di Kota Bukittinggi 9 sekolah telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional. Tetapi Kota Bukittinggi masih mempunyai 3 sekolah lagi yang belum memenuhi sarana prasarana sesuai dengan SNP, hal ini disebabkan karena ketersediaan lahan yang masih belum memadai serta ketersediaan dana yang belum mencukupi. Namun pemerintah kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP diantaranya dengan pelaksanaan Rehab dan RKB serta pengadaan peralatan.

Begitu juga halnya capaian indikator Persentase SLTA, kita telah memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan. Pada tahun 2015 dan 2016 dari target yang ditentukan sebanyak 65%, telah tercapai sebesar 90,90%, capaian ini sudah melampaui target yang ditetapkan dari 22 SLTA yang ada di Kota Bukittinggi, hanya 2 SLTA lagi yang belum memenuhinya. Namun diharapkan semua SLTA yang berada di Kota Bukittinggi dapat memenuhi sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan, agar siswa yang berada di lingkungan Kota Bukittinggi dapat memiliki fasilitas pendidikan yang dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar yang baik.

Sebagian besar sekolah baik di tingkat SD/SDLB/MI, SLTP/SMPLB dan SLTA telah memenuhi sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran diatas dengan predikat baik dan mengalami kenaikan. Hal ini ditunjang oleh semakin besarnya anggaran daerah yang di alokasikan untuk membenahi sarana prasarana sekolah baik tingkat SD / MI, SLTP dan SLTA. Disamping itu alokasi dana dari Pemerintah Pusat dibidang pendidikan turut menunjang meningkatnya pencapaian sasaran ini dari tahun ke tahun.

### 2.1.3.1.1.3.Rasio Guru / Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru sesuai tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Disamping ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan guru sebagai pengajar merupakan faktor pendukung yang tak kalah pentingnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Perkembangan perbandingan jumlah guru dengan murid untuk tingkat pendidikan dasar dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.23.**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SD / MI</b>					
1.1.	Jumlah Guru	1.049	902	822	884	1.058
1.2.	Jumlah Murid	14.619	16.596	16.579	16.414	17.592
1.3.	Rasio	71,8	54,4	49,6	53,9	60,14
<b>2</b>	<b>SMP / MTs</b>					
2.1.	Jumlah Guru	599	486	603	451	709
2.2.	Jumlah Murid	8.053	8.989	7.715	6.399	9450
2.3.	Rasio	74,4	54,1	78,2	70,5	75,03

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD / MI rendah selama kurun waktu 2012-2016. Pada tahun 2016 bahwa rasio ini hanya 60,14. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi masih kekurangan guru pada jenjang pendidikan ini seperti halnya Guru Kelas. Tidak jauh berbeda dengan jenjang pendidikan SD/MI, rasio yang juga terbilang rendah dapat dilihat pada jenjang pendidikan SMP/MTs.

Dikaitkan dengan capaian indikator kinerja Persentase SD/SDLB/MI yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan, Kota Bukittinggi masih memperoleh capaian sebesar 78,06%. Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa Kota

Bukittinggi belum mencapai 100% dalam pemenuhan tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan. Oleh sebab itu indikator kinerja terhadap persentase tenaga pendidik SD / SDLB / MI yang telah sesuai Standar Nasional Pendidikan masih menjadi agenda pokok dari pendidikan dasar. Masih banyak tenaga pengajar yang belum sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yang tersebar di seluruh SD / SDLB / MI yang berada di Kota Bukittinggi.

### 2.1.3.1.2 Pendidikan Menengah

#### 2.1.3.1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Sama halnya dengan APS tingkat SD, SMP, maka APS tingkat SMA merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia tingkat SMA, yakni usia 16-18 tahun. Pada tahun 2016 terdapat sejumlah 9.656 siswa sementara kelompok umur di usia yang sama 8.049 siswa dengan angka partisipasi sekolah 119.66. Meskipun APS ini terjadi penurunan pada tahun 2015 namun pada tahun 2016 sudah meningkat dan peningkatan tersebut tetap pada kategori baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.24.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	<b>SMA / MA / SMK</b>					
1.1.	Jumlah murid usia 16-18 thn	9.419	10.632	11.502	9.366	9.656
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	7.276	7.454	7.825	7.930	8.049
1.3.	APS SMA/MA/SMK	129.45	142.63	146.99	105.50	119.66

Sumber: Profil Pendidikan Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

#### 2.1.3.1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah jenjang pendidikan SMA / MA / SMK tahun 2016 dengan rasio adalah 34.79. dimana jumlah gedung sekolah 28 unit yang melayani 8.049 penduduk yang berusia pada kelompok umur 16-18 tahun. Ini berarti bahwa ketersediaan sekolah jenjang pendidikan SMA / MA / SMK tahun 2016 masih mengalami kekurangan dibanding jumlah penduduk usia sekolah pada kelompok umur 16-18 tahun. Pertumbuhan anak usia sekolah umur 16-18 tahun tidak

diimbangkan oleh penambahan jumlah gedung sekolah. Hal ini juga disebabkan masih banyaknya murid yang berasal dari luar Kota Bukittinggi yang memilih sekolah di Kota Bukittinggi. Oleh sebab itu rasionya semakin turun. Untuk itu perlu penambahan sekolah maupun ruangan kelas, agar anak usia sekolah jenjang pendidikan SMA/MA/SMK pada masa mendatang, bisa tertampung seluruhnya.

**Tabel 2.25.**  
**Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	28	28	28	28	28
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	7.276	7.454	7.825	7.930	8.049
1.3.	Rasio	38,48	37,56	35,78	35,31	34,79

Sumber: Profil Pendidikan Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

#### 2.1.3.1.2.3. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan rasio guru dan murid jenjang pendidikan menengah terlihat berimbang, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.26.**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>SMA / MA / SMK</b>					
1.1.	Jumlah Guru	1.307	936	1.106	1.138	1.152
1.2.	Jumlah Murid	10.150	9.894	11,502	9.599	13.650
1.3.	Rasio	1.287	946	961	1185	843

Sumber: Profil Pendidikan Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2016 terlihat penurunan hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah siswa yang cukup besar namun tidak sebanding

dengan penambahan jumlah guru. Salah satu penyebab pertumbuhan jumlah guru tidak bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah siswa pada jenjang pendidikan ini adalah adanya kebijakan moratorium penerimaan ASN yang tidak dikecualikan untuk guru di Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk memenuhi standar ketersediaan guru terhadap kelangsungan pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan kebijakan dengan tetap memberdayakan guru-guru honorer. Dengan kebijakan ini diharapkan kekurangan guru tidak menimbulkan kendala terhadap kemajuan pendidikan di Kota Bukittinggi.

### 2.1.3.2. Kesehatan

Indikator pelayanan umum bidang kesehatan dilihat dari Rasio Posyandu per satuan balita, Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu), Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk.

#### 2.1.3.2.1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Pembangunan Kesehatan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Kerja sama tersebut berbentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Salah satu UKBM tersebut adalah posyandu. Rasio posyandu per satuan balita menggambarkan jumlah balita yang dapat dilayani oleh satu posyandu. Untuk melihat perkembangan posyandu setiap tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.27.**  
**Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah posyandu	130	132	132	132	132
2.	Jumlah balita	11.668	11.896	12.338	12.638	12.649
3.	Rasio	11,14	11,06	10,6	10,4	10,4

Sumber: Profil Kesehatan 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio posyandu terhadap balita tahun 2015 dan 2016 adalah 10,4 artinya dalam 1000 balita dilayani oleh 10,4 posyandu, maka 1 Posyandu di Kota Bukittinggi melayani sebanyak 96 – 97 balita. Angka ini sudah bagus karena sudah berada diatas standar, menurut standar idealnya 1 posyandu dapat melayani 100 balita. Dalam kurun waktu diatas terlihat bahwa rasio semakin menurun yang artinya tingkat

pertumbuhan balita lebih cepat dari tingkat pertumbuhan posyandu sehingga satu posyandu melayani lebih banyak anak sehingga kualitas pelayanan bisa berkurang.

**Tabel 2.28.**  
**Jumlah Posyandu dan Balita**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1.	Guguk Panjang	56	4.706	11,9
2.	Mandiingin Koto Selayan	47	5.123	9,2
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	29	2.820	10,3
<b>JUMLAH</b>		<b>132</b>	<b>12.649</b>	<b>10,4</b>

Sumber: Profil Kesehatan 2016

Rasio Posyandu terhadap balita di Kecamatan Guguk Panjang pada tahun 2016 adalah 11,9. Angka ini merupakan rasio yang cukup bagus dalam pelayanan posyandu di Kota Bukittinggi, karena 1 Posyandu masih melayani kurang dari 100 balita, demikian juga dengan Kecamatan Mandiingin Koto Selayan dengan rasio 9,2 serta Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan Rasio 10,3. Dari jumlah posyandu ada sebanyak 132 Posyandu pada tahun 2014 terdiri dari Posyandu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri.

#### **2.1.3.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)**

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan primer yang diselenggarakan pemerintah bagi masyarakat adalah Puskesmas. Jadi pengertian dari puskesmas itu sendiri adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja

Di Kota Bukittinggi, sarana kesehatan berupa puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dalam kondisi jumlah yang sama setiap tahunnya, beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi khususnya Dinas Kesehatan adalah meningkatkan pelayanan dengan melengkapi sarana dan prasarana serta SDM yang langsung melayani. Perkembangan jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu dalam kurun waktu 2012 s/d 2016 dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 2.29.**  
**Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Puskesmas	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Poliklinik	2	2	2	1	1
3.	Jumlah Pustu	14	14	14	14	14
4.	Jumlah Penduduk	114.415	118.260	120.491	122.621	124.715
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk *)	0,062	0,059	0,058	0,057	0,056
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk *)	0,018	0,017	0,016	0,008	0,008
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk *)	0,122	0,118	0,116	0,114	0,112

Sumber: Profil Kesehatan 2016; BDA 2016

\*) Data diolah

Dari tabel di atas terlihat rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 0,057. Artinya dalam 1000 penduduk dilayani oleh 0,057 puskesmas dimana Kota Bukittinggi dalam 1 Puskesmas melayani penduduk sebanyak 17.543 orang penduduk. Pada tahun 2016 rasio ini sedikit turun yaitu 0,056. Namun angka ini sudah cukup bagus dimana Standar Nasional 1 Puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk. Jumlah Puskesmas di Kota Bukittinggi sudah banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk. Disamping itu, penduduk yang berkunjung ke puskesmas tidak hanya dari Kota Bukittinggi saja namun juga berasal dari luar Kota Bukittinggi.

Sementara itu untuk jumlah poliklinik pada tahun 2015 dan 2016 terjadi pengurangan dari 2 poliklinik pada tahun sebelumnya. Pengurangan 1 poliklinik ini disebabkan salah satu poliklinik ditutup karena operasionalnya tidak berjalan dengan optimal.

Pada tabel diatas juga tergambar bahwa rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) terhadap penduduk pada tahun 2015 adalah 0,114 dan terjadi sedikit pengurangan pada tahun 2016 yaitu 0,112. Dimana rata-rata 1 Puskesmas melayani 2-3 puskesmas pembantu, dan angka ini juga sudah cukup ideal. Perbandingan penyebaran sarana kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.30.**  
**Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jml	Rasio*	Jml	Rasio*	Jml	Rasio*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
1.	Guguk Panjang	46.397	1	0,021	1	0,021	3	0,065
2.	Mandiingin Koto Selayan	50.490	4	0,079	0	0	8	0,158
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	27.828	2	0,072	0	0	3	0,108
<b>JUMLAH</b>		<b>124.715</b>	<b>7</b>	<b>0,056</b>	<b>1</b>	<b>0,008</b>	<b>14</b>	<b>0,112</b>

Sumber: Profil Kesehatan 2016; BDA 2016

\*Data diolah

Pada tabel diatas tergambar bahwa penyebaran sarana kesehatan pada tingkat kecamatan tidak merata. Namun walupun begitu pelayanan kesehatan bagi penduduk sudah dapat dilaksanakan secara optimal. Tidak meratanya penyebaran sarana pelayanan kesehatan ini telah disesuaikan dengan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Dari tabel diatas terlihat bahwa Jumlah puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya memang lebih banyak berada di Kecamatan Mandiingin Koto Selayan. Hal ini juga cukup beralasan karena penduduk terbanyak memang berada pada kecamatan dimaksud yaitu berjumlah 50.490 jiwa.

#### 2.1.3.2.3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Pelayanan fasilitas kesehatan dapat diukur kinerjanya antara lain dengan melihat Ratio Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Dokter dan Tenaga Medis per satuan penduduk. Rumah sakit milik Pemerintah Kota Bukittinggi memang belum ada dan masih dalam proses perencanaanya. Namun, pelayanan kesehatan bagi penduduk di tingkat lanjutan telah dilakukan oleh rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Bukittinggi. Berikut gambaran jumlah dan rasio rumah sakit perjumlah penduduk di Kota Bukittinggi.

**Tabel 2.31.**  
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk**  
**Tahun 2011 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	3	1	3	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	1	-	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	-	-	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	3	3	3	3	3
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	6	6	6	6	6
6.	Jumlah Penduduk	113.569	114.415	118.260	120.491	122.621	124,715
7.	Rasio*)	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048

Sumber: Profil Kesehatan

\*) Data diolah

Rasio Rumah Sakit adalah gambaran ketersediaan dan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk berkisar pada angka 0,049 pada tahun 2015 ini. Pada tahun 2016 sedikit menurun yaitu menjadi 0,048. Jumlah Rumah Sakit di Kota Bukittinggi sebanyak 6 (enam) Rumah sakit, dimana tidak ada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. Rumah Sakit yang ada adalah milik:

1. Pemerintah Pusat, RSUP yang sekarang dikembangkan menjadi RSSN (Rumah sakit Stroke Nasional).
2. Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu RSAM (Rumah Sakit Achmad Muchtar).
3. Rumah Sakit Swasta yaitu Yayasan Rumah Sakit Ibnu Sina dan Rumah Sakit Ibnu Sina, Rumah Sakit Madina dan Rumah Sakit THT Sitawa Sidingin.
4. Rumah Sakit TNI AD Tk.IV

Dalam melayani kesehatan penduduk di rumah sakit-rumah sakit tersebut menyediakan 726 tempat tidur dan didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana, dan dari jumlah penderita yang dirawat tahun 2014 sebanyak 72.702 orang. Dan dari data diatas dapat dirata-ratakan bahwa satu rumah sakit dapat melayani 20.785 orang penduduk.

**Tabel 2.32.**  
**Jumlah Rumah Sakit**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kota Bukittinggi**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru & penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jlh	Rasio*	Jmlh	Rasio	Jlh	Rasio*	Jlh	Rasio	Jlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1.	Guguk Panjang	46.397	0	0	1	0,021	1	0,021	0	0	1	0,021	3	0,065
2.	Mandiingin Koto Selayan	50.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	27.828	1	0,036	0	0	0	0	0	0	2	0,072	3	0,107
<b>JUMLAH</b>		<b>124.715</b>	<b>1</b>	<b>0,008</b>	<b>1</b>	<b>0,008</b>	<b>1</b>	<b>0,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,024</b>	<b>6</b>	<b>0,048</b>

Sumber: BDA 2015

\*Data diolah

#### 2.1.3.2.4. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan ditingkat primer yang dilakukan di Puskesmas dilakukan oleh Dokter umum dan Dokter gigi. Namun pada tingkat lanjutan di Rumah sakit dapat dilakukan oleh Dokter Umum dan Dokter Spesialis.

Indikator dokter persatuan jumlah penduduk menggambarkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter. Untuk melihat jumlah perkembangan dokter di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.33.**  
**Jumlah Dokter Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Dokter	217	187	212	264	264
2.	Jumlah Penduduk	114.415	118.260	120.491	122.621	124.715
3.	Rasio	1,90	1.56	1.76	2.15	2.11

Sumber: Profil Kesehatan 2016-2016; Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2011-2015

Data dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 terdapat persamaan jumlah dokter yang ada di Kota Bukittinggi yang tersebar pada Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Institusi Dinas Kesehatan lainnya. Perbedaan rasio nya disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk yang semakin tinggi pada tahun 2016. Rasio Jumlah Dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 2.11 untuk idealnya rasio dokter terhadap penduduk adalah 1 : 2500 (standar dari WHO sebesar 40 per 100.000 penduduk). Dengan rasio yang tergambar pada tabel diatas artinya Kota Bukittinggi sudah mencukupi dengan jumlah dokter yang ada. Rasio Penghitungan dokter yang dilakukan ini adalah ketersediaan tenaga dokter baik ditingkat layanan primer di puskesmas maupun ditingkat lanjutan, di beberapa rumah sakit dan dibandingkan terhadap jumlah penduduk Kota Bukittinggi. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk ini yang sudah sangat baik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap derajat kesehatan masyarakat.

**Tabel 2.34.**  
**Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Guguk Panjang	46.397	115	2.48
2	Mandiingin Koto Selayan	50.490	18	0.36
3	Aur Birugo Tigo Baleh	27.828	61	2.19
<b>TOTAL</b>		<b>124.715</b>	<b>194</b>	<b>1.56</b>

Sumber: Dinas Kesehatan, BDA 2016

Jika data tersebut dibagi menurut kecamatan, maka pada tahun 2016 didapat data rasio dokter per 1000 penduduk di Kecamatan Guguk Panjang adalah 2,48; Kecamatan Mandiingin Koto Salayan 0,36; dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 2,19. Faktor penyebab tingginya rasio dokter terhadap penduduk di Kecamatan Guguk Panjang adalah karena sebagian besar Rumah Sakit berada di kecamatan tersebut. Dari tabel diatas juga tergambar bahwa rendahnya rasio dokter terhadap penduduk di Kecamatan Mandiingin Koto Salayan disebabkan oleh jumlah rumah sakit yang memang tidak banyak beroperasi di wilayah kecamatan tersebut. Disamping itu jumlah penduduknya juga yang paling besar diantara 3 kecamatan ini. Namun dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tidaklah hal yang sulit bagi

penduduk karena Kota Bukittinggi telah dapat terhubung kemanapun dengan angkutan kota dengan jarak tempuh yang relatif dekat antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya.

#### 2.1.3.2.5. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tenaga medis yang ada di Kota Bukittinggi terdiri dari tenaga Analisis Labor, Temperatur dan Pengaturan rougent, anestesi. Fisioterapi, rekam medic, refoptisien yang tersebar diseluruh puskesmas, rumah sakit dan institusi.

**Tabel 2.35.**  
**Jumlah Tenaga Medis Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Tenaga Medis	253	224	273	236	236
2.	Jumlah Penduduk	114.415	118.260	120.491	122.621	124.715
3.	Rasio	2,21	1,89	2,26	1,92	1,89

Sumber: Profil Kesehatan

Rasio tenaga medis digunakan untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis yang ada disuatu wilayah. Dari tahun 2012 rasio tenaga medis terhadap 1000 penduduk ini mengalami kecendrungan angka yang naik turun. Pada tahun 2015 dan 2016 jumlah tenaga medis yang ada di Kota Bukittinggi adalah 236 orang. Rasio tenaga medis justru menurun pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Secara umum jumlah tenaga medis di Kota Bukittinggi masih belum cukup sesuai dengan indikator kesehatan maupun indikator WHO. Dengan demikian untuk selanjutnya sangat diperlukan dukungan pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga medis untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal di masa yang akan datang.

#### 2.1.3.3. Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari indikator penanganan sampah dan persentase penduduk berakses air minum. Semakin besar volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peran serta masyarakat untuk dapat mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Berikut gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana uraian berikut :

### 2.1.3.3.1. Persentase penanganan sampah

Sampah merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh setiap kota yang sedang berkembang. Penanganan sampah yang tidak tepat dan tidak terkendali akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten dan memiliki komitmen yang tegas terhadap pengelolaan sampah tersebut. Upaya yang telah dilakukan secara rutin yaitu penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan spanduk, billboard di lokasi TPS dan di kelurahan, bahkan razia yang dilakukan bersama tim Gabungan. Kota Bukittinggi yang memiliki 3 Pasar yang cukup besar serta jumlah penduduk yang cukup padat untuk skala kota kecil, memiliki volume sampah yang cukup banyak setiap harinya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.36.**  
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016)*
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m3)	156.484	143.267	271.089	*	329.817
2.	Jumlah volume produksi sampah (m3)	183.765	168.630	108.73	*	329.832
3.	Persentase	85,15	84,95	90	*	99,99

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2016

) \* Data diolah Dinas Lingkungan Hidup

\* : Data tidak tersedia

Dilihat dari tabel diatas, semenjak tahun 2012 volume sampah cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan volume sampah ini terjadi karena produksi sampah tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat Kota Bukittinggi itu sendiri tapi juga merupakan "sampah kiriman" dari masyarakat yang ada disekitar Kota Bukittinggi.

Penyebab lain dari tingginya produksi sampah ini adalah produk yang dikonsumsi masyarakat semuanya memakai kemasan baik itu berupa plastik, kertas, karton dan lain-lain. Dilihat dari Jumlah persentase produksi sampah yang selalu meningkat setiap tahunnya, maka pihak Pemerintah Kota Bukittinggi harus melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah terutama pengolahan sampah organik menjadi kompos dan daur ulang sampah dan an-organik menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat.

Untuk meningkatkan penanganan sampah ditengah-tengah masyarakat diperlukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mau dan mampu mengolah sampahnya sendiri, sehingga tertanam dalam diri masyarakat itu bahwa sampah itu adalah uang, bukan sesuatu yang buruk. Dengan adanya usaha dari masyarakat untuk mengolah sampah sendiri, diharapkan nantinya akan berdampak pada berkurangnya penanganan sampah oleh pemerintah dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.37.**  
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah**  
**Menurut Sumbernya Tahun 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Sumber	Persentase timbunan sampah (%)	Persentase timbunan sampah yang tertangani (%)
1.	Rumah Tangga/ Pemukiman	78,85	73,44
2.	Pasar	0,07	0,08
3.	Pertokoan/Komersial	0,08	0,10
4.	Perkantoran	0,13	0,99
5.	Jalan	1,06	1,34
6.	Industri	0,71	0,01
7.	Fasilitas Umum	3,93	4,95
8.	Saluran	2,31	2,91
9.	Lainnya	12,87	16,19
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2016

Sampah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dalam produksi sampah di Kota Bukittinggi yang kemudian diikuti oleh sampah fasilitas umum dan lainnya yang bersumber dari taman-taman / ruang terbuka hijau, kebun binatang dan riol-riol yang ada di Kota Bukittinggi. Untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang bersih dari sampah, beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi antara lain dengan memperbanyak tempat-tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di sekitar taman-taman / kebun binatang dan fasilitas umum guna memperpendek jarak pembuangan sampah dari rumah tangga ke TPS.

Disamping itu juga telah diimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang mengatur jadwal pembuangan sampah ke TPS dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi sehingga bisa memaksimalkan pengambilan sampah oleh petugas melalui angkutan armada (truk sampah) dan langsung dibawa ke TPA Regional.

### 2.1.3.3.2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah per satuan Penduduk

Rasio Tempat Pembuangan sampah menunjukkan perbandingan jumlah tempat pembuangan sampah dan daya tampungnya terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi rasionya berarti kinerja pembangunan Dinas Lingkungan Hidup serta SKPD terkait lainnya dalam penyediaan sarana persampahan semakin baik dalam meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota.

**Tabel 2.38.**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1.	Jumlah TPS	275	256	208	*	246
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	409,76	371,7	262,5	*	243,1
3.	Jumlah Penduduk	114.393	118.260	120.491	*	124.715
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk *)	3,58	3,14	2,17	*	1,94

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi

\*) Data diolah

\* Data tidak tersedia

Sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, untuk 2 tahun terakhir ini ada beberapa TPS yang dibongkar oleh masyarakat. Pembongkaran TPS tersebut disebabkan karena keresahan masyarakat terhadap perilaku warga yang berasal dari daerah sekitar Kota Bukittinggi yang membuang sampah ke TPS secara sembarangan. Mereka membuang sampah tidak pada TPS yang telah disediakan, tapi diluar dari TPS tersebut, sehingga sampah tersebut bertebaran hingga kejalan yang menyebabkan pemandangan yang kurang baik di sekitar TPS. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama terkait penanganan sampah dengan kabupaten tetangga tersebut.

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk pada dari tahun 2012-2016 ada kecenderungan menurun sebagai akibat pengolahan sampah oleh masyarakat terutama untuk sampah rumah tangga menjadi sampah organik.

### 2.1.3.3.3. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Pengelolaan air minum dalam Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Pada tahun 2015 tercatat jumlah pelanggan PDAM adalah sebanyak 9.718 Rumah Tangga. Pelanggan PDAM tidak hanya dari rumah tangga saja tapi juga melayani badan-badan sosial, Rumah Sakit, Umum, Niaga Kecil, Niaga Besar, Industri Kecil, Industri Besar, Instansi Pemerintah, dan lain-lain.

**Tabel 2.39.**  
**Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Kota Bukittinggi tahun 2012 s.d. 2016**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	9.795	9.671	9.624	*	9.718
2.	Jumlah Rumah Tangga	27.689	28.616	29.196	*	31.090
3.	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	35,37	33,80	33,12	*	31.25

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2016

\* Data tidak tersedia

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah rumah tangga yang telah mendapat akses air bersih dari PDAM hanya 31,25 % persen selebihnya rumah tangga mendapatkan air bersih/minum bersumber dari sumur bor, pompa air, sumur, air galon, mata air dan sungai.

Berdasarkan target *universal access* yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, maka pada tahun 2019 ditargetkan 100% masyarakat harus mendapat akses air bersih. Oleh karena telah dilaksanakan pembenahan dan peningkatan pelayanan PDAM, seperti penggantian pipa saluran PDAM serta pencarian sumber air baku baru guna meningkatkan pelayanan terhadap air PDAM.

Disamping itu, juga mulai dirintis kegiatan SPAM Regional antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan Kota Bukittinggi melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan hingga tahun 2019 nanti, akses air bersih di Kota Bukittinggi dapat mencapai target universal akses yaitu 100%.

#### 2.1.3.4. Pekerjaan Umum

Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam upaya menyediakan infrastruktur bagi peningkatan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat maka pemerintah harus selalu meningkatkan kinerja pembangunan terkait jaringan jalan, peningkatan ini salah satunya dapat diukur dari proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik yang dipantau perkembangannya setiap tahun.

##### 2.1.3.4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Perkembangan Proporsi panjang jaringan jalan di Kota Bukittinggi dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang jalan keseluruhan (nasional, provinsi dan kota) dalam beberapa tahun terakhir di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.40.**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jalan kota dalam kondisi baik	163,05	168,76	164,34	164.96	164.96
2.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	198,18	198,18	198,18	194.11	192,99
3.	Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik	0,82	0,82	0,85	0.85	0.85

Sumber: Data aktualisasi jalan Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum, BDA 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2013 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik selalu meningkat namun pada tahun 2014 dan 2015 kondisi ini cenderung tetap yaitu pada angka 0,85 artinya 85% panjang jalan yang ada di Kota Bukittinggi dalam kondisi baik dan 15% dalam kondisi kurang / tidak baik. Agar kondisi jalan ini dapat meningkat dari tahun ke tahun maka upaya perbaikan dan pemeliharaan jalan harus selalu ditingkatkan karena jalan merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi.

#### 2.1.3.4.2. Irigasi

Irigasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Dengan adanya irigasi maka kebutuhan akan air pada sebidang lahan tetap terpenuhi sekalipun kondisi lengas tanah tidak mencukupi sehingga tanaman tetap bisa tumbuh secara normal.

Jaringan irigasi yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap. Rasio Jaringan irigasi dapat menggambarkan efisiensi dan efektifitas operasional jaringan irigasi yang ada dalam mengairi petak sawah / areal tanam yang ada. Tabel berikut menyajikan Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi.

**Tabel 2.41.**  
**Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2012 s.d. 2016**

NO	Pasokan Irigasi	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang Saluran Irigasi (km)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
2.	Luas Areal Tanam (Ha)	800	823	762	759	759
3.	Rasio Jaringan Irigasi	0,0016	0,0015	0,0016	0,0016	0,0016

Sumber: Bidang Pengairan Dinas PU Kota Bukittinggi; BDA 2016

Dilihat dari tabel diatas, panjang saluran irigasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak terdapat penambahan, sedangkan luas areal tanam dari tahun 2015 hingga 2016 tidak terjadi penambahan. Penurunan areal tanam salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pembangunan perumahan. Kondisi ini harus dikawal secara baik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan pola ruang yang tidak sesuai

dengan RTRW Kota Bukittinggi sehingga produksi padi tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan secara maksimal.

#### 2.1.3.4.3. Rasio Tempat Ibadah

Kota Bukittinggi memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Sehingga jumlah Masjid dan Mushalla sangat menonjol dari pada jumlah tempat beribadah lainnya. Tempat ibadah yang tidak ada di Kota Bukittinggi adalah Pura (tempat beribadah agama Hindu).

Bukittinggi juga terkenal dengan toleransi antar umat beragamanya, dan masing-masing agama bebas menjalankan peribadatan dengan nyaman. Jumlah Masjid dari tahun 2011 s.d. 2015 tidak mengalami perubahan yaitu 44 buah. Namun jumlah Mushalla pada tahun 2011 sebanyak 52 buah dan mengalami peningkatan sampai tahun 2015 menjadi 146 buah. Sementara jumlah Gereja Katolik tahun 2011 s.d. 2015 sebanyak 1 buah, Gereja Protestan sebanyak 1 buah dan Vihara sebanyak 1 buah. Rasio masing-masing tempat ibadah terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.42.**  
**Rasio Tempat Ibadah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Mesjid	44	44	44	44	44
2.	Jumlah Mushalla menurut BDA	52	52	50	146	146
3.	Jumlah Penduduk beragama Islam	106.215	111.497	115.244	117.421	119.497
4.	Rasio Masjid Per satuan penduduk	0,41	0,39	0,38	0,37	0,37
5.	Rasio Mushalla Per satuan penduduk	0,49	0,47	0,43	1,24	1,22
6.	Jumlah Gereja Katholik	1	1	1	1	1
7.	Jumlah Penduduk beragama Katholik	1.060	1.068	1.104	1119	1139
8.	Rasio Gereja Katholik Per satuan penduduk	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88
9.	Jumlah Gereja Protestan	1	1	1	1	1
10.	Jumlah Penduduk Beragama Protestan	1.620	1.631	1.686	1.723	1754
11.	Rasio Gereja Protestan Per satuan penduduk	0,62	0,61	0,59	0,58	0,57

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2016

Peningkatan jumlah tempat ibadah di Kota Bukittinggi tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga rasio tempat ibadah dari tahun ke tahun cenderung menurun namun diperkirakan hal ini tidak akan mempengaruhi kualitas ibadah umat beragama. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kerusuhan yang terjadi antar umat beragama di Kota Bukittinggi.

#### 2.1.3.5. Penataan Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terbagi atas 2 yaitu RTH Publik dan RTH Private. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan untuk penyediaan RTH Publik minimal sebesar 20% dan RTH Private sebesar 10% dari luasan wilayah yang ada.

Untuk Kota Bukittinggi, sesuai dengan rencana pola ruang revisi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 RTH Publik yang ada di Kota Bukittinggi merupakan lahan yang terdiri dari hutan kota, sempadan Ngarai Sianok, Sempadan Sungai, Taman Kota, Taman Pemakaman Umum, Taman Bawah Jalan Layang dan Jalur Pejalan Kaki serta Kawasan Ngarai Sianok.

Ruang Terbuka Hijau dapat berfungsi sebagai paru-paru kota, penyejuk dan memperindah wajah kota, sekaligus menjadi tempat bersantai, berinteraksi sosial bagi warganya maupun bagi siapa saja yang berkunjung ke Bukittinggi.

**Tabel 2.43.**  
**Ruang Terbuka Hijau**  
**Tahun 2016 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	Luas (Ha)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	557,268
2.	Luas wilayah	2.523,90

Sumber : Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Jika mengacu pada ketentuan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan yang ada sekarang baru 22,58%. Ruang Terbuka Hijau dapat berfungsi sebagai paru-paru kota, penyejuk dan memperindah wajah kota, sekaligus

menjadi tempat bersantai, berinteraksi sosial bagi warganya maupun bagi siapa saja yang berkunjung ke Bukittinggi.

Besaran rasio ruang terbuka hijau tahun 2015, pada tingkat kecamatan tertinggi pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, karena pada kecamatan ini banyak terdapat hutan kota, lahan pertanian yang masih banyak di kecamatan ini. Untuk melihat perbandingannya pada tingkat kecamatan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.44.**  
**Ruang Terbuka Hijau Menurut Kecamatan**  
**Tahun 2016 Kota Bukittinggi**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)
1.	Guguk Panjang	683,10	146,588
2.	Mandiangin Koto Selayan	1.215,60	320,706
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	625,20	89,974
<b>JUMLAH</b>		<b>2.523,90</b>	<b>557,268</b>

*Sumber : Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030*

Berdasarkan analisis revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 diatas, maka RTH publik di Kota Bukittinggi adalah seluas 557,268 Ha atau jika dipersentasekan adalah sebesar 22,22%. Jadi, jika merujuk pada ketentuan penataan ruang, maka RTH Publik yang direncanakan untuk Kota Bukittinggi sudah melebihi dari syarat minimal yang ditentukan.

Ruang terbuka hijau membawa begitu banyak manfaat yang terkandung didalamnya. Mulai dari sarana untuk mencerminkan identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, sebagai sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, memperbaiki iklim mikro hingga meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat bagi meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan. Bahkan terkandung pula manfaat yang lebih bernilai sosial seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial atau sebagai sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula. Bisa dibbilang kebutuhan akan adanya ruang semacam ini di kota-kota besar tak hanya sekedar perlu namun kebutuhan.

### 2.1.3.6. Perhubungan

Kinerja pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi tahun 2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah arus penumpang angkutan umum, Rasio Izin Trayek, Jumlah Uji Kir Angkutan Umum, dan Jumlah Terminal Bis serta Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.

#### 2.1.3.6.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Dengan luas wilayah Kota Bukittinggi yang terbatas (seluas 25,239 Km<sup>2</sup>), Kota Bukittinggi hanya melayani penumpang bus antar kota dan antar provinsi pada satu terminal dengan penumpang bis dari tahun 2012 sampai tahun 2016 seperti tabel dan diagram berikut:

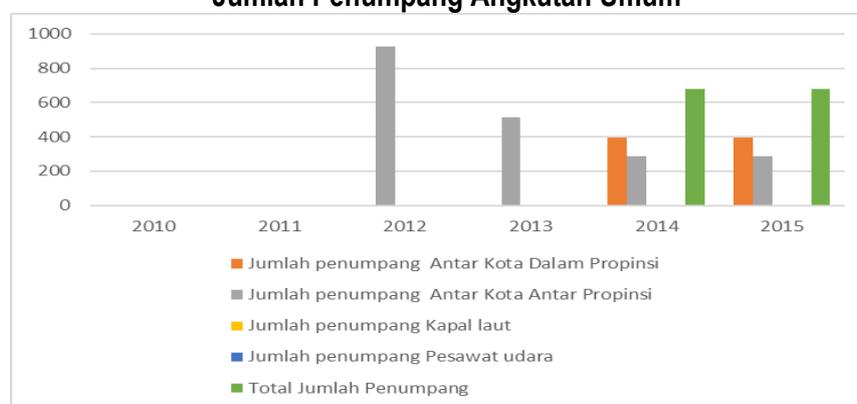
**Tabel 2.45.**  
**Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Jumlah penumpang Antar Kota Dalam Propinsi	1.882.864	2.005.866	396.846	396.846	362.563
2.	Jumlah penumpang Antar Kota Antar Propinsi	928.096	514.725	284.528	284.528	177.677
3.	Jumlah penumpang Kapal laut	-	-	-	-	-
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara	-	-	-	-	-
5.	Total Jumlah Penumpang	2.810.960	2.520.591	681.374	681.374	540.240

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2016

\*Data dari SKPD sampai bulan Juni 2016

**Gambar 6**  
**Jumlah Penumpang Angkutan Umum**



Pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi hanya melayani angkutan darat saja sementara untuk angkutan kereta api, kapal laut dan pesawat udara tidak ada di Bukittinggi. Disamping angkutan umum juga ada angkutan sewa pribadi berupa travel / carteran yang juga berkembang pesat di Kota Bukittinggi.

Hal ini menunjukkan kecenderungan orang yang berkunjung ke Bukittinggi selalu meningkat, namun cenderung menggunakan jasa angkutan sewa pribadi berupa travel / carteran. Tantangan kedepan adalah bagaimana menyediakan pelayanan angkutan massal yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu agar kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya angkutan pribadi tidak terjadi.

#### 2.1.3.6.2. Rasio Izin Trayek

Untuk melayani masyarakat Kota Bukittinggi, semenjak tahun 2012-2016 tidak terdapat penambahan jumlah trayek, walaupun terjadi penambahan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan luas wilayah perkotaan kecil, sehingga sudah terlayani dengan trayek yang ada. Jumlah trayek dan perkembangan jumlah penduduk semenjak tahun 2012-2016 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.46.**  
**Rasio Ijin Trayek Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Izin Trayek perkotaan	24	24	24	24	24
2.	Jumlah penduduk	114.416	118.260	120.469	122.621	124.715
3.	Rasio Ijin Trayek	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

Sumber: Dishubkominfo Kota Bukittinggi, BDA 2016

Dari tahun 2012 hingga tahun 2016 tidak terjadi peningkatan izin trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan, ini berarti tidak ada pembukaan trayek angkutan umum baru di dalam Kota Bukittinggi.

### 2.1.3.6.3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

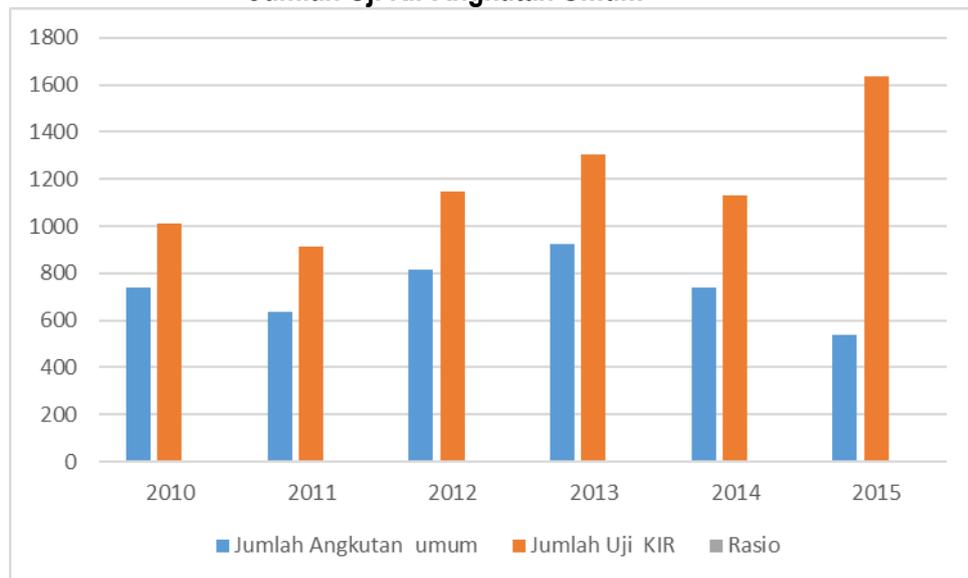
Pengawasan dan penerapan pengujian KIR angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi harus diperketat demi mengantisipasi terjadinya kecelakaan angkutan umum. Hal ini untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan angkutan umum. Perkembangan penumpang umum dan bus umum serta yang dilakukan uji KIR dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

**Tabel 2.47.**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Angkutan umum	814	922	742	539	539
2.	Jumlah Uji KIR	1.146	1.305	1.130	1.639	1734
<b>RASIO</b>		71,03	70,75	65,66	32,88	31,08

Sumber: Dinas Perhubungan

**Gambar 7**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**



Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase kendaraan umum yang melakukan uji kir pada tahun 2016 adalah sebanyak 31,08%. Uji kir kendaraan umum ini dilakukan setiap 6 bulan sekali atau dengan artian 1 (satu) kendaraan umum akan melakukan uji kir sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Jumlah kendaraan umum yang wajib kir adalah 539 yang terdiri dari angkutan umum perkotaan, taksi dan bus.

#### 2.1.3.6.4. Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis

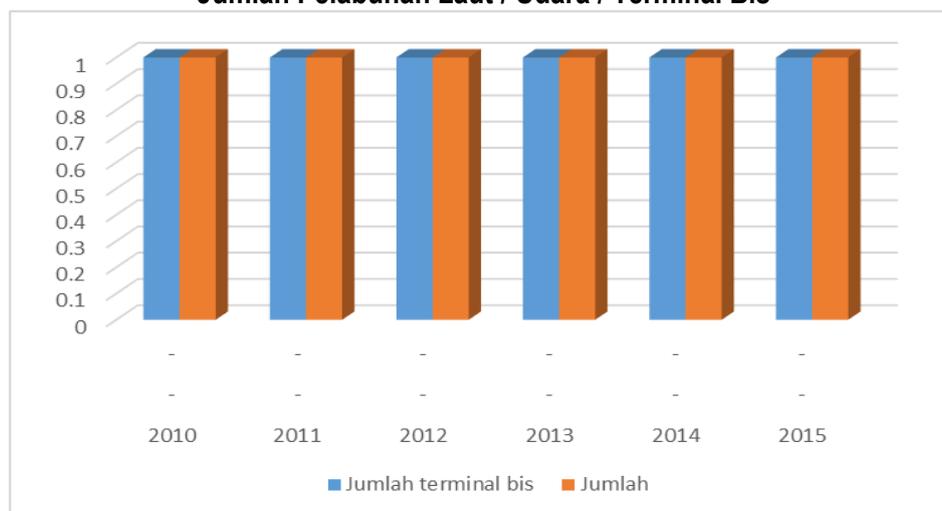
Di Kota Bukittinggi hanya terdapat 1 (satu) terminal, yaitu terminal tipe A Simpang Aur yang mulai tahun 2016 telah diserahkan ke Pemerintah Pusat karena Terminal Tipe A merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Jumlah terminal bis, Pelabuhan Laut dan udara dari tahun 2010–2015 dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

**Tabel 2.48.**  
**Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis**  
**Tahun 2012 s.d 2016 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi tahun 2016

**Gambar 8**  
**Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis**



#### 2.1.3.7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Salah satu pelaku ekonomi yang berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah adalah keberadaan dari Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, dimana pada masa krisis pun KUKM mampu bertahan dan tetap tumbuh.

### 2.1.3.7.1. Persentase Koperasi aktif

Keberadaan koperasi di Kota Bukittinggi cukup banyak, dimana pada tahun 2012 dan 2013 terdapat 101 koperasi yang terdaftar di Kota Bukittinggi, kemudian pada tahun 2014 dan 2015 terjadi kekurangan satu koperasi sehingga koperasi yang ada di Kota Bukittinggi sebanyak 100 koperasi. Pada tahun 2015 terjadi penambahan Koperasi di Kota Bukittinggi menjadi 105 koperasi. Dari sekian banyak koperasi yang ada di Kota Bukittinggi kurun waktu 2012 - 2015, lebih dari 81% merupakan koperasi yang aktif. Hal ini terlihat pada tahun 2012, dari 101 koperasi yang ada, 83 koperasi merupakan koperasi yang aktif atau setara dengan 82,18%. Kurun waktu 2013 dan 2014 terjadi penurunan koperasi yang aktif dibandingkan dengan tahun 2012, dimana pada tahun 2013, koperasi yang aktif sebanyak 81,18% dan tahun 2014 sebanyak 81,00%. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan koperasi aktif menjadi 82,00% dan meningkat kembali pada tahun 2016 dengan persentase koperasi aktif sebesar 82,8%. Perkembangan koperasi di Kota Bukittinggi tahun 2012 s.d. 2016 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.49.**  
**Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016*
1.	Jumlah koperasi aktif	83	82	81	84	87
2.	Jumlah koperasi	101	101	100	100	105
3.	Persentase koperasi aktif	82,18	81,18	81,00	82,00	82,8%

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2015

\*Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi

### 2.1.3.7.2. Jumlah UKM Non BPR / LKMUUKM

Jumlah UKM di Kota Bukittinggi cukup banyak, hal ini dipicu oleh keberadaan Kota Bukittinggi sebagai kota Perdagangan dan Jasa serta pariwisata. Dilihat dari kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi, sektor Perdagangan besar dan eceran merupakan sektor yang paling dominan. Perkembangan UKM di Kota Bukittinggi selalu meningkat setiap tahunnya, selain permintaan pasar, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan juga sangat intensif dalam menumbuhkembangkan UKM tersebut melalui pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Perkembangan jumlah UKM di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.50.**  
**Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Di Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah seluruh UKM/UMKM	-	4.559	7.803	9.433	9.527	9.302
2.	Jumlah BPR/LKM	49	49	49	49	49	49
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM	-	4.510	7.754	9.384	9.478	9.253

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi

#### 2.1.3.7.3. Jumlah BPR/LKM

Salah satu penunjang pengembangan usaha masyarakat dalam akses permodalan adalah keberadaan BPR dan LKM. Jumlah BPR dan LKM di Kota Bukittinggi tahun 2012 s.d. 2016 tidak mengalami perubahan, dimana jumlah BPR sebanyak 3 BPR dan Jumlah LKM sebanyak 46 LKM.

**Tabel 2.51.**  
**Jumlah BPR / LKM Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah BPR	3	3	3	3	3
2.	Jumlah LKM	46	46	46	46	46
<b>JUMLAH</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

Sumber: Buku Statistik Ekonomi Keuangan Bank Indonesia

#### 2.1.3.8. Kependudukan

Urusan Kependudukan dan catatan sipil mempunyai nilai strategis di bidang perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Kebijakan kependudukan seharusnya digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan Urusan Kependudukan. Kinerja Pembangunan pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kota Bukittinggi selama 5 Tahun 2012–2016 adalah peningkatan kinerja kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih dipengaruhi oleh kesadaran penduduk dengan memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kota Bukittinggi. Beberapa indikator kependudukan adalah sebagai berikut :

### 2.1.3.8.1. Pertumbuhan Penduduk

Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu dinamakan dinamika penduduk. Gejala dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (*fertilitas* atau *natalitas*), kematian (*mortalitas*), dan perpindahan penduduk (migrasi).

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Penduduk suatu wilayah akan bertambah apabila terdapat kelahiran dan penduduk yang datang ke wilayah tersebut, sedangkan penduduk suatu wilayah akan berkurang apabila terdapat kematian dan terdapat penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut.

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi sampai pada tahun 2016 selalu meningkat, jika dilihat hasil sensus yang dilaksanakan BPS tahun 2016 jumlah penduduk adalah 124.715 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 mengalami penurunan pada tahun 1,71. Laju pertumbuhan ini adalah 1,77 pada tahun 2015. Laju pertumbuhan penduduk selalu bertambah dan harus diimbangi oleh peningkatan sumber daya alam yang ada dan harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Dengan luas yang relatif tetap akan berdampak terhadap tingkat kepadatan potensi wilayah tinggal penduduk. Jumlah penduduk pada tabel dibawah ini memang terjadi peningkatan namun laju pertumbuhannya dari tahun ketahun telah terjadi penurunan. Laju pertumbuhan yang meningkat akan meningkatkan masalah-masalah sosial di suatu wilayah. Untuk itu sudah menjadi tujuan dari pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.52.**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2012 s.d. 2016**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk	116.075	118.260	120.491	122.621	124.715
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,91	1,88	1,89	1,77	1,71

Sumber: BPS 2016

### 2.1.3.8.2. Pengelompokan Penduduk

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintah Kota Bukittinggi berada dibawah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas ini telah dibentuk sejak tahun 2008, dimana sebelumnya hanya merupakan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selama 5 (lima) tahun terakhir penduduk Kota Bukittinggi selalu meningkat. Begitu juga dengan perkembangan penduduk laki-laki, yang cenderung selalu melihatkan angka kenaikan. Kelompok umur mayoritas terlihat pada kelompok umur laki laki 0-4 tahun, yakni 6.400 jiwa dan disusul kelompok umur laki laki usia 15-19 tahun, yaitu sejumlah 5.921 jiwa. Jika kita kaji pada dua kelompok tersebut, maka ini artinya, bahwa pemerintah daerah harus banyak memberikan perhatian pada ibu dan bayi. Memperbanyak fasilitas pendidikan kelompok usia dini agar semua murid laki laki tersebut dapat mengikuti pendidikan di usia dini, yang akan menjadi cikal bakal kelompok produktif sebagaimana terkenal dengan bonus demografi.

Pada kelompok umur 15-19 tahun, penduduk laki laki juga terlihat tinggi yakni 5,921. Pada kelompok usia ini adalah usia remaja yang menjelang usia produktif. Penduduk laki-laki maupun perempuan diusia ini masih mencari jati diri dengan kondisi emosionalnya yang masih labil. Pada usia ini kemungkinan adanya pengaruh yang masuk pada anak-anak kita, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Kenakalan remaja juga berpotensi di usia ini. Usia 15-19 tahun ini adalah usia SLTA. Peran pemerintah daerah dan masyarakat sangat dimintakan perhatian khusus, karena usia ini adalah usia yang labil dan harus disikapi sesuai dengan perkembangan zaman seusianya. Sikap kita salah satunya adalah meningkatkan mutu pendidikan baik mental maupun spritual serta menyediakan lapangan kerja, sehingga tidak akan menjadi beban keluarga maupun pemerintah pada usia produktif nantinya. Secara data perkembangan usia kelompok umur laki laki dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.53.**  
**Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d. 2016**

Kelompok Umur	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0-4	5.923	5.965	6.326	6.386	6.391	6.400
5-9	5.772	5.811	5.572	5.680	5.780	5.871
10-14	5.237	5.274	4.844	4.908	4.986	5.083
15-19	5.306	5.342	5.614	5.737	5.837	5.921

Kelompok Umur	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20-24	4.826	4.858	5.567	5.596	5.640	5.731
25-29	4.863	4.894	5.070	5.183	5.246	5.251
30-34	4.458	4.486	4.351	4.431	4.515	4.655
35-39	4.091	4.118	4.300	4.340	4.372	4.390
40-44	3.425	3.447	3.665	3.771	3.863	3.966
45-49	3.179	3.203	3.349	3.437	3.524	3.628
50-54	2.690	2.706	2.775	2.828	2.884	2.941
55-59	1.971	1.985	2.220	2.310	2.381	2.490
60-64	1.113	1.118	1.460	1.575	1.681	1.788
65-69	2.079	2.080	2.148	2.226	2.319	1.074
Jumlah	54.933	55.287	57.261	58.408	59.419	59.699

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2016

Pada kelompok usia 20-24 tahun juga terlihat jumlah penduduk yang tinggi yakni 5.731. Pada usia ini adalah masa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan sekaligus merupakan masa usia kerja. Bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, maka kita wajib membekali mereka dengan keahlian, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan, baik sebagai karyawan ataupun wiraswasta. Memperbanyak program pelatihan-pelatihan sesuai bakat mereka dan harus selualu dapat meningkatkan kemampuan dirinya.

Penduduk Kota Bukittinggi menurut jenis kelamin, maka mayoritas perempuan pada tahun 2016 terdapat pada kelompok usia 20-24 tahun dan kelompok 15-19 tahun atau 7.676 jiwa pada kelompok umur 20-24 dan dan 7.305 kelompok umur 15-19. Disisi lain pada kelompok usia 0-4 tahun dan kelompok usia 5-9 tahun, juga terlihat tingginya jumlah penduduk perempuan. Ini artinya pada 4 kelompok usia ini pemerintah harus memperhatikan dan memprioritaskan kebutuhan perempuan. Semua indikator dalam mewujudkan beberapa program pemerintah juga harus menjadi prioritas seperti pemenuhan hak-hak anak untuk penunjang kota layak anak, dan memprioritaskan pengarusutamaan gender pada setiap sektor pembangunan.

Selain itu pemerintah daerah juga harus gencar melakukan sosialisasi tentang pembekalan menjaga diri sebagai seorang wanita, memperbanyak program peningkatan keterampilan wanita, sehingga akan tercipta para perempuan yang mampu bersaing dan bersinergi dengan laki-laki. Membuka lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga wanita juga sangat dibutuhkan. Secara lengkap dapat dilihat dari data sebagai berikut :

**Tabel 2.54.**  
**Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d. 2016**

Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
0-4	5.703	6.162	6.226	6.247	6.249
5-9	5.561	5.458	5.560	5.669	5.767
10-14	5.154	4.810	4.863	4.926	5.005
15-19	6.768	6.969	7.088	7.229	7.305
20-24	6.822	7.416	7.465	7.564	7.676
25-29	5.017	4.990	5.075	5.134	5.180
30-34	4.409	4.447	4.500	4.561	4.612
35-39	3.998	4.135	4.209	4.283	4.336
40-44	3.598	3.796	3.890	3.977	4.071
45-49	3.178	3.272	3.338	3.406	3.479
50-54	2.603	2.711	2.764	2.819	2.863
55-59	1.924	2.243	2.358	2.458	2.548
60-64	1.177	1.466	1.572	1.691	1.798
65-69	3.216	3.124	3.175	3.238	1.200
Jumlah	59.128	60.999	62.083	63.202	62.089

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka Kota Bukittinggi

#### 1.1.3.8.3. Rasio Penduduk yang Memiliki KTP

Dari Sistem aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) secara online dan berbasis internet serta *Single Identity Number* dapat digunakan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat atas berbagai macam kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Kartu tanda penduduk yang mempunyai nomor induk kependudukan tunggal merupakan salah satu bukti kependudukan suatu wilayah. Salah satu indikator dalam pengendalian penduduk adalah seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk memiliki dan melengkapi administrasi kependudukannya antara lain dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menetapkan KTP secara elektronik yang terkoneksi dalam *data based* di tingkat nasional.

Dari data yang ada terlihat, bahwa dari tahun ke tahun masih ada penduduk usia wajib KTP yang belum mempunyai KTP, walaupun rasionya telah relatif meningkat setiap tahun. Idealnya penduduk yang wajib KTP sama dengan penduduk yang telah memiliki KTP. Pada tahun 2015 dan 2016 tergambar bahwa rasio penduduk yang telah memiliki KTP

terhadap penduduk yang wajib KTP semakin meningkat. Pada tahun 2016 terlihat rasionya adalah 87,74. meskipun rasionya selalu meningkat namun masih cukup banyak penduduk kota Bukittinggi yang wajib memiliki KTP namun belum memiliki KTP.

Untuk menindak lanjuti hal di atas, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus ditingkatkan. Dalam hal ini, dengan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya melengkapi administrasi kependudukan antara lain KTP, melakukan razia kependudukan, serta memperbanyak himbauan kepada seluruh stakeholder kota agar menyertakan persyaratan KTP dalam setiap pengurusan administrasi. Kerjasama seluruh elemen kota sangat diperlukan dan saling bersinergi untuk meningkatkan kesadaran tentang wajib KTP bagi setiap penduduk usia wajib KTP dimaksud. Jika hal ini telah terlaksana dengan baik maka siapa dan dimanapun berada dapat dipantau dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan basis nomor induk kependudukan secara tunggal. Secara lengkap dapat kita dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.55.**  
**Rasio Penduduk Yang Telah Memiliki KTP dan**  
**Penduduk Yang Wajib Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penduduk yang telah memiliki KTP (E-KTP)	41.288	30.645	48.108	66.375	9.632
2.	Penduduk wajib KTP	85.986	53.294	85.071	85.666	10.978
3.	Rasio	48.01	57,50	56,55	77,48	87,74

Sumber : BDA 2016

Data di atas jelas terlihat bahwa masih banyak penduduk Kota Bukittinggi yang belum memiliki KTP pada saat usia wajib KTP. Dengan adanya peningkatan program kegiatan pada SKPD terkait dapat memperkecil masalah administrasi kependudukan.

#### **2.1.3.9. Ketenagakerjaan**

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama periode 2012–2016 di Kota Bukittinggi ada beberapa indikator yaitu Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran, sebagaimana uraian berikut :

### 2.1.3.9.1. Angkatan Kerja (*labor force*)

Penduduk dengan usia 15 tahun keatas untuk sektor ketenagakerjaan dapat menggambarkan kondisi ekonomi kota Bukittinggi dibanding dengan jumlah penduduk. Artinya tingginya tingkat angkatan kerja di Kota Bukittinggi yang dapat menyerap kemampuan pasar kerja yang berkualitas sehingga dapat meminimalkan jumlah pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk perbaikan kemasa depannya perlunya peningkatan pengembangan kesempatan kerja, perlindungan dan pengendalian tenaga kerja terhadap jaminan sosial bagi tenaga kerja dalam berbagai bidang serta peningkatan penerimaan devisa dari pengiriman tenaga kerja keluar negeri.

**Tabel 2.56.**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2015 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) (i)	39.943	44.685	84.628
2.	BUKAN ANGKATAN KERJA	19.476	20.080	39.556
3.	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) *)	75,81	60,10	67,59
4.	TPT (tingkat pengangguran terbuka) *)	5,21	6,98	6,04

Sumber: Statistik Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015

\*) Data diolah

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk 15 tahun ke atas termasuk dalam angkatan kerja. Pada tahun 2015 TPAK Bukittinggi sebesar 67,59% yang berarti dari 100 orang penduduk usia kerja, 67 orang diantaranya merupakan angkatan kerja yang aktif secara ekonomi. Bila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, maka TPAK perempuan yang tercatat hanya 60,10%, jauh tertinggal dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 75,81%. Dalam hal mewujudkan pengarusutamaan gender diharapkan dapat meningkatkan TPAK perempuan salah satunya dengan memberikan sosialisasi dan kesempatan kerja yang lebih banyak lagi untuk perempuan. Dan memberikan pendidikan yang maksimal agar perempuan mempunyai pengetahuan yang bisa digunakan untuk kebutuhan kerjanya.

Secara sederhana analisa tentang pengangguran didekati dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi

belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Bukittinggi tahun 2015 sebesar 6,04 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat 6 orang pengangguran. TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki. Berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja dibagi menjadi 5 kelompok sektor. Penduduk Kota Bukittinggi banyak bekerja di sektor 3 (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel) yaitu 45,73%. Kemudian diikuti sektor 4 (jasa, kemasyarakatan, sosial dan perumahan) 25,88%, kelompok sektor 5 (lainnya) 13,81%, kelompok sektor 2 (industri pengolahan) 10,38%, dan sektor 1 (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan) 4,20%.

### 2.1.3.9.2. Produktivitas Tenaga Kerja

Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja dengan menggunakan data nilai tambah yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Dapat dilihat pada tabel berikut (dalam juta rupiah) :

**Tabel 2.57.**  
**Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d. 2015**  
**Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PDRB (juta)	4.025.631	4.487.879	5.023.308	5.642.931	6.117.430
2.	Jumlah Angkatan Kerja	50.812	52.938	53.589	57.044	57.200
3.	Produktivitas Tenaga kerja	79,225	84,776	93,736	98,922	106,948

Sumber: Statistik Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015

\*) Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dimana pada tahun 2011 produktivitas tenaga kerja sebesar Rp. 79,225 juta menjadi Rp. 106,948 juta pada tahun 2015. Produktivitas Tenaga Kerja terjadi peningkatan setiap tahunnya, kendatipun angkatan kerja bertambah setiap tahunnya namun lapangan kerja juga memberikan kesempatan untuk menampung angkatan kerja tersebut, hal ini terlihat dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bukittinggi setiap tahunnya.

#### **2.1.3.9.3. Kesempatan kerja**

Program pengembangan kesempatan kerja perlu ditingkatkan di masa depan yang bertujuan untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Bukittinggi dengan membuka seluas-luasnya lapangan kerja. Permasalahan terhadap ketenagakerjaan di Kota Bukittinggi sampai dengan beberapa tahun kedepannya adalah terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang selalu bertambah dan diiringi oleh lambatnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja yang terbatas. Permasalahan ini diatasi dengan melaksanakan beberapa program perluasan kesempatan kerja, dengan melakukan langkah awal dengan pembangunan infrastruktur secara umum disamping juga program pengembangan dan diversifikasi usaha produktif diberbagai sektor.

Dalam beberapa dekade terakhir perempuan mulai secara aktif memasuki lapangan kerja. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan ini selain karena permintaan pasar, disisi lain karena adanya peningkatan kuantitas dan kualitas perempuan. Bagi perempuan yang bekerja keberadaan dan partisipasi mereka menjadi sangat strategis selain juga dapat membantu ekonomi rumah tangga.

#### **2.1.3.9.4. Pengangguran**

Kota Bukittinggi selalu melakukan program untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan berbagai upaya disetiap sektornya. Jumlah penduduk yang bertambah banyak juga akan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Berbagai upaya yang dapat dilakukan secara bertahap untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Bukittinggi dengan peningkatan keterampilan dan bimbingan usaha.

Dari data Statistik Daerah tahun 2015 jumlah pengangguran sebanyak 3.455 orang atau sebesar 6,04% yang berarti dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja terdapat 6 orang pengangguran. Angka ini sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Secara nasional, tingkat pengangguran memang meningkat. Beberapa perusahaan banyak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta banyaknya kebijakan yang menggunakan tenaga asing sebagai tenaga kerja. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Bukittinggi. Perlu dilaksanakan program yang semakin membantu penurunan tingkat pengangguran di Kota Bukittinggi.

#### **2.1.3.10. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)**

Keluarga merupakan sebuah kelompok kecil dalam susunan masyarakat yang menjadi pusat terbentuknya sebuah Negara. Perkembangan sebuah negara pun berawal dari keluarga. Jika masyarakatnya pintar mengelola kelompok kecil tersebut, maka negara pun akan maju dan begitu juga sebaliknya. Karena itulah, adanya program Keluarga Berencana bermaksud supaya masyarakat dapat sejahtera dengan mengelola keluarganya dengan baik. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama periode 2012–2016 di Kota Bukittinggi dilihat pada beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah anak per keluarga, rasio akseptor KB dan pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Diharapkan masyarakat dapat memahami makna keluarga berencana. Dengan begitu dapat diwujudkan keluarga dan kemajuan dapat terwujud.

##### **2.1.3.10.1. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga**

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana. Rata-rata jumlah anak juga menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Menurut data statistik Kota Bukittinggi tahun 2016 jumlah anak-anak sebanyak 29.375 jiwa dan jumlah rumah tangga adalah 28.616 jiwa, rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 1 s.d. 2 orang per keluarga. Besarnya jumlah masyarakat yang berhasil diajak berkeluarga berencana merupakan salah satu sasaran program KB. Hal ini menggambarkan bahwa program keluarga berencana telah hampir mencapai sasarannya yaitu 2 orang anak lebih baik. Selain itu juga digalakkannya program KB untuk laki-laki, merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan dalam menurunkan angka pertumbuhan penduduk.

##### **2.1.3.10.2. Rasio Akseptor KB**

Rasio Akseptor KB menggambarkan adanya pengendalian terhadap jumlah penduduk. Rasio Akseptor KB dihitung dengan membandingkan jumlah akseptor KB dengan pasangan usia subur mulai dari umur dibawah 20 tahun sampai umur 49 tahun.

**Tabel 2.58.**  
**Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Baru	Rasio (%)	Peserta KB Aktif	Rasio
1.	Guguk Panjang	5.897	1.241	21,04	3.685	62,49
2.	Mandiingin Koto Selayan	6.856	1.277	18,63	4.120	60,09
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.591	834	23,22	2.283	63,57
<b>TOTAL</b>		<b>16.344</b>	<b>3.352</b>	<b>20,51</b>	<b>10.088</b>	<b>61,72</b>

Sumber: Kantor PPKB Kota Bukittinggi

Pada tahun 2016 tercatat jumlah akseptor KB yang aktif sebanyak 10.088 orang, sedangkan jumlah pasangan usia subur berjumlah 16.344 pasang. Rasionya adalah 61,72. Dapat diartikan bahwa terdapat sebanyak 61,72% Pasangan Usia Subur menjalani program KB dan aktif menjadi akseptor KB. Semakin tinggi persentase angka absolutnya berarti program KB semakin dipahami dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun sebenarnya program KB ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat secara maksimal. Agar usaha ini berhasil maka program KB perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya yang lebih efektif.

#### **2.1.3.11. Penanaman Modal**

Penanaman modal (investasi) merupakan faktor yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Peningkatan penanaman modal akan memacu peningkatan produktifitas dan juga penyerapan tenaga kerja. Kinerja pembangunan pada urusan wajib penanaman modal dilihat dari beberapa indikator berikut.

##### **2.1.3.11.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)**

Penanaman modal dapat dibagi atas 2 (dua) bagian utama yaitu penanaman modal swasta (*private investment*) dan penanaman modal pemerintah (*public investment*). Penanaman modal swasta merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta seperti pendirian pabrik baru, peralatan dan penambahan faktor produksi baru. Penanaman modal ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dalam negeri (PMDN), swasta asing (PMA) dan rumah tangga. Sedangkan penanaman modal pemerintah merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur, transportasi, komunikasi, listrik,

irigasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Pada tahun 2016 di Kota Bukittinggi terdapat 18 investor yang terdiri dari 12 Penanaman Modal Dalam Negeri dan 6 Penanaman Modal Asing. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah 17, dimana peningkatan terjadi pada Penanaman Modal Asing. Kondisi ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.59.**  
**Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2016**

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
Akumulasi sampai Tahun 2016	<p><b>PMDN:</b> (1) PT. Dymens Hotel, (2) PT. Grahamas Citra Wisata, (3) PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), (4) PT. Rajawali Indonesia &amp; Co, (5) PT. Maizar Hasan, (6) PT. Hudaya Firdaus Utama, (7) PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), (8) PT. Kendimas Satria Nusantara, (9) PT. Red Planet Indonesia, Tbk, (10) PT. Limela Persada Bukittinggi, (11) Kawali Square, (12) PT. Bunda Empat Pilar.</p> <p><b>PMA:</b> (1) PT. Jasa Katom (Amerika), (2) PT. Sultan Shaan Wisata Indonesia(tentative)(Malaysia), (3) PT. Lativi Media Karya (Inggris), (4) PT. Sari Melati Kencana, (5) PT. Lebantika Jaya</p>	12	6	18

Sumber: BP2TPM Kota Bukittinggi

#### 2.1.3.11.2. Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Pada tahun 2016, jumlah investasi di Kota Bukittinggi dari 12 investor PMDN tercatat sebesar Rp. 6.985.859.748.080 dan dari 6 investor PMA tercatat sebesar US\$20.638.200. Dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Bukittinggi telah dilakukan berbagai upaya seperti promosi investasi dan juga meningkatkan iklim investasi serta peningkatan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Tabel 2.60.**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai tahun 2016**  
**Kota Bukittinggi**

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (US\$)
Akumulasi Sampai Tahun 2016	12	6.985.859.748.080	6	20.638.200

Sumber: BP2TPM Kota Bukittinggi (SIPD)

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, BP2TPM diberi kewenangan sebagai penyelenggara dalam memberikan pelayanan publik bidang Perizinan dan Non perizinan. Dalam melaksanakan tugasnya BP2TPM diwajibkan untuk berkoordinasi dengan SKPD terkait melalui Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP2TPM Kota Bukittinggi. Hingga tahun 2016 jenis perizinan yang diselenggarakan melalui BP2TPM sebanyak 85 izin.

#### **2.1.3.12. Kebudayaan**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menegaskan bahwa kebudayaan merupakan urusan pemerintahan baik urusan pemerintah maupun urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh sebab itu melestarikan nilai sosial budaya merupakan kewajiban pemerintah/daerah.

Dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok-kelompok kebudayaan yang ada di Indonesia/daerah.

Bukittinggi selain terkenal dengan obyek wisata alamnya, juga dikenal sebagai salah satu Kota Seni dan Budaya, dengan adat istiadat khas dan kemajemukan penduduk yang ikut memberi warna bagi kebudayaan yang ada, karena selain suku Minangkabau, penduduk Kota Bukittinggi berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Arab dan lainnya.

Peran pemerintah dalam hal ini, adalah memfasilitasi keanekaragaman kebudayaan yang ada agar tetap lestari dengan tidak meninggalkan nilai tradisi didalamnya namun tetap dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal yang dilakukan adalah dengan mengadakan pagelaran seni budaya yang menampilkan atraksi seni budaya masing-masing, sebagaimana dilaksanakan pada iven Pesta Seni Budaya Pameran Dagang dan Industri (PEDATI) yang dicanangkan tahun 2000.

##### **2.1.3.12.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Dalam rangka mempromosikan dan memperkenalkan seni budaya Kota Bukittinggi, pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpartisipasi dalam berbagai even seni dan budaya dengan mengikut sertakan sanggar atau

kelompok seni yang ada di Kota Bukittinggi baik di tingkat regional maupun nasional. Festival atau pagelaran seni budaya yang telah diikuti sebagai berikut :

**Tabel 2.61.**  
**Festival Seni dan Budaya yang Diikuti**  
**oleh Pemerintah Kota Bukittinggi**

No	Uraian	Tanggal	Tempat	Kelompok Seni
1.	Mengikuti Inakraft (ICC)	21 s.d. 23 April 2016	Jakarta	Sanggar Puti Limo Jurai
2.	Mengikuti JKPI	9 s.d. 12 Mei 2016	Banda Aceh	Sanggar Gastarana
3.	Festival Gandorih	Mei 2016	Pariaman	
4.	Lomba Lagu Pop Minang	April 2016	Kabupaten 50 Kota	
5.	Festival Randai	Agustus 2016	Padang	
6.	Festival Randai	Agustus 2016	Sawah Lunto	
7.	Lomba Musik	Agustus 2016	Padang	
8.	Festival Saluang Dendang	19 s.d. 20 November 2016	Payakumbuh	
9.	Festival Pawai Budaya	27 November 2016	Batusangkar	
10.	Festival Nyanyi Minang	28 November	Batusangkar	
11.	Pemilihan Uda-Uni Sumbar	10 s.d. 11 November 2016	Padang	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas, promosi kebudayaan Kota Bukittinggi khususnya seni tradisional Minangkabau telah dilakukan, namun dengan keterbatasan anggaran pada pemerintah kota, tidak semua even seni budaya yang diadakan dapat diikuti.

Namun Pemerintah Kota Bukittinggi memberi perhatian terhadap keberadaan sanggar atau kelompok seni budaya yang ada ditengah masyarakat, dimana hingga saat ini tercatat 26 kelompok seni ada di Kota Bukittinggi, yaitu :

**Tabel 2.62.**  
**Kelompok Seni Tradisi yang ada**  
**di Kota Bukittinggi**

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Seni
1.	Mandiangan Koto Selayan	14
2.	Guguk Panjang	7
3.	Aur Birogo Tigo Baleh	5
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Peran Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal meningkatkan dan mengembangkan seni budaya antara lain memberi bantuan pengadaan peralatan kesenian, pelatihan seni budaya (*panitahan*) dan fasilitasi kegiatan lainnya.

#### **2.1.3.12.2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya**

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kota Bukittinggi antara lain *Medan Nan Balinduang* yang terletak di belakang Hotel Jogja, dan *Medan Nan Bapaneh* di daerah Panorama secara berkala menampilkan atraksi seni budaya Minangkabau, sedangkan sarana lainnya yang sering digunakan dalam penyelenggaraan atraksi budaya masih memanfaatkan gedung atau areal terbuka seperti *Sport Hall*, lapangan kantin / Wirabraja, PGSD IKIP dan Aula Perpustakaan Bung Hatta.

Sejak Februari 2016 pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan pagelaran atau atraksi seni dan budaya bertempat di pelataran Jam Gadang setiap malam minggu, yang menampilkan kelompok seni yang ada di Kota Bukittinggi. Dengan adanya *event* ini selain mengembangkan bakat dan kemampuan masyarakat terutama generasi muda dibidang seni budaya, diharapkan memberi hiburan baru bagi pengunjung dan memberi tempat bagi kelompok seni dalam mengembangkan kemampuan dibidang seni budaya.

Namun kedepan kiranya perlu ada upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif guna mengapresiasi kreatifitas seni masyarakat khususnya generasi muda.

#### **2.1.3.12.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kebudayaan Nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya,

struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Upaya melestarikan benda cagar budaya dan situs yang ada baik bersifat fisik (*tangible*) maupun non fisik (*Un tangible*) diawali dengan pendataan benda cagar budaya berupa pendokumentasian (tulisan dan gambar), dilanjutkan dengan pendaftaran, penetapan, serta zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melindungi, melestarikan, memanfaatkan dan mengembangkan Benda Cagar Budaya ini secara umum telah menetapkannya dalam Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Bukittinggi dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut terdapat 42 benda cagar budaya dan peninggalan sejarah, diantaranya Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Gua Jepang Panorama (Lobang Jepang), Benteng *Fort de Kock* dan Rumah Kelahiran Bung Hatta, Masjid Surau Gadang (Masjid Jami'), Bangunan Sekolah Rajo (SMA Negari 2 Bukittinggi) dan beberapa rumah tinggal.

Untuk Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kota Bukittinggi telah dilakukan deliniasi zona inti dan zona penyangga pada *Masterplan* Kota Pusaka Bukittinggi namun hal ini belum berupa ketetapan Walikota.

#### **2.1.3.13. Kepemudaan dan Olah Raga**

Kinerja pembangunan pada urusan kepemudaan dan olahraga selama periode 2012–2016 di Kota Bukittinggi terdapat beberapa indikator yaitu jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, kegiatan kepemudaan dan jumlah kegiatan olahraga. Untuk kedepannya berkaitan dengan pelayanan olahraga dan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan karang taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional saat ini masih terbatas dan belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu upaya yang dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan sarana yang ada serta pembangunan pusat olahraga (*sport center*) yang baru.

### 2.1.3.13.1. Jumlah Organisasi Pemuda

Kelompok pemuda yang kreatif biasanya sering berkumpul hingga membentuk organisasi sesuai dengan kreatifitas mereka dan menyusun suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu organisasi pemuda juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui organisasi kepemudaan. Semakin banyak organisasi kepemudaan di suatu wilayah maka menggambarkan bahwa tingginya peran serta pemerintah daerah dalam membina organisasi kepemudaan. Jika banyaknya aktifitas pemuda yang terorganisir akan mengurangi permasalahan sosial di kalangan pemuda.

Tahun 2016 jumlah organisasi pemuda yang terdaftar di Kota Bukittinggi sebanyak 68 yang tersebar pada 3 kecamatan. Organisasi terbanyak terdapat pada wilayah kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Disini terlihat tingginya minat pemuda untuk berorganisasi dan tingginya peran pemerintah dalam memfasilitasi aktifitas pemuda sehingga mereka eksis pada setiap kegiatan. Pada Kecamatan ABTB dan Guguk Panjang juga hampir merata, (24 dan 19 organisasi pemuda). Namun demikiandiharapkan peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan pada khususnya berupaya mengajak para pemudanya untuk berorganisasi sehingga program pemerintah juga dapat tersalur melalui program organisasi mereka. Secara data dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.63.**  
**Jumlah Organisasi Pemuda**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mandiangin Koto Selayan	10	10	10	10	25
2.	Guguk Panjang	14	14	14	14	19
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	6	6	6	6	24
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>68</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi

### 2.1.3.13.2. Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi olah raga yang ada di Kota Bukittinggi tersebar di setiap kecamatan yang ada, organisasi dari sekolah dan dari organisasi olahraga dari masyarakat itu sendiri. Untuk jumlah organisasi olahraga dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 2.64.**  
**Jumlah Organisasi Olahraga**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mandiingin Koto Selayan	9	9	10	10	16
2.	Guguk Panjang	9	9	10	10	6
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	11	11	13	13	6
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>28</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi

Organisasi olah raga yang ada di sekolah–sekolah pembinaan langsung dibina oleh sekolah itu sendiri dibawah bimbingan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, sedangkan pembinaan organisasi olah raga masyarakat langung dibina oleh ketua pemuda yang ada disetiap kelurahan. Organisasi olah raga yang ada di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 terdapat 28 organisasi olahraga. Kecamatan Mandiingin Koto Salayan memiliki 16 organisasi, serta Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh memiliki 6 organisasi olahraga. Dari jumlah organisasi olahraga yang ada, dapat dilihat keaktifannya dalam mengikuti kegiatan keolahragaan di Bukittinggi ataupun ke luar Bukittinggi, namun demikian masih perlu perhatian yang lebih dari pemerintah Kota Bukittinggi untuk dapat memberikan bimbingan ataupun pembinaan serta bantuan dalam melengkapi sarana dan prasarana dalam meningkatkan aktifitas organisasi olah raga tersebut.

#### **2.1.3.13.3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan**

Kegiatan kepemudaan adalah *event* kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SKPD yang membidangi keolahragaan di Kota Bukittinggi harus meningkatkan pembinaan, kepedulian dan meningkatkan koordinasi dengan organisasi kepemudaan, sehingga Kota Bukittinggi betul-betul mempunyai pemuda yang berpendidikan dan kreatif. Jika pemuda selalu melaksanakan kegiatan positif maka apapun program pemerintah yang

ditujukan untuk pembangunan akan cepat dan dapat diterima oleh pemuda karena pemuda juga memberikan peran serta untuk mencapai tujuan.

Perkembangan jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.65.**  
**Jumlah Kegiatan Kepemudaan**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mandiingin Koto Selayan	2	2	2	3	3
2.	Guguk Panjang	2	2	2	3	3
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	2	2	2	4	4
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi

#### **2.1.3.13.4. Jumlah Kegiatan Olahraga**

Organisasi yang ada, jika kurang atau tidak ada melakukan kegiatan, sama saja dengan organisasi yang sia-sia. Harapan kita tentunya setiap organisasi yang ada selalu beraktifitas sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh organisasi tersebut. *Event* yang paling sering dilakukan oleh organisasi pemuda adalah di bidang keolahragaan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis.

Sangat banyak *event* keolahragaan yang dilakukan sampai ketingkat nasional bahkan internasional. Jika kita selalu melakukan pembinaan yang rutin terhadap kegiatan olahraga dan dalam mencari bibit dan bakat seseorang di bidang keolahragaan, niscaya di Kota Bukittinggi akan bertaburan insan olahraga yang berpestasi.

Selama 4 (empat) tahun terakhir terlihat dari data bahwa di Kota Bukittinggi cukup banyak kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan dari organisasi kepemudaan yang ada. Jika diambil rata-rata perbulan maka terdapat 2 *event* olahraga yang dilakukan masing-masing kecamatan untuk memberdayakan para pemuda dibidang olahraga. Selain bakat mereka tersalur, maka yang paling penting adalah para pemuda di Kota Bukittinggi selalu disibukkan dengan kegiatan positif sehingga diharapkan pengaruh negatif terhadap lingkungan akan dapat ditekan terus.

Sarana dan prasarana olah raga juga harus menjadi perhatian pemerintah. Meningkatkan dan memperbaharui sarana yang ada sesuai dengan perkembangan keolahragaan juga menjadi prioritas program dan kegiatan selanjutnya. Perkembangan kegiatan keolahragaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.66.**  
**Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mandiingin Koto Selayan	2	3	3	3	1
2.	Guguk Panjang	2	3	3	3	2
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5	5	5	5	1
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>4</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi

Dilihat pada tabel di atas kegiatan olahraga yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 4 kegiatan, menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan yang lebih baik lagi, agar Bukittinggi dapat memiliki nama baik di bidang olahraga. Untuk itu perlu adanya Monitoring dan evaluasi yang lebih aktif lagi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan aktifitas olah raga yang dilaksanakan oleh pemuda dan disamping itu juga diperlukan dukungan dana untuk pembinaan serta *reward* untuk yang telah memberikan hasil yang terbaik dalam bidang keolahragaan.

#### **2.1.3.14. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian masyarakat selama periode 2012-2016 di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada beberapa indikator yang terkait dengan keamanan, ketertiban dan ketentraman dilingkungan masyarakat. Adapun indikator sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

#### 2.1.3.14.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Bukittinggi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dibentuklah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepala setingkat Eselon II

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ditempatkan beberapa orang tenaga yang telah dilatih dan dibekali dengan kemampuan bela diri serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Bahkan pada saat ini telah ada Polisi Pamong Praja Wanita yang akan bertugas dan terjun mengamankan dan menertibkan masyarakat pada sisi-sisi yang lebih luas.

Adapun perkembangan jumlah anggota Polisi Pamong Praja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terjadi penurunan dan kenaikan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.67.**  
**Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	101	93	92	105	172
2.	Jumlah Penduduk	114.415	118.260	120.469	122.621	124.715
3.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	8,82	7,86	7,80	8,56	13.79

Sumber: Kantor Satpol PP

Pada tahun 2012 jumlah anggota Polisi Pamong Praja sebanyak 101 orang, dan tahun 2013 mengalami pengurangan sebanyak 8 orang. Pada tahun 2014 jumlah ini mengalami pengurangan lagi sebanyak 1 orang. Hal ini disebabkan pegawai yang bersangkutan memasuki masa pensiun dan dimutasi ke SKPD lain, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan personil dalam operasi penegakan Peraturan Daerah, maka Pimpinan mengambil kebijakan mengangkat dan memutasikan pegawai harian dari SKPD ke Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 13 orang. Maka jumlah personil Pamong Praja pada tahun 2015 meningkat menjadi 105 orang. Dilihat dari perkembangan Rasio jumlah Polisi Pamong Praja pada tahun 2015 adalah 8,56. Pada tahun 2016 seiring dengan semakin tegasnya upaya penegakan peraturan demi keamanan dan ketertiban serta untuk kepentingan masyarakat Kota Bukittinggi, ditambah dan diangkat tenaga harian kontrak

sebanyak 65 orang, yang terdiri dari 47 orang Polisi Pamong Praja Pria dan 18 orang Polisi Pamong Praja Wanita. Dengan penambahan 65 orang tenaga tambahan Polisi Pamong maka Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk menjadi 13.79.

Idealnya untuk dapat memenuhi Standar Pelayanan Masyarakat adalah satu orang Polisi Pamong Praja dapat melindungi 900 jiwa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Polisi Pamong Praja. Kondisi saat ini di Kota Bukittinggi dengan tambahan 65 orang Polisi Pamong Praja tersebut, artinya satu orang Polisi Pamong Praja telah dapat melindungi 725 orang penduduk. Dengan demikian kebutuhan Polisi Pamong Praja sudah dapat dikatakan cukup di Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### 2.1.3.14.2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Perlindungan Masyarakat merupakan satu kesatuan yang saat ini terdiri dari 10 orang yang ditempatkan pada masing-masing kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi, keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat disetiap kelurahan yang dipilih langsung dari masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut serta dalam upaya memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan kelurahan.

**Tabel 2.68.**  
**Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 di Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Linmas	24	24	24	704	120
2.	Jumlah Penduduk	114.415	118.260	120.469	122.621	124.715
3.	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	2,10	2,03	2,03	57,41	9,62

Sumber: Kantor Sat Pol PP Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2012 s.d. 2014 tercatat jumlah Satuan Linmas di Kota Bukittinggi sebanyak 24 satuan yang tersebar pada masing-masing Kelurahan. Sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan personil pada masing-masing kelurahan menjadi 10 per satuan linmas, sehingga total keseluruhan personil linmas yang ada kondisi tahun 2015 sebanyak 704 orang. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan karena pada tahun 2015 dilaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah yang tentu saja membutuhkan pengamanan pada masing-masing TPS, disamping jumlah Linmas yang memang telah ditugaskan pada masing-masing kelurahan. Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kota Bukittinggi.

#### **2.1.3.14.3. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan**

Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bidang keamanan dan ketertiban, merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuh kembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban disetiap lingkungannya masing-masing.

Siskamling juga merupakan salah satu model Polmas (Polisi Masyarakat) dalam memberikan kontribusi komunikasi serta informasi secara eksternal (dari dan bagi masyarakat) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap waktu dan merupakan potensi pengamanan swakarsa yang berazaskan gotong royong, kerjasama, budaya paguyuban yang menjiwai dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rasa aman.

Sistem Keamanan Lingkungan merupakan peran serta masyarakat/pemuda dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal. Di Kota Bukittinggi ketersediaan Pos Siskamling dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.69.**  
**Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 di Kota Bukittinggi**

No	Keca Matan	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jml Pos	Jml Kel	Rasio												
1.	Guguk Panjang	29	7	4,14	29	7	4,14	28	7	4	29	7	4,14	29	7	4,14
2.	Mandiingin Koto Selayan	21	9	2,33	34	9	3,77	35	9	3,89	122	9	13,55	122	9	13,55
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	35	8	4,37	35	8	4,37	18	8	2,25	25	8	3,125	25	8	3,125
<b>JUMLAH</b>		<b>85</b>	<b>24</b>	<b>3,54</b>	<b>98</b>	<b>24</b>	<b>4,08</b>	<b>81</b>	<b>24</b>	<b>3,38</b>	<b>176</b>	<b>24</b>	<b>7,33</b>	<b>176</b>	<b>24</b>	<b>7,33</b>

Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2016

Rasio Pos Siskamling terhadap jumlah Kelurahan pada Kecamatan Guguk Panjang dari tahun 2012 s.d. 2016 pada umumnya 4.14 yaitu 29 Unit Pos Siskamling meskipun terjadi pengurangan jumlah 1 (satu) unit Pos Siskamling pada tahun 2014. Dapat diartikan dengan jumlah 29 unit Pos Siskamling di Kecamatan Guguk Panjang sampai pada tahun 2016 dapat di rasiokan rata-rata setiap Kelurahan terdapat 4 Unit Pos Siskamling dan terdapat satu Kelurahan mempunyai 5 unit Pos Siskamling, hal ini merujuk kepada luas wilayah dan tingginya aktifitas Pemuda di Kelurahan tersebut.

Pada tahun 2012 s.d. 2016 Kecamatan Mandiingin Koto Salayan menunjukkan peningkatan penambahan jumlah Pos Siskamling sehingga kondisi sampai tahun 2014 tercatat sejumlah 35 unit Pos Siskamling yang ada dengan rasio 3,89.

Sedangkan pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dari 8 Kelurahan terjadi penurunan yang signifikan dari jumlah 35 unit Pos Siskamling pada tahun 2013 menjadi 18 unit Pos Siskamling pada tahun 2014 dengan rasio 3,38. Namun pada tahun 2015 dan 2016 terjadi lagi peningkatan menjadi menjadi 25 Unit Pos Siskamling dengan rasio 7,33.

#### **2.1.3.14.4. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Bukittinggi**

Pada Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 diatur tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Istilah Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Adapun jumlah perkembangan personil dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 2.70.**  
**Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	120 orang	120 orang	240 orang	4	4
2.	Jumlah penduduk	114.415	118.260	120.469	122.621	124.715
3.	Rasio personil Linmas per 10.000 penduduk	10,49	10,48	20,34	0,32	0,32

Sumber: Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat tahun 2012 s.d. 2013 berjumlah 120 orang dan terjadi peningkatan pada tahun 2014 menjadi 240 orang dengan sebarannya 5 orang per kelurahan atau satu kesatuan. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat bertambah menjadi 240 dimana pada masing masing Kelurahan terdapat 10 orang petugas. Jumlah Linmas yang terlihat turun drastis pada tahun 2015 dan 2016 hanyalah karena perbedaan rumus penghitungan. Jumlah Linmas di masyarakat tidak mengalami penurunan drastis namun Petugas Pelindungan masyarakat yang dimaksudkan pada tahun 2015 dan 2016 adalah personil yang menangani pengurusan Linmas di masyarakat yang saat ini berada di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **2.1.3.14.5. Pertumbuhan Ekonomi**

Laju Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi kurun waktu 2012 sampai dengan 2015 berada di atas angka 6%. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi 6,55% di atas pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang sebesar 6,31%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi 6,30% sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera

Barat hanya sebesar 6,08%. Selanjutnya pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sebesar 6,19%, masih diatas Provinsi Sumatera Barat yang hanya 5,86%. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi yang sebesar 6,12% jauh diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang hanya 5,41%.

**Tabel 2.71.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2012-2015**

NO	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015*
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,55	6,30	6,19	6,12

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angkat 2015

\*Angka Sementara

#### 2.1.3.14.6. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara pemahaman utamanya mencakup:

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Ketimpangan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi dari dua gambaran yang lainnya.
- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
- Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Pengecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Kota Bukittinggi berdasarkan hasil Susenas Tahun 2012, jumlah penduduk miskin adalah 6.686 jiwa dan tahun 2014 telah dapat ditekan menjadi 6.004 jiwa. Namun disayangkan pada tahun 2015 berdasarkan hasil Susenas Jumlah KK miskin di Kota Bukittinggi meningkat lagi. Angka ini harus diupayakan untuk semakin menurun. Untuk itu peranan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bukittinggi dalam melaksanakan monitoring serta evaluasi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi sangat menentukan. Selain itu masing-masing pokja serta pokgram pada TKPKD telah mulai secara terarah menjalankan fungsinya sesuai dengan Permendagri 42 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan usaha dalam menekan angka kemiskinan Kota Bukittinggi dapat dilakukan secara terarah.

**Tabel 2.72.**  
**Jumlah KK Miskin Berdasarkan Data Susenas Tahun 2012 s.d. 2015**

NO	Kota	Hasil Susenas 2012	Hasil Susenas 2013	Hasil Susenas 2014	Hasil Susenas 2015
1.	Kota Bukittinggi	6.686 Jiwa	6.371 Jiwa	6.004 Jiwa	6.540 Jiwa
<b>JUMLAH</b>		<b>6.686 Jiwa</b>	<b>6.371 Jiwa</b>	<b>6.004 Jiwa</b>	<b>6.540 Jiwa</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi  
Data 2016 belum tersedia.

Secara rinci perubahan jumlah KK Miskin di Kota Bukittinggi dapat di lihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 9**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

### 2.1.3.14.7. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (selanjutnya disingkat WMK) oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdiksi urusan pemerintahannya. PPK adalah salah satu alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah.

Wilayah Manajemen Kebakaran atau WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain : pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian / pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kota Bukittinggi per tahun 2016 sebanyak 6 unit, berdasarkan standar *International Fire Chiefs Association of Asia* (IFCAA) yang menetapkan bahwa setiap 10.000 penduduk dilayani 1 (satu) unit mobil. Jika Penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2016 adalah sebanyak 124.715 jiwa, maka idealnya Kota Bukittinggi memiliki 12 unit mobil pemadam kebakaran. Walaupun demikian, Dinas Kebakaran selalu berusaha memaksimalkan sarana yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal.

**Tabel 2.73.**  
**Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	4	4	4	5	6
2.	Jumlah Penduduk	114.415	118.260	120.649	122.621	124.715
3.	Rasio (1:2 x 100%)	0,0034	0,0033	0,00339	0,00408	0,00481

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2016

Dilihat dari tabel di atas, jumlah mobil Pemadam Kebakaran meningkat dari 5 unit menjadi 6 unit pada tahun 2016, kondisi ini secara otomatis berdampak pada peningkatan Cakupan Layanan Bencana Kebakaran di Kota Bukittinggi yaitu dari rasio 0.00408 menjadi 0.00481.

Jumlah mobil pemadam kebakaran ini masih separuh dari jumlah ideal kendaraan pemadam kebakaran yang seharusnya, berdasarkan penjelasan diatas masih terdapat kekurangan sebanyak 7 unit lagi. Kekurangan ini diharapkan dapat segera dipenuhi sehingga Cakupan Layanan Bencana Kebakaran di Kota Bukittinggi juga dapat ditingkatkan.

#### 2.1.3.14.8. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

**Tabel 2.74.**  
**Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran	45	53	98	116	115
2.	Jumlah Kejadian Kebakaran	45	53	98	116	115
3.	Rasio (1:2 x 100%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Permendagri nomor 69 tahun 2012, Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2016 minimal 75% (tujuh puluh lima persen). Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Tingkat Waktu

Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Bukittinggi telah 100%, jauh diatas target. Walaupun target telah terpenuhi, namun tetap perlu ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

#### **2.1.3.14.9. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat**

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4/M.PAN-RB/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, di Kota Bukittinggi telah diadakan Survei Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Survei IKM ini telah dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal setiap tahunnya dengan indeks sudah berada di atas 90% dengan klasifikasi sangat puas .

#### **2.1.3.15. Ketahanan Pangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dari pengertian tersebut maka menjadi kewajiban Negara dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perserorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya.

##### **2.1.3.15.1. Regulasi Ketahanan Pangan**

Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang antara lain mengatur cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah, penganeekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat, kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangannya, distribusi

pangan serta perdagangan dan bantuan pangan, pengawasan, sistem informasi pangan gizi dan peran serta masyarakat.

Dalam pasal 26 Ayat (2) mengamanatkan penganekaragaman pangan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan pelaku usaha pangan lokal setempat.

Regulasi terkait ketahanan pangan di Kota Bukittinggi yaitu Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 Tanggal 9 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Perwako Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi yang diketuai oleh Walikota Bukittinggi, dengan dasar hukum pembentukan Dewan Ketahanan Pangan secara nasional yakni Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006.

#### 2.1.3.15.2. Ketersediaan Pangan Utama

Sebagai daerah perkotaan, Kota Bukittinggi masih memiliki lahan untuk pertanian dan daerah sentra pertanian yang masih luas adalah Kecamatan Mandiangin Koto Salayan. Produksi Padi pada tahun 2016 di Kota Bukittinggi 5.227 Ton/tahun.

Namun ketersediaan pangan di Kota Bukittinggi masih tergantung dari daerah di luar Kota Bukittinggi, yaitu sekitar 75%-78% hanya 21%-24% berasal dari produksi sendiri. Ketersediaan pangan utama (beras) Kota Bukittinggi untuk tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.75.**  
**Ketersediaan Pangan Utama**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2012 s.d. 2016**

NO	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk	114.393	118.260	120.469	122.621	124.715
2.	Produksi Padi	5.471,50	4.463,33	5.053,18	4.200	5.227
3.	Ketersediaan pangan utama (angka konsumsi 123/kg/tahun/org x jumlah penduduk – produksi padi x 10%)	0,86	1,01	1,48	1,50	1,53

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan

Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bukittinggi, sejak tahun 2011 Pemerintah Kota telah melaksanakan berbagai kegiatan baik dengan cara mandiri maupun bekerjasama dengan daerah sekitar. Selain sebagai salah satu upaya ketahanan pangan, sawah abadi juga diperuntukan bagi perluasan ruang terbuka hijau. Penyediaan pangan di Kota Bukittinggi hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali iklim dan (iii) bencana banjir.

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau Kawasan Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Bukittinggi.

#### **2.1.3.16. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan peran sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga miskin, meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat secara aktif untuk bergotong royong.

##### **2.1.3.16.1. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

Kelompok Dasawisma inilah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dibawah naungan PKK untuk menyampaikan pesan program dan kegiatan. Untuk mengaktifkan fungsi dan kualitas Dasawisma ini diperlukan peran masyarakat dan pemerintah. Perkembangan kelompok dasawisma dari tahun ketahun di Kota Bukittinggi relatif tetap, dan sesuai dengan jumlah penduduk, maka kelompok dasawisma terbanyak terdapat ada Kecamatan Mandiangin Koto Salayan yakni 425, disusul Kecamatan Guguk Panjang 388 dan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 288. Kelompok ini dibentuk dalam 10 rumah tangga menjadi 1 Dasawisma pada setiap kelurahan. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga diupayakan untuk terus meningkat dan berperan sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan, maka melalui kelompok dasawisma ini merupakan salah satu bentuk peningkatan peran perempuan dimaksud. Perkembangan lebih lengkap dasa wisma dapat dilihat ada tabel berikut :

**Tabel 2.76.**  
**Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mandiangin Koto Salayan	425	425	425	425	425
2.	Guguk Panjang	388	388	388	388	388
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	288	288	288	288	288

*Sumber: TP PKK Kota Bukittinggi*

#### **2.1.3.16.2. Jumlah LSM**

Lembaga Swadaya Masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi Non Pemerintah (Ornop). LSM menjalankan berbagai jasa dan fungsi kemanusiaan, membawa keprihatinan dalam masyarakat kepada pemerintah, memonitor berbagai kebijakan dan mendorong partisipasi politik dalam tataran masyarakat. Berikut data Jumlah LSM yang ada di Kota Bukittinggi:

**Tabel 2.77.**  
**Jumlah LSM Di Kota Bukittinggi Tahun 2012 s.d. 2016**

LSM	2012	2013	2014	2015	2016
LSM Berdasarkan Profesi	115	127	134	137	142
LSM Berdasarkan Agama	15	17	18	18	18
<b>JUMLAH</b>	<b>130</b>	<b>144</b>	<b>152</b>	<b>155</b>	<b>160</b>

*Sumber : Kantor Kesbangpol Bukittinggi*

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah LSM semakin meningkat pada kurun waktu 2012-2016. Jumlah LSM ini pun tumbuh berdasarkan profesi dan berdasarkan agama. Peningkatan jumlah LSM ini cukup mengindikasikan bahwa keberadaan pemerintah akan semakin diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. Artinya Pemerintah harus semakin peka terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

#### **2.1.3.16.3. PKK Aktif**

Tim Pengerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan partner Pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat. Jangkauan wilayah kerja PKK mulai di tingkat Kota sampai dengan Dasawisma. Dalam hal pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Jumlah Tim Pengerak PKK di Kota Bukittinggi berjumlah 28 (dua puluh delapan), yang terdiri dari 1 (satu) TP PKK tingkat Kota, 3 (tiga) TP PKK tingkat kecamatan dan 24 (dua puluh empat) TP PKK tingkat kelurahan. Semua TP PKK yang ada di Kota Bukittinggi berjalan dengan aktif dan lancar.

#### **2.1.3.16.4. Posyandu Aktif**

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah kegiatan kesehatan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu ini merupakan kegiatan swadaya masyarakat dibidang kesehatan yang berada pada kelurahan-kelurahan. Posyandu ini lebih difokuskan kepada pelayanan kesehatan balita meliputi imunisasi, timbang berat badan, menyediakan makan suplemen dll. Hal ini sangat penting dilakukan dalam meningkatkan angka harapan hidup bayi. Tenaga kesehatan atau sukarelawan pada posyandu telah mendapat pelatihan dari Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan dan panduan bagi ibu hamil, bayi dan ibu menyusui. Selain itu

Posyandu juga memberikan makanan suplemen kepada bayi dan Balita. Posyandu ini juga berfungsi sebagai pendeteksi dini terhadap perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak.

Terlihat pada data berikut, perkembangan posyandu di Kota Bukittinggi selalu meningkat dari tahun ketahun walaupun tidak signifikan. Harapan yang terpenting adalah bagaimana kelompok Dasawisma dapat meningkatkan dan menggerakkan kegiatan posyandu, agar kualitas posyandu dapat maksimal, dan berdampak pada peningkatan perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak.

**Tabel 2.78.**  
**Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Posyandu	130	132	132	132	132

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi*

#### **2.1.3.17. Statistik**

Statistik merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota. Dari beberapa dokumen dan data tentang informasi pembangunan di Kota Bukittinggi yang selama ini dikerjasamakan penyusunannya oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Badan Pusat Statistik antara lain Buku Bukittinggi Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Inflasi Kota Bukittinggi dan Statistik Daerah. Mulai tahun 2014 sudah merupakan produk yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi dan tidak lagi dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, sedangkan untuk kebutuhan data masih didukung oleh dinas instansi lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Semua dokumen dan data tersebut merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik untuk menyusun sekaligus mempublikasikannya setiap tahun.

### 2.1.3.18. Komunikasi Dan Informatika

Komunikasi dan Informatika merupakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan urusan ini telah menunjukkan capaian kinerja seperti yang sudah diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan program tahunan pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Bukittinggi.

#### 2.1.3.18.1. Rasio Wartel / Warnet Terhadap Penduduk

Sejak tahun 2010 s.d. 2016 keberadaan wartel di Kota Bukittinggi cenderung mengalami penurunan bahkan cenderung hilang. Penurunan ini adalah sebagai pengaruh dari semakin terjangkaunya harga ponsel bagi kalangan ekonomi menengah dan bawah ditambah dengan terjadinya perang tarif provider-provider jaringan telekomunikasi tanpa kabel baik GSM maupun CDMA. Bahkan saat ini rata-rata satu orang memiliki lebih dari 1 (satu) ponsel hal ini seiring dengan perkembangan teknologi ponsel yang selalu berinovasi.

Demikian juga halnya dengan Warnet, pada tahun 2016 jumlah warnet di Kota Bukittinggi menurun dibanding tahun 2015 dari 44 unit warnet menjadi 40 unit dengan rasio 0.321. Penurunan ini menggambarkan bahwa tingkat kebutuhan internet yang disewakan mulai berkurang seiring dengan beberapa faktor – faktor di bawah ini:

- 1). Semakin murah alat elektronik berbasis komputer sehingga terjadi pergeseran kebutuhan yang dulunya merupakan kebutuhan sekunder saat ini telah menjadi kebutuhan pokok;
- 2). Semakin murah harga modem dan paket provider internet sehingga terjangkau oleh seluruh kalangan; dan
- 3). Semakin mudahnya mendapatkan layanan internet gratis di berbagai ruang publik.

Berikut perkembangan warnet di Kota Bukittinggi tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.79.**  
**Rasio Wartel / Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2016**  
**Di Kota Bukittinggi**

NO	Kota	Tahun 2016				
		Jumlah Penduduk	Jumlah wartel	Jumlah Warnet	Rasio Wartel	Rasio Warnet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/3)	(7=5/4)
1.	Bukittinggi	124.715	*)	40	*)	0.321

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2016

Tempat usaha warnet yang ada di Kota Bukittinggi umumnya berupa usaha perorangan bukan berbadan hukum, sementara untuk kantor-kantor Pemerintah maupun kantor swasta rata-rata saat ini sudah tersedia jaringan internet, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi semakin mudah ditemukan. Bagi masyarakat umum dan kalangan siswa serta mahasiswa kemudahan ini juga didapat dengan tersedianya produk paket-paket internet yang ditawarkan sehingga layanan internet sudah dapat diakses menggunakan *Tablet* dan *Smartphone* masing-masing.

#### 2.1.3.18.2. Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal di Kota Bukittinggi.

Jumlah Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal pada tahun 2012 s.d. 2015 yang jumlah bervariasi dari 26 jenis naik menjadi 29 jenis surat kabar. Bahkan pada tahun 2016 jumlahnya menjadi 40 Jenis. Hal ini menunjukkan semakin besar peranan dan kebutuhan Pemerintah akan fasilitas jaringan komunikasi berupa media cetak untuk menunjang kebutuhan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Tabel 2.80.**  
**Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal**  
**Tahun 2012 s.d. 2016 di Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	10 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	13 jenis
2.	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	16 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	27 jenis
3.	Total jenis surat kabar (1+2)	26 jenis	29 jenis	29 jenis	29 jenis	40 jenis

Sumber: Bagian Humas Setdako Bukittinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kota Bukittinggi Tahun 2012 terdapat 10 jenis surat kabar nasional, namun pada tahun 2013 sampai 2015 surat kabar nasional berkurang menjadi 9 jenis. Data ini dilihat berdasarkan koran berlangganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Sedangkan surat kabar lokal tahun 2012 berjumlah 16 jenis dan kemudian naik jumlahnya tahun 2013 sampai 2015 menjadi 20 jenis surat kabar lokal. Terjadinya peningkatan kebutuhan informasi juga diiring dengan bertambahnya jumlah berlangganan Surat Kabar Nasional dan Lokal pada tahun 2016 yaitu menjadi 40 jenis Surat kabar. Kehadiran surat kabar lokal menunjukkan kebutuhan masyarakat akan informasi lokal lebih menarik dibanding informasi nasional. Hal ini sejalan dengan perkembangan media informasi. Sementara informasi nasional belum terinformasikan secara merata sehingga

masih dibutuhkan media lokal. Secara umum kondisi media surat kabar yang beredar di Bukittinggi telah dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat.

#### **2.1.3.18.3. Website Milik Pemerintah Daerah**

Pemerintah Kota Bukittinggi telah memiliki Website dengan situs [www.bukittinggikota.go.id](http://www.bukittinggikota.go.id) yang diresmikan tahun 2007. Kemudian Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sehingga keberadaan *website* Pemerintah Kota Bukittinggi ikut mendukung amanat dari undang-undang tersebut yaitu dengan memberi informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi resmi terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat, oleh sebab itu pemerintah dituntut dapat membuka diri kepada masyarakat dalam memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja terkait penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung maksud tersebut melalui *website* yang ada telah berkembang beberapa sub-domain, yaitu :

1. KLH Kota Bukittinggi;
2. Perizinan Kota Bukittinggi, oleh BP2TPM Kota Bukittinggi;
3. LRA Kota Bukittinggi, oleh DPKAD Kota Bukittinggi;
4. Disbudpar Kota Bukittinggi;
5. DKK Kota Bukittinggi;
6. Disdikpora Kota Bukittinggi;
7. DPRD Kota Bukittinggi;
8. LPSE Kota Bukittinggi, oleh Bagian Pembangunan Setda Kota Bukittinggi.

Dalam rangka penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi memberi himbauan akan peran aktif PNS dalam penyampaian informasi strategis dan aktual dari SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Bukittinggi untuk kemudian ditampilkan melalui *website* resmi Pemerintah Kota Bukittinggi, sehingga data dan informasi yang tampil di *website* senantiasa *up to date*.

#### 2.1.3.18.4. Pameran / Expo

Pameran merupakan salah satu cara efektif untuk mempromosikan Produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pada pelaksanaan pameran bukan hanya keuntungan dari penjualan produk yang didapat tetapi juga bisa banyak "link atau *chanel*" untuk mempromosikan produk UMKM yang dimiliki. Beberapa manfaat lainnya yang berguna bagi promosi UMKM dari pelaksanaan pameran antara lain:

1. Meningkatkan penjualan produk;
2. Tempat mencari tambahan modal;
3. Memperluas jaringan;
4. Bisa memperbaiki kualitas produk UKM;
5. Survey pasar.

Dengan adanya promosi tersebut diharapkan dapat mendorong usaha/industri dalam hal ini UMKM dalam meningkatkan efisiensi dan produktifitas serta kemampuan UMKM untuk memperbaiki kualitas teknologi dan manajemen usahanya. Dengan meningkatnya produk UMKM diharapkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga memberi dampak pengurangan angka pengangguran.

Pelaksanaan kegiatan promosi produk UMKM dalam beberapa tahun ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, baik even daerah maupun nasional guna mempromosikan dan memasarkan produk unggulan kota. Adapun pameran yang telah diikuti sebagai berikut :

**Tabel 2.81.**  
**Kegiatan Pameran Dalam Negeri yang diikuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi**

NO	Nama Kegiatan	2016	
		Tanggal	Peserta
1.	Pameran Gebyar Produk Unggulan dan Investasi Nusantara 2016	Jakarta, 24 s.d. 27 Maret 2016	IKM Bintang Bordir
2.	Inacraft 2016	Jakarta, 20 s.d. 24 April 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• IKM Putri Ayu</li><li>• Krisandina</li><li>• Chintya Boutique</li></ul>
3.	HUT Dekranas	Jakarta, 17 s.d. 31 Juli 2016	
4.	Minangkabau Fashion Festival	Padang, 23 s.d. 25 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• IKM IFD</li><li>• Ivo Pelaminan</li></ul>
5.	Bazar/Pasar Rakyat	Padang, 28 Juni s.d. 1 Juli 2016	KUB Anggrek
6.	Indonesia City Expo 2016	Jambi 27 s.d. 31 Juli 2016	IKM H.Lis
7.	Pameran Jambore Terpadu PKK	Sawahlunto, 3 s.d. 6 Agustus 2016	UP2K Kota Bukittinggi
8.	Nusantara Expo dan Forum 2016	Jakarta, 19 s.d. 23 Oktober 2016	IKM Bintang Bordir

NO	Nama Kegiatan	2016	
		Tanggal	Peserta
9.	Jakarta Fashion Week 2016	Jakarta, 24 s.d. 27 November 2016	Eni Desain
10.	Sumbar Expo 2016	Bandung, 24 s.d. 7 November 2016	STR Bumbu Masak
11.	Pameran Produk Kerajinan Unggulan Sumbar 2016	Padang, 1 Desember 2016	IKM Cenrawasih

Sumber: Dinas Koperindag Kota Bukittinggi

Dari pameran yang diikuti tersebut telah membuka akses bagi UMKM dalam memperkenalkan dan memasarkan aneka produk olahannya, karena setiap ajang pameran yang mereka ikuti terjadi transaksi dengan nilai yang bervariasi.

### 2.1.3.19. Perpustakaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2012-2016 di Kota Bukittinggi tergambar pada beberapa indikator yaitu Jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan. Indikator tersebut digambarkan sebagai berikut:

#### 2.1.3.19.1. Jumlah perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Kota Bukittinggi mempunyai 1 ( satu ) Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi. Perpustakaan ini baru membuka pelayanan pengunjung mulai pada tahun 2015. Disamping itu juga terdapat 1 (satu) buah perpustakaan milik pemerintah pusat, yakni UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (PPBH). Aset tersebut murni adalah milik pemerintah pusat termasuk seluruh karyawannya. Masyarakat tidak peduli apakah sebuah perpustakaan milik pemerintah pusat atau tidak, yang penting kebutuhan dalam meningkatkan pengetahuan melalui penyaluran minat baca dapat tersalur melalui sebuah perpustakaan .

Harapan kita tentunya kebutuhan dan budaya minat baca tetap meningkat di Kota Bukittinggi. Karena hanya mempunyai 2 (dua) perpustakaan, pemenuhan minat baca masyarakat diperbanyak dengan kegiatan Pustaka Keliling dengan mobil pustaka kelilingnya. Disamping itu keberadaan Pustaka Sekolah turut mendongkrak pemenuhan minat baca bagi para siswa.

**Tabel 2.82.**  
**Jumlah Perpustakaan Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pusat)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah	*)	*)	*)	*)	100
3.	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemerintah Daerah	*)	*)	*)	*)	11
<b>TOTAL PERPUSTAKAAN (1+2)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>112</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka kota Bukittinggi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi  
\*) Data tidak tersedia

#### 2.1.3.19.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Bukittinggi hanya mempunyai 1 (satu) perpustakaan daerah yaitu Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi dan 1 (satu) perpustakaan milik Perpustakaan Nasional, yaitu Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Perpustakaan tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan minat baca bagi masyarakat Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Perpustakaan Umum Daerah kita masih dalam kondisi keterbatasan, yaitu keterbatasan koleksi dan keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu belum adanya gedung yang representatif untuk sebuah Perpustakaan Daerah. Namun Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang merupakan milik pemerintah pusat sudah sangat representatif, pada lingkungan yang asri dan nyaman, sehingga memberi ketenangan dan konsentrasi pengunjung dalam membaca lebih fokus.

Dari data yang ada dapat dilihat tingginya minat baca penduduk Kota Bukittinggi dan penduduk sekitar yang datang memenuhi kebutuhan minat bacanya. Ini berarti bahwa penduduk Kota Bukittinggi sangat tahu bahwa dengan meningkatkan minat baca akan pasti meningkatkan ilmu pengetahuan dan intelektual seseorang.

Semenjak tahun 2012, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta telah diserahkan kepada pemerintah sebagai Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Perpustakaan Nasional Bung Hatta. Pemerintah Kota Bukittinggi mulai merintis membuat perpustakaan daerah dimulai dengan persiapan dan pengelolaan sampai tahun 2014. Pada tahun 2015 baru secara resmi membuka pelayanan untuk perpustakaan daerah yang dibuka untuk umum.

**Tabel 2.83.**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	*)	*)	*)	3.750	3.801
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	*)	*)	*)	*)	*)
<b>Total pengunjung Perpustakaan (1+2)</b>		*)	*)	*)	<b>3.750</b>	<b>3.801</b>

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

\*) Data tidak tersedia

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016 jumlah pengunjung perpustakaan semakin meningkat. Hal ini seiring dengan dibukanya pelayanan pengunjung Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tahun 2015. Dengan kondisi ini diharapkan budaya minat baca (literasi) ditengah masyarakat Kota Bukittinggi semakin tumbuh meningkat.

## **B. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Fokus layanan urusan pilihan di Kota Bukittinggi dapat dilihat atas beberapa urusan yaitu pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian yang akan diuraikan berikut ini.

### **2.1.3.20. Pertanian**

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan

pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga (misalnya lebah). Perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air). Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan.

#### 2.1.3.20.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sektor pertanian tidak terlalu berperan di Kota Bukittinggi, hal ini sesuai dengan karakteristik kota yang pemanfaatan lahannya lebih mengarah kepada jasa usaha dan permukiman. Produksi pertanian di Kota Bukittinggi didominasi oleh produksi padi, ketela rambat, ketela pohon dan jagung yang merupakan bahan pangan utama lokal lainnya selain padi. Produktivitas padi Kota Bukittinggi setiap tahunnya rata-rata masih di atas 60 kw/ha. Pada tahun 2016, dengan luas area tanaman 809 ha dapat memproduksi padi sebanyak 5.227 ton atau dengan tingkat produktivitas 64,61 kw/ha. Produktivitas tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, dimana tingkat produktivitasnya 66,7 kw/ha dari hasil produksi padi 4.200 ton dengan luas area tanaman 633 ha. Perkembangan produktivitas padi Kota Bukittinggi tahun 2011 s/d 2016 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.84.**  
**Produktivitas Padi Tahun 2011 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

No	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2016	5,227	809	64,61
2.	2015	4,200	633	66,7
3.	2014	5,063	763	64,53
4.	2013	4,463	823	54,24
5.	2012	5,471	800	68,40
6.	2011	4,041	783	51,61

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2011-2016 & Dinas Pertanian

Produktivitas Jagung di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, hal ini terjadi karena penurunan luas area tanaman sehingga berdampak pada jumlah produksi tanaman Jagung. Pada tahun 2015, produktivitas tanaman jagung mencapai 67 kw/ha dari luas area tanaman seluas 50 ha dengan produksi tanaman sebanyak 104,84 ton. Pada tahun 2016 terjadi penurunan produktivitas menjadi 24,06 kw/ha dari luas area tanaman 32 ha dan jumlah produksi tanaman jagung sebanyak 77 ton. Perkembangan produktivitas jagung tahun 2011 s.d. 2016 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.85.**  
**Produktivitas Jagung Tahun 2011 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

No,	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2016	77	32	24,06
2.	2015	104,84	50	67
3.	2014	111,06	58	61,67
4.	2013	84,35	42	76,68
5.	2012	34	63	68
6.	2011	15	51	50

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2011-2015 dan Dinas Pertanian

Produktivitas Ketela Rambat di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015. Tahun 2016 produktivitas Ketela Rambat sebesar 307,95 Kw/Ha dari luas area tanaman 44 Ha dengan jumlah produksi 1.355 Ton. Sedangkan pada tahun 2015 produktivitas Ketela Rambat sebesar 245,19 Kw/Ha dari luas area tanaman seluas 39 Ha dan jumlah produksi sebanyak 907,20 Ton.

**Tabel 2.86.**  
**Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2011 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

No,	Tahun	Produksi Ketela Rambat (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2016	1,355	44	307,95
2.	2015	907,20	39	245,19
3.	2014	1324,18	48	245,19
4.	2013	1222,94	47	260,22
5.	2012	1691	51	345,10
6.	2011	807	45	146,74

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2011-2015 dan Dinas Pertanian

Produktivitas Ketela Pohon di Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d. 2016 berfluktuatif karena dipengaruhi dengan luas area tanaman Ketela Pohon tersebut. Pada tahun 2016 dengan luas area tanaman 24 Ha mampu memproduksi sebanyak 784 Ton atau dengan tingkat produktivitas 326,67 Kw/Ha. Pada tahun 2015, produktivitas Ketela Pohon mencapai 367,50 Kw/Ha dari luas area tanaman seluas 14 Ha dengan jumlah produksi sebanyak 367,50 Ton. Perkembangan produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi tahun 2011 s.d. 2016 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.87.**  
**Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2011 s.d. 2016**  
**Kota Bukittinggi**

No,	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2016	784	24	326,67
2.	2015	367,50	14	367,50
3.	2014	587,92	26	367,50
4.	2013	712,80	18	375,16
5.	2012	1048	22	419
6.	2011	461	21	271,18

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2011-2015 dan Dinas Pertanian

#### 2.1.3.20.2. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bukittinggi baik dilihat melalui atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini merupakan karakteristik sebuah kota, dimana struktur perekonomiannya tidak lagi bertopang kepada kelompok primer.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2011 masih berkontribusi sebesar 1,64%, seiring bertambahnya tahun terus tergerus sampai pada tahun 2015 hanya berkontribusi sebesar 1,36%. Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi tahun 2011 s.d. 2015 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.88.**  
**Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 s.d. 2015**

No	Kategori	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,64	1,51	1,40	1,39	1,36

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2014 dan 2015

Sejalan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan pun mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian ini hanya 1,30%, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi penurunan 0,31%, yang mana pada tahun 2011 masih berkontribusi sebesar 1,61%. Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.89.**  
**Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB**  
**Atas Dasar Harga Konstan (2010)**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No	Sub Sektor	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,61	1,48	1,38	1,35	1,30

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2106

#### 2.1.3.21. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mempunyai *multiflier effect* tinggi dalam pembangunan perekonomian. Selain berdampak positif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Dewasa ini banyak daerah yang menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk Kota Bukittinggi.

#### 2,1,3,21,1, Kunjungan Wisata

Kota Bukittinggi yang dianugerahi sang pencipta dengan pesona alam dan iklim yang sejuk serta didukung dengan pengembangan berbagai destinasi wisata telah bertopang kepada sektor ini dalam pembangunan daerahnya. Hal ini disebabkan juga karena Kota Bukittinggi tidak memiliki sumber kekayaan alam berupa pertambangan dan juga terbatasnya lahan pertanian.

Salah satu indikator guna melihat kinerja pembangunan Kota Bukittinggi di bidang pariwisata adalah kunjungan wisata. Kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Kota Bukittinggi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisata ke Kota Bukittinggi berjumlah 470.760 wisatawan yang terdiri dari 27.516 wisatawan mancanegara dan 443.244 wisatawan domestik. Meningkat 2,14% dari

tahun 2015, dimana jumlah kunjungan wisatanya sebanyak 460.905. perkembangan jumlah kunjungan wisata tahun 2011 s.d. 2016 ke Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.90.**  
**Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2012 s.d. 2016**

No.	Wisatawan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mancanegara	26.802	32.067	32.501	25.970	27.516
2.	Domestik	360.191	404.145	400.538	434.935	443.244
<b>JUMLAH</b>		<b>386.993</b>	<b>436.212</b>	<b>433.039</b>	<b>460.905</b>	<b>470.760</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam angka 2016 & Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

### 2,1,3,21,2 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi dilihat atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan keberadaan hotel dan restoran serta sarana pendukung lainnya di Kota Bukittinggi. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2016 telah mencapai 5,46% untuk PDRB atas dasar Harga Berlaku dan 4,53% untuk PDRB atas dasar Harga Konstan. Perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi kurun waktu lima tahun terakhir terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.91.**  
**Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi**  
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No	Kontribusi Sektor Pariwisata	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4,13	4,43	4,75	4,94	5,46
2.	Atas Dasar Harga Konstan	4,05	4,26	4,38	4,45	4,53

Sumber: PDRB Bukittinggi 2011-2015

### 2.1.3.22. Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan Kota Bukittinggi dalam pembangunan daerah. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi ditopang dengan keberadaan pasar simpang aur, pasar atas, dan pasar bawah. Pasar Simpang Aur Kuning merupakan pasar grosir terbesar di Sumatera sehingga pasar simpang Aur Kuning disebut juga sebagai Tanah Abang II. Hal ini menyebabkan Bukittinggi bukan saja sebagai sentral perdagangan yang berskala lokal, tapi juga regional.

#### 2.1.3.22.1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor perdagangan besar dan eceran dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB sangat dominan dimana pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 33,64% naik dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 32,75%.

**Tabel 2.92.**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**  
**Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No	Sub Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1,	Perdagangan Besar dan Eceran	32,36	32,39	32,23	32,75	33,64

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015

### 2.1.3.23. Perindustrian

Pengertian industri menurut undang-undang tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

#### 2.1.3.23.1. Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB yang dilihat melalui peranan sektor industri pengolahan mempunyai kecenderungan penurunan setiap tahunnya baik dilihat melalui atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku pada tahun 2015 sebesar 6,86%

terjadi penurunan 1,53% dalam kurun waktu lima tahun, dimana pada tahun 2011 kontribusinya masih 8,39%. Sama halnya dengan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku, kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan juga mengalami penurunan sebesar 0,68% dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Perkembangan peranan sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2011 s.d. 2015 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.93.**  
**Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB**  
**Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Industri Pengolahan	8,39	8,20	7,76	7,28	6,86

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015

\*) Angka Sementara

**Tabel 2.94.**  
**Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB**  
**Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2011	2012	2013	2014 <sup>*)</sup>	2015 <sup>*)</sup>
1.	Industri Pengolahan	8,26	8,19	7,98	7,80	7,58

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Bukittinggi Tahun 2016

\*) Angka Sementara

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek produktivitas total daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### 2.1.4.1 Produktivitas Total Daerah

Salah satu indikator yang dapat mencerminkan produktivitas total daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB sebagai ukuran produktivitas menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d. 2015 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.95.**  
**PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

N O	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014*		2015**	
		(Rp)	%								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	69.327,5	1,72	70.993,93	1,58	74.648,84	1,49	82.178,97	1,48	87.489,66	1,43
2	Pertambangan dan Penggalian	139,47	0,00	146,03	0,00	155,55	0,00	180,19	0,00	194,86	0,00
3	Industri Pengolahan	337.594,15	8,39	367.933,43	8,20	389.352,93	7,76	409.898,56	7,28	419.403,13	6,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	25.072,61	0,62	24.047,25	0,54	22.630,7	0,45	28.734,46	0,51	38.839,95	0,63
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.036,04	0,17	7.261,01	0,16	7.652,06	0,15	8.211,77	0,15	9.144,44	0,15
6	Konstruksi	256.821,79	6,38	288.407,17	6,43	330.562,35	6,59	353.907,48	6,29	388.141,23	6,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.147.706,29	32,36	1.302.724,57	32,39	1.453.493,89	32,23	1.617.180,98	32,75	1.843.230,93	33,64
8	Transportasi dan Pergudangan	403.814,94	10,79	434.328,61	10,49	470.869,05	10,78	541.005,26	10,97	617.352,39	10,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140.902,56	4,13	166.186,05	4,43	199.034,83	4,74	237.772,93	4,94	277.747,52	5,46
10	Informasi dan Komunikasi	257.482,95	7,06	284.395,72	7,18	322.384,11	6,61	331.846,55	6,60	371.189,36	5,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	208.112,60	5,86	235.902,53	5,86	266.976,32	6,15	308.688	6,17	347.132,05	6,13
12	Real Estat	146.662,69	3,64	157.439,34	3,64	176.444,95	3,52	197.955,11	3,52	219.265,82	3,58
13	Jasa Perusahaan	29.453,95	0,73	32.248,32	0,73	34.791,09	0,69	37.922,89	0,67	41.544,01	0,68
14	Administrasi	272.521,69	6,77	310.039,9	6,91	339.609,24	6,77	364.380,58	6,47	360.102,40	5,89

N O	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014*		2015**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib										
15	Jasa Pendidikan	194.524,35	4,83	215.446,8	4,80	257.329,05	5,13	295.104,65	5,24	324.925,94	5,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115.953,13	2,88	137.423,29	3,06	156.455,56	3,12	175.148,84	3,11	189.125,92	3,09
17	Jasa lainnya	146.986,57	3,65	163.734,54	3,65	192.217,92	3,83	217.786,15	3,87	238.891,06	3,91
	<b>PDRB</b>	<b>4.025.631,57</b>	<b>100,00</b>	<b>4.487.879,23</b>	<b>100,00</b>	<b>5.018.343,96</b>	<b>100,00</b>	<b>5.628.061,9</b>	<b>100,00</b>	<b>5.642.931,3</b>	<b>100,00</b>

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2015

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari tahun 2011 s.d. 2015 kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya baik dilihat berdasarkan atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan. Seiring dengan sektor primer, sektor sekunder pun terjadi penurunan kontribusi dalam pembentukan PDRB setiap tahunnya. Sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi dari tahun 2011 s.d. 2015 adalah pada sektor tersier khususnya Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan.

Perkembangan PDRB atas dasar harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 secara nominal PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi sebesar 3.819.053,61 juta rupiah, pada tahun 2015 PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka 4.872.533,23 juta rupiah. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi dari tahun 2011 s/d 2015 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.96.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015**  
**atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta)**

No	LAPANGAN USAHA	2011		2012		2013		2014*		2015**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	64.519,44	1.69	63.085,41	1.55	62.852,17	1.45	65.029,82	1.42	66.735,50	1,37
2.	Pertambangan dan Penggalian	132,40	0.003	130,38	0.003	128,67	0.003	126,47	0.003	125,80	0,07
3.	Industri Pengolahan	315.644,51	8.26	333.237,40	8.19	345.281,39	7.98	358.082,78	7.80	369.144,12	0,00

No	LAPANGAN USAHA	2011		2012		2013		2014*		2015**	
		(Rp)	%								
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	27.626,29	0.72	30.068,71	0.74	31.017,94	0.72	33.471,30	0.73	34.132,11	7,58
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.956,64	0.18	7.064,47	0.17	7.291,24	0.17	7.318,00	0.16	7.656,82	0,70
6.	Konstruksi	241.729,68	6.33	259.393,76	6.37	282.104,07	6.52	295.207,09	6.43	312.926,81	0,16
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.229.884,23	32.20	1.318.471,97	32.40	1.397.993,08	32.32	1.501.989,36	32.70	1.501.989,36	32,81
8.	Transportasi dan Pergudangan	420.251,19	11.00	445.233,46	10.94	476.307,24	11.01	507.448,07	11.05	545.167,31	11,19
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	154.809,96	4.05	173.152,35	4.26	188.882,26	4.38	203.479,56	4.45	220.500,54	4,53
10.	Informasi dan Komunikasi	279.755,23	7.33	310.289,26	7.63	326.688,81	7.55	348.117,66	7.58	376.058,61	7,72
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	222.494,84	5.83	238.504,78	5.86	260.162,30	6.02	277.515,62	6.04	288.410,49	5,92
12.	Real Estat	139.346,97	3.65	143.173,18	3.52	150.936,24	3.49	159.133,65	3.47	167.519,99	3,44
13.	Jasa Perusahaan	28.593,29	0.75	29.669,77	0.73	30.836,42	0.71	32.074,94	0.70	33.461,26	0,69
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	257.896,26	6.75	259.464,72	6.38	267.142,74	6.18	270.863,46	5.90	281.454,22	5,78
15.	Jasa Pendidikan	180.976,29	4.74	192.306,56	4.73	209.062,17	4.83	222.940,31	4.86	239.477,97	4,91
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.595,52	2.84	119.994,62	2.95	129.345,21	2.99	139.852,95	3.05	151.302,29	3,11
17.	Jasa lainnya	139.840,87	3.66	145.776,70	3.58	158.391,63	3.66	168.813,70	3.68	179.989,16	3,69
<b>PDRB</b>		<b>3.819.053,61</b>	<b>100.00</b>	<b>4.069.017,51</b>	<b>100.00</b>	<b>4.324.423,59</b>	<b>100.00</b>	<b>4.591.464,72</b>	<b>100.00</b>	<b>4.872.533,23</b>	<b>100.00</b>

\*Angka Diperbaiki

\*\*Angka Sementara

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2015

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwasanya sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka 1.501.989,36 juta rupiah atau dengan persentase sebesar 32,81%, dan diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 545.167,31 atau dengan persentase 11,19%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2011. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

#### **2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota. Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan restoran, serta ketersediaan penginapan. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

##### **2.1.4.2.1 Aksesibilitas Daerah**

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau sulitnya lokasi dicapai oleh transportasi. Tingkat aksesibilitas diantaranya ditentukan oleh ketersediaan jaringan jalan, dan jumlah alat transportasi.

Letak Kota Bukittinggi yang sangat strategis yaitu merupakan jalur lintas Sumatera dan merupakan perlintasan antar daerah di Provinsi Sumatera Barat sudah seharusnya memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi sehingga penduduk dan non penduduk yang berada di Kota Bukittinggi memperoleh kemudahan dalam mobilitasnya. Pengaturan tata guna lahan juga akan mempengaruhi tingkat aksesibilitas.

##### **2.1.4.2.2 Penataan wilayah**

Penataan Wilayah Kota secara berjenjang harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota itu sendiri.

Wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah dimulai dari perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan wilayah sampai pada pengendalian pemanfaatannya. Penataan wilayah Kota Bukittinggi diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi tahun 2010-2015 dan saat ini sedang dilakukan revisi.

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam pemanfaatan/tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti : kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman.

#### 2.1.4.2.3 Fasilitas Bank dan Non Bank

Ketersediaan dalam mendukung berjalannya roda perekonomian, fasilitas penunjang seperti keberadaan fasilitas Bank adalah suatu keharusan. Keberadaan bank ini tentunya akan memperlancar transaksi keuangan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini ditambah lagi dengan berbagai fasilitas pelayanan dan kemudahan serta keamanan yang ditawarkan dalam transaksi perbankan. Jumlah perbankan di Kota Bukittinggi sebanyak 19 unit yang terdiri dari Bank Konvensional sebanyak 10 unit, Bank Syariah sebanyak 6 unit, dan BPR Konvensional sebanyak 3 unit.

**Tabel 2.97.**  
**Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Sektor	Jumlah				
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>1,</b>	<b>Bank Umum</b>					
1,1,	Konvensional	10	10	10	10	10
1,2,	Syariah	6	6	6	6	6
<b>2,</b>	<b>BPR</b>					
2,1,	Konvensional	3	3	3	3	3
2,2,	Syariah	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

Keberadaan perusahaan asuransi di Kota Bukittinggi dalam mendukung aspek daya saing daerah cukup penting. Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, jumlah perusahaan asuransi di Kota Bukittinggi tidak mengalami perubahan, masih sebanyak 10 unit, yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian konvensional sebanyak 5 unit dan perusahaan asuransi jiwa konvensional sebanyak 5 unit.

**Tabel 2.98.**  
**Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya**  
**Kota Bukittinggi**

NO	Sektor	Jumlah				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	<b>Perusahaan Asuransi Kerugian</b>					
1.1.	Konvensional	5	5	5	5	5
1.2.	Syariah	-	-	-	-	-
2.	<b>Perusahaan Asuransi Jiwa</b>					
2.1.	Konvensional	5	5	5	5	5
2.2.	Syariah	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Sumber: Bagian Perekonomian

#### 2.1.4.2.4 Ketersediaan Restoran/Rumah Makan

Dalam menunjang keberadaan Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata perlu ditunjang oleh berbagai fasilitas penunjang, salah satunya adalah keberadaan restoran dan rumah makan. Selain guna menunjang kepariwisataan, hadirnya restoran dan rumah makan akan menambah Pendapatan Asli Daerah melalui pendapatan pajak restoran. Perkembangan jumlah restoran dan rumah makan di Kota Bukittinggi tahun 2011 s.d. 2016 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.99.**  
**Jumlah Restoran / Rumah Makan**  
**Di Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Usaha rumah makan kelas A	4	4	4	4	4	2
2.	Usaha rumah makan kelas B	2	2	2	2	2	12
3.	Usaha rumah makan kelas C	4	4	5	5	5	4
4.	Usaha rumah makan kelas D	8	8	10	10	10	11
5.	Usaha rumah makan kelas E	-	-				
6.	Jenis Usaha Restoran Non Kelas	34	38	42	42	54	41

Sumber: Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kota Bukittinggi, 2016

#### 2.1.4.2.5 Ketersediaan Penginapan

Fasilitas penting lainnya dalam mendukung kepariwisataan Kota Bukittinggi selain dari keberadaan restoran dan rumah makan adalah penginapan/hotel. Sama halnya dengan keberadaan restoran dan rumah makan, dengan hadirnya banyak penginapan / hotel di Kota Bukittinggi juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi melalui penerimaan pajak hotel. Kehadiran hotel tentu diharapkan mampu memberikan pelayanan

kepada wisatawan dengan tetap mengedepankan Sapta Pesona Pariwisata yang memenuhi kriteria nyaman, bersih, sehat, pelayanan yang cepat, tepat dan dengan suasana yang mencerminkan ciri khas daerah.

Kota Bukittinggi yang didukung dengan berbagai macam destinasi wisata dan iklim yang sejuk serta ditunjang dengan keamanan dan kenyamanan, tidak saja sebagai daerah wisata tetapi juga sering dijadikan tempat pertemuan baik skala lokal maupun nasional sehingga berdampak pada tingginya tingkat hunian penginapan/hotel.

Jumlah penginapan / hotel di Kota Bukittinggi sebanyak 66 unit yang terdiri dari 18 hotel berbintang dan 48 hotel non bintang. Jenis dan jumlah hotel di Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.100.**  
**Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel**  
**Kota Bukittinggi**

No	Jenis Penginapan / Hotel	2012			2013			2014			2015		
		Jumlah											
		Hotel	Kamar	Tempat Tidur	Hotel	Kamar	Tempat Tidur	Hotel	Kamar	Tempat Tidur	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
1.	Hotel Bintang	15	762	1,462	16	898	1,526	17	910	1,513	18	924	1,489
2.	Hotel Non Bintang (Hotel Melati dan penginapan lainnya)	45	831	1,676	47	732	1,370	50	772	1,429	48	779	1.334
3.	Total Jumlah penginapan /Hotel	60	1,593	1,138	63	1,630	2,898	67	1,682	2,942	66	1.703	2.823

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2016

#### 2.1.4.3. Iklim Berinvestasi

Dalam pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumberdaya strategis, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak dampak ganda (*multiplier effects*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju pertumbuhan investasi dan tingkat produktivitas yang dihasilkannya akan mendorong tinggi dan luasnya jangkauan dampak yang ditimbulkan.

Dalam menarik investasi ke daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah suatu kewajiban melalui peningkatan keamanan dan ketertiban, kemudahan layanan perizinan, dan sebagainya.

#### 2.1.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban

Aspek Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga menarik investasi ke daerah. Menciptakan rasa aman ditengah-tengah masyarakat akan ketertiban seluruh komponen masyarakat akan menghilangkan keengganan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah, yang pada akhirnya dengan kehadiran investor tersebut akan lebih meningkatkan roda perekonomian di daerah.

##### a. Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Perkembangan angka kriminalitas Kota Bukittinggi pada tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah wilayah hukum Polres Bukittinggi melingkupi Kota Bukittinggi dan Wilayah Agam Bagian Timur, sehingga tindak kriminalitas pada Wilayah Administratif Kota Bukittinggi tergabung juga dengan tindak kriminalitas di sebagian Wilayah Administratif Kabupaten Agam.

Angka kriminalitas Kota Bukittinggi dengan berbagai jenis tindak kriminal sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.101.**  
**Angka Kriminalitas Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Kasus Narkoba	23	26	33	25	31
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	1	0	2	2	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	21	28	19	18	6

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	148	256	240	155	162
5.	Jumlah Kasus Pencurian	159	291	445	215	283
6.	Jumlah Kasus Penipuan	35	51	55	50	40
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	1	0	0	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	387	653	794	465	522
9.	Jumlah Penduduk	113,547	114,393	118,260	120,469	123,608
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	34,08	57,08	67,14	38,60	42,23

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

## b. Kemudahan Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah kemudahan perijinan. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya terkait dengan pelayanan perizinan telah mengupayakan pendekatan dan kemudahan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja telah disusun *Standar Operating Procedur* (SOP) dan Standar Pelayanan Publik dalam Bidang Perizinan. Dengan demikian proses pelayanan perizinan sudah memiliki standar waktu dan biaya pengurusan seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.102.**  
**Lama Proses Perizinan Kota Bukittinggi**

No	Nama Izin	Dokumen Persyaratan	Lama Proses	Biaya Retribusi
1.	SITU HO/ Izin Gangguan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan</li> <li>2. KTP</li> <li>3. IMB/ Kartu Kuning Jika Bangunan Milik Pemerintah</li> <li>4. Sertifikat Hak Milik/ Surat Perjanjian Hak Sewa/ Surat Pernyataan Pemakaian Tempat</li> <li>5. Akta Notaris yang telah disahkan pejabat berbadan hukum</li> <li>6. Dokumen SPPL/UKL/ UPL</li> </ol>	12 (dua belas) hari kerja	Sesuai Perda

No	Nama Izin	Dokumen Persyaratan	Lama Proses	Biaya Retribusi
2.	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	1. Formulir Permohonan 2. KTP 3. Akta Notaris 4. NPWP	3 (tiga) hari kerja	Gratis
3.	IUI (Izin Usaha Industri)	1. Formulir Permohonan 2. KTP 3. Akta Notaris 4. NPWP	3 (tiga) hari kerja	Gratis
4.	TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	1. Formulir Permohonan 2. KTP 3. Akta Notaris 4. NPWP	3 (tiga) hari kerja	Gratis
5.	TDG (Tanda Daftar Gudang)	1. Formulir Permohonan 2. KTP 3. Izin Gangguan Gudang	3 (tiga) hari kerja	Gratis
6.	TDUWL (Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal)	1. Formulir Permohonan 2. KTP 3. Akta Notaris 4. NPWP	5 (lima) hari kerja	Gratis
7.	Izin Lembaga Kursus	1. Formulir Permohonan 2. KTP 3. Akta Notaris 4. Izin Gangguan 5. Rekomendasi	30 (tiga puluh) hari	Gratis
8.	Izin Operasional	1. Formulir Permohonan 2. KTP 3. Akta Notaris 4. Izin Gangguan 5. Rekomendasi	30 (tiga puluh) hari	Gratis
9.	Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah	1. Formulir Permohonan 2. KTP 3. Akta Notaris 4. Izin Gangguan 5. Rekomendasi	30 (tiga puluh) hari	Gratis
10.	Izin Penyelenggaraan PAUD	1. Formulir Permohonan 2. KTP 3. Akta Notaris 4. Izin Gangguan 5. Rekomendasi	30 (tiga puluh) hari	Gratis

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Bukittinggi

#### 2.1.4.3.2 Sumber Daya Manusia

Secara umum sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh suatu individu. Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci sukses dalam pembangunan daerah, dimana sumber daya manusia merupakan subjek dan objek dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Ada beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia antara lain, pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek. Kedua adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*). Ketiga adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil merupakan faktor keunggulan suatu daerah dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Terakhir, adalah pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

#### **2.1.4.3.3 Kualitas Tenaga Kerja**

Tenaga Kerja sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja saat ini relative masih rendah, salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim.

Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas.

Salah satu cara yang harus diterapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan untuk melatih seseorang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan berkarakter serta kreatif.

Kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi didasarkan pada jumlah tamatan S1, S2 dan S3 yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Secara data dapat terlihat penduduk Kota Bukittinggi dari kualitas tenaga kerja adalah tamatan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Disusul jumlah lulusan S2 namun dengan perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain, angkatan kerja pada tamatan S1, sangat terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, karena sangat terbatasnya perguruan tinggi yang mempunyai program study S2 di Kota Bukittinggi. Perkembangannya dapat kita lihat pada uraian tabel berikut :

**Tabel 2.103.**  
**Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	5.605	7.518	6.328	7.443	8.544	10.063
2.	Jumlah lulusan S2/S3	864	429	140	812	978	1.322
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	6.469	7.947	6.468	8.255	9.522	11.385
5.	Jumlah penduduk	113.903	116.075	118.260	120.491	122.621	124.715
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	5,68	6,85	5,47	6,85	7,77	9,13

Dari tabel diatas tergambar bahwa rasio lulusan S1, S2, dan S3 sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi sudah semakin meningkat dan diharapkan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang tidak hanya mempunyai ilmu akademis namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.

#### **2.1.4.3.4 Tingkat Ketergantungan**

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Penduduk muda usia dibawah 15 tahun disebut sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang

menanggungnya. Penduduk usia 65 tahun ke atas juga dianggap sudah tidak produktif lagi. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap usia produktif.

**Tabel 2.104.**  
**Rasio Ketergantungan Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2010 s.d. 2016**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	31.713	32.713	32.701	33.148	33.597	33.999	34.375
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	5.069	5.121	5.187	5.728	5.399	5.557	5.751
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	36.782	37.352	37.888	38.426	38.996	39.556	40.126
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	74.943	76.551	78.187	79.834	81.495	83.065	84.589
5.	Rasio Ketergantungan	49,08	48,79	48,46	48,13	47,85	47,62	47,44

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2016

Dari tabel di atas terlihat kecenderungan semakin berkurang rasio ketergantungan di Kota Bukittinggi selama tahun 2010-2016. Ini berarti beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan usia yang tidak produktif lagi semakin berkurang dan ini berdampak positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.

**Tabel 2.105.**  
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah**  
**terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kota Bukittinggi**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja							Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	3.598.796,76	3.819.053,61	4.069.017,51	4.325.190,59	4.592.883,72	4.884.733,0	5.196.394,9	+	Sesuai
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	3.598.796,9	4.025.631,3	4.487.879,0	5.023.308,4	5.642.931,3	6.322.459,2	7.087.355,7	+	Sesuai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja							Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
PDRB per kapita Berdasarkan Harga Konstan	32.330.718	35.453.436	39.232.112	42.476.817	46.800.061	58.470.000	66.596.400	+	Sesuai
Indeks Gini	0,29	0,33	0,31	0,37	0,34	0,34	0,34	< 0,3	Belum tercapai
<b>Kesejahteraan Sosial</b>									
<b>Pendidikan</b>									
Angka melek huruf	99,79	98,96	99,95	99,58	99,94	99,41	99,77	100	Belum Tercapai
Angka Partisipasi Murni SD/MI	112,29	100,11	111,17	100,83	159,95	121,93	124,74	110	Melampaui
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	132,38	92,61	93,97	97,78	148,34	110,30	118,20	115	Belum Tercapai
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	101,39	112,29	129,60	128,59	142,63	123,48	119,97	110	Melampaui
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	130,93	131,25	128,31	105,13	141,13	136,75	140,98	125	Melampaui
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	139,58	132,38	126,43	115,33	145,24	140,02	142,97	145	Belum Tercapai
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	200,33	130,34	126,76	129,45	142,63	165,41	169,59	135	Melampaui
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) SD/MI		1.843	1.538	1.638	2.638	2.636	2.538	+	Sesuai
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) SMP/MTs		2.023	1.453	1.497	1.586	2.660	2.846	+	Sesuai
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) SMA/MA/SMK		1.193	2.663	2.934	2.974	3.583	2.582	+	Sesuai
<b>PELAYANAN UMUM</b>									
<b>Pelayanan Urusan Wajib</b>									
<b>Pendidikan</b>									
<b>Pendidikan dasar</b>									
Angka partisipasi sekolah SD/MI	95,64	112,37	108,67	100,83	122,53	121,93	124,74	95	Melampaui
Angka partisipasi sekolah SMP/MTs	129,49	111,4	93,75	97,78	109,84	110,30	110,00	90	Melampaui
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	45,20	50,41	50,01	46,74	55,28	48,91	52,89		
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	27,55	25,37	25,17	22,92	25,85	26,13	28,74		
Rasio guru terhadap murid SD/MI	55,72	57,5	71,8	54,4	49,6	53,9	60,14		
Rasio guru terhadap murid SMP/ MTs	74,9	73,5	74,4	54,1	78,2	70,5	75,03		
<b>Pendidikan menengah</b>									
Angka partisipasi sekolah SMA/MA/SMK	1.303,38	1.267,63	1.294,53	1.426,35	1.469,90	105,50	119,66	60	Melampaui

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja							Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK	34,17	38,77	38,48	37,56	35,78	35,31	34,79		
Rasio Guru terhadap murid SMA/MA/SMK	1.292	1.205	1.287	946	961	1185	843		
<b>Kesehatan</b>									
Rasio posyandu per satuan balita	14,14	13,80	11,14	11,06	10,06	10,4	10,4	13,5	Melampaui
Rasio puskesmas per satuan penduduk	0,054	0,062	0,062	0,059	0,058	0,057	0,056	1,32	Belum Tercapai
Rasio poliklinik per satuan penduduk	0,017	0,018	0,018	0,017	0,16	0,008	0,008	1,32	Belum Tercapai
Rasio pustu per satuan penduduk	0,125	0,123	0,122	0,118	0,116	0,114	0,112	1,32	Belum Tercapai
Rasio rumah sakit persatuan penduduk	0,054	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049	0,048	0,05	Tercapai
Rasio dokter persatuan penduduk	0,054	0,053	0,052	0,051	1,76	2,15	2,11	0,030	Melampaui
Rasio tenaga medis persatuan penduduk		1,911	1,897	1,581	1,759	1,757	1,89		
<b>Lingkungan Hidup</b>									
Persentase penanganan sampah	78,49	79,27	85,15	84,95	90	-	99,99	71,8	Melampaui
Persentase RT yang mendapat akses air minum	37,188	35,91	35,37	33,80	33,12	-	31,25	59,41	Belum Tercapai
<b>Pekerjaan Umum</b>									
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,80	0,82	0,82	0,85	0,85	0,85	0,85	0,87	Belum Tercapai
Rasio jaringan irigasi	0,0015	0,0016	0,0016	0,0015	0,0016	0,0016	0,0016	0,0086	Belum Tercapai
Rasio Mesjid persatuan penduduk	0,39	0,41	0,39	0,38	0,37	0,37			
Rasio Mushalla persatuan penduduk	0,87	0,88	0,825	-	-	1,22			
Rasio Gereja Katolik persatuan penduduk	0,96	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88			
Rasio Gereja Protestan persatuan penduduk	0,63	0,62	0,61	0,59	0,58	0,57			
Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk	3,24	3,50	3,58	3,41	2,17	-	1,94	0,61	Belum Tercapai
<b>Perhubungan</b>									
Jumlah penumpang Antar Kota Dalam Provinsi	-	3.060.979	1.882.864	2.005.866	396.846	396.846	362.563	+	Belum Tercapai
Jumlah penumpang Antar Kota Antar Propinsi	-	2.907.143	928.096	514.725	284.528	284.528	177.677	+	Belum Tercapai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja							Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1	5	Belum Tercapai
Rasio ijin trayek perjumlah penduduk	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	Sesuai
Rasio uji KIR perjumlah penduduk	73,19	69,55	71,03	70,75	65,66	32,88	31,08	100	Belum Tercapai
<b>Koperasi</b>									
Persentase koperasi aktif	70,75	75,49	82,18	81,19	81,00	82,00	82,8	100	Belum Tercapai
<b>Kependudukan</b>									
Jumlah penduduk laki-laki	53.045	54.933	55.287	57.261	58.408	59.419	59.699		
Jumlah penduduk perempuan	57.467	58.636	59.128	60.999	62.083	63.202	62.089		
Rasio penduduk yang memiliki KTP	29,33	41,98	48,01	67,59	56,55	77,48	87,74	100	Belum Tercapai
<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>									
Rasio peserta KB baru	-	-	-	21,21	25,38		20,51		
Rasio peserta KB aktif	-	-	-	69,50	69,95		61,72	72,95	Belum Tercapai
Rasio keluarga pra sejahtera	-	-	-	0,0174				0,0171	Sesuai
Rasio keluarga sejahtera	-	-	-	0,119				0,171	Melampaui
<b>Penanaman Modal</b>									
Jumlah investor PMDN/PMN		-	-	12	12	12	18		
Jumlah investasi PMDN/PMN (juta rupiah)	-	-	-	-	-	7.776.595	6.985.859		
<b>Kebudayaan</b>									
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>									
Jumlah organisasi Pemuda	30	30	30	30	30	30	68		
Jumlah organisasi Olahraga	29	29	29	29	33	33	28		
Jumlah kegiatan kepemudaan	6	6	6	6	6	10	10		
Jumlah kegiatan Olahraga	8	8	9	9	11	11	4		
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja perjumlah penduduk	8,80	9,06	8,82	7,86	7,80	8,90	13,79	+	Belum Tercapai
Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	-	2,11	2,10	2,03	2,03	2,03	9,62	+	Belum Tercapai
<b>Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur</b>									
<b>Aksesibilitas Daerah</b>									

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja							Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1 : 4	1 : 3	1 : 4	1 : 3	1 : 2				
<b>Penataan Wilayah</b>									
Rasio luas Wilayah Industri per luas seluruh wilayah budi daya	-	-	-	1,48	-	-			
Rasio luas Wilayah Industri per luas seluruh wilayah budi daya	-	-	-	86,82	-	-			
Rasio jumlah pos Siskamling per kelurahan	3,41	3,41	3,54	4,08	3,38	7,33	7,33	7	Sudah Tercapai
Pertumbuhan Ekonomi		6,12	6,55	6,30	6,19	6,12	6,83	+	Sesuai
<b>Kemiskinan</b>									
Jumlah KK Miskin berdasarkan data Susenas (orang)	-	6.700	6.400	6.400	6.004	6.540			
<b>Petugas Linmas</b>									
Rasio petugas Linmas per jumlah penduduk	-	10,57	10,49	10,98	20,34	20,34	0,32	+	Tercapai
<b>Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran</b>									
Rasio jumlah mobil pemadam kebakaran per jumlah penduduk	0,0036	0,0035	0,0034	0,0033	0,0033	0,00408	0,00481		
<b>Tingkat waktu tanggap (Response Time) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)</b>									
Rasio ketepatan waktu pemadaman kebakaran per jumlah kejadian kebakaran	-	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>									
Jumlah kelompok Dasa Wisma	281	282	288	288	288	288	288	+	Sesuai
Jumlah LSM									
PKK Aktif	28	28	28	28	28	28	28		
Pos Yandu Aktif	127	128	1129	131	132	132	132	+	Sesuai
<b>Statistika</b>									
<b>Komunikasi dan Informatika</b>									
Jumlah surat kabar Nasional dan Lokal	-	26 jenis	29 jenis	29 jenis	29 jenis	29 jenis	40 Jenis		
<b>Perpustakaan</b>									
Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1	1	1	0	Melampaui
Jumlah pengunjung perpustakaan	71.226	42.194	-	-	-	3.750	3.801		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja							Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Pelayanan Urusan Pilihan</b>									
<b>Ketahanan Pangan</b>									
Ketersediaan pangan utama (angka konsumsi 123 kg/thn/org x jumlah penduduk – produksi beras x 10%)	0,92	0,99	0,86	1,01	1,48	1,50	1,53	+	Sesuai
<b>Pertanian</b>									
<b>Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar</b>									
Produktivitas Padi (Ton/Ha)	53,97	51,61	68,40	54,24	64,53	67,29	64,61		
Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	42,13	50	68	76,68	61,67	67	24,06		
Produktivitas Ketela Rambat (Ton/Ha)	140,00	146,74	345,10	260,22	245,19	245,19	307,95		
Produktivitas Ketela pohon (Ton/Ha)		271,18	419	375,16	367,50	367,50	326,67		
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010	1,80	1,72	1,58	1,49	1,48	1,39	1,36		
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010	1,80	1,69	1,55	1,45	1,42	1,35	1,30		
<b>Pariwisata</b>									
Jumlah kunjungan wisata	326.413	358.875	386.993	436.212	433.039	460.905	470.760	+	Sesuai
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		4,13	4,43	4,75	4,94	5,23	5,46	+	Sesuai
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan		4,05	4,26	4,38	4,45	4,59	4,53	+	Sesuai
<b>Perdagangan</b>									
Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010	31,89	32,36	32,39	32,19	32,68	33,64	32,98	+	Sesuai
Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Atas Dasa (HK) Tahun Dasar 2010	17,36	17,42	17,53	17,78	17,78			+	Sesuai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja							Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Perindustrian</b>									
Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2000	10,01	9,51	9,08	8,66	8,66	6,86			
Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000	10,22	9,94	9,69	9,43	9,43	7,58			
<b>DAYA SAING DAERAH</b>									
<b>Kemampuan Ekonomi</b>									
<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>									
<b>Produktivitas total daerah</b>									
<b>Fasilitas Bank dan Non Bank</b>									
Jenis dan jumlah Bank	16	16	16	16	16	16	19	16	Sesuai
Jumlah Bank Umum Konvensional	10	10	10	10	10	10	10	10	
Jumlah Bank Umum Syariah	6	6	6	6	6	6	6	6	
Jenis dan jumlah Perusahaan Asuransi	10	10	10	10	10	10	10	10	Sesuai
Jumlah Perusahaan Asuransi Kerugian Konvensional	5	5	5	5	5	5	5	5	
Jumlah Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional	5	5	5	5	5	5	5	5	
<b>Ketersediaan jumlah Restoran/ Rumah Makan</b>									
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas A	-	4	4	4	4	4	2		
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas B	-	2	2	2	2	2	12		
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas C	-	4	4	5	5	5	4		
Jumlah Usaha Rumah Makan Kelas D	-	8	8	10	10	10	11		
Jumlah Usaha Rumah Makan Non Kelas	-	34	38	42	42	54	41		
<b>Ketersediaan Penginapan</b>									
Jumlah hotel	57	57	60	63	67	66		58	Melampaui

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja							Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Jumlah hotel bintang	14	15	15	15	15	18	18		
Jumlah hotel non bintang	43	42	45	47	50	48	48		
Jumlah kamar hotel bintang	748	763	762	898	910	924	924		
Jumlah kamar hotel non bintang	618	616	831	732	772	779	779		
Jumlah tempat tidur hotel bintang	1.499	1.529	1.462	1.526	1.513	1.489	1.489		
Jumlah tempat tidur hotel non bintang	1.252	1.198	1.676	1.370	1.429	1.334	1.334		
<b>Iklim Berinvestasi</b>									
<b>Keamanan dan Ketertiban</b>									
Angka Kriminalitas yang tertangani	45,82	50,45	84,16	88,02				+	Sesuai
Jumlah Demonstrasi	4	0	0	2	0	0		-	Sesuai
<b>Sumber Daya Manusia</b>									
<b>Kualitas Tenaga Kerja</b>									
Rasio lulusan S1/S2/S3 per jumlah penduduk	729,264	5,68	6,85	5,47	6,85	7,77	9,13	1.278	Belum tercapai
Rasio ketergantungan (jumlah penduduk usia tidak produktif/jumlah penduduk usia produktif)	51,26	51,26	51,24	48,16	47,90	47,62	47,44	45	Melebihi

## 2.2. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

Perkembangan kondisi umum perekonomian merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Gambaran perkembangan kondisi ekonomi makro ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam pengelolaan ekonomi secara efisien dan efektif. Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung adalah merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran, dan IPM yang semuanya akan diuraikan di bawah ini:

**Tabel 2.106.**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2013 s.d. 2017**

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Proyeksi	
		Tahun			Tahun	
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (juta rupiah) tahun dasar 2010	5.023.308,47	5.642.931,11	6.322.459,2	7.087.355,7	7.948,7
2.	PDRB atas dasar Harga Konstan (juta rupiah)	4.325.190,59	4.592.883,72	4.884.733,0	5.196.394,9	5.549,7
3.	PDRB Perkapita berdasarkan Harga Berlaku tahun dasar 2010 (juta rupiah)	42,476	46,800	51,428	56,588	63,526
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun dasar 2010 (%)	6,30	6,19	6,35	6,38	6,8
5.	Tingkat Inflasi (%)	7,43	9,24	6,50	6,24	5,99
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,72	3,93	3,84	2,91	3,62
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	77,67	78,02	78,50	78,98	79,47

Sumber: Data tahun 2013 s/d 2015 dari BPS Kota Bukittinggi, Bappeda Propinsi Sumbar  
Data tahun 2016 dan 2017 hasil proyeksi dari Bappeda

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** mencerminkan output yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bukittinggi pada tahun 2014 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu Rp. 5.642.931,11,- dari Rp. 5.023.308,47,- pada tahun 2013, atau naik sebesar Rp. 619.622,64,-. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup besar, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat.

Produktivitas ekonomi riil Kota Bukittinggi berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pada tahun 2014 nilai tambah yang tercipta adalah sebesar Rp. 4.592.883,72,- sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.325.190,59,- atau naik sebesar Rp. 267.693,13,-. Dengan kata lain, perekonomian Kota Bukittinggi pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 6,19 persen (angka sementara).

**Tingkat pertumbuhan ekonomi** Kota Bukittinggi pada tahun 2014 yang sebesar 6,19% ini menurun dari tahun sebelumnya (6,30%). Pada tahun 2014 tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor Pertanian, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan yang negatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang positif seperti Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang merupakan salah satu potensi unggulan Kota Bukittinggi.

Ditinjau dari peranan sektor ekonomi dalam struktur PDRB, Jika dilihat dari peranan sektor ekonomi dalam struktur PDRB, maka akan terlihat bahwa pada tahun 2014 polanya masih tetap sama dengan tahun 2013 dimana pergeseran struktur yang terjadi tidak terlalu mendasar. Dalam struktur perekonomian Kota Bukittinggi, peran terbesar tetap ditempati oleh lima sektor utama yaitu sektor Jasa-Jasa (25,37%), sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (22,9%), sektor Angkutan dan Komunikasi (21,51%), sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (11,82%), serta sektor Industri Pengolahan (9,56%). Secara umum dapat dikatakan produktivitas ekonomi Kota Bukittinggi terletak pada kelompok sektor tersier yang menjadi tulang punggung perekonomian kota sebesar 81,6% seperti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, sedangkan sisanya berada pada sektor-sektor primer dan sekunder.

**Pendapatan perkapita** adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan domestik suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Selama 4 (empat) tahun terakhir, sejak tahun 2013, pendapatan perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dan sekaligus relatif rendahnya pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita Kota Bukittinggi tahun 2014 mencapai Rp. 46.800.000,- atau naik sebesar 1,10% dari tahun sebelumnya yaitu setara dengan nominal Rp. 42.476.000,-. Akan tetapi setelah dikeluarkan penyusutan dan pajak tak langsung dari total PDRB, maka diperoleh Pendapatan Regional Perkapita sebesar Rp. 46.800.000,- pada tahun 2014.

**Laju inflasi** merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 7,43 persen menjadi 9,24 persen atau dengan kata lain terjadi peningkatan sebesar 1,81 persen.

**Tabel 2.107.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

TPT	2011	2012	2013	2014	2015
	( % )				
Kota Bukittinggi	9,10	6,93	4,72	3,93	6,04
Provinsi Sumatera Barat	6,45	6,52	7,02	6,50	6,89

*Sumber : Bappeda Provinsi Sumbar, 2016*

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pada Tahun 2011 TPT Kota Bukittinggi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,95%. Angka pada tahun 2011 yang sebesar 9,10% menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat 9 orang pengangguran. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

**Tabel 2.108.**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi,**  
**Provinsi Sumatera Barat dan Nasional**  
**Tahun 2011 s.d. 2016**

IPM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	( % )					
Kota Bukittinggi	76,30	76,92	77,67	78,02	78,72	78,98
Provinsi Sumbar	67,81	67,76	68,91	69,36	69,98	70,73
Indonesia	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18

Sumber : BPS Provinsi Sumbar 2016

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selama kurun waktu 2011-2016, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Indonesia dan selama kurun waktu 2011-2016 nilai IPM Kota Bukittinggi selalu meningkat dan di atas rata-rata Provinsi dan Nasional.

## 2.2. Analisis Keuangan Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal, maka dukungan pendanaan daerah dan penetapan anggaran belanja daerah harus disusun secara terukur dalam bentuk input dan output yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah.

## 1. Analisis dan Perhitungan Penerimaan Daerah

- a. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi;
- b. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kota Bukittinggi;
- c. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah;
- d. Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi;
- e. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah;
- f. Proyeksi Pendapatan Kota Bukittinggi;
- g. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah;
- h. Proyeksi / Target Penerimaan Kota Bukittinggi.

## 2. Penghitungan Pengeluaran Daerah

- a. Penghitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi;
- b. Penghitungan Kebutuhan Belanja Langsung Wajib/Mengikat dan Prioritas Kota Bukittinggi.

Sumber utama pembiayaan pembangunan daerah adalah berasal dari Pendapatan Daerah. Kebijakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan lebih lanjut diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta menggunakan data-data tahun sebelumnya dan tahun berjalan, proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan tahun 2017 diproyeksikan sekitar Rp. 719.369.989.864,00 dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 113.756.953.864,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 577.015.505.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 28.597.531.000,00

Perkembangan pendapatan daerah Kota Bukittinggi menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tabel dibawah ini dapat dilihat proyeksi pendapatan daerah Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Perubahan tahun 2017, sebagai berikut:

**Tabel 2.109.**  
**Evaluasi / Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah**  
**RKPD Tahun 2017 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	Proyeksi Perubahan Tahun 2017 (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>719.369.989.864,00</b>	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	113.756.953.864,00	
	Pajak Daerah	46.068.135.193,00	
	Retribusi Daerah	36.468.949.414,00	
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	3.448.620.797,00	
	Lain-Lain PAD yang sah	27.771.248.460,00	
1.2.	Dana Perimbangan	577.015.505.000,00	
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	17.789.622.000,00	
	Dana Alokasi Umum	458.968.482.000,00	
	Dana Alokasi Khusus	100.257.401.000,00	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.597.531.000,00	
	Hibah	0	
	Dana Darurat	0	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.097.531.000,00	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	
	<b>Total Pendapatan (a)</b>	<b>719.369.989.864,00</b>	
2	<b>Pencairan Dana Cadangan (b)</b>	0	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	81.135.585.091,18	
	Saldo kas neraca daerah	78.466.657.397,50	
	Dikurangi:		
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	2.780.376.220,00	
	Kegiatan lanjutan	0	
	<b>Jumlah (c)</b>	<b>75.686.281.177,50</b>	
	<b>Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)</b>	<b>795,056.271.041,50</b>	

Sumber: Hasil Analisis, 2017

### 2.2.3.1. Analisis dan Perhitungan Penerimaan Daerah

#### 1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi

Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis pengelompokan, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Peningkatan PAD Kota Bukittinggi pada Tahun 2017 antara lain diproyeksi dari:

- 1) Pajak hotel, khususnya Hotel Bintang IV dan III yang telah memiliki Manajemen pengelolaan yang baik, serta Hotel Bintang I dan Hotel Melati yang telah mempunyai kesadaran untuk melaporkan tingkat huniannya kepada DPKAD serta rutinnya Tim gabungan dan Tim Intensifikasi turun kelapangan untuk melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel yang ada di Kota Bukittinggi.
  - 2) Pajak Restoran/Rumah Makan, karena setiap rumah makan dan restoran yang ada di Kota Bukittinggi telah diterapkan pemungutan pajak dengan memakai sistem Bill secara utuh.
  - 3) Pajak Penerangan Jalan, hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan bangunan/rumah baru cukup pesat yang tentunya akan menambah langganan baru PT. PLN, yang implikasinya tentu akan menambah Pajak Penerangan Jalan.
  - 4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, karena tingkat transaksi yang cukup signifikan selama ini terjadi.
  - 5) Perubahan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui kenaikan Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan pemberian stimulus secara bertahap.
  - 6) Retribusi Daerah, secara umum juga terjadi peningkatan dari tahun ketahun seiring dengan seringnya dilakukan pengawasan oleh Tim Gabungan serta tingkat disiplin dari aparat yang melakukan pemungutan retribusi yang mempunyai tanggungjawab cukup baik.
- b. Dana Perimbangan, meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Penerimaan Dana Perimbangan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, baik yang berasal dari DAU, DAK, sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung berfluktuasi.

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, juga dari tahun ketahun terjadi peningkatan.

Pendapatan daerah merupakan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut sebagai penyumbang yang besar terhadap pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan dengan rata-rata hampir mencapai 10%, hal ini terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi.

Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih kecil, yaitu rata-rata sekitar 7,58%, hal ini disebabkan karena luas wilayah Kota Bukittinggi kecil hanya 0,06% dari luas Propinsi Sumatera Barat, sehingga beberapa potensi pajak seperti; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah bila dibandingkan dengan daerah tetangga masih jauh kecil penerimaannya, namun kontribusi dibidang pajak lainnya serta dari retribusi daerah diharapkan dari tahun ketahun tingkat kemandirian Pemerintah Kota Bukittinggi terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kecendrungan peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, kontribusinya terhadap pendapatan daerah rata-rata sekitar 41,33%, hal ini disebabkan karena masih berfluktuasinya pendapatan tersebut diterima oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Badan Keuangan Kota Bukittinggi selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang mengkoordinir pendapatan daerah dan SKPD terkait lainnya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Melakukan intensifikasi pendapatan asli daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, melalui:
  - 1) Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengirim aparatur mengikuti Kursus Keuangan Daerah serta program-program diklat yang berkaitan dengan pendapatan daerah;

- 2) Mengadakan Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat dan wajib pajak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah baik melalui media cetak dan elektronik;
  - 3) Menjaring wajib pajak dan retribusi baru melalui pendataan secara berkala;
  - 4) Melakukan rapat-rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi dengan SKPD pengelola PAD dan kolektor PBB-P2;
  - 5) Uji petik potensi pajak/retribusi daerah;
  - 6) Penggunaan teknologi informasi dalam rangka pengendalian PAD;
  - 7) Membuat baliho dan spanduk, menghimbau masyarakat untuk membayar pajak dengan bekerjasama dengan pihak KPP Pratama Kota Bukittinggi melakukan *canvassing*;
  - 8) Melakukan penataan personil dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Merevisi Peraturan Daerah yang menyangkut penambahan obyek pajaknya daerah/ retribusi daerah dan atau kenaikan tarif pajak daerah/retribusi daerah.
  - c. Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah diubah dengan *self assessment system*. Salah satu pertimbangan penerapan *self assessment system* adalah untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - d. Meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.
  - e. Secara proaktif berupaya mendapatkan informasi kebijakan tentang pengalokasian dana/program/kegiatan dari APBN dan APBD Provinsi serta Lembaga pemerintah Non Departemen, baik dalam rangka realisasi dana perimbangan maupun penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  - f. Mengembangkan strategi kreatif untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan cara optimalisasi manajemen kas daerah tanpa mengganggu substansi proses pembangunan.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

**Tabel 2.110.**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>595.424.983.587,00</b>	<b>593.323.296.014,34</b>	<b>647.045.711.855,85</b>	<b>4,24</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>61.613.681.043,00</b>	<b>66.027.359.716,34</b>	<b>71.303.771.735,85</b>	<b>7,58</b>
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	27.314.135.978,00	29.002.139.678,00	30.709.690.231,00	6,03
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	18.043.436.304,00	17.031.261.904,00	21.070.502.562,00	8,06
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.452.740.700,00	3.884.306.585,00	4.636.543.697,00	15,88
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.803.368.061,00	16.109.651.549,34	14.887.035.245,85	7,83
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>452.713.545.419,00</b>	<b>449.872.722.059,00</b>	<b>547.829.867.933,00</b>	<b>10,00</b>
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.279.128.419,00	12.555.527.059,00	15.128.297.227,00	-0,49
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	404.285.567.000,00	408.640.651.000,00	458.968.482.000,00	6,55
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	33.148.850.000,00	28.676.544.000,00	73.733.088.706,00	49,14
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>81.097.757.125,00</b>	<b>77.423.214.239,00</b>	<b>27.912.072.187,00</b>	<b>-41,33</b>
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.263.679.125,00	21.308.056.239,00	22.912.072.187,00	15,20
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	61.623.658.000,00	52.991.158.000,00	5.000.000.000,00	-71,52
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	2.210.420.000,00	3.124.000.000,00	-	-100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2017

## 2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kota Bukittinggi.

Belanja tidak langsung yang terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik. Dari lima komponen belanja yang ada pada Pemerintah Kota Bukittinggi, berdasarkan rata-rata realisasi tahun 2014 s/d tahun 2016, belanja Hibah merupakan pengeluaran yang cukup besar yaitu sekitar 92,41% diserap dari belanja tidak langsung, Belanja Pegawai sekitar 90,31%, Belanja Bansos sekitar 72,75%, Belanja Bantuan Keuangan sekitar 76,80%, dan Belanja Tidak Terduga sekitar 0%.

Belanja Hibah, rata-rata realisasinya sekitar 92,41%, hal ini disebabkan dari daftar penerima Hibah yang telah ditetapkan dengan keputusan walikota, masih ada kelompok masyarakat, Organisasi kemasyarakatan yang tidak mencairkan/merealisasikan dana hibahnya dikarenakan masih adanya persyaratan yang belum terpenuhi atau setelah

dilakukan verifikasi oleh SKPD Monev tidak direkomendasikan untuk dicairkan disebabkan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, seperti harus terdaftar di Kesbangpol, memiliki kesekretariatan yang jelas, kedepannya agar realisasinya dapat mencapai 100% setiap penerima hibah yang direkomendasikan oleh SKPD Monev, secara persyaratan telah terpenuhi hendaknya.

Belanja Pegawai, rata-rata realisasinya sekitar 90,31%, hal ini disebabkan karena alokasi dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tunjangan Penghasilan Guru PNSD yang dialokasi melalui dana transfer tidak sebanding dengan jumlah guru di kota Bukittinggi. Sehingga hal tersebut selalu menyisakan Silpa yang cukup besar pada Belanja Pegawai.

Belanja Bantuan Sosial, rata-rata realisasinya sekitar 72,75%, hal disebabkan dari daftar penerima Bantuan Sosial yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, pada umum telah terealisasi, namun Bantuan Sosial yang tidak direncanakan yang telah dianggarkan tidak dicairkan/direalisasikan dikarenakan Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan hanya dapat direalisasikan apabila ada terjadi resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD.

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa atau Partai Politik, rata-rata realisasinya sekitar 76,80%, hal disebabkan bantuan tersebut diberikan Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Partai Politik yang mempunyai perwakilan di DPRD Kota Bukittinggi. Pada tahun 2014 bantuan tersebut terealisasi 80,70%, sedangkan untuk tahun 2016 hanya terealisasi hanya 82,87%, hal ini disebabkan ada Partai Politik yang tidak merealisasikan bantuan tersebut dikarenakan adanya konflik internal yang terjadi pada Partai Politik tersebut.

Belanja Tidak Terduga, realisasinya hanya 0%, hal ini disebabkan belanja tidak terduga dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencanaalam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Belanja tidak terduga dianggarkan dalam APBD untuk mengantisipasi sebagaimana tersebut diatas, dan proses penggunaanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

**Tabel 2.111.**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah**  
**Kota Bukittinggi**

NO	URAIAN	2013	2014			2015			2016					
		Realisasi	Anggaran	Realisasi			Anggaran	Realisasi			Anggaran	Realisasi		
				Rp	%	% Kenaikan		Rp	%	% Kenaikan		Rp	%	% Kenaikan
2.	<b>BELANJA</b>	504.110.258.150	641.272.623.132	542.050.414.973,83	84,53	1,08	686.497.094.334,48	579.515.283.167,49	84,42	1,07	740.530.417.595,22	631.173.276.618,00	85,23	1,09
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	292.653.417.491	361.045.093.853	323.519.471.680,00	89,61	1,11	387.158.159.985,48	339.899.689.457,00	87,79	1,05	369.112.321.364,22	349.010.851.917,00	94,55	1,03
2.1.1	Belanja Pegawai	284.139.179.620	336.743.703.072	301.399.665.287,00	89,50	1,06	366.394.913.067,48	322.784.474.843,00	88,10	1,07	352.495.800.801,22	336.101.758.265,00	95,35	1,04
2.1.2	Belanja Bunga													
2.1.3	Belanja Hibah	4.406.252.136	19.614.840.000	18.619.220.084,00	94,92	4,23	18.106.524.820,00	15.881.006.950,00	87,71	0,85	11.694.321.895,00	11.063.426.045,00	94,61	0,70
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.594.680.177	3.249.036.000	3.056.759.036,00	94,08	0,85	1.238.903.430,00	821.266.538,00	66,29	0,27	2.304.380.000,00	1.333.685.699,00	57,88	1,62
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	501.521.298	549.978.536	443.827.273,00	80,70	0,88	617.818.668,00	412.941.126,00	66,84	0,93	617.818.668,00	511.981.908,00	82,87	1,24
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	11.784.260	887.536.245	-	-	-	800.000.000,00	-	0,00	-	2.000.000.000,00	-	0,00	-
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	211.456.840.659	280.227.529.279	218.530.943.293,83	77,98	1,03	299.338.934.349,00	239.615.593.710,49	80,05	1,10	371.418.096.231,00	282.162.424.701,00	75,97	1,18
2.2.1	Belanja Pegawai	45.311.233.704	47.027.483.450	40.703.304.450,00	86,55	0,90	52.041.550.250,00	45.063.994.971,00	86,59	1,11	55.285.208.090,00	49.860.243.789,00	90,19	1,11
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.852.281.672	132.516.098.372	101.276.088.207,83	76,43	1,13	157.376.580.589,00	125.376.686.163,49	79,67	1,24	188.585.992.083,00	151.375.611.821,00	80,27	1,21
2.2.3	Belanja Modal	76.293.325.283	100.683.947.457	76.551.550.636,00	76,03	1,00	89.920.803.510,00	69.174.912.576,00	76,93	0,90	127.546.896.058,00	80.926.569.091,00	63,45	1,17

Sumber : Hasil Analisis, 2017

### 3. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika terjadi peningkatan belanja modal berarti akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika terjadi pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika terjadi penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

#### A. Kas

Kas yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2016 berjumlah Rp 80.673.244.604,18 Kas tersebut adalah merupakan rekening BUD Kota Bukittinggi yang terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah;

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sisa Kas di Kas Daerah Kota Bukittinggi menurut pencatatan Badan Keuangan selaku SKPKD (BUD) adalah sebesar Rp 78.466.657.397,50

2. Kas dibendahara penerimaan;

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Rp. 1.070.000,00

3. Kas di Bendahara Pengeluaran;

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Rp. 1.070.000,00

4. Kas di BLUD;

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Rp.0

5. Kas Lainnya;

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Rp.1.096.558.681,00

6. Setara Kas;

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Rp. 1.011.632.829,68

## **B. Piutang**

Nilai Piutang Daerah per 31 Desember 2014 yang lalu adalah Rp. Rp.19.904.482,562. Selama Tahun Anggaran 2014 terdapat mutasi bersih piutang sebesar Rp13.790.769.021,59 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2015 menjadi Rp.6.113.713.549,41 yang terdiri dari Piutang Pajak Rp.5.639.696.354,95, Piutang Retribusi sebesar Rp. 390.814.729,- Piutang Pendapatan Lainnya Rp. 30.163.101,46 dan Piutang Lainnya sebesar Rp. 53.039.364,-.

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintah pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengemukakan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan utang tak tertagih tidak bersifat kumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis / karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilaikualitas piutang.

Piutang terdiri dari piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah dan piutang lainnya.

## **C. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan *Stock Opname*-perhitungan fisik persediaan yang telah dilakukan untuk posisi tanggal 31 Desember 2016 terdapat nilai Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp.4.930.175.495,00

Seperti tahun-tahun sebelumnya, *stock opname* persediaan Tahun 2016, telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2016. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **A. INVESTASI JANGKA PENDEK**

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Pemerintah Kota Bukittinggi hingga Tahun 2016 tidak memiliki investasi jangka pendek.

#### **B. INVESTASI JANGKA PANJANG**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 bernilai Rp. 48.226.919.336,88

#### **C. ASET TETAP**

Nilai Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2015 lalu adalah Rp. 1.216.951.312.750,60 Pada tahun 2016 aset tetap tersebut mengalami mutasi bersih sebesar Rp. 542.395.651,35 sehingga saldo akhir tahun 2016 adalah Rp. 1.216.408.917.099,25 Uraian Aset Tetap berikut mutasinya adalah sebagai berikut:

##### **1. Tanah**

Nilai tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2015 lalu adalah Rp. 510.559.945.477,00 Pada tahun 2016 Tanah tersebut mengalami mutasi bersih sebesar Rp. 40.489.605.000,00 sehingga saldo akhir tahun 2016 tanah adalah Rp. 470.070.340.477,00

##### **2. Peralatan dan Mesin**

Nilai peralatan dan mesin pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2015 lalu adalah Rp. 182.629.812.609,77 Pada tahun 2016 Tanah tersebut mengalami mutasi bersih sebesar Rp. 13.872.852.877,83 sehingga saldo akhir tahun 2016 tanah adalah Rp. 196.502.665.487,60

### **3. Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2015 yang lalu adalah sebesar Rp. 701.876.690.710,19 Selama tahun 2016 terdapat mutasi bersih sebesar Rp. 48.346.354.441,32 sehingga nilai seluruh Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 adalah Rp. 653.530.336.268,87

### **4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2015 yang lalu adalah Rp. 432.796.508.953,88 Selama tahun 2016 terdapat mutasi bersih sebesar Rp. 36.978.192.627 sehingga nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 menjadi Rp. 469.774.701.580,88

### **5. Aset Tetap Lainnya**

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2015 yang lalu adalah yakni Rp. 20.021.649.448,80 Selama Tahun 2016 terdapat mutasi bersih sebesar Rp. 2.467.970.492,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 17.553.678.956,80

### **6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp. 29.972.037.727,00 yakni terdapat mutasi bersih sebesar Rp.16.844.214.004,00 dari saldo akhir Tahun 2016 yang lalu sebesar Rp.13.127.823.723,00

### **7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp. (660.905.332.176,04),- Saldo akhir Tahun 2016 yang lalu sebesar Rp. (694.150.629.394,90)

## **D. ASET LAINNYA**

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2015 yang lalu adalah Rp. 31.864.160.227,90 terdapat mutasi bersih sebesar Rp. 113.477.816.639,10 Sehingga nilai Aset Lainnya Pemko Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 145.341.976.867,00

## **E. ASET DANA CADANGAN**

Pada Tahun 2013 yang lalu Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembentukan Dana Cadangan dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. Selanjutnya pada tahun 2015 dilakukan revisi Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2013 menjadi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan dana cadangan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi.

Peraturan Daerah sebagaimana di atas ditindaklanjuti kemudian dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-350-2013 tentang Pembukaan Rekening Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kota Bukittinggi tanggal 30 Desember 2013 dengan nomor rekening BPD 0200.0101.00344-2.

Sampai dengan Tahun 2016 telah dilakukan 3 tahap Pembentukan Dana Cadangan yaitu :

1. Pada Tahun 2013 yang lalu berdasarkan kedua peraturan tersebut dipindahkan dana dari kas daerah ke rekening Dana Cadangan (0200.0101.00344-2) pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nominal sebesar Rp.15.000.000.000,00 pada tanggal 31 Desember 2013. Pemindahan rekening tersebut atas permintaan Kepala DPKAD melalui surat Nomor : 970.2164a/DPKAD.04/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Pemindahan Rekening. Pembentukan dana cadangan dianggarkan sebesar Rp.15.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100% dari yang dianggarkan dan terdapat jasa giro dana cadangan sebesar Rp.410.958,00. Jasa giro dana cadangan tersebut diakui langsung sebagai penambah dana cadangan, sehingga nilai aset dana cadangan Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2013 yang lalu adalah Rp.15.000.410.958,00.
2. Berdasarkan Persetujuan Walikota atas Telaahan Staf Kepala DPKAD Nomor 950.1709/DPKAD.04/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Persetujuan untuk melakukan pemindahbukuan dana cadangan, maka pada tanggal 23 Oktober 2014 telah dilakukan pemindahbukuan ke rekening Dana Cadangan (0200.0101.00344-2) pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nominal sebesar Rp10.000.000.000,00;
3. Berdasarkan Persetujuan Walikota atas Telaahan Staf Kepala DPKAD Nomor 950.1952/DPKAD.04/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Persetujuan pemindahbukuan dana cadangan ke rekening Dana Cadangan Pemerintah Kota

Bukittinggi, maka pada tanggal 31 Desember 2014 telah dilakukan pemindahbukuan ke rekening Dana Cadangan (0200.0101.00344-2) pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nominal sebesar Rp.15.000.000.000,00;

4. Selama Tahun 2014 rekening Dana Cadangan tersebut menghasilkan jasa giro sebesar Rp Rp172.361.065,00;
5. Berdasarkan Persetujuan Walikota atas Telaahan Staf Kepala DPKAD Nomor 950.1396/DPKAD.04/2015 tanggal 19 Oktober 2014 perihal persetujuan pemindahbukuan dana cadangan ke rekening Dana Cadangan Pemerintah Kota Bukittinggi, maka dilakukan pemindahbukuan ke rekening Dana Cadangan (0200.0101.00344-2) pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nominal sebesar Rp.15.000.000.000.00,-;
6. Selama Tahun 2015 rekening Dana Cadangan Tersebut menghasilkan jasa giro sebesar Rp.405.217.060,00.
7. Berdasarkan porsi kepemilikan saham Pemerintah Kota Bukittinggi posisi 31 Desember 2016 sebesar 2,38%, maka jumlah tambahan modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 11.638.000.000,-

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah paragraf pengeluaran pembiayaan, maka seluruh jasa giro ditambahkan sebagai Dana Cadangan. Dengan demikian sampai dengan 31 Desember 2015 rekening Dana Cadangan Pemerintah Kota Bukittinggi menurut pencatatan BUD adalah sebesar Rp.55.577.898.083,00.

## **F. KEWAJIBAN**

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Bukittinggi. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Kota Bukittinggi per 31 Desember 2015 Rp. 2.919.583.554,91 dan selama tahun 2016 terdapat mutasi kewajiban sebesar Rp. 98.478.409,91 sehingga saldo kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 2.821.105.145,00

## G. EKUITAS DANA

Ekuitas merupakan kekayaan daerah bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pada Neraca Pemko Bukittinggi per 31 Desember 2016 terdapat ekuitas sebesar Rp. 1.485.062.072.381,50

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

**Tabel 2.112.**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah**

URAIAN	2014	2015	2016	Rata-rata pertumbuhan (%)
<b>ASET</b>	<b>2.035.683.171.614,95</b>	<b>1.443.534.285.031,71</b>	<b>1.487.883.177.526,50</b>	<b>-14,51</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>125.893.872.600,73</b>	<b>103.480.554.692,96</b>	<b>96.684.707.319,37</b>	<b>-12,37</b>
Kas/setara Kas	99.940.404.399,48	89.800.709.153,33	80.673.234.604,18	<b>-10,15</b>
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00	
Piutang Pendapatan	19.904.482.562,00	17.924.439.514,00	21.639.316.102,00	<b>4,27</b>
Piutang Lainnya		1.115.001.745,00	1.142.346.707,00	
Penyisihan Piutang		(10.596.064.593,09)	(11.703.648.571,81)	
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00	
Persediaan	6.048.985.639,25	5.236.468.873,72	4.933.458.478,00	<b>-9,69</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>26.511.210.495,25</b>	<b>35.660.268.277,25</b>	<b>48.226.919.336,88</b>	<b>34,87</b>
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	757.651.221,45	995.485.412,45	818.512.040,40	<b>3,94</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen	25.753.559.273,80	34.664.782.864,80	47.408.407.296,48	<b>35,68</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>1.803.735.892.058,97</b>	<b>1.216.951.312.750,60</b>	<b>1.126.408.917.099,25</b>	<b>-20,98</b>
Tanah	508.370.855.477,00	510.559.945.477,00	470.070.340.477,00	<b>-3,84</b>
Peralatan dan Mesin	.735.157.071,00	182.629.812.609,77	196.502.665.487,60	<b>9,55</b>
Gedung dan Bangunan	673.969.357.697,08	701.876.690.710,19	653.530.336.268,87	<b>-1,53</b>
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	414.098.020.595,89	432.796.508.953,88	469.774.701.580,88	<b>6,51</b>
Aset Tetap Lainnya	22.746.507.886,00	20.021.649.448,80	17.553.678.956,80	<b>-12,15</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.815.993.332,00	29.972.037.727,00	13.127.823.723,00	<b>-20,59</b>
Akumulasi Penyusutan		(660.905.332.176,04)	(694.150.629.394,90)	
<b>DANA CADANGAN</b>	<b>40.172.772.023,00</b>	<b>55.577.989.083,00</b>	<b>71.220.656.904,00</b>	<b>33,15</b>
Dana Cadangan	40.172.772.023,00	55.577.989.083,00	71.220.656.904,00	<b>33,15</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>39.369.424.437,00</b>	<b>31.864.160.227,90</b>	<b>145.341.976.867,00</b>	<b>92,14</b>
Tagihan Jangka Panjang		89.824.928,00	83.824.928,00	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00	
Aset Tidak Berwujud		2.485.862.479,00	1.954.053.597,00	
Aset Lain-lain	39.369.424.437,00	29.288.472.820,90	143.304.098.342,00	<b>90,79</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.035.683.171.614,95</b>	<b>1.443.534.285.031,71</b>	<b>1.487.883.177.526,50</b>	<b>-14,51</b>

URAIAN	2014	2015	2016	Rata-rata pertumbuhan (%)
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>2.222.792.157,09</b>	<b>2.919.583.554,91</b>	<b>2.821.105.145,00</b>	<b>12,66</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>2.222.792.157,09</b>	<b>2.919.583.554,91</b>	<b>2.821.105.145,00</b>	<b>12,66</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		9.405.856,00	3.126.364,00	
Utang Bunga		0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.224.672.409,09	1.224.672.409,09	1.142.500.000,00	<b>-3,41</b>
Pendapatan Diterima Dimuka		177.078.719,82	269.574.664,00	
Utang Belanja		1.496.416.602,00	358.213.658,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	998.119.748,00	12.009.968,00	1.047.690.459,00	<b>2,45</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>2.222.792.157,09</b>	<b>2.919.583.554,91</b>	<b>2.821.105.145,00</b>	<b>12,66</b>
<b>EKUITAS</b>		<b>1.440.614.701.476,80</b>	<b>1.485.062.072.381,50</b>	
<b>EKUITAS</b>	<b>2.033.460.379.457,86</b>	<b>1.440.614.701.476,80</b>	<b>1.485.062.072.381,50</b>	<b>-14,54</b>
Ekuitas	2.033.460.379.457,86	1.440.614.701.476,80	1.485.062.072.381,50	<b>-14,54</b>
Ekuitas SAL		0,00	0,00	
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>1.440.614.701.476,80</b>	<b>1.485.062.072.381,50</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.035.683.171.614,95</b>	<b>1.443.534.285.031,71</b>	<b>1.487.883.177.526,50</b>	<b>-14,51</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2017

#### 4. Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi

Persentase sumber pendapatan daerah Kota Bukittinggi, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.113.**  
**Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi**

No	Uraian	TAHUN		
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>10,35</b>	<b>11,13</b>	<b>11,02</b>
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	44,33	43,92	43,07
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	29,28	25,79	29,55
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,60	5,88	6,50
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	20,78	24,40	20,88
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>76,03</b>	<b>75,82</b>	<b>84,67</b>
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,38	2,79	2,76
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	89,30	90,83	83,78
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	7,32	6,37	13,46
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13,62</b>	<b>13,05</b>	<b>4,31</b>
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21,29	27,52	82,09
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	75,99	68,44	17,91
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	2,73	4,03	0,00

Sumber : Hasil Analisis, 2017

## 5. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana diketahui bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Ketiga komponen pendapatan tersebut merupakan sumber pendanaan dalam pembangunan daerah.

Kinerja realisasi pendapatan daerah merupakan tingkat realisasi pendapatan daerah yang ditarget pada awal penyusunan APBD. Memperhatikan tingkat realisasi dari ketiga komponen sumber pendapatan daerah untuk dua tahun kebelakang, dapat disimpulkan bahwa kinerja dari pendapatan asli daerah ada peningkatan walaupun tidak begitu signifikan, pada tahun 2014 pendapatan asli daerah telah terealisasi sebesar 101,71%, meningkat pada tahun 2015 menjadi 104,66% dan menurun pada tahun 2016 menjadi 96,79%. Hal ini memperlihatkan adanya upaya dan usaha yang serius dari SKPD penghasil baik itu dari segi perpajakan maupun dari segi retribusi.

Dana perimbangan, bila diperhatikan untuk dua tahun kebelakang memang belum maksimal untuk merealisasikan dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2014 realisasi penggunaan dana perimbangan sekitar 99,84% dan pada Tahun 2015

pemanfaatan dana perimbangan menurun menjadi 97,21%. Sedangkan pada Tahun 2016 mengalami penurunan lagi menjadi 95,82%. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pemanfaatan dana perimbangan adalah masih adanya dana alokasi khusus yang belum terealisasi secara maksimal oleh SKPD terkait karena terkendala oleh juklak dan juknis yang terlambat sampainya kepada SKPD penerima.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, hanya bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang tidak memenuhi realisasi penerimaannya yaitu pada tahun 2014 terealisasi sekitar 99,49%, namun pada tahun 2015 hanya terealisasi sebesar 90,64%. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat kinerja realisasi pendapatan daerah Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

**Tabel 2.114.**  
**Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah**

NO	URAIAN	Kinerja (Realisasi/Anggaran X 100)		
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>99,98</b>	<b>97,06</b>	<b>95,82</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>101,71</b>	<b>104,66</b>	<b>96,79</b>
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	101,23	104,12	82,17
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	88,01	83,60	84,26
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100,00	93,08	124,17
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	132,78	150,72	197,13
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>99,84</b>	<b>97,21</b>	<b>95,82</b>
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	95,46	68,71	94,89
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	100,00	100,00	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	100,00	80,00	76,17
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>99,49</b>	<b>90,64</b>	<b>93,40</b>
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	97,66	106,51	99,99
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	100,00	81,02	100,00
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	100,00		0,00

Sumber : Hasil Analisis, 2017

## 6. Proyeksi Pendapatan Kota Bukittinggi

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat proyeksi pendapatan daerah Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

**Tabel 2.115.**  
**Proyeksi Pendapatan Kota Bukittinggi**

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2017 (Rp.)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>703,137,133,154.00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>97,524,097,154.00</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	46,068,135,193.00
1.1.2.	Retribusi Daerah	36,468,949,414.00
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	3,448,620,797.00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	11,538,391,750.00
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>577,015,505,000.00</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	17,789,622,000.00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	458,968,482,000.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	100,257,401,000.00
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>28,597,531,000.00</b>
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Dana Darurat	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21,097,531,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,500,000,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Proyeksi Pendapatan Kota Bukittinggi untuk tahun 2017 masih berpedoman kepada pendapatan pada tahun 2016, hal ini disebabkan PAD khusus untuk pajak daerah dan retribusi daerah ada yang mengalami penurunan, seperti PAD untuk tahun 2016 sebesar Rp. 71.303.771.735,85 mengalami kenaikan menjadi Rp. 97.524.097.154,00 secara umum dapat dijelaskan terjadi kenaikan penerimaan di pajak daerah dari Rp 30.709.690.231,00 tahun 2016 menjadi Rp.46.068.135.193,00 pada tahun 2017, hal ini disebabkan perubahan kenaikan alokasi pada beberapa jenis alokasi pajak daerah.

Retribusi daerah juga mengalami kenaikan dari Rp.21.070.502.562,00 tahun 2016 menjadi Rp 36.468.949.414,00 hal ini disebabkan adanya beberapa kenaikan retribusi seperti retribusi parkir dan retribusi terminal dan retribusi IMB.

Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2017 proyeksikan sebesar Rp. 11.538.391.750,00 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp.14.887.035.245,85 penurunan tersebut berasal dari pendapatan atas eksekusi atas jaminan,

pendapatan dari pengembalian dan dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional.

Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih diproyeksikan sama dengan tahun 2016, hal ini disebabkan belum adanya petunjuk untuk penentuan berapa besarnya DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dari pemerintah pusat.

## **7. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pembiayaan dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Untuk dimasa yang akan datang dalam rangka percepatan pembangunan sarana dan prasarana publik perlu dilakukan strategi penambahan sumber pedanaan pembangunan melalui alternatif pinjaman dari dalam negeri sepanjang memungkinkan menurut ketentuan yang berlaku. Disamping pendapatan daerah dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah juga berasal dari penerimaan pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah bila diperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan, untuk tahun 2017 ini sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016 diproyeksikan sekitar Rp. 75.220.682.946,00,-, hal ini jika dibandingkan dengan tahun 2015 Silpanya berjumlah Rp. 88.868.356.913,13,-, sedangkan untuk Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah belum dapat diproyeksikan untuk tahun 2017, hal ini disebabkan belum adanya data yang akurat untuk itu.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat proyeksi penerimaan daerah Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

**Tabel 2.116.**  
**Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Uraian</b>	<b>Proyeksi Tahun 2017 (Rp)</b>
<b>3.1.1.</b>	<b>SILPA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA</b>	<b>75.220.682.946,00</b>
<b>3.1.1.01.</b>	<b>PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD</b>	<b>5.989.997.274,00</b>
3.1.1.01.01.	PAJAK DAERAH	1.146.627.600,00
3.1.1.01.04.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	4.843.369.674,00
<b>3.1.1.03.</b>	<b>PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.302.707.139,00</b>
3.1.1.03.01.	PELAMPAUAN DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI	1.302.707.139,00
<b>3.1.1.04.</b>	<b>SISA PENGHEMATAN BELANJA ATAU AKIBAT LAINNYA</b>	<b>41.188.425.766,00</b>
3.1.1.04.01.	BELANJA PEGAWAI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.772.303.344,00
3.1.1.04.02.	BELANJA PEGAWAI DARI BELANJA LANGSUNG	6.217.160.000,00
3.1.1.04.03.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.173.523.528,00
3.1.1.04.04.	BELANJA MODAL	2.799.921.024,00
3.1.1.04.07.	BELANJA HIBAH	2.225.517.870,00
3.1.1.04.08.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.000.000.000,00
3.1.1.04.11.	BELANJA BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
<b>3.1.1.06.</b>	<b>SISA BELANJA DAK</b>	<b>25.935.552.767,00</b>
3.1.1.06.01.	DAK BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN	721.434.788,00
3.1.1.06.02.	DAK BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI	1.337.263.435,00
3.1.1.06.03.	DAK BIDANG INFRASTRUKTUR AIR MINUM	3.765.724.682,00
3.1.1.06.04.	DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SANITASI	4.879.539.424,00
3.1.1.06.05.	DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA	1.799.324.161,00
3.1.1.06.06.	DAK BIDANG KEHUTANAN	900.393.783,00
3.1.1.06.08.	DAK BIDANG KESEHATAN	24.072.418,00
3.1.1.06.09.	DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.736.674.838,00
3.1.1.06.10.	DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.035.065.918,00
3.1.1.06.11.	DAK BIDANG PERTANIAN	(174.683.840,00)
3.1.1.06.12.	DAK BIDANG PENDIDIKAN	4.340.736.875,00
3.1.1.06.13.	DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	1.335.503.785,00
3.1.1.06.14.	DAK BIDANG PERDAGANGAN	3.234.502.500,00
<b>3.1.1.09.</b>	<b>SISA BELANJA DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL</b>	<b>804.000.000,00</b>
3.1.1.09.01.	DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	804.000.000,00
<b>3.1.2.</b>	<b>PENCAIRAN DANA CADANGAN</b>	<b>70.809.822.878,00</b>
3.1.2.01.	PENCAIRAN DANA CADANGAN	70.809.822.878,00
3.1.2.01.01.	PENCAIRAN DANA CADANGAN	70.809.822.878,00

Sumber : Hasil Analisis, 2017

## **8. Proyeksi / Target Penerimaan Kota Bukittinggi**

Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk meningkatkan capaian proyeksi/target realisasi tahun lalu perlu dilakukan perubahan sistem pengawasan, memperbaiki regulasi, meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola PAD, menjaring wajib pajak dan wajib retribusi melalui pendataan secara berkala. Kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah rata-rata setiap tahunnya berkisar antara 10,35% s.d 11,02%.

Penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan kontribusinya sangat besar sekitar 78,84% setiap tahunnya, hal ini berarti penerimaan Kota Bukittinggi masih sangat bergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat.

Sedangkan penerimaan dari Lain-Lain Penerimaan Yang Sah hanya berkontribusi sekitar 10,33% setiap tahunnya, hal ini disebabkan penerimaan tersebut hanya berasal dari penerimaan dari bagi hasil, penerimaan bantuan keuangan, dan penerimaan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih pengguna anggaran tahun lalu, dari tahun ketahun selalu meningkat, hal ini disebabkan kurang matangnya perencanaan dalam mempergunakan belanja langsung SKPD, sehingga belanja yang telah ditentukan masih banyak yang tidak terealisasikan pada tahun berjalan, kedepan untuk menekan agar penerimaan pembiayaan ini lebih kecil lagi dibutuhkan perencanaan yang matang dari setiap SKPD dalam menyusun program / kegiatan.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat proyeksi penerimaan daerah Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

**Tabel 2.117.**  
**Realisasi dan Proyeksi / Target Penerimaan Kota Bukittinggi**

No	Uraian	JUMLAH (Rp.)				
		Realisasi		2017	Proyeksi/Target	
		2015	2016		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>66.027.359.716,34</b>	<b>71.303.781.735,85</b>	<b>97.524.097.154</b>	<b>93.561.077.670</b>	<b>105.087.802.438</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	29.002.139.678	30.709.690.231	46.068.135.193	45.293.035.421	52.548.979.695
1.1.2.	Retribusi Daerah	17.031.261.904	21.070.502.562	36.468.949.414	20.078.534.219	21.210.963.549
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	3.884.306.585	4.636.543.697	3.448.620.797	5.352.600.766	5.956.374.132
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	16.109.651.549,34	14.887.045.245,85	11.538.391.750	22.803.072.005	25.603.289.247
1.2.	<b>Dana Perimbangan</b>					
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	12.555.527.059	15.128.297.227	17.789.622.000	17.653.790.038	19.777.540.975
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	408.640.651.000	458.968.482.000	458.968.482.000	540.939.366.142	593.951.424.023
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	28.676.544.000	73.733.088.706	100.257.401.000	34.270.349.565	36.367.694.958
1.3.	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>					
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.308.056.239	22.912.072.187	21.097.531.000	32.221.258.238	36.983.560.205
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52.991.158.000	5.000.000.000	7.500.000.000	53.950.733.334	54.274.437.734
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.124.000.000	-	-	-	-
1.3.6.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis, 2017

### 2.2.1.2. PENGHITUNGAN PENGELUARAN DAERAH

#### 1. Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi

Kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Bukittinggi, merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan pembangunan. Penghitungan kebutuhan belanja daerah didasarkan kepada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, serta dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas. Efisiensi, dan efektifitas.

Pengeluaran mengikat bermakna pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap

periodik oleh pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan, seperti tunjangan fungsional guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas dimaksud untuk menganalisis jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan karena kewajiban pemerintah daerah baik disebabkan karena peraturan maupun karena ada perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat penghitungan kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

**Tabel 2.118.**  
**Realisasi Belanja Daerah 2015 s.d. 2017**  
**dan Proyeksi/Target Belanja Daerah 2018-2019 Kota Bukittinggi**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				
		Realisasi		2017	Proyeksi/Target	
		2015	2016		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
<b>1</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>1.103.844.939.883</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>339.899.689.457</b>	<b>351.010.851.917</b>	<b>285.762.968.858.15</b>	<b>377.260.127.919</b>	
1.1.1	Belanja Pegawai	322.784.474.843	336.101.758.265	263.665.444.864,15	361.721.489.356	496,244,154,896.13
1.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1.1.3	Belanja Hibah	15.881.006.950	11.063.426.045	14.978.563.326	11.114.839.895	10,000,000,000
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	821.266.538	1.333.685.699	2.001.142.000	2.405.980.000	1,000,000,000
1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	412.941.126	511.981.908	617.818.668	617.818.668	617,818,668
	Belanja Tidak Terduga	-	2.000.000.000	4.500.000.000	1.400.000.000	1,400,000,000.00
<b>1.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>28.676.544.000</b>	<b>78.733.088.706</b>	<b>107.757.401.000</b>	<b>366.454.452.503</b>	<b>366.454.452.503</b>
	Belanja DAK	28.676.544.000	73.733.088.706	100.257.401.000	361.454.452.503	361,454,452,503
	Belanja DID	-	5.000.000.000	7.500.000.000	5.000.000.000	5,000,000,000
	Pagu Indikatif				360.130.359.461	366.454.452.503

Sumber : Hasil Analisis, 2017

**Tabel 2.119.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s.d. 2017**  
**dan Proyeksi / Target Tahun 2018 dan 2019 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	JUMLAH (Rp.)				
		Realisasi		2017	Proyeksi/Target	
		2015	2016		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
<b>1</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
1.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>					
1.1.1	Silpa Tahun sebelumnya		88.463.139.853,33	75.220.682.946	75.220.682,946	75.220.682,946
1.1.2	Pencairan dana cadangan		-	70.809.822.878	70.809,822,878	70.809,822,878
	Pembangunan RSUD		-	70.809.822.878	70.809,822,878	70.809,822,878
	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya		-	-	-	-
1.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>					
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000	-	5.000,000,000.00	5.000,000,000.
1.2.2	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya		-	-	5.000,000,000.00	5.000,000,000.
1.2.3	Penyertaan Modal		8.200.000.000	4.000.000.000	4.000,000,000.00	4.000,000,000.

Sumber : Hasil Analisis, 2017

### 2.3. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun pertama RPJMD periode 2016-2021 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.120.**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun 2016**  
**Kota Bukittinggi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	
1.	Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1.1	Jumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong .	jml	72	70	97
		1.2	Perusahaan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	%	70	60	85
2.	Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	2.1	Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda/kepemudaan	jml	52	52	100
		2.2	Sanggar seni yang aktif	jml	7	8	114

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
3.	Meningkatnya event olahraga generasi muda	3.1 Jumlah Event keolahragaan bagi generasi muda / Kepemudaan	jml	6	7	116
4.	Meningkatnya fungsi rumah ibadah	4.1 Kelompok/organisasi Remaja Mesjid yang aktif dalam bidang keagamaan	jml	3	4	133
		4.2 Jumlah Event keagamaan	jml	3	3	100
5.	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	5.1 % pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	%	50	63,65	127
		5.2 Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP)	Nilai	LPPD Rangking 65, LKIP C	63 CC	96 150
		5.4 % capaian program pembentukan peraturan daerah	%	19	13	68
6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	6.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	100
7.	Terpenuhinya RTH Kota	7.1 % RTH Publik	%	8	8	100
8.	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	8.1 % air minum layak	%	93	78	83
		8.2 % sanitasi layak	%	95	72,72	76
9.	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	9.1 Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	%	55	85	154
		9.2 Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	%	50	59	118
10.	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB)	10.1 Benda cagar budaya yang lestari	%	5	6	120
11.	Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	11.1 Jumlah Penambahan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama	jml	1	1	100
12.	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	12.1 Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	%	81	100	123
		12.2 Fasilitas Keselamatan Jalan	%	71	70	98
		12.3 Jalan berkondisi baik	%	86	85,67	99,6
13.	Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat dan terhadap bencana	13.1 Fasilitas kebencanaan	%	60	71	118

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
14.	Berkembangnya koperasi	14.1 Jumlah Koperasi sehat	Jml	12	13	108
15.	Berkembangnya usaha mikro	15.1 Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil	Jml	5	5	100
16.	Berkembangnya investasi	16.1 Jumlah Investasi	Rp Triliun	1.884	1.771	93
17.	Berkembangnya Industri Kecil Menengah	17.1 Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi)	jml	5	5	100
18.	Meningkatnya lapangan kerja	18.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,84	6,04	96,5
19.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19.1 Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp	34.758.804.463	30.709.690.231	88
20.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	20.1 jumlah kunjungan wisatawan	Jml	483.950	499.806	103
21.	Meningkatkan mutu pendidikan	21.1 Harapan lama sekolah	Tahun	14,7	14,92	79
		21.2 Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	10,85	10,79	99
		21.3 APK PAUD (3 – 6 TH)	%	86,00	79	91
		21.4 % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	%	72,88	79	108
		21.5 % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	%	54,50	73	135
		21.6 % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA	%	63,60	82	130
		21.7 % Kompetensi keahlian yang berakreditasi A tingkat SMK	%	37,20	42	113
22.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	22.1 Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,13	101
		22.2 Puskesmas yang terakreditasi	Jml	2	2	100
		22.3 Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	81	85	104
23.	Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	23.1 Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,71	1,71	100
		23.2 Tingkat Kemiskinan	%	4,23	5,46	71
		23.3 Indek Pemberdayaan gender	%	70,84	91	129
		23.4 Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk.	%	80	112	140
24.	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	24.1 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Rp Triliun	2.338	1.844	78

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
25.	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal	25.1 Skor pola pangan harapan (PPH)	%	84,1	83,9	99,7
26.	Meningkatnya Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat	26.1 Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani	Kasus	650	657	101
<b>RATA-RATA</b>						<b>105%</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat, capain rata-rata dari 46 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 26 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 105%. Sesuai dengan Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan Sangat baik. Secara lebih terinci capaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan berdasarkan Misi yang terdapat pada dokumen RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**Misi I : “ Mengembangkan dan memberdayakan pertispasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha, dan masyarakat ”.**

Pencapaian Kinerja, 4 (empat) sasaran strategis misi 1 tahun 2016 yang diukur dengan capaian rata-rata 7 (tujuh) indikator kinerja utama adalah sebesar 104%. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

**Tabel 2.121.**  
**Capaian Kinerja Misi I RPJMD 2016-2021**  
**Kota Bukittinggi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1.1 Jumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong.	jml	72	70	97
		1.2 Perusahanan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	%	70	60	85

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	2.1 Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda/kepemudaan	jml	52	52	100
		2.2 Sanggar seni yang aktif	jml	7	8	114
3.	Meningkatnya event olahraga generasi muda	3.1 Jumlah Event keolahragaan bagi generasi muda / Kepemudaan	jml	7	7	100
4.	Meningkatnya fungsi rumah ibadah	4.1 Kelompok/organisasi Remaja Mesjid yang aktif dalam bidang keagamaan	jml	3	4	133
		4.2 Jumlah Event keagamaan	jml	3	3	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN 7 INDIKATOR</b>						<b>104</b>

Dari tabel diatas berdasarkan Misi I Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan bahwa:

1. Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sudah meningkat dengan indikator kinerja. Jumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97%, dan Perusahanan / Dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 85%.
2. Meningkatnya *event* generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya juga telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja *event* kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%, dan sanggar seni yang aktif dengan tingkat capaian kinerja sebesar 114%.
3. Meningkatnya *event* olahraga generasi muda dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja. Jumlah *event* keolahragaan bagi generasi muda / kepemudaan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

4. Meningkatnya fungsi rumah ibadah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja kelompok / organisasi remaja masjid yang aktif dalam bidang keagamaan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 133%, dan Jumlah *event* keagamaan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

**Misi II : “ Meningkatkan Kinerja Pemerintah Secara Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan ”.**

Pencapaian Kinerja, dua sasaran strategis misi II tahun 2016 yang diukur dengan capaian rata-rata 4 (empat) indikator kinerja utama adalah sebesar 108%. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan / kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

**Tabel 2.122.**  
**Capaian Kinerja Misi II RPJMD 2016-2021**  
**Kota Bukittinggi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1.	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	1.1	% pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	%	50	63,65	127	
		1.2	Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP)	Nilai	LPPD Rangking 65, LKIP C	63	150	96
		1.3	% capaian program pembentukan peraturan daerah	%	19	13	68	
2.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	100	
<b>RATA-RATA CAPAIAN 4 INDIKATOR</b>						<b>108</b>		

Dari tabel diatas berdasarkan Misi II Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan bahwa:

1. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan sudah meningkat dengan indikator kinerja, % pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 127%, Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP) dengan

tingkat capaian kinerja sebesar 96% dan 150%, dan % capaian program pembentukan peraturan daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 68%.

2. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN telah dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

**Misi III : “Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan”.**

Pencapaian Kinerja, 7 sasaran strategis misi III tahun 2016 yang diukur dengan capaian rata-rata 11 indikator kinerja utama sebesar 112%. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

**Tabel 2.123.**  
**Capaian Kinerja Misi III RPJMD 2016-2021**  
**Kota Bukittinggi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Terpenuhinya RTH Kota	1.1 % RTH Publik	%	8	8	100
2.	Pemenuhan target universal akses (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	2.1 % air minum layak	%	93	78	83
		2.2 % sanitasi layak	%	95	72,72	76
3.	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	3.1 Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	%	55	85	154
		3.2 Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	%	50	59	118
4.	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB)	4.1 Benda cagar budaya yang lestari	%	5	6	120
5.	Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	5.1 Jumlah Penambahan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama	jml	1	1	100
6.	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu	6.1 Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	%	81	100	123

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	lintas	6.2 Fasilitas Keselamatan Jalan	%	71	70	98
		6.3 Jalan berkondisi baik	%	86	85,67	99,6
7.	Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat dan terhadap bencana	7.1 Fasilitas kebencanaan	%	60	71	118
<b>RATA-RATA CAPAIAN 11 INDIKATOR</b>						<b>112</b>

Dari tabel diatas berdasarkan Misi III Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan bahwa:

1. Terpenuhinya RTH Kota di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sudah meningkat dengan indikator kinerja, persentase RTH Publik dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
2. Pemenuhan target universal akses (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh) juga telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Persentase air minum layak dengan tingkat capaian kinerja sebesar 83%, dan Persentase sanitasi layak dengan tingkat capaian kinerja sebesar 76%.
3. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 154%, dan Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 118%.
4. Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB) telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Benda cagar budaya yang lestari dengan tingkat capaian kinerja sebesar 120%.
5. Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Jumlah Penambahan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
6. Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator Cakupan Daerah

yang terlayani angkutan umum dengan tingkat capaian kinerja sebesar 123%, Fasilitas Keselamatan Jalan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98%, dan Jalan berkondisi baik tingkat capaian kinerja sebesar 99%.

7. Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat dan terhadap bencana dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Fasilitas kebencanaan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 118%.

**Misi IV : “Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna”.**

Pencapaian Kinerja, 6 sasaran strategis misi IV tahun 2016 yang diukur dengan capaian rata-rata 6 (enam) indikator kinerja sebesar 97%. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

**Tabel 2.124.**  
**Capaian Kinerja Misi IV RPJMD 2016-2021**  
**Kota Bukittinggi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Berkembangnya koperasi	1.1 Jumlah Koperasi sehat	Jml	12	13	108
2.	Berkembangnya usaha mikro	2.1 Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil	Jml	5	5	100
3.	Berkembangnya investasi	3.1 Jumlah Investasi	Rp Triliun	1,884	1,771	93
4.	Berkembangnya Industri Kecil Menengah	4.1 Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi)	jml	5	5	100
5.	Meningkatnya lapangan kerja	5.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.84	6,04	96,5
6.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.1 Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp	34.758.804.463	30.709.690.231	88
<b>RATA-RATA CAPAIAN 6 INDIKATOR</b>						<b>97</b>

Dari tabel diatas berdasarkan Misi IV Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan bahwa:

1. Berkembangnya koperasi pada tahun 2016 sudah meningkat dengan indikator kinerja jumlah koperasi sehat, serta tingkat capaian kinerja sebesar 108%.
2. Berkembangnya usaha mikro juga telah dapat dilaksanakan dengan baik dimana dapat dilihat dari capaian indikator kinerja jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
3. Berkembangnya investasi dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja jumlah investasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93%.
4. Berkembangnya Industri Kecil Menengah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan produksi) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
5. Meningkatnya lapangan kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96%.
6. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Jumlah penerimaan pajak daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88%.

**Misi V : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat”.**

Pencapaian Kinerja, 7 (tujuh) sasaran strategis misi V tahun 2016 yang diukur dengan capaian rata-rata 18 (delapan belas) indikator kinerja sebesar 102%. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

**Tabel 2.125.**  
**Capaian Kinerja Misi V RPJMD 2016-2021**  
**Kota Bukittinggi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1.1 jumlah kunjungan wisatawan	Jml	483.950	499.806	103
2.	Meningkatkan mutu pendidikan	2.1 Harapan lama sekolah	Tahun	14,7	14,92	79
		2.2 Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	10,85	10,79	99
		2.3 APK PAUD (3 – 6 TH)	%	86,00	79	91
		2.4 % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	%	72,88	79	108
		2.5 % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	%	54,50	73	135
		2.6 % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA	%	63,60	82	130
		2.7 % Kompetensi keahlian yang berakreditasi A tingkat SMK	%	37,20	42	113
3.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	3.1 Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,13	101
		3.2 Puskesmas yang terakreditasi	Jml	2	2	100
		3.3 Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	81	85	104
4.	Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,71	1,71	100
		4.2 Tingkat Kemiskinan	%	4,23	5,46	71
		4.3 Indek Pemberdayaan gender	%	70,84	91	129
		4.4 Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk.	%	80	112	140
5.	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	5.1 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Rp Triliun	2.338	1.844	78
6.	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragama, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal	6.1 Skor pola pangan harapan (PPH)	%	84,1	83,9	99,7
7.	Meningkatnya Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat	7.1 Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani	Kasus	650	657	101
<b>RATA-RATA 18 INDIKATOR SASARAN</b>						<b>104</b>

Dari tabel diatas berdasarkan Misi V Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan bahwa:

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan pada tahun 2016 sudah meningkat dengan indikator kinerja, jumlah kunjungan wisatawan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103%.
2. Meningkatkan mutu pendidikan juga telah dapat dilaksanakan dengan baik dimana dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Harapan lama sekolah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 79%, Angka Rata Rata Lama Sekolah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99%, APK PAUD (3 – 6 TH) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91%, % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD dengan tingkat capaian kinerja sebesar 108%, % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP dengan tingkat capaian kinerja sebesar 135%, % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA dengan tingkat capaian kinerja sebesar 130%, dan % Kompetensi keahlian yang berakreditasi A tingkat SMK dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113%.
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Angka Harapan Hidup dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101%, Puskesmas yang terakreditasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%, dan Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104%
4. Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%, Tingkat Kemiskinan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 71%, Indeks Pemberdayaan gender dengan tingkat capaian kinerja sebesar 129%, dan Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk dengan tingkat capaian kinerja sebesar 140%.
5. Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran dengan tingkat capaian kinerja sebesar 78%.

6. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragama, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Skor pola pangan harapan (PPH) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,7%.
7. Meningkatnya Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101%.

Dalam peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi kedepan masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kualitas perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen Sistem AKIP belum terbangun secara baik. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan belum seluruhnya memenuhi persyaratan dan kriteria sasaran dan indikator kinerja yang baik.
- b. Komitmen pejabat pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun secara baik. Hal ini dapat diamatidari penerapan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi hasil dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
- c. Kompetensi SDM Aparatur masih kurang.

**Tabel 2.126.**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD**  
**Sampai Dengan Tahun 2017**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>															
<b>I</b>	<b>BAGIAN PEMBANGUNAN</b>														
1.	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Capaian target pelaksanaan Pembangunan di kota Bukittinggi	100	%	100	%	80,34	%	80,34		100%	100%	60,45	60,45	
<b>II</b>	<b>BAGIAN HUMAS</b>														
1..	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran	100	%	100	%	92,47	%	92,47	%	100%	100%	64,49	64,49	
2.	Program pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa	Cakupan pelayanan informasi daerah	84	%	80	%	73,88	%	92,35	%	125%	81%	57,72	68,71	
3.	Program kerjasama Informasi dengan mas media	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	90	%	80	%	75,94	%	94,93	%	125%	83%	58,59	65,10	
<b>III</b>	<b>BAGIAN KESRA</b>														
1.	Program Peningkatan Pemahaman Pengamalam Kehidupan Beragama	Event keagamaan ditengah masyarakat	80	%	80	%	79,33	%	99,16	%	125%	100%	60,05	75,07	
2.	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	80	%	80	%	45,97	%	57,46	%	125%	100%	46,15	57,69	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN	
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian		
<b>IV</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>															
1.	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	90	%	80	%	82,17	%	102,71	%	125%	82%	61,18	67,97		
2.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik	100	%	80	%	80	%	100	%	125%	80%	60,27	60,27		
<b>V</b>	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>															
1.	Program Penataan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah	Tertatanya aset pemda (%)	94	%	75	%	2,52	%	3,36	%	133%	91%	26,42	28,11		
2.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penyelesaian konflik pertanahan (%)	84	%	75	%	21,36	%	28,48	%	133%	81%	34,76	41,38		
3.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Terwujudnya kerjasama antar daerah (%)	84	%	80	%	81	%	36,75	%	45%	81%	39,19	46,65		
4.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya kualitas kelembagaan (%)	85	%	62	%	66,39	%	107,8	%	162%	55%	56,78	66,80		
5.	Program Penegasan Batas Wilayah	Terwujudnya kejelasan batas kota (%)	84	%	95	%	10,81	%	11,38	%	105%	81%	35,73	42,54		
6.	Penegasan Batas Administratif Wilayah Kota Bukittinggi	Batas administratif wilayah kecamatan dan kelurahan yang jelas dan tepat (kelurahan)	84	%	95	%	10,81	%	0%	%	0%	81	58,67	69,84		
7.	Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur kelurahan (%)	100	%	0	%	0	%	0	%	0%		0,00	0,00		
<b>VI</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>															
1.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penetapan peraturan perundang-undangan	84	%	80	%	73,2	%	91,5	%	125%	81%	57,44	68,38		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN	
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian		
<b>VII</b>	<b>BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN</b>															
1.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Ka.Daerah/Wa.Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100	%	86,42	%	88,93	%	88,93	%	100%	85%	58,73	58,73		
<b>VIII</b>	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>															
1.	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		0	%	100	%	96,71	%	96,71	%	100%	100%	65,90	0,00		
2.	Program Peningkatan Pengentasan Kemiskinan	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	90	%	100	%	90,45	%	90,45	%	100%	15%	63,53	70,59		
3.	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Tingkat pengembangan potensi ekonomi	100	%	100	%	90,8	%	90,8	%	100%	100%	63,93	63,93		
4.	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Terkelolanya penanggulangan inflasi	4	%	100	%	97,24	%	97,24	%	100%	6%	65,77	66,67		
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																
1.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan -peraturan daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan	100	%	100	%	19		13		68%	100%	38,00	38,00		
2.	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah	Persentase pertemuan yang diikuti anggota dewan dan sekretariat DPRD	100	%	100						100%		33,67	33,67		
<b>INSPEKTORAT</b>																
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase meningkatnya sistem Pengendalian internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	67,00	67,00		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	67,00	67,00	
<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>															
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	3				3		3		100%	3	2,00	66,67	
2.	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak	46,605	milyar			31,758	milyar	30,709	milyar	97%	34,927	21,88	46,94	
		Persentase peningkatan PAD	100	%			100		98		98%	100,00%	33,00	33,00	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	75	%	10		15		15		100%	20,00%	25,20	33,60	
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>															
1.	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan	550	orang			550	orang	330	orang	60%	90	140,00	25,45	
2.	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	95	%	95	%					0%	16%	31,72	33,39	
3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	95	%	95	%	95	%			0%	16%	31,72	33,39	
4.	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	100	%	100	%	100	%	92	%	92%	100%	64,33	64,33	
<b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>															
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	100	%	94	%	1	dokumen	1	dokumen	100%	100%	32,00	32,00	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
2.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	97	%	69	%	1	laporan	1	laporan	100%	100%	23,67	24,40	
3.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100	%	70	%	1	laporan	1	laporan	100%	100%	24,00	24,00	
4.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemenuhan pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	85	%	70	%	1	laporan	1	laporan	100%	100%	24,00	28,24	
5.	Program Perencanaan Sosial Budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100	%	37	%	1	laporan	1	laporan	100%	100%	13,00	13,00	
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>															
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi PAUD dan TK	100	%	95	%	100	%	100	%	100%	100%	65,33	65,33	
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tingkat APM dan APK SD, SMP	100	%	85	%	100	%	100	%	100%	100%	62,00	62,00	
3.	Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	100	%	83	%	100	%	100	%	100%	100,00%	61,33	61,33	
4.	Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	100	%	91	%	100	%	100	%	100%	100%	64,00	64,00	
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tingkat sekolah yang berakreditasi A tingkat SD,SMP dan SMA/SMK	100	%	99	%	100	%	100	%	100%	100%	66,67	66,67	
6.	Program Manajemen Pelayanan	Tingkat ketaatan terhadap manajemen pelayanan pendidikan	100	%	100	%	1		1		100%	100%	34,00	34,00	
7.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	100	%	80	%	0,6		1		167%	0,1667	27,06	27,06	
8.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	100	%	99	%	1		1		100%	0,1667	33,39	33,39	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
9.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	100	%	76	%	1		1		100%	0,1667	25,72	25,72	
10.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	100	%	87	%	1		1		100%	0,1667	29,39	29,39	
<b>DINAS PARIWISATA DAN OLAHRAGA</b>															
1.	Program Pembinaan Kepemudaan	Tersedianya data-data pendidikan pemuda dan olahraga secara lengkap	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	67,00	67,00	
2.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase pembinaan dan fasilitasi terhadap organisasi kepemudaan dan olahraga	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	67,00	67,00	
3.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	67,00	67,00	
4.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya pengetahuan pemuda terhadap peran pemuda dalam masyarakat	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	67,00	67,00	
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	67,00	67,00	
6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kunjungan wisatawan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	67,00	67,00	
7.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kepuasan pengunjung	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	67,00	67,00	
<b>DINAS KESEHATAN</b>															
1.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan PHBS Tingkat Kota .	75	%	20	%	20	%	20	%	100%	65	35,00	46,67	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar .	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100,00%	67,00	67,00	
3.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	100	%	0	%	60	%	60	%	100%	100,00%	20,33	20,33	
4.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi anemia ibu hamil .	10		23		15		15		100%	13%	12,71	127,10	
5.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar ( Antenatal)	90	%	91	%	91	%	91	%	100%	86%	60,95	67,73	
6.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja	13		13	%	13	%	13	%	100%	0,17	8,72	67,09	
7.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	100	%			60	%	60	%	100%	100%	53,33	53,33	
8.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	7	puskesmas			2		2		100%	5%	2,33	33,33	
9.	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	95	%	100	%	0		0		0%	85%	33,62	35,39	
10.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase bangunan Puskesmas. Pustu dan Jaringannya sesuai standar pelayanan	100	%	75	%	75	%	75	%	100%	80%	50,27	50,27	
11.	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	95	%	90	%	90	%	90	%		91%	60,30	63,48	
12.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar .	100		100		100		100		100%	100%	67,00	67,00	
13.	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pangan yang memenuhi syarat .	100		90	%	90	%	90	%	100%	100%	60,33	60,33	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
14.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	44	%	35	%	40	%	40	%	100%	41%	25,14	57,13	
15.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penderita DBD yang ditangani .	90	%	100	%	60	%	100	%	167%	70%	66,90	74,33	
17.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin .	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	67,00	67,00	
18.	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit .	25	%	25	%	25	%	25	%	100%	25%	16,75	67,00	
<b>DINAS SOSIAL</b>															
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya	PMKS yang terbebas dari masalah sosial	3	%	1,5	%	2	%	2	%	100%	2	1,83	61,11	
2.	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	75	%	60	%	65	%	65	%	100%	68%	41,89	55,86	
3.	Program Pembinaan Anak Terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	45	%	32	%	35	%	35,7	%	102%	37%	22,69	50,42	
4.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Tingkat Penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	3	%	3	%	12	%	10	%	83%	15%	4,38	146,11	
5.	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Jumlah panti yang memenuhi standar pelayanan sosial	100	%	50	%	25	%	25	%	100%	50	41,67	41,67	
6.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tingkat orsos yang memenuhi standar pelayanan sosial	90	%	75	%	75	%	73	%	97%	80%	49,60	55,11	
7.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian			80	%	80	%	95	%	119%		58,33	0,00	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
8.	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kepahlawanan	-		100	%	100	%	100	%	100%		66,67	0,00	
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>															
1.	Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	persentase penurunan kasus KDRT dan TPPO	50	%			50	%	50	%	100%	50	33,33	66,67	
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan	70	%	70	%	70	%	68	%	97%	70,00%	46,23	66,05	
3.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase penurunan kemiskinan	3	%			4	%	4	%	100%	4%	1,35	44,89	
4.	Program Keluarga Berencana	Cakupan sasaran PUS yang menjadi peserta KB	68	%			62	%	62	%	100%	11,30%	20,70	30,45	
5.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan PT memiliki PIK/RM	75	%			35	%	35	%	100%	45,00%	47,00	62,67	
6.	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Tercapainya program peningkatan peran serta masyarakat	-								0%				
7.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	100% data akurat	95	%			85	%	85	%	100%	88,00%	28,63	30,13	
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>															
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat dan dapat dimanfaatkan	90	%	80	%	100	%	100	%	100%	15%	60,05	66,72	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
<b>DINAS KEBAKARAN</b>															
1.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kebakaran	Persentase kesiapsiagaan dan tanggap terhadap pencegahan kebakaran meningkat	90	%	50	%	60	%	100	%	167%	70%	50,23	55,81	
<b>DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>															
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	85	%	0	%	50	%	50	%	100%	60,00%	16,87	19,84	
2.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	100	%	0	%	100	%	100	%	100%	100,00%	33,67	33,67	
3.	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kasus pelanggaran gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan yang tertangani	250	kasus			650	kasus	657	kasus	99%	600	99,00%	38,00	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan	60	%	100	%	20	%	20	%	100%	30,00%	40,10	66,83	
<b>DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>															
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian (%)	65	%	13	%	13	%	5	%	38,5%	13,00%	38,00	58,46	
2.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja (%)	23	%	5	%	5	%	2	%	40%	17	10,00	43,48	
3.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan (%)	95	%	100	%	60	%	60	%	100%	70,00%	53,57	56,39	
4.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan jumlah investor (perusahaan)	540	perusahaan	100	%	90	%	90	%	100%	100	170,00	31,48	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
5.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi (dokumen)	4		0		1		0		-	1	1,00	25,00	
6.	Program Peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat	Tingkat kelancaran pelayanan kepada masyarakat (%)	100	%	100	%	20	%	20	%	100%	20,00%	40,00	40,00	
7.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya realisasi investasi (%)	50	%	100	%	10	%	10	%	100%	20,00%	21,00	42,00	
8.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Peningkatan nilai produksi industri kecil menengah (%)	12	%	2	%	2	%	1	%	50%	2	4,00	33,33	
9.	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (Unit usaha)	30	%	6	%	6	%	2	%	33,3%	10	12,00	40,00	
10.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM (%)	10	%	2	%	2	%	1	%	50%	2	4,00	40,00	
11.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB (%)	10		2		2		0,5		25%	1,5	4,00	40,00	
<b>DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN</b>															
1.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat (unit)	17	unit	-		12	unit	13	unit	108,33%	13	8,67	50,98	
2.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan (%)	48		-		30		30		100 %	36	22,00	45,83	
3.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	87,64		-		82,86		82,86		100 %	83,80	55,55	63,39	
4.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil (unit)	105	unit							-	0	20,00	19,05	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
5.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha (persh)	2000	unit			300	unit	300	unit	100 %	350	216,67	32,50	
6.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi (jenis)	50		-		50		50		100 %	50	33,33	66,67	
7.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL (lokasi)	5	lokasi	-		1	lokasi	1	lokasi	100 %	1	2,00	40,00	
8.	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat sarana dan prasarana pasar yang dikembangkan (%)	100	%	-		100	%	100	%	100 %	100	66,67	66,67	
9.	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar (%)	100	%	-		100	%	100	%	100 %	100	66,67	66,67	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>															
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Pemeliharaan jaringan komunikasi, Informatika dan media massa	84	%			80	%	75	%	93,75%	81,00%	25,27	30,08	
2.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	90	%			80	%	75	%	93,75%	82,00%	25,27	28,08	
3.	Program Pembangunan dan Sistem Informasi (Aplikasi perangkat lunak)	Pengembangan sistem informasi (Aplikasi perangkat lunak)	90	%			80	%	75	%	93,75%	82,00%	25,27	28,08	
4.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	90				0		0		0,00%		0,00	0,00	
5.	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Program pengembangan pos dan telekomunikasi	90	%			80	%	80	%	100%	82,00%	26,94	29,93	
6.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	50	%								100%	0,33	0,67	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>															
1.	Program peningkatan sarana dan prasarana ke PU an/kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat berat ke PU an / Kebinamargaan	90	%	30	%	50	%	30	%	60%	50%	20,17	22,41	
2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik	95	%	85,6	%	85,6	%	85,6	%	100%	88%	57,36	60,38	
3.	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan kualitas jalan dari pemeliharaan	95	%	85,6	%	85	%	85	%	100%	88%	57,16	60,17	
4.	Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap	95	%	99	%	99	%	99	%	100%	95%	66,32	69,81	
5.	Program Sistem Informasi / Database Jalan Jembatan	Tingkat ketersediaan informasi/data base jalan	100	%	20	%	20	%	20	%	100%	40,00%	13,47	13,47	
6.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	95	%	72	%	72	%	72	%	100%	99%	48,33	50,87	
7.	Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Drainase	Fasilitasi pengembangan kebijakan kinerja pengelolaan drainase	95	%	72	%	72	%	72	%	100%	80,00%	48,27	50,81	
8.	Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan titik genangan	85	%	0		75	%	80	%	107%	85,00%	26,95	31,71	
9.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	80	%	45	%	45	%	45	%	100%	50,00%	30,17	37,71	
10.	Program Pengembangan, Pengelolaan & konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara/ normalisasi	75	%	47	%	47	%	47	%	100%	55,00%	31,52	42,02	
11.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase DI yang beirigasi teknis dengan kondisi baik	100	%	98	%	98	%	98	%	100%	98,00%	65,66	65,66	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
12.	Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	85	%	65	%	65	%	65	%	100%	70%	43,57	51,25	
13.	Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	% Gedung negara dan swasta yang laik fungsi	40	%	0	%	0	%	0	%	0%	5	1,67	4,17	
14.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	75	%	10	%	10%	%	10	%	100%	20	13,33	17,78	
15.	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	50	%	12,5	%	13	%	13	%	100%	20%	8,57	17,13	
16.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	80	%	40	%	60	%	60	%	100%	65%	33,55	41,94	
17.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	100	%	48	%	48	%	48	%	100%	48%	32,16	32,16	
		persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100	%	40	%	40	%	40	%	100%	55%	26,85	26,85	
18.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran pemanfaatan tata yang dapat ditertibkan	75	%	40	%	50	%	50	%	100%	60%	30,20	40,27	
<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>															
1.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pembangunan/ Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	60	%	0	%	0	%	0	%	0%	10%	0,03	0,06	
2.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Jalan Dengan Riol Yang Sehat	80	%	0	%	0	%	0	%	0%	14%	0,05	0,06	
3.	Peningkatan Kualitas Permukiman ( DAK 2010-2015)	Tercapainya Kualitas Permukiman Yang Sehat	4		0		0		0		0%	1	0,33	8,33	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
4.	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasy dan Peningkatan Fasilitas Umum	Persentase Ketersediaan Sarana Sosial Masyarakat dan Fasilitas Umum	20	%	0	%	0	%	0	%	0%	3,33%	0,01	0,06	
5.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Kualitas Perumahan Kawasan Permukiman Berbasis Kemitraan	10	%	0	%	0	%	0	%	0%	2%	0,01	0,07	
6.	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Persentase Kualitas Pembangunan Perumahan	25	%	0	%	0	%	0	%	0%	4,50%	0,02	0,06	
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>															
1.	Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang baik	75	%	50	%	71	%	50	%	70%	72,00%	33,57	44,76	
2.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tersedianya rambu-rambu yang baik	75	%	100	%	100	%	100	%	100%	12,50%	66,71	88,94	
3.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan dan jasa angkutan umum	85	%	60	%	100	%	100	%	100%	15%	53,38	62,80	
4.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	75	%							0%	72%	0,24	0,32	
5.	Program Pengendalian dan Pembangunan Lalu lintas	Terciptanya lalu lintas yang aman, tertib dan lancar	75	%	75	%	100	%	100	%	100%	72,00%	58,57	78,10	
6.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Optimalisasi peningkatan pengoperasian kendaraan	85	%			100	%	100	%	100%	12	37,33	43,92	
<b>DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN</b>															
1.	Program Pengembangan data Informasi/statistik daerah	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	67 kwl/ha, 2%, 2%		66 kwl/ha, 0,5%, 0,4%		67 kwl/ha 1%, 1%		62,3 kwl/ha, (0,82), 0,5%		92% dan (82%), 50%	67 kwl/ha, 2%, 2%	62,3 kwl/ha, (0,82), 0,5%	40%	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	2400 Kkal/kap/hr dan 63 gr/kap/hr		2620 Kkal/kap/hr dan 87 gr/kap/hr		2400 Kkal/kap/hr dan 63 gr/kap/hr		2394 Kkal/kap/hr dan 71 gr/kap/hr		99,7% dan 112%	2400 Kkal/kap/hr dan 63 gr/kap/hr	2394 Kkal/kap/hr dan 71 gr/kap/hr	35%	
3.	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	85,20%		83,90%		84,10%		83,90%		99,90%	84,30%	83,90%	40%	
4.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan agroindustri yang berbasis sumberdaya lokal : Jenis olahan pangan lokal yang dihasilkan	40 jenis		15 jenis		18 jenis		18 jenis		100%	23 jenis	18 jenis	45%	
5.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	2%												
6.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas Padi, Palawijah dan Hortikultura	67 kwl/ha, 2%, 2%		66 kwl/ha, 0,5%, 0,4%		67 kwl/ha, 1%, 1%		62,3 kwl/ha, (0,82), 0,5%		92% dan (82%), 50%	67 kwl/ha, 2%, 2%	62,3 kwl/ha, (0,82), 0,5%	35%	
7.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas Padi, Palawijah dan Hortikultura	67 kwl/ha, 2%, 2%		66 kwl/ha, 0,5%, 0,4%		67 kwl/ha, 1%, 1%		62,3 kwl/ha, (0,82), 0,5%		92% dan (82%), 50%	67 kwl/ha, 2%, 2%	62,3 kwl/ha, (0,82), 0,5%	30%	
8.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan pendapatan Petani	5%		0,5%		1,0%		1,0%		100%	2,0%	0,1%	30%	
9.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	100%		40%		50%		50%		100%	60%	50%	25%	
10.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Berkurangnya kasus rabies di Kota Bukittinggi	85%		80%		81%		81%		100%	82%	81%	30%	
11.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	2%		0,5%		0,5%		0,5%		100%	0,5%	0,25	30%	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
12.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	2%		0,5%		0,5%		0,5%		100%	0,5%	0,25	30%	
13.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Ikan	352 ton		340 ton		350 ton		350 ton		100%	351 ton	350 ton	40%	
14.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan produk olahan dan pemasaran hasil perikanan	10%		2%		4%		3%		75%	5%	3%	40%	
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>															
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan pengelolaan persampahan	100	%	90	%	90	%	90	%	100%	90,00%	60,30	60,30	
2.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	15	%		%	10	%	10	%	100%	12,00%	3,37	22,49	
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase peningkatan pengendalian polusi	30	%			70	%	60	%	86%	60%	20,20	67,33	
4.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses informasi lingkungan hidup	95	%			60	%	60	%	100%	70%	20,23	21,30	
5.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan									0%	0,67 %	0,00	0,00	
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>															
1.	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha	100	%	40	%					0%	17	19,00	19,00	
2.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100 %	67,00	67,00	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
3.	Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan	Tingkat Tersedianya data dan informasi perpustakaan.	100	%	40	%					0%	17	19,00	19,00	
4.	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	100	%	40	%					0%	17	19,00	19,00	
5.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	100	%	100	%	100	%	90	%	90%	100%	63,67	63,67	
6.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	100	%	100	%	100	%	90	%	90%	100%	63,67	63,67	
7.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah	Tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	100	%	100	%	100	%	80	%	80%	100%	60,33	60,33	
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>															
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase kesiap siagaan dan tanggap terhadap bencana	90	%	100	%	60	%	100	%	167%	70%	66,90	74,33	
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase aparat yang terlatih dalam penanggulangan bencana	90	%	100	%	60	%	100	%	167%	0%	66,67	74,07	
3.	Program Sistem Kebencanaan	Persentase regulasi/kebijakan, dokumen dan sistem peringatan dini bencana	70	%	100	%	60	%	100	%	167%	0	66,67	95,24	
<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>															
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100	%	100	%	100	%	96	%	96%	100%	65,67	65,67	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
2.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah gangguan keamanan yang dapat diredam akibat gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain	100	%	100	%	100	%	96	%	96%	100%	65,67	65,67	
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	100	%	100	%	100	%	96	%	96%	100%	65,67	65,67	
4.	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	100	%	0	%	0	%	0	%	0%	100%	0,33	0,33	
5.	Program Pencegahan, Penanganan Dan Rehabilitasi Narkoba	Jumlah kasus narkoba di Bukittinggi	100	%	100	%	100	%	92	%	92%	100%	64,33	64,33	
6.	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	100	%	100	%	100	%	0	0%	0%	100%	33,67	33,67	
7.	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Tingkat Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	100	%	100	%	100	%	98	%	98%	100%	66,33	66,33	
<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>															
1.	Program Pelayanan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	5		5		7,2		7,2		100%	2	4,73	94,67	
2.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	5		5		8		8		100%	2	5,00	100,00	
3.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	100		100		100		100		100%	16,67%	66,72	66,72	
4.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	100		100		0		0		0%	16,67%	33,39	33,39	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
5.	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	5		5		5		5		100%	2	4,00	80,00	
6.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	80	%	80	%	82	%	82	%	100%	14	58,67	73,33	
7.	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	80	orang	80	orang	0		0		0%	14	31,33	39,17	
8.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkannya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanaka oleh pemerintah maupun masyarakat	10		10		10		10		100%	2,50%	6,68	66,75	
9.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	3	%	3	%	3	%	3	%	100%	1	2,33	77,78	
10.	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	80	pelaku usaha	80	pelaku usaha	0		0		0%	14	31,33	39,17	
11.	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	12		12		12		12		100%	2	8,67	72,22	
12.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	12		12		12		12		100%	2	8,67	72,22	
<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>															
1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Presentase LPM yang aktif	100	%	100	%	5	%	5	%	100%	100%	35,33	35,33	
		Presentase Posyandu yang aktif	100	%	100	%	5	%	5	%	100%	100%	35,33	35,33	
		Presentase TP PKK yang aktif	100	%	100	%	5	%	5	%	100%	100%	35,33	35,33	
		Presentase dasawisma yang aktif	100	%	100	%	5	%	5	%	100%	100%	35,33	35,33	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
2.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	50	%	50	%	15	%	15	%	100%	9%	21,70	43,39	
3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Presentase peningkatan jumlah swadaya masyarakat	5%		5%		5%		5%		100%	2%	0,04	80,00	
		jumlah bangunan fisik yang dibiayai dengan swadaya masyarakat	24				24		20		83%	4	0,83	83,00	
4.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Presentase RW yang aktif	100	%	100	%	10	%	10	%	100%	100%	37,00	37,00	
		Presentase RT yang aktif	100	%	100	%	10	%	10	%	100%	100 %	37,00	37,00	
5.	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100%	67,00	67,00	
<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>															
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	85	95,00	95,00	
2.	Pengembangan Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	4	kegiatan	0		0		0		0%	3	1,00	25,00	
3.	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	3		3		2		2		100	2	2,33	77,78	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keterbacaan dan Keamanan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	0		0		0		0		0	80	80,00	80,00	
5.	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan	60	proposal	42	proposal	60	proposal	28	proposal	47%	60	43,33	72,22	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Satuan	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016					Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017		CATATAN
							Target	Satuan	Realisasi	Satuan	Tingkat Capaian (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
6.	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT	100	%	90	%	80	%	80	%	100	85	85,00	85,00	
7.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	90	%	81	%	75	%	75	%	100%	80	78,67	87,41	
8.	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	Kualitas pelayanan pada masyarakat	80	%	80	%	85	%	85	%	100%	90,00%	55,30	69,13	
9.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	90	%	80	%	80	%	80	%	100%	85,00%	53,62	59,57	
10.	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	10	%	3	%	3	%	3	%	100%	5	3,67	36,67	
11.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan per tahun	17	%	5	%	7	%	7	%	100%	9,00%	4,03	23,71	
12.	Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Aparatur yang kapabel dan kompetitif dalam manajemen pemerintahan	109		109		109		109		100%	110,00%	73,03	67,00	
13.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam Pencapaian tujuan program Pemerintah	100	%	100	%	80	%	80	%	100%	85	88,33	88,33	
14.	Program Kerjasama Informasi dan Media massa	Kuantitas informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik	29		24		24		24		100%	24	24	83,00	

## 2.4. Penelaahan Terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi untuk Kota Bukittinggi

Adapun keterkaitan antara RPJMN dan RKPD Provinsi Sumatera Barat dengan perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi dapat dilihat sesuai tabel berikut :

**Tabel 2.127.**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi**

No	Kebijakan Nasional		
	RPJMN	RKPD Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat	
2.	Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;	Pelaksanaan Birokrasi reformasi dalam pemerintahan.	
3.	Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;	Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan	
4.	Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	
5.	Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera;	Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis.	
6.	Akan Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional;	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi	
7.	Akan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik;	Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan.	
8.	Akan Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.	
9.	Akan Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial	Pengembangan energi dan pembangunan Infrastruktur	
10.		Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam	

Dari tabel diatas secara umum dapat ditelaah kebijakan Pembangunan Nasional yang dikenal dengan Nawacita dibandingkan dengan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya sama-sama mempunyai tujuan dan semangat dalam :

- Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
- Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.
- Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis dengan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi dengan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan.
- Berorientasi pada pembangunan mental dan karakter bangsa dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dari Korupsi, efektif, bermartabat dan terpercaya.

Meskipun visi pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMN tidak sama dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun arah kebijakan dan tujuan dari RPJMN dan RKPD Provinsi Sumatera Barat dapat dianalisa dan ditarik kesimpulan bahwa sama-sama punya semangat ingin mewujudkan masyarakat yang

adil dan makmur, mandiri dan maju dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah serta mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

Sedangkan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bukittinggi merumuskan Misi utama yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradab berdasarkan iman dan taqwa.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan.
- Menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan di wilayah Sumatera.
- Mewujudkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan menyenangkan.

## **2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bukittinggi dalam Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Peningkatan Urusan Pendidikan
2. Peningkatan Urusan Kesehatan
3. Peningkatan Urusan Ekonomi, Jasa dan Perdagangan
4. Peningkatan Urusan Kepariwisata
5. Peningkatan Urusan Pemerintahan Lainnya.

**Tabel 2.128.**  
**Rumusan Usulan Program/Kegiatan**  
**Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi**  
**Kota Bukittinggi**

No	Program/Kegiatan	Volume (Jumlah Usulan)	Lokasi	SKPD Terkait	Validasi / Keterangan
1	Bedah Rumah	99	Kota Bukittinggi	Dinas PKP	
2.	Rehab Mesjid/Mushalla	34	Kota Bukittinggi	Dinas PKP	
3.	Pembuatan Riol	12	Kota Bukittinggi	Dinas PUPR	
4.	Dam Tebing / Bangunan	5	Kota Bukittinggi	Dinas PUPR	
5.	Pembangunan Jalan Lingkungan	4	Kota Bukittinggi	Dinas PKP	
6.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	11	Kota Bukittinggi	Dinas PUPR	
7.	Perbaikan Jalan	30	Kota Bukittinggi	Dinas PKP / PUPR	
8.	Pembangunan Pos Keamanan Masyarakat	3	Kota Bukittinggi	Dinas PKP	
9.	Pengadaan Ambulance	4	Kota Bukittinggi	Dinas Kesehatan	
10.	Pembangunan Gapura	15	Kota Bukittinggi	Dinas PKP	
11.	Pembuatan dan Perbaikan Trotoar Jalan	8	Kota Bukittinggi	Dinas PUPR	
12.	Pemberian Bibit Pohon dan Tanaman	4	Kota Bukittinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
13.	Pembangunan Halte	3	Kota Bukittinggi	Dinas Perhubungan	
14.	Rehab MDA, MDTA, TPQ	12	Kota Bukittinggi	Dinas PKP / Bagian Kesra	
15.	Pembangunan / Rehab Pos Kesehatan Masyarakat (Posyandu, Poskeskel, Posbindu, Posyandu Lansia)	11	Kota Bukittinggi	Dinas Kesehatan / Kecamatan	
16.	Pembangunan / Rehab Saluran dan Drainase	7	Kota Bukittinggi	Dinas PUPR	
17.	Pendidikan dan Kebudayaan	35	Kota Bukittinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
18.	Pariwisata dan olahraga	14	Kota Bukittinggi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
19.	lain-lain	28	Kota Bukittinggi		
<b>JUMLAH</b>		<b>399</b>			

## 2.6 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Penyusunan sebuah perencanaan tidak dapat dilepaskan dari analisis isu-isu strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan akan meningkatkan kualitas perencanaan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Selain identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga harus dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat, pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut terjadi ketimpangan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Mengatasi ketimpangan yang terjadi disusun perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan pembangunan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.

### **2.6.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah**

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah;

1. Cakupan masalah yang luas;
2. Permasalahan cenderung meningkat di masa datang dan berdampak negatif;
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bukittinggi setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Dengan adanya indikator dan target yang ditetapkan tersebut, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui kondisi capaian sebagai data dasar bagi perencanaan menengah tahun 2016-2020. Untuk dapat melaksanakan amanat RPJPD Kota Bukittinggi dan melihat tingkat capaian pembangunan, khususnya Tahap II periode 2010-2015, maka dalam bagian ini akan diuraikan kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan RPJPD Kota Bukittinggi. Disebutkan dalam RPJPD Kota Bukittinggi bahwa Visi Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2025 adalah: "Terwujudnya Masyarakat Adil, Sejahtera dan Terdidik berlandaskan Agama dan Budaya dalam Kota yang Maju dan Berwawasan Lingkungan". Untuk mencapai Visi jangka panjang tersebut, maka disusun Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradab berdasarkan iman dan taqwa;

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadikan kota tentram, aman dan tertib dalam mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai pusat perdagangan di Sumatera;
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan menyenangkan.

#### **2.6.1.1. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

##### **2.6.1.1.1. Aspek Pemerintahan**

Proses pembangunan akan berjalan dengan baik tentunya dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang ini yang masih dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya adalah belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip di atas. Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya adalah:

#### **2.6.1.1.1.1 Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Kelembagaan Pemerintah Daerah merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah, selain elemen urusan pemerintahan dan kapasitas aparatur pemerintah daerah itu sendiri. Pengaturan terhadap kelembagaan atau sering disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi sekarang ini adalah belum maksimalnya Struktur Organisasi Tata Kerja dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan SOTK Kota Bukittinggi belum efektif dan efisien karena belum mampu menyentuh seluruh aspek pelayanan masyarakat. Selain itu, berkaitan dengan kelembagaan pemerintah daerah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal.

Ditetapkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menuntut perubahan regulasi turunannya berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini membawa konsekuensi perubahan struktur kelembagaan, perubahan urusan yang diselenggarakan dan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Standar Pelayanan Minimal yang hanya difokuskan untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di Bukittinggi juga akan mengikuti ditetapkannya regulasi tersebut.

#### **2.6.1.1.1.2.Sumber Daya Aparatur**

Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terlaksana optimal dikarenakan masih terbatasnya kompetensi aparatur dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu manajemen kepegawaian dalam hal penempatan aparatur belum merujuk sepenuhnya kepada kompetensi yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang membawa implikasi perubahan paradigma kepegawaian. Namun Peraturan Pemerintah sebagai regulasi turunannya belum ditetapkan sesuai tuntutan UU tersebut untuk dapat menyempurnakan sistem kepegawaian secara nasional.

### **2.6.1.1.1.3. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah secara penuh telah menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah, yang telah dimulai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pelaporan keuangan daerah sudah secara penuh menggunakan acrual base yang menuntut kesiapan personil, sistem dan penyajian laporan sesuai ketentuan tersebut. Pada tahun 2015 dan 2016 Pemerintah Kota Bukittinggi berturut-turut telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 dan 2015. Dengan acrual base sebagai wujud implementasi penuh SAP, maka menjadi tantangan besar tidak saja bagi SKPD PPKD, tetapi juga seluruh SKPD.

Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara bertahap telah mulai diurai dan diselesaikan sampai tahun 2015. Namun permasalahan ini belum bisa dituntaskan seratus persen, karena masalah asset ini terkait dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.

### **2.6.1.1.2. Aspek Sosial Budaya**

#### **2.6.1.1.2.1. Bidang Pendidikan**

Keberhasilan pembangunan suatu Negara ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan melalui pendidikan yang berkualitas. Kinerja pendidikan Kota Bukittinggi pada masa lalu relatif sudah baik, namun tantangan kedepan juga tidak ringan. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk urusan pendidikan pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi berwenang dalam mengelola Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, karena harus diserahkan ke pemerintah provinsi, efektif tahun 2017. Selama ini penyelenggaraan pendidikan SLTA merupakan unggulan Kota Bukittinggi yang telah banyak mengukir berbagai prestasi dan memperoleh berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, persoalan pendidikan juga akan berdampak terhadap penyelesaian aset dan sumber daya kependidikan yang perlu ditata sedemikian rupa. Beberapa program unggulan Kota Bukittinggi seperti pendidikan berbasis aqidah juga belum maksimal sehingga belum mampu menjadi icon kota sebagaimana yang diharapkan. Terwujudnya masyarakat cerdas yang dibarengi dengan kematangan emosional yang dilandasi nilai-nilai agama dan

adat minangkabau juga belum dapat diukur pencapaiannya karena belum tersedia indikatornya. Permasalahan ini timbul karena belum meratanya akses dan kualitas pendidikan tersebut bagi seluruh masyarakat. Selain itu tingkat kompetensi tenaga pendidik juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan saat ini. Berikut yang tidak kalah pentingnya mempengaruhi kualitas pendidikan adalah manajemen pengelolaan lembaga pendidikan yang belum terkelola dengan baik.

#### **2.6.1.1.2.2. Bidang Kesehatan**

Pelayanan kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Pemerataan akses pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yaitu Indonesia Sehat. Semenjak tahun 2014 Pemerintah telah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Program BPJS kesehatan. Kehadiran program ini mewajibkan seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan baik yang dibiayai pemerintah ataupun secara mandiri. Sampai saat ini lingkup kepesertaan di Bukittinggi relatif sudah baik mencapai 81,9% dari target nasional 100% pada tahun 2019.

Terkait itu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah persyaratan layanan kesehatan yang berjenjang untuk tingkat rujukan, sehingga dibutuhkan rumah sakit daerah. Semenjak tahun 2013 sudah dialokasikan dana cadangan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah hingga akhir tahun 2016 akan tersedia sebesar Rp. 72 Milyar. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ini akan dilaksanakan tahun 2017, namun Pemerintah Kota Bukittinggi juga membutuhkan biaya operasional dan pengembangan berikutnya sehingga menjadi rumah sakit rujukan yang berkualitas.

Kondisi Bukittinggi yang berada di persimpangan dan sebagai kota tujuan wisata juga menyebabkan Bukittinggi rentan terhadap menularnya penyakit, begitu juga dengan daerah sekitar Bukittinggi. Karena itu Bukittinggi membutuhkan penanganan penyaakit yang realtif ekstra dan diakses secara cepat. Unit layanan kesehatan yang ada di Bukittinggi relatif dekat, bahkan mudah diakses tidak hanya oleh masyarakat Bukittinggi, tetapi juga masyarakat di luar kota. Namun ini juga merupakan tantangan tersendiri, sehingga kebijakan Bukittinggi terutama untuk layanan kesehatan juga perlu mempertimbangkan penduduk kota dan bukan penduduk kota, sehingga alokasi anggaran

kesehatan dapat dimaksimalkan untuk warga kota. Walaupun pada prinsipnya persoalan bukan hanya masalah daerah dalam batas administratif saja, karena akan mencakup wilayah yang berdekatan.

Permasalahan lain yang harus disikapi belum terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat berdasarkan indikator indonesia sehat, peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta ketersediaan seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu fokus terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat penciptaan lingkungan hidup yang sehat juga menjadi perhatian untuk ditingkatkan.

#### **2.6.1.1.2.3. Lingkungan Hidup**

Proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini mendorong gagasan pembangunan yang berbasiskan lingkungan dan menjadi perhatian hingga internasional. Karena itu pembangunan berwawasan lingkungan menjadi sangat penting agar daya dukung alam dapat dipertahankan dalam tajak pembangunan ramah lingkungan.

Secara umum kondisi lingkungan masih tergolong baik, terutama kualitas udara. Namun kualitas air dan tanah menjadi perhatian serius, terutama dengan konversi lahan pertanian menjadi bangunan dan gedung, serta pemanfaatan irigasi sebagai drainase. Sementara itu fungsi-fungsi drainase juga tidak berjalan baik, sehingga menimbulkan genangan air disamping luapan air dari luar kota. Permasalahan lingkungan hidup juga terkait kualitas sanitasi. Target pemerintah tahun 2019, kualitas sanitasi sudah 100% baik, dimana kualitas sanitasi sudah memenuhi standar nasional. Persoalan ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup dengan berperilaku hidup bersih dan sehat.

#### **2.6.1.1.2.4. Sampah**

Tingginya tingkat aktifitas masyarakat di Kota Bukittinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Kota. Hal ini juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Prilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga para pengunjung, baik

yang berwisata, maupun pada pusat-pusat perdagangan.

Beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Payakumbuh sudah membantu penyelesaian masalah pesampahan, namun tidak dalam jangka panjang, karena keterbatasan dan daya dukungnya. Untuk itu pemerintah kota perlu memikirkan TPA regional baru untuk keberlanjutannya karena Bukittinggi memiliki keterbatasan lahan. Selain itu program 3 R (*reduce, reuse and recycle*) juga belum berjalan, sehingga perlu lebih dikembangkan dan membudaya di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator, selalu berupaya dalam mewujudkan 3R tersebut

#### **2.6.1.1.2.5. Air Bersih**

Ketersediaan air bersih guna melayani kebutuhan masyarakat merupakan salah satu penunjang dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Sampai saat ini ketersediaan air bersih belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Kota Bukittinggi, dikarenakan kurangnya sumber air yang ada. Hingga kini sumber air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat hanya bersumber dari satu tempat saja yakni daerah Sungai Tanang. Permasalahan penting lain juga terkait jaringan pipa air yang sudah tua, sehingga efisiensinya masih rendah, dan tingkat kebocoran cukup tinggi.

Selain mencari sumber air baku baru dari luar kota, Bukittinggi juga sudah harus melakukan rehabilitasi jaringan perpipaan, terutama transmisi induk dari sumber air baku di Sungai Tanang hingga batas kota. Sementara jaringan dalam kota sudah dilakukan rehabilitasinya semenjak tahun 2011 pada beberapa titik. Dengan demikian peta jaringan menjadi hal penting untuk melihat kondisi perpipaan PDAM di Bukittinggi.

#### **2.6.1.1.3. Aspek Ekonomi**

Kota Bukittinggi sudah lama dikenal sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang memberikan kontribusi yang positif dalam pertumbuhan ekonomi Kota. Hanya saja pertumbuhan ekonomi tersebut masih menyisakan permasalahan mengenai belum terwujudnya ketangguhan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan produk unggulan daerah.

#### **2.6.1.1.3.1.Kualitas KUMKM**

Aktifitas ekonomi Bukittinggi didukung oleh KUKM dan peranannya terlihat dari struktur PDRB Kota Bukittinggi. KUMKM di Bukittinggi terus berkembang dan terbuka, sehingga menjadi magnitudo untuk berusaha bagi urban. Implikasinya pengangguran kota terus berkembang sehingga mampu menyerap angkatan kerja. Selain itu KUKM juga dinilai tahan dalam menghadapi guncangan perekonomian, karena dianggap tidak berhubungan langsung dengan bank dan lebih banyak menggunakan input lokal.

Permasalahan yang dihadapi KUKM di Kota Bukittinggi pada dasarnya sama dengan permasalahan umum yang dihadapi, yakni permasalahan peningkatan kualitas produk, packaging, manajemen usaha pelaku UMKM dan pola pemasaran. Penggunaan teknologi produksi masih terbatas karena spesifik masing-masing produk dan bahkan pelaku usaha. Pengembangannya membutuhkan intervensi pemerintah, berikut fasilitasi dan motivasi untuk memanfaatkannya.

Permasalahan modal usaha dalam kaitannya dengan kredit perbankan juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi. Selain itu masalah yang masih mendasar dari KUKM ini adalah manajemen dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan itu semua akhirnya bermuara pada kurang kompetitifnya produk lokal baik skala nasional maupun internasional.

#### **2.6.1.1.3.1.Sarana Pendukung Perekonomian**

Sarana pendukung pengembangan perekonomian tentunya tidak bisa dilepaskan dari sistem transportasi meliputi jalan raya, alat transportasi terminal dan manajemen lalu lintas. Kota Bukittinggi belum memiliki terminal angkutan barang, sementara kondisi terminal angkutan orang juga semakin berkurang karena peluasan pertokoan. Kondisi ketiadaan terminal angkutan barang dan berkurangnya fungsi terminal angkutan penumpang berdampak kepada aktivitas perekonomian kota. Karena itu keberadaan terminal angkutan barang dan terminal angkutan penumpang yang representatif sangat mendesak. Lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kewenangan terminal tipe A dan B dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi efektif semenjak tahun 2017. Hal ini perlu disikapi dengan baik, sehingga betul-betul mampu mendorong perekonomian kota dengan dukungan sarana dan prasarana yang representatif.

Sejalan dengan persoalan terminal, kebutuhan akan sarana perparkiran juga

sangat mendesak untuk mendukung fungsi kota. Keberadaan gedung parkir yang ada sekarang belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah perparkiran. Operasional gedung parkir yang ada juga belum maksimal, sementara perparkiran liar yang menggunakan badan jalan juga menjadi persoalan yang masih sulita diatasi, terutama pada puncak keramaian kunjungan ke Bukittinggi. Prasarana penting mendukung perekonomian kota juga terkait dengan pengembangan pasar yang ada. Kebutuhan pasar yang represntatif menjadi sangat penting sehingga mampu mendukung pertumbuhan pedagang, meningkatkan layanan terhadap konsumen dengan ketersediaan areal perparkiran, baik untuk pedagang ataupun pembeli.

Pada saat ini perkembangan pedagang belum terkendali, sehingga menggunakan badan jalan, areal parkir, sementara pertokoan *Banto Trade Centre* belum dapat difungsikan. Kondisi ini semakin membuat wajah kota menjadi semraut dan berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi perkotaan. Rencana revitalisasi ketiga pasar menjadi mendesak untuk direalisir dengan pembangunan secara vertikal, dan menyediakan areal perparkiran, serta penyediaan pertokoan dan areal perdagangan sesuai kebutuhan dan prilaku pedangan ataupun pembeli.

Mendukung keberadaan Bukittinggi sebagai kota wisata juga dibutuhkan *outlet* dan *shopping centre* kerajinan produk UMKM. Hal ini perlu diintegrasikan dengan pengembangan objek wisata, sehingga perdagangan souvenir dan berbagai produk industri lainnya lebih terkendali dan memberikan kesan nyaman dan aman bagi pengunjung. Begitu juga dengan pusat kuliner yang membutuhkan pengelolaan profesional sehingga memberikan kenangan yang baik bagi setiap pengunjung. Pengembangan kawasan pedestrian di sekitar Jam Gadang juga merupakan salah satu solusi penting yang sudah pernah diwacanakan. Bahkan keberadaan pedestrian saat ini juga perlu ditingkatkan lagi, sehingga tidak memberi image negatif bagi penduduk dan pengunjung. Karena itu konsep pedestrian perlu dilakukan secara terpadu dan perencanaan yang matang, melibatkan seluruh *stakeholders* sehingga didukung secara bersama. Berbagai keterbatasan yang ada di pusat kota ini juga perlu dicarikan solusinya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang menjadi penghambat mewujudkan Bukittinggi sebagai *pedestrian city*.



## *Bab III*

# **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

---

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2018.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pengembangan ekonomi daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2018 diprioritaskan untuk Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Peningkatan Promosi Industri dan Pariwisata, Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah, Peningkatan sarana prasana pendukung perekonomian daerah serta Program Penanggulangan Kemiskinan.

#### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017**

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2016 dan 2017 dan perkiraannya pada tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas yang terjaga. Beberapa indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2015 dan 2016 berikut dengan proyeksi tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi**

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun			Tahun		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (Rp milyar)	5.018,3	5.628,1	6.117,4	7.087,3	7.948,7	8,919
2.	PDRB atas dasar Harga Konstan (Rp, milyar)	4.324,4	4.591,4	4.872,5	5.196,3	5.549,7	5.883,4
3.	Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun 2010 (%)	6,28	6,18	6,12	6,38	6,8	6,75
4.	Tingkat Inflasi (%)	7,43	9,24	2,79	3 - 5	4,0	4,0
5.	Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%)						
	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,49	1,48	1,43	1,33	1,26	1,26
	• Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Industri Pengolahan	7,76	7,28	6,86	6,71	6,45	6,45
	• Pengadaan Listrik dan Gas	0,45	0,51	0,63	0,43	0,39	0,39
	• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,13	0,12	0,12
	• Konstruksi	6,59	6,29	6,34	6,11	6,03	6,03
	• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,23	32,75	33,64	32,98	33,11	33,11
	• Transportasi dan Pergudangan	10,78	10,97	10,90	10,77	10,68	10,68
	• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,74	4,94	5,46	5,53	5,85	5,85
	• Informasi dan Komunikasi	6,61	6,60	5,99	6,29	6,14	6,14
	• Jasa Keuangan dan Asuransi	6,15	6,17	6,13	6,36	6,45	6,45
	• Real Estat	3,52	3,52	3,58	3,38	3,32	3,32
	• Jasa Perusahaan	0,69	0,67	0,68	0,63	0,61	0,61
	• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,77	6,47	5,89	6,64	6,64	6,64
	• Jasa Pendidikan	5,13	5,24	5,31	5,48	5,60	5,60
	• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,12	3,12	3,09	3,27	3,35	3,35
	• Jasa lainnya	3,83	3,83	3,91	3,96	4,00	4,00
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,72	3,93	6,04	3,73	3,62	3,16
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	77,67	78,02	78,72	78,98	79,47	79,82

Sumber: Data tahun 2011 -2015 dari BPS Kota Bukittinggi  
Data tahun 2016 s/d 2018 hasil proyeksi dari Bappeda

Keterangan: \* angka sementara

## **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB mencerminkan *output* yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 489.368,9 juta rupiah dari tahun 2014 sebesar 5.628.061,9 juta rupiah menjadi 6.117.430,8 juta rupiah pada tahun 2015. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi Pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 7.087.303,8 juta rupiah dan tahun 2017 sebesar 7.948.787,9 juta rupiah serta tahun 2018 sebesar 8.919.365,4 juta rupiah.

Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat.

## **Tingkat pertumbuhan ekonomi**

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2015 yang sebesar 6,12% ini menurun sebesar 0,06 % dibandingkan dari tahun sebelumnya yakni 6,18%. Pada tahun 2015 tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sektor primer seperti Sektor Pertanian, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah sektor tersier seperti penyediaan akomodasi dan makan minum.

Melihat angka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2015 baik atas dasar Harga Konstan maupun atas dasar Harga Berlaku, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB adalah pada kategori Perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini merupakan hasil dari semakin berkembangnya perekonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa serta.

### **Pendapatan perkapita**

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan domestik suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

Pendapatan perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dan sekaligus relatif rendahnya pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita Kota Bukittinggi tahun 2015 mencapai Rp.49.888.932,-/jiwa. atau naik sebesar Rp.3.088.871,-/jiwa dari tahun sebelumnya yaitu setara dengan nominal Rp.46.800.061,-/jiwa.

### **Laju inflasi**

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2015 cukup rendah yakni 2,84% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 9,24%. Laju inflasi untuk tahun ke depan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

### **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2015 TPT Kota Bukittinggi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,11%. Angka pada tahun 2014 yang sebesar 6,04% menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat 6 orang pengangguran. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

## **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama kurun waktu 2011-2015, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Indonesia dan selama kurun waktu 2011-2015 nilai IPM Kota Bukittinggi selalu meningkat dan di atas rata-rata Propinsi dan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2018 diselaraskan dengan pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan dalam RKP 2018, yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari:
  - a. revolusi mental;
  - b. pembangunan pendidikan;
  - c. pembangunan kesehatan; dan
  - d. pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari:
  - a. kedaulatan pangan;
  - b. kedaulatan energi dan ketenagalistrikan;
  - c. kemaritiman dan kelautan;
  - d. pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari:
  - a. pemerataan antar kelompok pendapatan;
  - b. perbatasan negara dan daerah tertinggal;
  - c. pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - d. pengembangan konektivitas nasional.

Penyelarasan sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2018 dengan pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan dalam RKP 2018, disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di Kota Bukittinggi, karena tidak semua unsur dari dimensi tersebut dimiliki oleh Kota Bukittinggi

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang digunakan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Arah dan kebijakan keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang didasari oleh berbagai kondisi objektif dan aspirasi yang berkembang di daerah guna mewujudkan rencana-rencana pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat.

Agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal, maka dukungan pendanaan daerah dan penetapan anggaran belanja daerah harus disusun secara terukur dalam bentuk input, output dan outcome yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Sehingga arah dan kebijakan umum daerah dijabarkan dalam:

- 1) proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan,
- 2) arah kebijakan pendapatan daerah,
- 3) arah kebijakan belanja daerah, dan
- 4) arah dan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

#### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Sumber utama pendanaan pembangunan daerah adalah berasal dari Pendapatan Daerah. Kebijakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan lebih lanjut diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta menggunakan data-data tahun sebelumnya dan tahun

berjalan, proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 82,261 miliar rupiah dengan rincian pajak daerah dapat tercapai sebesar 40,817 miliar rupiah, retribusi daerah 26,723 miliar rupiah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar 3,934 miliar rupiah serta dari sumber lain-lain PAD yang sah sebesar 10,786 miliar rupiah.

**Tabel 3.2.**  
**Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2015 s.d. 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)					
		2015	2016		2017		PROYEKSI/ TARGET
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2018
1,	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>593,323,296,014</b>	<b>675.267.277.742</b>	<b>647.045.711.855,85</b>		<b>703,137,133,154</b>	<b>688.391.605.084</b>
1,1	Pendapatan Asli Daerah	66,027,359,716	73.665.978.705	71.303.771.735,85	97.524.097.154	97,524,097,154	93.561.077.670
1,1,1	Hasil Pajak Daerah	29,002,139,678	37.372.320.634	30.709.690.231,00	46.068.135.193	46,068,135,193	45.293.035.421
1,1,2	Hasil Retrebusi Daerah	17,031,261,904	25.008.005.524	21.070.502.562,00	36.468.949.414	36,468,949,414	20.078.534.219
1,1,3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3,884,306,585	3.733.946.797	4.636.543.697,00	3.448.620.797	3,448,620,797	5.352.600.766
1,1,4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16,109,651,549	7.551.705.750	14.887.035.245,85	11.538.391.751	11,538,391,750	22.803.072.005
1,2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>449,872,722,059</b>	<b>571.717.429.850</b>	<b>547.829.867.933,00</b>	<b>577,015,505,000</b>	<b>577,015,505,000</b>	<b>592.863.505.745</b>
1,2,1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12,555,527,059	15.942.934.000	15.128.297.227,00	17.789.622.000	17,789,622,000	17.653.790.038
1,2,2	Dana Alokasi Umum	408,640,651,000	458.968.482.000	458.968.482.000,00	458.968.482.000	458,968,482,000	540.939.366.142
1,2,3	Dana Alokasi Khusus	28,676,544,000	96.806.013.850	73.733.088.706,00	100.257.401.000	100,257,401,000	34.270.349.565
1,3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>77,423,214,239</b>	<b>29.883.869.187</b>	<b>27.912.072.187,00</b>	<b>28,597,531,000</b>	<b>28,597,531,000</b>	<b>86.171.991.572</b>
1,3,1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	32.221.258.238
1,3,3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	21,308,056,239	22.914.429.187	22.912.072.187,00	21,097,531,000	21,097,531,000	53.950.733.334
1,3,4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52,991,158,000	5.000.000.000	5.000.000.000,00	7,500,000,000	7,500,000,000	5,000,000,000
1,3,5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,124,000,000	1.969.440.000	-	-	-	1,823,565,594
1,3,6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah						

### 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan

daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalian dan pengelolaan sumber-sumber yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Penerimaan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

Peningkatan PAD Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 antara lain diperoleh dari:

- a. Hasil kajian pada Riset Potensi Pendapatan Daerah (Rispora) yang telah dilakukan pada tahun 2014.
- b. Pajak hotel khususnya Hotel Bintang IV, karena manajemen pengelolaan pajak hotelnya telah baik didukung oleh kesadaran dari pihak manajemen untuk memungut pajak kepada konsumen.
- c. Pajak restoran/rumah makan, karena penerapan pemungutan pajak dengan Sistem Bill secara utuh sesuai rekomendasi BPK.
- d. Penggunaan sistim cash register untuk Hotel dan Rumah Makan/Restoran, sehingga pendapatan asli daerah pada objek hotel dan rumah makan / restoran dapat dihitung secara real time dan lebih akurat.
- e. Pajak Penerangan Jalan, karena dengan tumbuhnya rumah/bangunan baru yang juga akan menjadi pelanggan PT. PLN baru, maka akan terjadi penambahan wajib pajak penerangan jalan di Kota Bukittinggi.
- f. Beberapa retribusi daerah dengan pemberlakuan tarif baru seperti Retribusi Sampah (Perda Nomor 5 Tahun 2014), Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan (Perda Nomor 15 Tahun 2013 dan Retribusi Pelayanan Pasar (perda Nomor 16 Tahun 2013)
- g. Monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD yang ketat serta pengawasan atas pemasukan PAD untuk menghindari terjadinya kebocoran.

- 2) Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

Penerimaan dari dana perimbangan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun antara lain dari dana alokasi umum serta diikuti dengan penerimaan dari dana DAK.

Dana Alokasi Umum pada tahun 2018 ditargetkan Rp. 565,098 Milyar, mengalami kenaikan Rp. 106,129 Milyar dari APBD Tahun 2017 yaitu Rp. 458 Milyar. Sedangkan untuk alokasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penurunan, Dana Alokasi Khusus merupakan Dana Alokasi Khusus Reguler yang Terdiri dari DAK Infrastruktur Air Minum, Jalan, Kesehatan dan KB, Pariwisata, Pertanian, Pendidikan dan DAK Penugasan yang terdiri dari Lingkungan Hidup dan Irigasi.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kemandirian pendanaan daerah, dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap komponen pendapatan daerah secara keseluruhan. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah secara rata-rata masih menunjukkan angka yang rendah yaitu sebesar 10,41 persen. Sementara pemberi kontribusi yang cukup besar dalam pendanaan pembangunan yaitu Pendapatan Dana Perimbangan dengan rata-rata mencapai 76,83 persen, hal ini terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Diharapkan dari tahun ke tahun tingkat kemandirian Pemerintah Kota Bukittinggi terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kecenderungan peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Berikut ini disajikan tabel data kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah:

**Tabel 3.3.**  
**Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah**  
**terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2012 s.d. 2017**

NO	URAIAN	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	Rata - Rata
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>								
<b>1</b>	<b>PAD</b>	<b>10,52</b>	<b>9,77</b>	<b>10,47</b>	<b>10,35</b>	<b>11,13</b>	<b>10,26</b>	<b>13,86</b>	<b>10,41</b>
1,1	Pajak Daerah	4,35	4,30	4,28	4,59	4,89	4,60	6,55	4,50
1,2	Retribusi Daerah	3,49	3,20	3,15	3,03	2,87	3,13	5,19	3,14
1,3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,76	0,63	0,70	0,58	0,65	0,62	0,49	0,66
1,4	Lain-Lain PAD Yang Sah	1,92	1,64	2,34	2,15	2,72	1,91	1,64	2,11
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>76,22</b>	<b>79,31</b>	<b>77,50</b>	<b>76,03</b>	<b>75,82</b>	<b>76,07</b>	<b>82,06</b>	<b>76,83</b>
2,1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	3,89	5,26	3,44	2,57	2,12	2,60	2,53	3,31
2,2	DAU	67,97	70,70	69,83	67,90	68,87	67,55	65,27	68,80
2,3	DAK	4,36	3,34	4,24	5,57	4,83	5,93	14,26	4,71
<b>3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>13,26</b>	<b>10,92</b>	<b>12,03</b>	<b>13,62</b>	<b>13,05</b>	<b>13,67</b>	<b>4,07</b>	<b>12,76</b>
3,1	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	0,01	-	-	-	-	-	3,00	0,00
3,2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2,90	2,35	2,32	2,90	3,59	2,79	1,07	2,81
3,3	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	2,52	-	9,43	10,35	8,93	10,89	-	7,02
3,4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,15	-	0,28	0,37	0,53	-	-	0,22

Berdasarkan data *time series* dari Tahun 2013, PAD Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya namun dilihat dari tingkat pertumbuhan menunjukkan tingkat fluktuasi yang cukup tinggi. Pada tahun 2017, PAD diperkirakan tumbuh sebesar 5,49 persen. Realisasi dan pertumbuhan PAD Kota Bukittinggi selama tahun 2011-2015 serta target PAD Kota Bukittinggi tahun 2017 dan 2018 ditampilkan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.4.**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi Realisasi Tahun 2011 s.d. 2015,**  
**APBD 2016 dan Target Tahun 2017-2018**

Tahun	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2011	42.223.418.002	24,75
2012	45.076.555.841	6,76
2013	55.204.002.563	22,47
2014	61.613.681.043	11,61
2015	66.027.359.716	7,16

Tahun	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2016	72.882.962.533	10,38
2017	76.889.300.509	5,49
2018	82.261.758.143	12,86

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang mengkoordinir Pendapatan Daerah dan SKPD terkait lainnya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain :

1. Melakukan intensifikasi pendapatan asli daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, melalui:
  - a. Melakukan uji petik untuk objek-objek retribusi daerah seperti hotel, rumah makan, dan parkir.
  - b. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD, yang dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
  - c. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.
  - h. Melakukan riset terhadap potensi pajak dan retribusi daerah melalui pihak ketiga.
  - i. Menjaring wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah baru melalui pendataan secara berkala;
  - j. Merevisi Peraturan Daerah yang menyangkut penambahan obyek pajaknya daerah/ retribusi daerah dan atau kenaikan tarif pajak daerah/retribusi daerah;
  - k. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi pengelola PAD;
  - l. Penggunaan teknologi informasi dalam rangka pengendalian pendapatan asli daerah.
2. Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah diubah dengan self assessment system. Salah satu pertimbangan penerapan self assessment system adalah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak dapat menghitung potensi pembayaran pajak secara akurat.

3. Mengefektifkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.
5. Secara proaktif berupaya mendapatkan informasi kebijakan tentang pengalokasian dana/program/ kegiatan dari APBN dan APBD Provinsi serta lembaga pemerintah non departemen, baik dalam rangka realisasi dana perimbangan maupun penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
6. Mengembangkan strategi kreatif untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diantaranya optimalisasi manajemen kas daerah tanpa mengganggu substansi proses pembangunan.

Selain peningkatan di atas, juga terjadi penurunan pada penerimaan pajak reklame karena akan lahir kebijakan tidak membolehkan lagi reklame rokok di Kota Bukittinggi begitu juga dengan berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana penerimaan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil sudah tidak ada lagi.

### **3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah tidak terlepas dari kebijakan penganggaran untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2018 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2018 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi pelaksanaan RPJMD.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia

dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung lainnya untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5.**  
**Realisasi Belanja Daerah 2015 s.d. 2016, APBD 2017**  
**serta Proyeksi Belanja Daerah 2017 – 2018**

No	Uraian	JUMLAH (Rp.)						
		2015		2016		2017		2018
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Proyeksi Realisasi	Proyeksi Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	<b>BELANJA DAERAH</b>							
1.1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	379.352.850.660	339.899.689.457	369.112.321.364	351.010.851.917	285.762.968.858	285.762.968.858	377.260.127.919
1.1.1.	Belanja Pegawai	359.512.622.742	322.784.474.843	352.495.800.801	336.101.758.265	263.665.444.864	263.665.444.864	361.721.489.356
1.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Belanja Hibah	16.498.597.820	15.881.006.950	11.694.321.895	11.063.426.045	14.978.563.326	14.978.563.326	11.114.839.895
1.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	1.328.811.430	821.266.538	2.304.380.000	1.333.685.699	2.001.142.000	2.001.142.000	2.405.980.000
1.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	617.818.668	412.941.126	617.818.668	511.981.908	617.818.668	617.818.668	617.818.668
	Belanja Tidak Terduga	1.400.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	1.400.000.000
1.2.	<b>Belanja Langsung</b>	279.353.790.403	28.676.544.000	371.418.096.231	78.733.088.706	107.757.401.000	107.757.401.000	366.454.452.503
	Belanja DAK	35.845.680.000	28.676.544.000	96.806.013850	73.733.088.706	100.257.401.000	100.257.401.000	361.454.452.503
	Belanja DID		-	-	5.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	5.000.000.000
	Pagu Indikatif							

Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan fungsi pemerintah daerah, perlu ditetapkan pokok-pokok kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2018 diantaranya sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam PP No. 23 tahun 2013 dan

- berdasarkan informasi Menteri Dalam Negeri, bahwasanya untuk PNS / ASN tidak ada kenaikan gaji seperti tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi diganti dengan Gaji Ke-14.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi.
  3. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dalam rangka pelayanan publik, di bidang pendidikan, pariwisata, lalu lintas dan perpajakan, kesehatan, dan perdagangan.
  4. Pengalokasian dana untuk program dan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan dan industri usaha kecil dan menengah.
  5. Program dan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, serta menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah.
  6. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap.
  7. Alokasi dana dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Bukittinggi. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan estetika kota maka prioritas anggaran juga diberikan untuk Program Sanitasi dan Kebersihan Kota.
  8. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan dan pelayanan kesehatan.
  9. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (pro poor) di Kota Bukittinggi.
  10. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum dan sarana dan prasarana sanitasi permukiman penduduk, parkir, terminal dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Bukittinggi.

11. Pengalokasi luncheon dana DAK dari Tahun 2010 sampai 2015 berikut dengan sisanya untuk digunakan kembali sesuai petunjuk teknis penggunaan dana DAK yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

### 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Untuk masa yang akan datang dalam rangka percepatan pembangunan sarana dan prasarana publik perlu dilakukan strategi penambahan sumber pendanaan pembangunan melalui alternatif pinjaman dari dalam negeri sepanjang memungkinkan menurut ketentuan yang berlaku. Disamping pendapatan daerah, dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah juga berasal dari penerimaan pembiayaan daerah.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2015 dan 2016 serta Proyeksi 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s.d. 2016**  
**dan Proyeksi / Target Tahun 2017 dan 2018**

No	Uraian	JUMLAH (Rp.)						
		2015		2016		2017	Proyeksi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi 2017	Target 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	53.100.000.000	74.341.027.131	65.263.139.853	65.263.139.853	142.030.505.824	142.030.505.824	132.030.505.824
1.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	70.000.000.000	98.224.027.131	88.463.139.853	88.463.139.853	146.030.505.824	146.030.505.824	377.260.127.919
1.1.1.	Silpa Tahun sebelumnya	70.000.000.000	98.224.027.131	88.463.139.853	88.463.139.853	75.220.682.946	75.220.682.946	75.220.682.946
1.1.2.	Pencairan dana cadangan			-	-	70.809.822.878	70.809.822.878	70.809.822.878
	Pembangunan RSUD			-	-	70.809.822.878	70.809.822.878	70.809.822.878
	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya			-	-	-	-	-
1.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	16.900.000.000	23.883.000.000	23.200.000.000	23.200.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	14.000.000.000
1.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	5.000.000.000
1.2.2.	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya	-	8.883.000.000	-	-	-	-	5.000.000.000
1.2.3.	Penyertaan Modal	6.900.000.000	74.341.027.131	8.200.000.000	8.200.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2018 sebesar Rp.132.030.505.824,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp. 75,220,682,946,- dan pencairan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp. 70.809.822.878,- dan untuk Revitalisasi Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya sebesar Rp.5.000.000.000,-. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.14.000.000.000,- dialokasikan untuk:

1. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 5.000.000.000,-
2. Revitalisasi kawasan jam gadang dan sekitarnya sebesar Rp. 5.000.000.000,-
3. Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp.4.000.000.000,-

Sehingga neto pembiayaan daerah sebesar Rp. 132.030.505.824,- digunakan untuk menutupi defisit belanja daerah, pembangunan RSUD dan revitalisasi kawasan Jam Gadang dan sekitarnya.



## Bab IV

# TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

---

### 4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

#### 4.1. 1. Tema Pembangunan

Kebijakan pada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 memperhatikan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) yaitu “ **Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**”.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yaitu : “**Memajukan Kualitas SDM, Infrastruktur dan Iklim Investasi Untuk Menurunkan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat**”.

Sejalan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah : “**PENGEMBANGAN PARIWISATA DENGAN MENINGKATKAN KUALITAS SEKTOR PENDUKUNG UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BUKITTINGGI**” .

Tema tersebut mengandung beberapa makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu :

#### 1. Pembangunan pariwisata dengan meningkatkan sektor pendukung

Dimaknai dengan kondisi Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan PAD dan pendapatan masyarakat. Dengan indikator : (a) Daya tarik objek wisata; (b) Ketersediaan akses; (c) Ketersediaan sarana prasarana pariwisata; (d) Kenyamanan dan keamanan.

## 2. Kesejahteraan Masyarakat

Dimaknai dengan kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator :

- a. Pertumbuhan Ekonomi;
- b. Pengangguran;
- c. Penduduk Miskin;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan,
- e. Indeks Pembangunan Gender.

### 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah harus terarah dan mengacu kepada visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021 visi kota adalah **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, berkenaan telah disyahnkannya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, maka penyusunan dokumen RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pada Bab III pasal 8 point (3) berbunyi “Dalam hal daerah sedang menyusun Peraturan Daerah mengenai RPJMD yang sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 memperhatikan rencana program, sasaran dan pagu indikatif yang disusun dalam rancangan RPJM.

Dalam penyempurnaan pencapaian Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun

urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi yang termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran**

<b>VISI :</b>			
<b>“TERWUJUDNYA BUKITTINGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”</b>			
<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).	Meningkatkan sinergitas pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam pembangunan
		Meningkatkan aktifitas generasi muda dalam penggalian potensi diri (seni, budaya, olahraga)	Meningkatnya even generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya
		Meningkatkan fungsi rumah ibadah untuk penguatan iman dan taqwa dan generasi muda	Meningkatnya event keolahragaan generasi muda
2.	Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan	Meningkatnya kapabilitas lembaga pemerintahan
		Mewujudkan reformasi birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
			Meningkatnya kualitas pelayanan public
3.	Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Terpenuhinya RTH Kota
			Peningkatan pelayanan kesehatan
			Fasilitas Sosial yang memenuhi standar lingkungan
		Pemenuhan target universal access	
		Peningkatan Penataan Ruang Kota	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota
Menjadikan Bukittinggi sebagai kota Pusaka Nasional dan Dunia	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya		
	Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama		

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
		Terwujudnya pelayanan lalin dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib lancar dan terpadu	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas
		Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana
4.	Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna	Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam menunjang perekonomian kota	Berkembangnya koperasi
			Berkembangnya usaha mikro
		Mewujudkan ekonomi kota yang sehat	Berkembangnya investasi
			Berkembangnya Industri Kecil Menengah
		Meningkatnya kesempatan Kerja bagi masyarakat	Meningkatnya lapangan kerja
	Meningkatnya penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Mewujudkan pariwisata yang berdaya saing	Meningkatnya kunjungan wisatawan
		Mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu	Meningkatkan mutu pendidikan
			Mewujudkan Integrasi nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
		Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		Mewujudkan Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berdaya saing	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan
		Meningkatkan Ketertiban, Ketentraman dan keamanan Kota	Berkurangnya penyakit masyarakat

## 4.2 Prioritas Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kepada visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### a. Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, Bab II pasal 3 point (1) menyatakan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018 yang dimuat dalam Rancangan RKP Tahun 2018. Dimana arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018 merujuk pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional sebagai berikut :

- Cita 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- Cita 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- Cita 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- Cita 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Cita 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- Cita 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Cita 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Cita 8 Melakukan revolusi karakter bangsa

Cita 9 Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2018 berdasarkan RKP Tahun 2018 terdiri dari 10 prioritas, yaitu :

- 1) pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Perumahan dan Pemukiman;
- 4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
- 5) Ketahanan Energi;
- 6) Ketahanan Pangan;
- 7) Penanggulangan Kemiskinan;
- 8) Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman;
- 9) Pembangunan Wilayah; dan
- 10) Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan.

#### **b. Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2018 yaitu:

- 1). **Prioritas 1;** Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat dengan 5 kegiatan prioritas:
  - a. Pengembangan sekolah/lembaga formal dan non formal di bidang keagamaan dan adat;
  - b. Peningkatan koordinasi keagamaan dan perlindungan kegiatan keagamaan;
  - c. Peningkatan, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;

- d. Peningkatan penghimpunan, penyaluran serta pemanfaatan dana zakat, infaq, wakaf dan sedekah;
  - e. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama dan adat.
- 2). **Prioritas 2;** Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan dengan 3 kegiatan prioritas:
- a. Peningkatan kapasitas aparatur;
  - b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Peningkatan efektifitas pelayanan publik melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- 3). **Prioritas 3;** Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan dengan 4 kegiatan prioritas:
- a. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan rintisan 12 tahun;
  - b. Peningkatan mutu pembelajaran yang berorientasi pendidikan karakter;
  - c. Penyediaan dan pemerataan layanan pendidikan;
  - d. Peningkatan kualitas lulusan SMA / SMK / MA yang siap bersaing di pasar kerja.
- 4). **Prioritas 4;** Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 4 kegiatan prioritas:
- a. Penyediaan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - b. Peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan;
  - c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - d. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.
- 5). **Prioritas 5;** Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis dengan 2 kegiatan prioritas:
- a. Peningkatan cadangan pangan;
  - b. Peningkatan produktivitas komoditi utama pertanian.

- 6). **Prioritas 6;** Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi dengan 4 kegiatan prioritas:
  - a. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan industri, wisata, pertanian dan perdagangan;
  - b. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, industri, perdagangan dan koperasi;
  - c. Peningkatan kualitas perizinan;
  - d. Percepatan pembangunan destinasi pariwisata.
  
- 7). **Prioritas 7;** Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan dengan 1 kegiatan prioritas:
  - a. Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan budidaya laut.
  
- 8). **Prioritas 8;** Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal dengan 4 kegiatan prioritas:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi);
  - b. Peningkatan keterampilan, dukungan modal usaha dan pemasaran;
  - c. Perluasan aksesibilitas (antara lain jalan, telekomunikasi);
  - d. Sarana produksi pertanian.
  
- 9). **Prioritas 9;** Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur dengan 5 kegiatan prioritas:
  - a. Pembangunan dan peningkatan jalan mendukung kawasan pertanian, industri pariwisata dan perdagangan;
  - b. Pembangunan infrastruktur moda transportasi;
  - c. Pembangunan/peningkatan jalan mendukung kawasan tertinggal;
  - d. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman;
  - e. Pembangunan Pembangkit listrik untuk daerah perbatasan dan pulau terluar;

- 10). **Prioritas 10;** Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam dengan 3 kegiatan prioritas:
- a. Pembangunan infrastruktur mitigasi kebencanaan;
  - b. Pengendalian dan penurunan beban pencemaran;
  - c. Pengendalian kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang.

**c. Rancangan Proritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2018.**

Mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2018 disusun sebagai berikut:

1. Pengembangan Pariwisata;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur;
4. Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
6. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan;
7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
8. Penanggulangan Kemiskinan;
9. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya.

Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Bukitinggi tahun 2018 dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Nasional yang tertuang dalam Nawacita adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Tabel Keterkaitan Prioritas Pembangunan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2018**

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	NO	PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI
1.	pendidikan	1	Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan	1	Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan
2.	Kesehatan	2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	NO	PRIORITAS KOTA BUKITTINGGI
3.	Perumahan dan Pemukiman	3	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam	3	Pelestarian Lingkungan Hidup
4.	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	4	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi	4	Pengembangan Pariwisata
5.	Ketahanan Energi	5	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	5	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
9.	Pembangunan Wilayah				
6.	Ketahanan Pangan	6	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis	6	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
7.	Penanggulangan Kemiskinan	7	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	7	Penanggulangan Kemiskinan
8.	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	8	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan		
10.	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan	9	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	8	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
		10	Pembangunan mental da pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat	9	Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya

Rancangan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2018 tersebut dalam rangka penyempurnaan pencapaian visi dan misi kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2018**

MISI	PRIORITAS
1	2
MISI 1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).	PRIORITAS 9 Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya

MISI	PRIORITAS
1	2
MISI 2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan	PRIORITAS 2. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik
MISI 3 Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan	PRIORITAS 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
	PRIORITAS 4. Pelestarian Lingkungan Hidup
MISI 4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna	PRIORITAS 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
	PRIORITAS 8. Penanggulangan Kemiskinan
MISI 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PRIORITAS 9. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya
	PRIORITAS 6. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan
	PRIORITAS 7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
	PRIORITAS 1. Pengembangan Pariwisata

#### d. Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Pembangunan Tahun 2018 berdasarkan prioritasnya diukur berdasarkan pencapaian sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai seperti pada tabel berikut:

##### 1). Prioritas 1 : Pengembangan Pariwisata

SASARAN DALAM RPJMD	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2018
SASARAN 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan	1.	Jumlah kunjungan wisatawan	483.950	533.555

2). **Prioritas 2 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik**

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2018
<b>SASARAN 2.</b> Meningkatnya kapabilitas lembaga pemerintahan	1.	% pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	63,65%	70 %
	2.	Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP)	LPPD RANK 63,65 LKIP CC	LPPD RANK 55,4 LKIP C
	3.	Jumlah inovasi pelayanan publik	1	3
	4.	% capaian program pembentukan peraturan daerah	13	100
<b>SASARAN 3.</b> Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP
<b>SASARAN 4.</b> Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	Indeks kepuasan layanan public	82 %	50%

3). **Prioritas 3: Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur**

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2018
<b>SASARAN 5.</b> Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	1.	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	85	63%
	2.	Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	59	65%
<b>SASARAN 6.</b> Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	1.	Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	100	83%
	2.	Fasilitas Keselamatan Jalan	70	73%
	3.	Jalan berkondisi baik	85,67	90%
<b>SASARAN 7.</b> Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	1.	Fasilitas kebencanaan	71	70%

#### 4). Prioritas 4: Pelestarian Lingkungan Hidup

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2018
<b>SASARAN 8.</b> Terpenuhinya RTH Kota	1.	% RTH Publik yang dikelola	8	12%
	2.	% RTH Private		7.3%
<b>SASARAN 9.</b> Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	1.	% fasilitas sosial yang representative dan memenuhi standar lingkungan		84%
	2.	% Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan		75%
<b>SASARAN 10.</b> Pemenuhan target universal access	1.	% air minum layak	78%	97%
	2.	Kawasan Kumuh	-	-
	3.	% sanitasi layak	72,72	98%
<b>SASARAN 11.</b> Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya	1.	Benda cagar budaya yang dilestarikan	6 %	15%
<b>SASARAN 12.</b> Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	1.	jumlah pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama	1 unit	3 unit

#### 5). Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2018
<b>SASARAN 13.</b> Berkembangnya koperasi	1.	Jumlah Koperasi sehat	13	14
<b>SASARAN 14.</b> Berkembangnya Usaha Mikro	1.	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil	5	45
<b>SASARAN 15.</b> Berkembangnya Investasi	1.	Jumlah Investasi	1.771 Triliun	2.280 Triliun
<b>SASARAN 16.</b> Berkembangnya Industri Kecil Menengah	1.	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi)	5	15
<b>SASARAN 17.</b> Meningkatnya lapangan kerja	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,04%	2.16%
<b>SASARAN 18.</b> Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp. 30.709.690.231	Rp. 41.932.744.926
<b>SASARAN 19.</b> Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	1.	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	1.844	2.963 triliun

**6). Prioritas 6 : Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan**

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2018
<b>SASARAN 20.</b> Meningkatkan mutu pendidikan	1.	Harapan lama sekolah	14,92	14,80 Tahun
	2.	Angka Rata Rata Lama Sekolah	10,79	11,05 %
	3.	APK PAUD (3 - 6 TH)	79	87 %
	4.	APM SD	74 %	> 100%
	5.	APM SMP	118,20 %	> 100%
	6.	APM SMA	119,97 %	> 100%
	7.	Angka Putus sekolah Jenjang SD, SMP		0,14%
	8.	% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	79	76,27 %
	9.	% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	73	63,63 %
	10	% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA	82	63,63 %
	11.	% Kompetensi keahlian yang berakreditasi A tingkat SMK	42	41,86 %
<b>SASARAN 21.</b> Mewujudkan Integrasi nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan	1.	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal pendidikan karakter berbasis adat dan budaya minangkabau	1	1

**7). Prioritas 7 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2018
<b>SASARAN 22.</b> Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1.	Angka Harapan Hidup	73,13	73,12 Tahun
	2.	Puskesmas yang terakreditasi	2	4
	3.	Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	85	94%
<b>SASARAN 23.</b> Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal.	4.	Skor Pola Pangan Harapan	83,9	85,5

**8). Prioritas 8 : Penanggulangan Kemiskinan**

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2018
<b>SASARAN 24.</b> Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarsutamaan gender dan perlindungan anak	1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,71	1,56 %
	2.	Tingkat Kemiskinan	5,46	3,61 %
	3.	Indek Pemberdayaan gender	91%	72,84 %
	4.	Jumlah PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	112	83 %

**9). Prioritas 9 : Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya.**

SASARAN	INDIKATOR		CAPAIAN 2016	TARGET 2018
<b>SASARAN 25.</b> Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam pembangunan	1.	Pembangunan Fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dan semangat gotong royong	70	72 unit
	2.	Jumlah Perusahanan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	60	90 %
<b>SASARAN 26.</b> Meningkatnya even generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	1.	Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda	52	59 event
	2.	Sanggar seni yang aktif	8 sanggar	13 sanggar
<b>SASARAN 27.</b> Meningkatnya event keolahragaan generasi muda	1.	Jumlah Event keolahragaan bagi generasi muda	7	11 jenis
<b>SASARAN 28.</b> Meningkatnya fungsi rumah ibadah	1.	Kelompok/organisasi Remaja yang aktif dalam bidang keagamaan	4	9 klpk
<b>SASARAN 29.</b> Meningkatnya event keagamaan bagi generasi muda	1.	Jumlah Event keagamaan	3	9 jenis



## *Bab V*

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

---

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 yang dituangkan dalam Bab V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain memuat urusan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab V ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kota Bukittinggi Tahun 2018, juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan APBN Tahun 2018.

Isu permasalahan pembangunan Kota Bukittinggi yang begitu luas hakekatnya tidak mungkin diatasi dengan hanya mengandalkan sumber pendanaan APBD Kota Bukittinggi sendiri yang cukup terbatas. Disamping itu pada kenyataannya proses pembangunan yang sudah berjalan selama ini sudah merupakan perwujudan dari dukungan seluruh peran pemangku kepentingan di Kota Bukittinggi, baik melalui pendanaan APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Pihak Swasta, serta Bantuan pihak lainnya seperti swadaya masyarakat. Oleh karena itu sangat penting untuk merekapitulasi dan memetakan kembali

semua sumber pendanaan pembangunan di luar APBD Kota Bukittinggi yang berkembang di daerah selama ini, untuk kemudian diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan yang direncanakan, agar dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal.

Salah satu mekanisme untuk menjaring aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam meningkatkan pembangunan di Kota Bukittinggi diwujudkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Pada pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 ini setiap Kelurahan diarahkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang betul-betul prioritas dengan tiga (3) usulan per Kelurahan pada setiap bidang pembangunan yaitu: (1). Bidang Infrastruktur, (2). Bidang Ekonomi, (3). Bidang Sosial, dan (4) Bidang Pemerintahan. Seluruh usulan tersebut akan diakomodir oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan urusan yang dilaksanakannya setelah terlebih dahulu diferivikasi kesiapan lahan serta kelayakan teknis untuk pelaksanaan kegiatan tersebut nantinya. Daftar usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1**  
**DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	DETAIL LOKASI	VOLUME	ANGGARAN		KESIAPAN LAHAN *) (Siap/ Belum siap)	KELAYAKAN TEKNIS *) Layak/ Tidak Layak)	KETERANGAN
				PERKIRAAN ANGGARAN (Rp.)	TEKNIS PENEMPATAN ANGGARAN (Kegiatan/Hibah/ Bansos/APBD Kota/APBD Propinsi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN PAKAN LABUAH</b>							
1	Penambahan ruang belajar SD 03	Pakan Labuah						
<b>II</b>	<b>KELURAHAN BIRUGO</b>							
1	Penunjang Sarana dan Prasarana Pelatihan Panitahan, Randai dan Tari Gelombang	Kelurahan Birugo		90.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	Sangat perlu dilakukan untuk melestarikan seni dan budaya
2	Pengadaan Tanah dan Penambahan Lokal SD 05 Birugo	RT 3, RW IV		600.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	Pengadaan tanah untuk
<b>III</b>	<b>KELURAHAN AUR KUNING</b>							
1	Renovasi lantai II Kantor KAN Aua Birugo	Jl. Prof. M. Yamin SH RT 01 RW01	9x 12 M2		APBD Kota	Siap	Layak	
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN PAKAN LABUAH</b>							
1	Rehab Kantor KAN Tigo Baleh	Pakan Labuah						
2	Pelatihan Adat dan Seni Budaya bagi generasi muda dalam mendukung pariwisata yang berkarakter	Pakan Labuah						
3	Penambahan ruang belajar SDN 03 pakan labuah	Pakan Labuah	4 lokal					
<b>V</b>	<b>KELURAHAN LADANG CAKIAH</b>							
1	Pengadaan Drumband							
2	Pelatihan Adat dan Budaya		30					
3	Pelatihan Kader dan Bundo Kanduang		30					
<b>VI</b>	<b>KELURAHAN PARIT ANTANG</b>							
1	Beasiswa berprestasi	Kelurahan	20 orang	20.000.000,00	APBD Kota	Siap	Layak	
2	Bantuan operasional FKPM	Kelurahan	1 paket	9.000.000,00	APBD Kota	Siap	Layak	Tertampung DPA Kelurahan
3	Pendidikan dan pelatihan agama seni dan budaya (Pemahaman adat, panitahan, tari dan nencak silat)	Kelurahan	1 paket	40.000.000,00	APBD Kota	Siap	Layak	Diharapkan kedepannya tertampung
<b>VI</b>	<b>KELURAHAN BELAKANG BALOK</b>							
1	Pengadaan alat musik talempong dan pakaian tradisional grup kesenian Puti Linduang Bulan	Jl Perawat RT 03 Rw 01	25 orang		APBD Kota			
<b>B</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN TAROK DIPO</b>							
1	Pengadaan Mobiler dan Permainan untuk PAUD Nurul Ulum terintegrasi Posyandu Aua Batamu	Kel. Tarok Dipo	1 paket	30.000.000				
2	Pelatihan Adat Minangkabau	Kel. Tarok Dipo	1 paket	20.000.000				
<b>II</b>	<b>KELURAHAN PAKAN KURAI</b>							
1	Pengadaan peralatan Randai dan Tambua			100.000.000	APBD Kota			
2	Pengadaan peralatan Rebana			25.000.000	APBD Kota			
<b>III</b>	<b>KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TANGAH SAWAH</b>							
1	Lanjutan Pelatihan panitahan adat	ATTS	12 orang	20.000.000				
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS</b>							
1	Lanjutan pembangunan mushalla SDN. 01 Benteng	Jl. Ahmad Karim RT. 02 RW. II dan Jl. Ahmad Yani						
<b>V</b>	<b>KELURAHAN KAYU KUBU</b>							
1	Pembinaan pelestarian seni dan budaya minangkabau	Rw I, Rw II	1 paket	15.000.000	APBD Kota			
<b>VI</b>	<b>KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN</b>							
1	Pengadaan mobiler sekolah, SD, Posyandu, PAUD dan Poskeskel							segera masukkan
2	Penyediaan dana untuk kegiatan panitahan dan silek							sudah ada di tahun 2017
<b>C</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan latihan Panitahan Adat dan Budaya bagi Generasi Muda melalui Cupak Nan Duo	Kel. Koto Selayan				Siap	Layak	
2	Pelatihan Kesenian dan olahraga, randai, bela diri, silat dan lain-lain	Kel. Koto Selayan				Siap	Layak	
<b>II KELURAHAN GAREGEH</b>								
1.	Pengadaan dan Pemasangan Paving Blok	Halaman SDN 04 Garegeh	50 m					
<b>III KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN</b>								
1	Pembelajaran dan pelatihan adat istiadat bagi masyarakat						layak	
2	Pengadaan grup pencak silat dan panitahan						layak	
3	Pengadaan alat musik tradisional dan modern di SD 10 PPK						layak	
4	Rehab PAUD. TK Kenari, TK Al Ikhwan dan MIS dan SDN 05 Percobaan							
<b>IV KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH</b>								
1	Bantuan Dana Untuk Pelatihan adat Istiadat.Seni dan budaya	Ls	KGB		APBN	siap		
<b>V KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK</b>								
1	Mengadakan pelatihan adat dan budaya minang (panitahan, pasambahan)	Kel CGB			APBD Kota		Layak	
2	Pelatihan Tahfiz Alquran	Kel CGB			APBD Kota		Layak	
3	Pelatihan penyelenggaraan jenazah bagi generasi muda	Kel CGB			APBD Kota		Layak	
4	Pengadaan perlengkapan alat olahraga silat	Kel CGB			APBD Kota		Layak	
5	Pelatihan randai	Kel CGB			APBD Kota		Layak	
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
<b>A KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>								
<b>I KELURAHAN BELAKANG BALOK</b>								
1	Pengaspalan ulang jalan	Jl. Prof. Hazairin RW I (simpang yarsi) s/d Jl. Kehakiman RW II (Mesjid Al Barkah Belakang Balok)	± 750 m		APBD Kota			Aspal jalan sudah bergelombang
2	Pembuatan saluran air riol ke ngarai	Jl. Perawat RT 03 RW I	75 m		APBD Kota			Agar air tidak langsung menyentuh ke bibir ngarai / tanah
3	Pemasangan tiang lampu jalan	Jl. Perwira Ujung RT 02 RW 02	3 titik		APBD Kota			Belum ada sama sekali
<b>II KELURAHAN SAPIRAN</b>								
1.	Peningkatan jalan lingkungan (jalan aspal beton)	Jl. Sertu Kamaruddin RT II RW I	169 m	205.335.000	APBD Kota	Siap	Layak	Melalui usulan dana Hibah Kota
2.	Peningkatan jalan lingkungan, Penutupan Riol Rawan (Rawan DBD)	RW II RT III Belakang Kantor Membuat SIM	50 M	91.125.000	APBD Kota	Siap	Layak	Melalui usulan dana Hibah Kota
<b>III KELURAHAN BIRUGO</b>								
1	Lanjutan Pembangunan Bandar dan Trotoar	(dari RW V sampai ke RW IV depan Pasa Paqi Birugo)	250 M	300.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	
2	Pembangunan Pintu Air Permanen (Bandar Nagari)	RT 2, RW II		50.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	Sangat perlu dibangun untuk mengatasi banjir
3	Pembangunan Pagar dan Taman Kantor Kelurahan Birugo	Kantor Kelurahan Birugo		150.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	Kantor kelurahan belum ada pagar
<b>IV KELURAHAN AUR KUNING</b>								
1	Perbaikan drainase (500 m)	Jl. Adinegoro	20x0.5x0.8		APBD Kota	Siap	Layak	
<b>V KELURAHAN PAKAN LABUAH</b>								
1	Pembuatan bandar dan Trotoar Jl. Raya Tigo Baleh Depan kantor Lurah sampai depan Masjid	Pakan Labuah						
2	Pelatihan Adm Pertanahan dan IMB bagi Ketua RW/RT dan Pengurus LPM							
3	Pembuatan bandar/drainase jalan Bermawi dari simp tigo baleh s/d depan mushalla nurul Bilad kapalo Koto							
<b>VI KELURAHAN KUBU TANJUANG</b>								
1	Rehab berat saluran tersier Banda Gadang (Banda tengah)	RT II/RW 01-04	±1000 m	800.000.000,0				
2	Jalan Usaha tani sepanjang banda gadang	RT II/RW 01-03	1600 m	1,5 m				
<b>VII KELURAHAN LADANG CAKIAH</b>								
1	Pengadaan tanah untuk Kantor Lurah				APBD			
2	Perbaikan jembatan dan gorong-gorong di jalan sumua ladang cakiah	RT 03 RW 01	7 m		APBD	siap		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Renovasi Dam Banda Kubu Tabak	RT 04, RT 02 RW 01	200 m	50.000.000,0	APBD	siap		
<b>VIII KELURAHAN PARIT ANTANG</b>								
1	Pembangunan Kantor Lurah Lantai 2	Kantor Lurah Parit Antang RW III	400 m	2.000.000.000,00	APBD Kota	Siap	Layak	Prioritas Utama
2	Pemasangan Batu Barongjong Belakang Mushalla Arifah Ikua Labuah	Jl Kurai Ikua Labuah RT1 RW II	100 m	200.000.000,00	APBD Kota	Siap	Layak	Prioritas Utama
3	Pembangunan Dam Tebiang dan pagar tebing serta pengecoran lantai diatas dibelakang SMP 7	Tabing belakang SMP 7 Bukittinggi	30 m	950.000.000,00	APBD Kota	Siap	Layak	Prioritas Utama
<b>B KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>								
<b>I KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG</b>								
1.	Pembangunan Kantor Lurah BCKR	Kel. BCKR						Tidak terlampung di 2017
2	Pengedaman/ rehab/ penguatan tebing posyandu kamp. Trandam	RT 001 RW 004						
<b>II KELURAHAN TAROK DIPO</b>								
1	Pengaspalan jalan Pendidikan sampai ke SMP 2	RT.04 RW.03	400 x 3,5	100.000.000		Siap		
<b>III KELURAHAN PAKAN KURAI</b>								
1	Pembuatan Balai-Balai Masyarakat	RW 02	4 X 6 M	50.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	
2	Pengecoran Jalan (Bahan Redemik)	Jln Banda Dedek RT 01 / RW III	150 M 100 M		APBD Kota APBD Kota	Siap Siap	Layak Layak	
		RT 01 / RW IV	200 M		APBD Kota	Siap	Layak	
<b>IV KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TANGAH SAWAH</b>								
1	Lanjutan pembangunan Kantor Lurah ATTS		150 m	100.000.000				
2	Pengadaan tanah untuk Puskesmas dan Rumah Bidan		300 m	900.000.000				
3	Perbaikan drainase, plat beton bertulang Gg. Mahoni dan Gg. Apel	RT 03/ RW I	150 m	450.000.000				
<b>V KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS</b>								
1	Pendaman tebing Pasar Ikan Lama	Jl. Pasar Ikan Lama RT. 01 RW. I						
2	Pembangunan Kantor Lurah yang representatif minimal 2 (dua) tingkat dan basement untuk sarana parkir	RT. 03 RW. II						
3	Pengaspalan Jl. Kumango / depan soto H. Minah (akses ke lokasi tersebut agar kegiatan perdagangan di lokasi kembali ramai)	Kel. BPA						
<b>VI KELURAHAN KAYU KUBU</b>								
1	Pendaman/penahan tebing Panorama	Rt 1 Rw II	100 meter	1.000.000.000	APBD Kota	Siap		Usulan ke
<b>VII KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN</b>								
1	Pembuatan jalan ke SDN 13 Bukik Sangkuik	RT 03 RW IV	200 m	300.000.000				
2	Pembangunan gedung serbaguna	eks kantor Lurah lama						
<b>C KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>								
<b>I KELURAHAN PULAI ANAK AIR</b>								
1	Pembuatan Draenase dari Simpang Balai-Balai ke Lakuang	Balai-Balai RT.001/RW.003 menuju Simpang Lakuang RT.003/RW.002	500 M			Siap	Layak	
2	Pembuatan Dam Tebing Musahlla Al-Ikhlas	Komplek Wisma Gantiang Permai, RT.003/RW.004	10 X 8 M			Siap	Layak	
3	Pembuatan Dam Batu Barongjong SD 06 Pulai Anak Air	ParakCongkak, RT.002/RW.005	20 X 8 M			Siap	Layak	
4	Penyelesaian Konsolidasi Jalan By Pass	Kelurahan				Siap	Layak	
<b>II KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>								
1	Pe3mbangunan lantai 2 ruang serba guna (ruang arsip) kantor Lurah Koto Selayan	RW 02/RT 01	6 x 8 m	300.000.000	APBD Kota Bukittinggi	Siap	Layak	
2	Pembuatan Gedung Rawat Inap Puskesmas Nilam Sari	RW 01	8 x 15 M	600.000.000	APBD Kota Bukittinggi	Siap	Layak	
3	Pembinaan/Sosialisasi Adm Pertanahan	Kelu Koto Selayan						
<b>III KELURAHAN GAREGEH</b>								
1.	Dam Tebing Belakang Kantor Lurah	Belakang Kantor Lurah	40 m					Disetujui prioritas 1
<b>IV KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>								
1	Pengedaman Tabek Parak Bunceh	RT 02/ RW.04	1.5 x 24 m			Siap		
<b>V KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>								
1.	Pengaspalan Ulang	RT.02/RW.II RT.04/RW.II RT.01/RW.III	500 m 300 m 500 m		APBD KOTA			
<b>VI KELURAHAN PUHUN TEMBOK</b>								
1	Pembangubab baru gedung serba guna RW	RT 03/RW 05	5 x 10 M			Siap	Layak	
2	Rehabilitasi Jalan Kirab Remaja	RT 02/RW 05	1			Siap	Layak	
3	Rehab kantor dan lanjutan pembangunan ruangan LPM	Kelurahan Puhun Tembok		70.000.000	APBD		Layak	
4	Pembuatan Sumur Bor Kantor Lurah			30.000.000	APBD		Layak	
<b>VII KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN</b>								
1	Pembuatan jalan lingkung	Simpang SDN 12 - simp Puskesmas (RW I)	2 km			Siap	Layak	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Pengaspalan jalan Ambacang	RT 01 RW II	300 m			Siap	Layak	
3	Pembuatan Sumur Resapan	Simp Jirek	3 titik			Siap	Layak	
<b>VIII</b>	<b>KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH</b>							
1	Pengaspalan jalan	1.400M	RW.2.RT.4		APBD	Siap		
2	Pembangunan Drainase	1.150M	RW.2.RT.4		APBN	Siap		
3	Pembuatan Troktoar	500 M	RW.2.RT		APBN	Siap		
<b>IX</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK</b>							
1	Drainase	RW 01	1.145 M		APBD Kota	Siap	Layak	
2	Pembuatan Drainase	RW 06	850 M		APBD Kota	Siap	Layak	
3	Drainase	RW 02	550 M		APBD Kota	Siap	Layak	
4	Drainase	RT 04 / RW 04	300 M		APBD Kota	Siap	Layak	
	<b>JALAN</b>							
1	Pencoran Jalan Lingkung di Komp. Pesantren	RT03.RT 04 / RW 03	400 x 4 M		APBD Kota	Siap	Layak	
2	Pelebaran Jalan Famboyan	RT 04/RW 06	100 M		APBD Kota	Siap	Layak	
	<b>TIANG LAMPU</b>							
1	Pemasangan Lampu Jalan	RW 01	8 Unit		APBD Kota	Siap	Layak	
2	Pemasangan Lampu Jalan	RW 02	20 Unit		APBD Kota	Siap	Layak	
3	Pemasangan Lampu Jalan	RT 02.03/RW 04	4 Unit		APBD Kota	Siap	Layak	
4	Pemasangan Lampu Jalan	RW 06	4 Unit		APBD Kota	Siap	Layak	
5	Dam tebing di belakang gedung serba guna	RW 04/RW 06			APBD Kota	Siap	Layak	
6	Lanjutan pembangunan gedung serbaguna RW	RW 02			APBD Kota		Layak	
7	Pembangunan gedung serbaguna RW	RW 03			APBD Kota		Layak	
	<b>DINAS KESEHATAN</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN BELAKANG BALOK</b>							
1	Pembuatan jambanisasi	Kelurahan Belakang Balok	48 R.Tanaga		APBD KOTA			Program Kotaku
<b>II</b>	<b>KELURAHAN AUR KUNING</b>							
1	Pembangunan Poskeskel	Gg. Aster RT.02/01	3x5 M2			Belum siap	Layak	
<b>III</b>	<b>KELURAHAN PARIT ANTANG</b>							
1	Bantuan tambahan makan lansia	Kelurahan	20 orang	15.000.000,00	APBD Kota	Siap	Layak	
<b>B</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN KAYU KUBU</b>							
1	Pembangunan Poskeskel	SMP N 4 / Rt 4 Rw II	5 X 8 meter	200.000.000	APBD Kota	Belum Siap		Tanah Pemko (sudah dilaporkan)
2	Peningkatan BOP Kader Posyandu (mobiler, seragam, ATK)	Kayu Kubu	25 orang/ 5 unit	40.000.000	APBD Kota			
<b>C</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN PUHUN TEMBOK</b>							
1	Pembangunan Baru Puskesmas Pembantu	RT 02/RW 02	200 M <sup>2</sup>			Siap	Layak	
<b>II</b>	<b>KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>							
1	Makanan Tambahan (PMT) Posyandu dan Poskeskel							
2	Pembinaan Posyandu, Lansia, Balita	Kelu Koto Selayan						
<b>III</b>	<b>KELURAHAN GAREGEH</b>							
1	- Kursi plastik	Posyandu Flamboyan dan Mahkota Mas	20 bh					
	- Tripot ( Timbangan dacin )	s d a	2 bh					
	- Timbangan Bayi	s d a	1 bh					
	- Timbangan digital	s d a	2 bh					
	- Timbangan Manual	s d a	2 bh					
	- Lemari Arsip	s d a	2 bh					
2	Meja kerja petugas beserta kursi	Puskesmas	3 buah					
	Tempat tidur periksa	s d a	1 buah					
	Tempat tidur ginekologi	s d a	1 buah					
	Lemari arsip sakrem untuk menutupi ruang pada saat pemeriksaan	s d a	1 buah					
	Lampu sorot meja alat atau drasing car	s d a	1 buah					
	Lemari untuk menyimpan peralatan medis (lemari kaca)	s d a	1 buah					
	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN BIRUGO</b>							
1	Pembangunan Gapura/Pintu Gerbang , Pagar dan Menara Mensjid Jami' Birugo	RT 3, RW II		4.300.000.000	APBD Kota dan APBD Provinsi (Hibah)	Siap	Layak	Sangat perlu untuk penunjang pariwisata
<b>II</b>	<b>KELURAHAN AUR KUNING</b>							
1	Pembuatan riol/saluran air (0,5x0,5x86 m)	Gg. Beringin RT 01 RW 01	80x0,5x0,5		APBD Kota	Siap	Layak	
2	Pembuatan riol/saluran air	Jl. Nenas RT 03 RW 02	20x0,5x0,5		APBD Kota	Siap	Layak	
<b>III</b>	<b>KELURAHAN BIRUGO</b>							
1	Penetapan Patok Batas Kelurahan Birugo	Kelurahan Birugo		75.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	Sangat dibutuhkan karena sampai sekarang belum ada patok batas

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN KUBU TANJUANG</b>							
1	Bedah Rumah An. Andayani	RW 1 RT 2	1 unit	50.000.000,0				
<b>B</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG</b>							
1	Perbaikan/ revitalisasi drainase lingkungan dan penutupan bandar Kamp. terendam	se Kel. BCKR						Tidak tertampung di 2017
<b>II</b>	<b>KELURAHAN TAROK DIPO</b>							
1.	Pengaspalan Jalan parak tinggi	RT.05 RW.04	600	500.000.000		Siap		
2.	Pembuatan riol depan DKK (agar dikoordinasikan dengan Dinas PU dan Dinas Kesehatan agar di buat riol baru)	RT.02 RW.04	200 x 60	500.000.000		Siap		
<b>III</b>	<b>KELURAHAN PAKAN KURAI</b>							
1.	Pembuatan / Penutupan riol	Dekat SMP N 6 ( Belakang Dinas Pertanian Kota Bukittinggi ) RT02 / RW 01	250 M		APBD Kota	Siap	Layak	
		Samping Lapangan Parkir RT 02 / RW VI	100 M		APBD Kota	Siap	Layak	
		Samping Foto Copy Wulan RT 02 / RW IV	150 M		APBD Kota	Siap	Layak	
		Belakang Balai Adat RT 01 / RW VI	100 M		APBD Kota	Siap	Layak	
		RT 01 / RW III	100 M		APBD Kota	Siap	Layak	
		RT 02 / RW III	100 M					
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS</b>							
1	Pembangunan gedung terpadu untuk Poskeskel / Posyandu, Mushola dan WC Umum	Taman Benteng RT. 01 RW. III						
2	Relokasi sebuah rumah di Jl. Cindua Mato / pendakian wowo yang berdiri diatas tanah Negara, kondisi tanah yang labil dan dipinggir jurang	RT. 02 RW. I						
<b>V</b>	<b>KELURAHAN KAYU KUBU</b>							
1	Peningkatan drainase/riol Bantolaweh Lingkar Dalam	RW I (Rt 2, 3, 4)	800 meter	500.000.000	APBD Kota	Siap		
<b>VI</b>	<b>KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN</b>							
1	Pendaman dan pengecoran bahu jalan RW 3 - RW	RW III dan RW V	1700 m					
<b>C</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>							
1	Pengecoran jalan lingkung Taruko ke Koto Selayan					Siap	Layak	
<b>II</b>	<b>KELURAHAN GAREGEH</b>							
1	Pembangunan Riol di Jalan Karan	RT.01/RW 02	400 m					Disetujui prioritas 2
2	Pembuatan Drainase	Jln Paninjauan ke jln Ranah RT.04.	400 m					Disetujui prioritas 3
3	Pen Daman Jalan Lakuang Ateh ( Kiri-kanan )	Lakuang Ateh RT.01. RW 01	20 m					Disetujui prioritas 4
<b>III</b>	<b>KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>							
1	Pengedaman dan Pengerasan Jalan Setapak	RT 01/ RW.01	2x200 m 2x250 m			Siap		
2	Pembuatan pagar pembatas YPAC	RT 01/ RW.02	1 x 170 m			Siap		
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>							
1	Pembuatan Drainase Tertutup Gang Ramura	RT.03,05,07/RW. II	600 m					
2	Pembuatan Drainase Tertutup Gang Jambak	RT.02/RW.II	200 m					
	<b>DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN ABTB</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN PAKAN LABUAH</b>							
1	Sosialisasi Perda Trantibum bagi RW, RT, FKPM dan Pemilik Rumah Kos	Pakan Labuah						
<b>B</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN</b>							
1	mobiler FKPM	samping kantor lurah						
2	Sarana prasarana pos ronda	5 RW						
3	Posko untuk tenaga keamanan yang telah dilatih pemerintah	5 RW						
<b>II</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>							
1	Bantuan Operasional FKPM	Kelurahan	1 Klpk					
<b>III</b>	<b>KELURAHAN AUR KUNING</b>							
1	Pengadaan honor FKPM	Kel. Aur kuning	12 bulan	45.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	
2	Bantuan alat komunikasi FKPM (HT)	Kel. Aur kuning	5 unit	10.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	
<b>C</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>							
1	Pembinaan Tranitib	Kelu Koto Selayan						
<b>II</b>	<b>KELURAHAN GAREGEH</b>							
1	Pembinaan FKPM & Bantuan Operasional	Kelurahan Garegeh						
2	Pembinaan Linmas & Bantuan Operasional	Kelurahan Garegeh						
3	Bantuan Pakaian untuk Pengurus FKPM (Rompi)	Kelurahan Garegeh	30 stel					
<b>III</b>	<b>KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN</b>							
1	Pembuatan pos ronda							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN BELAKANG BALOK</b>							
1	Bintek KBLK Kelurahan	Kelurahan	20 orang		APBD Kota			
<b>B</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN KAYU KUBU</b>							
1	Fasilitasi dana penanggulangan bencana (biaya visum korban, makan dan minum dll)	Kayu Kubu		60.000.000	Kegiatan			
<b>II</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>							
1	Pelatihan penanggulangan Bencana	Kelurahan	21 RT					
	<b>DINAS SOSIAL</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN PAKAN LABUAH</b>							
1	Pendataan ulang ferivikasi data PMKS, KIS/JKN, penerima Raskin dan penerima bantuan sosial lainnya	Pakan Labuah						
<b>II</b>	<b>KELURAHAN LADANG CAKIAH</b>							
1	Pembinaan karang taruna				APBD			
<b>III</b>	<b>KELURAHAN AUR KUNING</b>							
1	Penambahan bantuan untuk lansia			19.200.000	APBD Kota	Siap	Layak	
<b>B</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN TAROK DIPO</b>							
1	Pelatihan Manajemen Organisasi Bagi Pengurus Karang Taruna dan Organisasi Kepemudaan lainnya	Kel. Tarok Dipo	1 paket kegiatan	30.000.000				
<b>II</b>	<b>KELURAHAN AUR TAJUNGGANG TANGAH SAWAH</b>							
1	Peningkatan kapasitas/Studi banding kader PSM	ATTS	5 orang	25.000.000				
<b>III</b>	<b>KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS</b>							
1	Relokasi sebuah rumah di Jl. Cindua Mato / pendakian wowo yang berdiri diatas tanah Negara, kondisi tanah yang labil dan dipinggir jurang	RT. 02 RW. I						
<b>C</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN PULAI ANAK AIR</b>							
1	Pelatihan Menjahit Bedcover dan Pembuatan Boneka	Koto Dalam, RW.005	2 paket			Siap	Layak	
<b>II</b>	<b>KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>							
1	Pembinaan dan Pelatihan pemuda dan karang Taruna	Kelu Koto Selayan						
<b>III</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>							
1	Bantuan Operasional Karang Taruna	Kelurahan	1 Klpk					
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>							
1	Penambahan sarana penerima program BPJS	RW. 01/ RW.02/ RW.03/ RW. 04						
<b>V</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>							
1.	Bantuan Dana Stimulant Untuk lansia	RW.I s/d IV	100 orang					
2.	Penambahan Kuota Raskin	RW.I s/d IV	137 orang					
3.	Penambahan Kuota BPJS	RW.I.S/d IV.	200 orang					
4.	Pelatihan Montir Sepeda Motor	RW.II	1 paket					
5.	bantuan kursi roda dan tongkat netra	RW.I.S/d IV.	5 dan 5					
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKI, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>							
1	Bantuan modal usaha lansia produktif	RW. 01/ RW.02/ RW.03/ RW. 04	10 orang	5.000.000			layak	
2	Peningkatan kualitas pemberdayaan dasawisma	Kelurahan Manggis Ganting						
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN BIRUGO</b>							
1	Penunjang Sarana dan Prasarana Kelompok Pengelolaan Sampah dan Pengomposan	Rt 03 RW IV		60.000.000	APBD Kota dan APBD Provinsi	Siap	Layak	Perlu dibangun rumah tempat mesin dan bak pengomposan (sangat penting)
<b>II</b>	<b>KELURAHAN SAPIRAN</b>							
1	Pelatihan mengolah sampah organik dan unorganik untuk karang taruna	Kelurahan Sapiran	1 kelompok	30.000.000	Kegiatan / APBD Kota	Siap	Layak	Dengan adanya bantuan mesin pencacah sampah dan telah terbentuknya bank sampah kelurahan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>B</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN TAROK DIPO</b>							
1	Pelatihan Daur Ulang Sampah untuk kelompok dasawisma	Kelurahan Tarok Dipo	1 paket kegiatan	30.000.000				
<b>II</b>	<b>KELURAHAN PAKAN KURAI</b>							
1	Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah			25.000.000	APBD Kota			
<b>C</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>							
1	Peningkatan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga oleh Dasawisma							
<b>II</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK</b>							
1	Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Bekas		1 Unit		APBD Kota	Siap	Layak	
<b>III</b>	<b>KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>							
1	Pembangunan sarana pembuatan kompos	RW. 02	1 ls	50.000.000			Layak	
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN PARIT ANTANG</b>							
1	Penyediaan mesin pembaca keaslian KTP	Kel Parit Antang	1 buah	30.000.000,00	APBD Kota	siap	Layak	Sudah dianggarkan oleh disdukcapil tahun 2017 sebanyak 24 buah
<b>B</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG</b>							
1.	Pendataan dokumen administrasi kependudukan	se kelurahan BCKR						
<b>C</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>							
1	Pembinaan/ Penyelenggaraan Administrasi kependudukan	Kelu Koto Selayan						
<b>II</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>							
1	Pelatihan Adm kependudukan bagi RT	Kelurahan	21 RT					
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS</b>							
1	Jl. Yos Sudarso dan tanjakan Benteng agar dijadikan satu jalur saja, begitu juga Jl. Teuku Umar juga dijadikan satu jalur demi menghindari kemacetan dan mengurangi potensi kecelakaan dan bendi di depan Jam Gadang dialihkan ke depan Tugu Pahlawan Tak Dikenal serta parkir sepeda motor di trotoar dan pinggir trotoar Jl. A. Yani dari Toko Mekar sampai KFC	RT. 01 RW. II, RT. 01 RW. III						
<b>A</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN PUHUN TEMBOK</b>							
1	Pembuatan Pita kejut lalin & rambu-rambu	RW 03 & 06	4			Siap	Layak	
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN PUHUN TEMBOK</b>							
1	Pembuatan sistem Informasi RW net berbasis Android	Kelurahan Puhun Tembok	1 paket aplikasi	50.000.000	APBD		Layak	
	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN BELAKANG BALOK</b>							
1	Pembentukan Sentra Kuliner	Jl. Batang Masang (depan UNP)	20 bh	40.000.000	APBD KOTA	Siap		Keseragaman tenda pedagang kuliner
<b>II</b>	<b>KELURAHAN SAPIRAN</b>							
1.	Pembinaan dan Sosialisasi Usaha Mikro Kecil Kelurahan sapiran	Kelurahan Sapiran	48 KK	30.000.000	Kegiatan / APBD Kota	Siap	Layak	Berdasarkan pendataan UMK Kecamatan terdapat 48 KK yang memiliki usaha mikro yang kekurangan pemasaran dan SDM
<b>III</b>	<b>KELURAHAN LADANG CAKIAH</b>							
1	Pengadaan mesin jahit dan menyulam		20 orang		APBD			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN PAKAN LABUAH</b>							
1	Pembentukan dan pembinaan lembaga keuanagan kelurahan dan bantuan modal (koperasi)	Pakan Labuah						
2	Pelatihan wirausaha bagi masyarakat dangenerasi muda	Pakan Labuah						
<b>B</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG</b>							
1	Peningkatan SDM berupa pelatihan/ keterampilan	se Kelurahan BCKR						
2	Pelatihan memasak	se Kelurahan BCKR						
<b>II</b>	<b>KELURAHAN TAROK DIPO</b>							
1.	Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Pengurus Dasawisma	Kelurahan Tarok Dipo	1 paket kegiatan	30.000.000				
<b>III</b>	<b>KELURAHAN AUR TAJUNGGANG TANGAH SAWAH</b>							
1	Pelatihan pembuatan snack box untuk dasawisma	ATTS	200 orang	9.400.000				
2	Pelatihan lewirausahaan (motivasi untuk berwirausaha)	ATTS	80 orang	ls				
3	Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat bidang usaha kecil	ATTS	80 orang	ls				
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN KAYU KUBU</b>							
1.	Pembinaan Kewirausahaan Industri Rumah Tangga	RW I, RW II, RW III	60 orang	30.000.000	Kegiatan SKPD			
<b>V</b>	<b>KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN</b>							
1	membantu penyaluran promosi hasil olahan pertanian	UP3HP						
<b>VI</b>	<b>KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS</b>							
1	Pelatihan dan penguatan ekonomi bagi warga Kel. Benteng Pasar Atas terutama yang bergerak di sektor informal	Kel. BPA						
<b>C</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN GAREGEH</b>							
1	Pengadaan tenda Ramadhan depan Mesjid Tablig	Kelurahan Garegeh	1 Unit					
<b>II</b>	<b>KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH</b>							
1	Usaha Konveksi (Etalse)		RT.01/RW. II		APBN	Siap		
2	Bantuan Gerobak untuk kampung Kuriner				APBN	Siap		
<b>III</b>	<b>KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN</b>							
1	Pembuatan kelompok usaha pembuatan produk UKM	Kel. Puhun Pintu Kabun	4 klp	100.000.000				
2	Pelatihan kewirausahaan (tata boga) dan modal usaha	Kel. Puhun Pintu Kabun	3 titik					
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN TAROK DIPO</b>							
1	Pelatihan Kewirausahaan untuk kelompok Dasawisma	Kelurahan Tarok Dipo	1 paket kegiatan	30.000.000				
<b>II</b>	<b>KELURAHAN BIRUGO</b>							
1	Pelaksanaan Pelatihan Menjahit, Memasak, Salon, Membuat Jilbab dan Bordir	Aula Kantor Kelurahan	- Pelatihan Menjahit : 60 orang - Pelatihan Memasak : 60 orang - Pelatihan Salon : 60 orang - Pelatihan Membuat Jilbab : 60 orang - Pelatihan bordir : 60 orang	150.000.000	APBD Kota dan APBD Provinsi	Siap	Layak	Sangat penting, masing-masing pelatihan 10 orang per RW
2	Pembinaan terhadap Masyarakat yang Sudah Memiliki Keterampilan Bordir, Menjahit, Membuat Kue dan Perbengkelan kedalam Kelompok Usaha Bersama (Kube)	Kelurahan Birugo	4 kelompok	80.000.000	APBD Kota dan APBD Provinsi	Siap	Layak	Dikelompokkan dalam bentuk kelompok usaha bersama
<b>III</b>	<b>KELURAHAN LADANG CAKIAH</b>							
1	Pelatihan Montir, servis HP, Komputer		20 orang		APBD			
<b>B</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>							
1	Pelatihan Montor Sepeda Motor	Kel. Koto Selayan				Siap	Layak	
2	Pelatihan Tata Boga dan Bed Cover	Kel. Koto Selayan				Siap	Layak	
<b>II</b>	<b>KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>							
1	Pelatihan pemgolahan bambu	RW. 03	1 ls				Layak	
<b>III</b>	<b>KELURAHAN PUHUN TEMBOK</b>							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bantuan Mesin Jahit	Kelurahan Puhun Tembok	25 orang			Siap	Layak	
2	Pelatihan Teknik Mesin Sepeda Motor	Kelurahan Puhun Tembok	16 orang			Siap	Layak	
3	Pelatihan Kewirausahaan /Tata Boga	Kelurahan Puhun Tembok	16 orang			Siap	Layak	
<b>IV KELURAHAN GAREGEH</b>								
1	Pelatihan tata Boga	Kelurahan Garegeh	10 orang					
2	Pelatihan tata Rias	Kelurahan Garegeh	10 orang					
3	Pelatihan tata Busana	Kelurahan Garegeh	10 orang					
<b>V KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN</b>								
1	Pelatihan teknik mesin bagi generasi muda							
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP</b>								
<b>A KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>								
<b>I KELURAHAN SAPIRAN</b>								
1.	Pengadaan Buku2 bahan bacaan	Kelurahan Sapiran	100 buku	2.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	Telah dibangun perpustakaan mini dikelurahan
<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>								
<b>A KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>								
<b>I KELURAHAN BELAKANG BALOK</b>								
1	Pengadaan alat musik talempong dan pakaian tradisional grup kesenian Puti Linduang Bulan Belakang Balok (Grup Tari)	Jl. Perawat RT 03 RW 01	25 orang		APBD KOTA			
2	Grup Silat	Jl. Perwira Ujung			APBD KOTA			
<b>II KELURAHAN BIRUGO</b>								
1	Penunjang Sarana dan Prasarana Olah Raga Bola Kaki, Bola Volley, Silat dan Karate	RW V DAN RW II		60.000.000	APBD Kota dan APBD Provinsi	Siap	Layak	Sangat perlu pengadaan matras tempat latihan silat dan karate, terpal dan tribun mini
<b>III KELURAHAN KUBU TANJUANG</b>								
1	Pelatihan silat dan kesenian tradisional	RT I dan II/RW 01-04	46 orang	40.000.000				
<b>B KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>								
<b>I KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG</b>								
1	Penangkaran kera	se Kelurahan BCKR						
<b>II KELURAHAN PAKAN KURAI</b>								
1	Pengadaan Lapangan				APBD Kota			
	a. Futsal							
	b. Basket 1 Gawang							
	c. Takraw							
	d. Tenis Meja							
<b>III KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS</b>								
1	Percepatan pembangunan kembali toko Jl. Lorong Saudagar dan Jl. Kumango demi pemulihan ekonomi warga Kel. BPA	Kel. BPA						
<b>C KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>								
<b>I KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>								
1	Bantuan Peningkatan Program Kampung wisata sanjai dan bantuan alat packing	RW. 01, RW 02	1 ls	50.000.000		Siap		
<b>II KELURAHAN PULAI ANAK AIR</b>								
1	Bantuan Alat Musik Tambua/Tansa	Parik Natuang, RT.002/RW.002	1 set			Siap	Layak	
<b>III KELURAHAN PUHUN TEMBOK</b>								
1	Peningkatan Prasarana Olahraga	RW 03 & 05	2 lokasi			Siap	Layak	
2	Pelatihan Pasambahan Kurai	Kel. Puhun Tembok	50 orang			Siap	Layak	
3	Pelatihan silat tradisional minang	Kel. Puhun Tembok	50 orang			Siap	Layak	
<b>IV KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>								
1	Peningkatan usaha kelompok pemuda produktif	RW. 01/ RW.02/ RW.03/ RW. 04						
<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>								
<b>A KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>								
<b>I KELURAHAN SAPIRAN</b>								
1	Budidaya perikanan	Kelurahan Sapiran			Kegiatan / APBD Kota	Siap	Layak	Banyak terdapat Kolam Ikan tidak Produktif di Kelurahan Sapiran
<b>II KELURAHAN PAKAN LABUAH</b>								
1	Bantuan Perontok Gabah	Pakan Labuah	6					
2	Bantuan mesin pemotong rumput	Pakan Labuah	6					
<b>III KELURAHAN KUBU TANJUANG</b>								
1	Pembuatan embung	RW 4	16 dasawisr	300.000.000				
2	Pelatihan pembuatan pupuk organik	RT II/RW 01-04	16 dasawisr	4.800.000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Bibit ikan dan makanannya	RT II/RW 01-04	1000 ekor	15.000.000				harus ada kelompok dan diusulkan proposal ke propinsi dan di tembuskan ke Distan Kota Bukittinggi
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN PARIT ANTANG</b>							
1	Penambahan jumlah pupuk subsidi dengan pendistribusian pupuk kepada petani	Kel Parit Antang	30,4 Ha	50.000.000,00	APBD Kota	Siap	Layak	
2	Bantuan bibit unggul yang menambah nilai ekonomis warga sesuai dengan kondisi tanah	Kel Parit Antang	10 Ha	50.000.000,00	APBD Kota	Siap	Layak	
<b>B</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN KAYU KUBU</b>							
1	Pendampingan Dasawisma dalam peningkatan ekonomi keluarga (pembuatan kompos dan daur ulang)	RW I, RW II, RW III	20 dasawisma	80.000.000	Kegiatan SKPD			
<b>II</b>	<b>KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN</b>							
1	Penyediaan mesin bajak lahan pertanian	disetiap RW						
2	Penambahan modal pada koperasi Gapoktan	Gapoktan						
3	membantu penyaluran promosi hasil olahan perta	UP3HP						
<b>C</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN PULAI ANAK AIR</b>							
1	Pembangunan Kampung Wisata Agro	Parik Natuang, RT.002/RW.002	1000 M2			Belum siap	Layak	
2	Bantuan Mesin Bajak Tanah	Koto Bawah, RT.002/RW.003	1 unit			Siap	Layak	
3	Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan	Parik Natuang, RT.002/RW.002	1 unit			Siap	Layak	
4	Bantuan Mesin Pencacah Sampah Plastik	Kelurahan	1 unit			Siap	Layak	
<b>II</b>	<b>KELURAHAN GAREGEH</b>							
1	Bantuan untuk Karang Taruna berupa Bibit Ikan Air Tawar	RW. 02. RT. 02 RW 01 RT 01						
<b>III</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>							
1	Bantuan Mesin Pengipas Padi	Klpk Tani sadar	1 unit					
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH</b>							
1	Bantuan Bibit Ikan dan tanaman		KGB		APBN	Siap		
<b>V</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK</b>							
1	Bantuan Bibit Anggrek Kelompok Tani	RW06,RW 02			APBD Kota	Siap	Layak	
2	Pengadaan Mesin Pompa Air Kelompok Tani Saiyo Sakato	RW 01			APBD Kota	Siap	Layak	
3	Pengadaan Mesin Treser Kelompok Tani Saiyo Sakato	RW 01			APBD Kota	Siap	Layak	
4	Jaringan Irigasi Tersier Pertanian di Talao	RW 05	220 M		APBD Kota	Siap	Layak	
<b>VI</b>	<b>KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN</b>							
1	Pembentukan KUD modal usaha							
2	Pengadaan bibit buah pisang							
3	Pembangunan agrowisata di Panorama baru							
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							
	<b>BAGIAN UMUM</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN KAYU KUBU</b>							
1	Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Acara (kursi, piring, tenda, dll) untuk TP PKK Kelurahan	Kayu Kubu	1 paket	85.000.000	Hibah/ Bansos			
2	Fasilitasi dana pemilihan lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kayu Kubu	5 lembaga	30.000.000				
	<b>BAGIAN KESRA</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN ABTB</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN PAKAN LABUAH</b>							
1	Bantuan untuk Mesjid/Mushalla	Pakan Labuah						
<b>II</b>	<b>KELURAHAN KUBU TANJUANG</b>							
1	lomba penyelenggaraan sholat jenazah	RW 1 -4	45 orang	5000000				
<b>B</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN PAKAN KURAI</b>							
1	Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah			3.000.000	APBD Kota			
<b>II</b>	<b>KELURAHAN KAYU KUBU</b>							
1	Bantuan kepada Kegiatan Keagamaan	Rw I, Rw II	1 paket	60.000.000	APBD Kota			
<b>III</b>	<b>KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN</b>							
1	Penyediaan sarana dan prasarana untuk MDA dan TPA							
<b>C</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO IPUH</b>							
1	Bantuan Operasional BKMT	RW, I s/d IV	7 BKMT					
<b>II</b>	<b>KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>							
1	Pembinaan Remaja Mesjid, Didikan Subuh dan lain lain	Kel. Koto Selayan				Siap	Layak	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
III	<b>KELURAHAN PUHUN TEMBOK</b>							
1	Pelatihan Pasambahan Kurai	Kel. Puhun tembok	50 orang			Siap	Layak	
2	Pelatihan Silat Tradisional Minang	Kel. Puhun tembok	50 orang			Siap	Layak	
IV	<b>KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH</b>							
1	Operasional untuk ,Majlis Taklim.BK,BKB,BKR,BKL,Dasa Wisma	Ls	KGB		APBN	Siap		
2	Pengadaan Mobiler untuk Balai Pemuda RW.I.II.Posvandu Balita Lansia	Ls	KGB		APBD	Siap		
	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>							
A	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
I	<b>KELURAHAN PARIT ANTANG</b>							
1	Pengukuran ulang luas tanah sekaligus sertifikasi pronada	Kel Parit Antang	1 paket		APBD Kota	siap	Layak	Koordinasi dengan BPN
B	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
I	<b>KELURAHAN KAYU KUBU</b>							
1	Fasilitasi dana pemilihan lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kayu Kubu	5 lembaga	30.000.000	Kegiatan			
C	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
I	<b>KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH</b>							
1	Bantuan Operasional Pnyelesaian Pidana ringan Di Kel Berupa Tim.Tambahan Operasional Lurah K.Gulai Bancah 50 Juta se bulan	Ls	KGB		APBN	Siap		
2	Bantuan Baju Kader se Kota B.Tinggi	Ls	KGB		APBN	Siap		
	<b>BADAN KEUANGAN</b>							
A	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
I	<b>KELURAHAN PARIT ANTANG</b>							
1	Bantuan tambahan modal lembaga keuangan (BKM_UMSP)	Kel Parit Antang		200.000.000,00	APBD Kota	Siap	Layak	
2	Pelayanan pembayaran PBB pada hari libur oleh mobil kas DPKAD	Kel Parit Antang	8 bulan	30.000.000,00	APBD Kota	siap	Layak	
	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
II	<b>KELURAHAN KOTO SELAYAN</b>							
1	Pembinaan Dasawisma	Kelurahan Koto Selayan						
2	Peningkatan Operasional LPM	Kelurahan Koto Selayan						
IV	<b>KELURAHAN MANGGIS GANTING</b>							
1	Peningkatan fasilitas dan jaminan sosial bagi RT/RW, LPM dan kader	Kelurahan Manggis Ganting						
2	Penyediaan bantuan operasional PKK dan PWK	Kelurahan Manggis Ganting						
	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
I	<b>KELURAHAN TAROK DIPO</b>							
1.	Pengadaan Baju Seragam untuk Kader Posvandu dan Puskesmas	Kel. Tarok Dipo		50.000.000				
2	Pelatihan Kepemimpinan / leadership bagi pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan	Kel. Tarok Dipo	1 paket kegiatan	30.000.000				
3	Pengadaan kendaraan operasional untuk LPM Kelurahan Tarok Dipo	Kel. Tarok Dipo	1 unit	20.000.000				
II	<b>KELURAHAN PAKAN KURAI</b>							
1	Pengadaan peralatan umum				APBD Kota			
	a. Tenda							
	b. Kursi							
	c. Sound System							
	d. Peralatan Penyelenggaraan Jenazah/Pemakaman							
2	Pembekalan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan			20.000.000	APBD Kota			
3	Pembelian Tanah untuk Pembangunan Kantor Lurah			1.800.000.000	APBD Kota			
4	Pengadaan Pakaian Seragam LKK			40.000.000	APBD Kota			
5	Studi Banding LKK							
III	<b>KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS</b>							
1	Usulan Kenaikan honorarium Kader, Ketua RT/RW, LPM dan penguatan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan antara lain : FKPM Kawasan Pasar Atas dan Lereng, FKPM Kelurahan, kblk, Kader/ Fasilitator Lingkungan	Kel. BPA						
IV	<b>KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TANGAH SAWAH</b>							
1	Operasional dasawisma dan pengadaan buku administrasi	ATTS	50 kelompok	100.000.000				
2	Kelengkapan buku administrasi RT/RW, Plank famu waiib laoor	ATTS	24 jenis	60.000.000				
3	Pengadaan buku administrasi pemerintahan kelurahan	ATTS	24 jenis	15.000.000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Penunjang kegiatan FKPM, babinkabtibmas, Babinsa dan pemberdayaan Linmas dan Kelurahan (khususnya bidang trantib	ATTS	40	15.000.000				
	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN PAKAN LABUAH</b>							
1	Pengadaan Tanah Kantor Lurah Pakan Labuah	Pakan Labuah	min 500 m <sup>2</sup>					
<b>II</b>	<b>KELURAHAN SAPIRAN</b>							
1	Pelatihan pembangunan karakter bagi generasi muda kelurahan sapiran	Kelurahan sapiran	4 RW 11 RT	30.000.000	Kegiatan Kelurahan/ APBD	Siap	Layak	
2	Mengaktifkan kegiatan remaja masjid dan remaja musholla	Kelurahan sapiran	4 RW 11 RT	30.000.000	Kegiatan Kelurahan/ APBD	Siap	Layak	
3	Pelatihan RT/RW tingkat kelurahan dan pembayaran honor RT/RW diKelurahan	Kelurahan Sapiran	15 org	70.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	Kurang motivasi dan kurang pengetahuan
4	Pembayaran honor Kader dikelurahan dan pembinaan dan pertemuan kader setiap bulannya	Kelurahan Sapiran	33 org	60.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	Kurang motivasi dan kurang pengetahuan
5	Penambahan anggaran pembinaan dasawisma dan PKK Kleurahan	Kelurahan Sapiran	4 pokja / 32 dasawisma	25.000.000	APBD Kota	Siap	Layak	Kurang motivasi dan kurang pengetahuan
<b>III</b>	<b>KELURAHAN AUR KUNING</b>							
1	Pembangunan taman kantor Lurah Aur Kuning	Kel Aur kuning	5x10	50.000.000	APBD Kota			
<b>V</b>	<b>KELURAHAN KUBU TANJUANG</b>							
1	Peninjauan honor RT, RW dan kader	RT I dan II/RW 01-04	1 group					
<b>VI</b>	<b>KELURAHAN LADANG CAKIAH</b>							
1	Penambahan honor RT/RW				APBD			
<b>A</b>	<b>KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN LADANG CAKIAH</b>							
1	Sarana dan prasarana pos ronda per RW				APBD			
<b>A</b>	<b>KECAMATAN GUGUK PANJANG</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG</b>							
1	Pembinaan FKPM	RT/ RW se Kelurahan BCKR	25 buah					
<b>II</b>	<b>KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS</b>							
1	Pemantapan dan peningkatan rasa cinta Tanah Air tanpa memandang suku, agama, ras dan anta golongan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kel. BPA						
<b>III</b>	<b>KELURAHAN KAYU KUBU</b>							
1	Penyuluhan/Sosialisasi Organisasi dan Kegiatan Kepercayaan Terlarang	Kayu Kubu	70 orang	20.000.000	Kegiatan			
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TANGAH SAWAH</b>							
1	Pembekalan/ pelatihan FKM, pembinaan FKM	ATTS	40 Org					
<b>B</b>	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>							
<b>I</b>	<b>KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH</b>							
1	Bintek RT/RW,Trantibmas,ASN,Kelurahan	Ls	KGB		APBN	Siap		
<b>II</b>	<b>KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK</b>							
1	Sosialisasi Bela Negara	KEL CGB			APBD Kota		Layak	
2	Penunjang kegiatan operasional FKPM Kelurahan	KEL CGB			APBD Kota		Layak	

Usulan program dan kegiatan hasil musrenbang akan diakomodir oleh perangkat daerah dengan memasukkan kedalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah Tahun 2018. Untuk melihat Program dan kegiatan RKPD Tahun 2018 beserta jumlah dana pendukung kegiatan berdasarkan urusan/SKPD disajikan dalam tabel 5.2. berikut:

**Tabel 5.2.**  
**Jumlah Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Belanja Langsung**  
**SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018**  
**diurutkan berdasarkan urusan yang diemban**

No.	SKPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13	192
2.	DINAS KESEHATAN	18	81
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	23	81
4.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	45
5.	DINAS KEBAKARAN	5	30
6.	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8	48
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	22
8.	DINAS SOSIAL	12	51
9.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14	70
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	77
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	32
12.	DINAS PERHUBUNGAN	9	39
13.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11	57
14.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	13	59
15.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	17	71
16.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10	49
17.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	10	76

No.	SKPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
18.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	16	79
19.	SEKRETARIAT DAERAH	19	114
20.	SEKRETARIAT DPRD	4	44
21.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13	53
22.	BADAN KEUANGAN	7	74
23.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8	50
24.	INSPEKTORAT	7	39
25.	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	8	139
26.	KECAMATAN GUGUK PANJANG	7	138
27.	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	9	108
28.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9	44
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>300</b>	<b>1.962</b>

Secara rinci Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 beserta pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.3**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01.01.01.	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>			37.227.619.945				30.866.236.140
		<b>NON URUSAN</b>			1.369.255.224				1.506.180.746
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			1.150.255.224				1.265.280.746
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	Disdikbud	3.145 lembar	15.011.000	APBD	3.143 lembar	16.512.100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdikbud	3 rekening / bulan	75.000.000	APBD	3 rekening / bulan	82.500.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Disdikbud	5 unit roda 4, 45 unit roda 2	150.000.000	APBD	4 unit roda 4, 45 unit roda 2	165.000.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Disdikbud	10 item dan 2 orang cs	95.000.000	APBD	10 item dan 2 orang cs	104.500.000
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perbaikan peralatan kantor dan peripheral	Disdikbud	5 macam, 5 jenis	20.000.000	APBD	6 macam, 6 jenis	22.000.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Disdikbud	35 jenis	69.850.000	APBD	46 jenis	76.835.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Adanya barang cetakan dan penggandaan	Disdikbud	11 macam	50.000.000	APBD	11 macam	55.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disdikbud	13 macam	10.000.000	APBD	10 macam	11.000.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Disdikbud	1 tahun	50.000.000	APBD	1 tahun	55.000.000
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Adanya SPPD	Disdikbud	1 tahun	200.000.000	APBD	1 tahun	220.000.000
		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS	Disdikbud	4 Pekerja Kantor, 1 Sopir	75.394.224	APBD	4 Pekerja Kantor, 1 Sopir	82.933.646
		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya penyediaan tenaga pengamanan kantor	Disdikbud	4 orang	140.000.000	APBD	4 orang	154.000.000
		Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa	Disdikbud	200 Paket	200.000.000	APBD	200 Paket	220.000.000
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				131.000.000			144.100.000
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yang dibeli	Disdikbud	4 jenis	61.000.000	APBD	4 jenis	67.100.000
		Pengadaan Peralatan Kantor	Adanya peralatan kantor yang baik dan layak	Disdikbud	3 macam	40.000.000	APBD	3 macam	44.000.000
		Pembangunan Pagar Pengaman Kantor	Terlaksananya pagar pengaman Kantor	Disdikbud	1 paket	30.000.000	APBD	1 paket	33.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>88.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>96.800.000</b>
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	Disdikbud	2 semester	9.500.000	APBD		2 semester	10.450.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Rencana kerja dan keuangan	Disdikbud	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	11.000.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Realisasi dan Ikhtisar Kinerja	Disdikbud	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.500.000
	Penyusunan Laporan LPPD	Realisasi Anggaran dan Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Disdikbud	1 Dokumen	4.500.000	APBD		1 Dokumen	4.950.000
	Penyusunan LKPJ	Realisasi Anggaran dan Kinerja Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Disdikbud	1 Dokumen	4.000.000	APBD		1 Dokumen	4.400.000
	Penyusunan Pelaporan Digital	Realisasi anggaran dan kinerja Laporan Digital	Disdikbud	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.500.000
	Analisis Rencana Kebutuhan Belanja Operasional Sekolah bersumber dana APBD	Terukurnya Rencana kebutuhan sekolah bersumber APBD	Disdikbud	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
	<b>URUSAN WAJIB PENDIDIKAN</b>				<b>35.858.364.721</b>				<b>29.360.055.393</b>
	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Meningkatnya pelayanan Pendidikan</b>			<b>798.996.200</b>				<b>666.840.020</b>
	Penyelenggaraan TK N Pembina	Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK N Pembina Bukittinggi	Sekolah	12 Bulan	77.916.000	APBD	Pokir	12 Bulan	85.707.600
	Penyelenggaraan PAUD, Kelompok Bermain dan TK "Harapan Bunda"	Meningkatnya Kreatifitas dan Pola Pikir Peserta Didik	SKB	KB 20 orang TK 25 orang	58.070.000	APBD		KB 20 orang TK 25 orang	63.877.000
	Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)	Tersedianya utusan untuk mengikuti lomba ketingkat provinsi	Disdikbud	6 lomba	35.944.000	APBD		6 lomba	39.538.400
	Jambore Pendidik PAUD	Terlaksananya jumlah cabang lomba jambore	Disdikbud	8 Cabang Lomba	45.249.900	APBD		8 Cabang Lomba	49.774.890
	Reward PAUDNI Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional)	Meningkatnya motifasi anak didik, Pendidik dan	Disdikbud	1	75.000.000	APBD		1	82.500.000
	Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI	Meningkatnya motivasi PTK PAUDNI	Disdikbud	15 lomba	97.397.000	APBD		15 lomba	107.136.700
	Pengelolaan Izin Operasional Paudnj, PKBM, LKP	Tertata dan terdatanta lembaga PAUD	Disdikbud	40 lembaga	8.727.000	APBD		40 lembaga	9.599.700
	Penunjang akreditasi PAUD DIKMAS	Terangkatnya kredibilitas lembaga-lembag Pendidikan Non Formal Bukittinggi	Disdikbud	159 Lembaga	34.200.000	APBD		159 Lembaga	37.620.000
	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD	Meningkatnya pengetahuan PTK PAUD	Disdikbud	70 org	49.454.900	APBD		70 org	54.400.390
	Pembekalan program PAUD	Meningkatnya Pemahaman Stakeholder terhadap Program	Disdikbud	60 org	40.971.900	APBD		60 org	45.069.090
	Pembuatan tugu UKS dan taman, serabak air, bak pasir TK Pembina	Proses Belajar Mengajar di sekolah	Disdikbud		20.000.000	APBD	Musrembang	0	22.000.000
	Bimtek Pendidikan Keluarga	Terlaksanya jumlah peserta Bimtek Pendidikan Keluarga	Disdikbud	100 orang	63.287.500	APBD		100 orang	69.616.250
	Fasilitasi Penunjang Program HIMPAUDI		Disdikbud		33.178.000	APBD			36.495.800
	Operasional Penyelenggaraan PAUD- KB Harapan Bunda Binaan UPTD SKB (DAK Non Fisik 2018)		Disdikbud		21.600.000	APBN			23.760.000
	Operasional Penyelenggaraan PAUD- TK Harapan Bunda Binaan UPTD SKB (DAK Non Fisik 2018)		Disdikbud		19.200.000	APBN			21.120.000
	Operasional Penyelenggaraan PAUD- Negeri TK Pembina (DAK Non Fisik 2017)		Disdikbud		118.800.000	APBN			130.680.000
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan</b>	<b>Tingkat APM dan APK SD, SMP</b>			<b>24.397.006.421</b>	<b>APBD</b>			<b>16.989.617.063</b>
	Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 1 Unggul Bukit tinggi	Sekolah	12 bulan	97.107.336	APBD		12 bulan	106.818.070

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	115.714.686	APBD		12 bulan	127.286.155
	Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	64.036.436	APBD		12 bulan	70.440.080
	Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 4 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	104.723.738	APBD		12 bulan	115.196.112
	Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 5 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	79.576.198	APBD		12 bulan	87.533.818
	Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	Lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 6 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	67.704.654	APBD		12 bulan	74.475.119
	Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 7 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	44.874.978	APBD		12 bulan	49.362.476
	Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 8 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	53.979.000	APBD		12 bulan	59.376.900
	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD	Sekolah	12 bulan	45.930.000	APBD	Pokir	12 bulan	50.523.000
	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar di SD N 02 CGB	Sekolah	12 bulan	43.825.446	APBD		12 bulan	48.207.991
	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air	Lancarnya PBM di SDN 03 Pulau Anak Air Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	22.541.300	APBD		12 bulan	24.795.430
	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	35.873.000	APBD		12 bulan	39.460.300
	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Puhun Pintu Kabun Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	29.079.176	APBD		12 bulan	31.987.094
	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Pulau Anak Aia Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	19.050.000	APBD		12 bulan	20.955.000
	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah	Sekolah	12 bulan	24.144.200	APBD		12 bulan	26.558.620
	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh	Lancarnya PBM di SDN 08 Campago Ipuh	Sekolah	12 bulan	41.425.000	APBD	Pokir	12 bulan	45.567.500
	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SD N 09 Manggis Ganting Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	20.562.864	APBD		12 bulan	22.619.150
	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun	Sekolah	12 bulan	43.004.679	APBD	Pokir	12 bulan	47.305.147
	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	Lancarnya proses belajar mengajar pada SDN 11 Campago Guguk Bulek	Sekolah	12 bulan	19.658.794	APBD		12 bulan	21.624.673
	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun Pintu	Sekolah	12 bulan	18.790.248	APBD		12 bulan	20.669.273
	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu Gulai Bancah Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	18.235.000	APBD		12 bulan	20.058.500
	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjung Alam	Sekolah	12 bulan	20.665.199	APBD		12 bulan	22.731.719
	Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulau Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulau Anak Air Kota Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	23.430.858	APBD		12 bulan	25.773.944

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago Ipuh Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	46.871.712	APBD	Pokir	12 bulan	51.558.883
	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting	Lancarnya PBM di SD Negeri 17 Manggis Ganting	Sekolah	12 bulan	20.331.143	APBD		12 bulan	22.364.257
	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	lancarnya proses belajar mengajar di SDN 18 Campago Guguak Bulek	Sekolah	12 bulan	21.671.572	APBD		12 bulan	23.838.729
	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Benteng Pasar Atas Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	36.230.453	APBD		12 bulan	39.853.498
	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Percontohan Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	47.229.177	APBD		12 bulan	51.952.095
	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SDN 03 Pakan Kurai	Sekolah	12 bulan	68.919.000	APBD		12 bulan	75.810.900
	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Bukit Apit Puhun	Sekolah	12 bulan	24.441.826	APBD		12 bulan	26.886.009
	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar dan Mengajar di Sekolah	Sekolah	12 bulan	21.058.245	APBD		12 bulan	23.164.070
	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Sekolah	12 bulan	21.044.000	APBD		12 bulan	23.148.400
	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang	Lancarnya PBM di SDN 07 Bukit Cangang	Sekolah	12 bulan	34.237.002	APBD		12 bulan	37.660.702
	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah	Sekolah	12 bulan	30.343.049	APBD		12 bulan	33.377.354
	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah	lancarnya proses belajar mengajar SDN 10 ATTS	Sekolah	12 bulan	20.056.074	APBD		12 bulan	22.061.681
	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Bukit Apit Puhun	Sekolah	12 bulan	18.013.283	APBD		12 bulan	19.814.611
	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Bukit Cangang Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	17.542.671	APBD		12 bulan	19.296.938
	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit Puhun Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	16.451.856	APBD		12 bulan	18.097.042
	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya proses belajar mengajar di SDN 14 ATTS Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	31.690.000	APBD		12 bulan	34.859.000
	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	Lancarnya pelaksanaan PBM	Sekolah	12 bulan	36.261.871	APBD		12 bulan	39.888.058
	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai	Sekolah	12 bulan	80.400.000	APBD	Pokir	12 bulan	88.440.000
	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar dan Mengajar di Sekolah	Sekolah	12 bulan	19.310.000	APBD		12 bulan	21.241.000
	Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SD Negeri 19 ATTS Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	19.025.196	APBD		12 bulan	20.927.716
	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cangkih	Kelancaran Proses Belajar Mengajar di Sekolah	Sekolah	12 bulan	83.956.136	APBD	Pokir	12 bulan	92.351.750

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	Lancarnya Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di sekolah	Sekolah	12 bulan	71.717.883	APBD	Pokir	12 bulan	78.889.671
	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah	Lancarnya Proses PBM pada SDN 03 Pakan Labuah	Sekolah	12 bulan	29.230.000	APBD		12 bulan	32.153.000
	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah	Sekolah	12 bulan	47.639.007	APBD		12 bulan	52.402.908
	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Birugo	Sekolah	12 bulan	74.428.000	APBD	Pokir	12 bulan	81.870.800
	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	Lancarnya proses belajar mengajar di SD N 06 Parit Antang	Sekolah	12 bulan	70.288.045	APBD	Pokir	12 bulan	77.316.850
	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	Lancarnya pelaksanaan proses belajar mengajar di SD N 07 Belakang Balok	Sekolah	12 bulan	25.394.456	APBD		12 bulan	27.933.902
	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung	lancarnya proses belajar mengajar SDN 08 Kubu Tanjung	Sekolah	12 bulan	85.326.254	APBD	Pokir	12 bulan	93.858.879
	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Belakang Balok	Sekolah	12 bulan	27.128.614	APBD		12 bulan	29.841.475
	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Sapiran	Sekolah	12 bulan	29.523.715	APBD		12 bulan	32.476.087
	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Aur Kuning	Sekolah	12 bulan	24.203.391	APBD		12 bulan	26.623.730
	Penyelenggaraan UAS SD / MI	Terlaksananya Ujian Sekolah (US) SD/MI Kota Bukittinggi	Disdikbud	2692 siswa	150.000.000	APBD		2692 siswa	165.000.000
	Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTP	Terlaksananya Ujian Nasional SLTP Kota Bukittinggi	Disdikbud	17 sekolah	38.709.900	APBD		17 sekolah	42.580.890
	Olimpiade SD / MI	Terpilihnya siswa SD/MI lomba olimpiade bidang MIPA	Disdikbud	2 org tk nasional	129.999.900	APBD		2 org tk nasional	142.999.890
	Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SLTP	Terpilihnya siswa pemenang OSN SLTP Tingkat Kota Bukittinggi	Disdikbud	80 orang siswa	73.375.000	APBD		80 orang siswa	80.712.500
	Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlet ke Tingkat Propinsi dan Nasional	Meningkatnya prestasi atlet palajar kota bukittinggi	Disdikbud	8 cabor	285.057.800	APBD		8 cabor	313.563.580
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI	Terpilihnya siswa SD/MI untuk mengikutri FLS2N ke Tingkat Propinsi	Disdikbud	8 cabang	119.999.900	APBD		8 cabang	131.999.890
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP	Terpilihnya siswa SMP untuk mengikutri FLS2N ke Tingkat Propinsi	Disdikbud	17 Cabang	160.000.000	APBD		17 Cabang	176.000.000
	Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kota Bukittinggi	Tersedianya Guru SD / MI yang berkepetensi kurikulum 2013	Disdikbud	210 orang	236.438.500	APBD		210 orang	260.082.350
	Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SMP/MTs Kota Bukittinggi	Tersedianya Guru SMP/MTs yang berkepetensi kurikulum 2013	Disdikbud	80 orang	98.781.500	APBD		80 orang	108.659.650
	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah yang Meraih Nilai UN Terbaik	Terlaksananya pemberian reward kepada siswa berprestasi dan sekolah	Disdikbud	25 siswa, 2 sekolah	57.485.000	APBD		25 siswa, 2 sekolah	63.233.500
	Penerimaan Peserta Didik Baru	Terpilihnya calon peserta didik baru kota Bukittinggi	Disdikbud	6340 orang siswa baru	42.800.000	APBD		6340 orang siswa baru	47.080.000
	Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	Terlaksananya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi	Disdikbud	1	43.820.000	APBD		1	48.202.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penunjang Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD	Terlaksananya entri data siswa miskin	Disdikbud	95,00%	23.720.000	APBD		95%	26.092.000
	Penunjang Tim Koordinasi BOS	Optimalisasinya pelaksanaan BOS SD/SMP Negeri dan Swata kota Bukittinggi	Disdikbud	100,00%	106.217.600	APBD		100%	116.839.360
	Sosialisasi Penegakan Disiplin terhadap Pelajar	Meningkatnya disiplin pelajar	Disdikbud	100,00%	93.165.000	APBD		100%	102.481.500
	Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkatnya motivasi siswa kota Bukittinggi yang berprestasi	Disdikbud	95,00%	30.000.000	APBD		95%	33.000.000
	Penunjang Pelaksanaan Beasiswa Miskin SMP	Siswa dapat belajar dengan baik dan rajin	Disdikbud	100,00%	33.833.600	APBD		100%	37.216.960
	Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja	Terpilihnya siswa pemenang lomba karya tulis ilmiah remaja	Disdikbud		45.737.000	APBD			50.310.700
	Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah Pada Jenjang SMP, MTs	Terwujudnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah di Kota Bukit tinggi	Disdikbud	100,00%	100.000.000	APBD		100%	110.000.000
	Pertukaran Pelajar dan Guru Kota Bukittinggi ke malaysia	Terjalinnnya hubungan kerjasama di bidang pendidikan dengan negara Malaysia	Disdikbud	80%	450.000.000	APBD		80%	495.000.000
	Pesantren Pelajar SMP Kota Bukittinggi	Terlaksananya Pesantren Pelajar Kota Bukittinggi	Disdikbud	90 orang siswa	186.479.900	APBD		90 orang siswa	205.127.890
	Fasilitasi dalam rangka hari besar Pendidikan Nasional	Kegiatan berjalan dengan lancar	Disdikbud	1 Upacara	300.000.000	APBD		1 Upacara	330.000.000
	Penunjang DAK SD	Terfasilitasi Pengelolaan DAK SD 2017	Disdikbud	85,00%	52.865.400	APBD		85%	58.151.940
	Penunjang DAK SMP	Terfasilitasi Pengelolaan DAK SMP	Disdikbud	8 SMP	30.694.000	APBD		8 SMP	33.763.400
	Studi Kelayakan Izin Operasional Sekolah	Terverifikasinya izin operasional sekolah	Disdikbud	SD, SMP	30.000.000	APBD		SD, SMP	33.000.000
	Pengadaan Komputer dan Server Untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan Sistem CBT	Tersedianya Komputer untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dengan sistem CBT	Disdikbud	199 unit	1.827.000.000	APBD		199 unit	2.009.700.000
	Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 5 Bukittinggi	Jumlah ruang belajar yang dibangun refesintatif sesuai dengan master plan	Disdikbud	7 ruang	3.033.450.000	APBD		7 ruang	3.336.795.000
	Pembangunan RKB Bertingkat SDN 19 ATTS Kota Bukittinggi	Tersedianya Ruang belajar yang representatif sesuai dengan master paln	Disdikbud	4 ruang	1.384.000.000	APBD		4 ruang	1.522.400.000
	Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulai Anak Air	Terbangunnya DAM Tanah dan Pagar	Disdikbud	1 Paket	400.000.000	APBD		1 Paket	440.000.000
	Pegedaman Tanah SMPN 7 Bukittinggi	terbangunnya DAM Tanah SMPN 7 Bukittinggi	Disdikbud	1 Paket	700.500.000	APBD		1 Paket	770.550.000
	Pembangunan WC dan Sanitasi Serta air bersih SD Kota Bukittinggi	Tersedianya WC dan Sanitasi SD Kota Bukittinggi	Disdikbud	9 SD	667.080.000	APBD		9 SD	733.788.000
	Pengadaan Media Pendidikan Untuk SDN se Kota Bukittinggi	Tersedianya media pendidikan untuk SDN se kota Bukittinggi	Disdikbud	4 item	498.000.000	APBD		4 item	547.800.000
	Pembangunan Laboratorium IPA dan IT SMPN 7 Bukittinggi	Tersedianya laboratorium IPA dan IT SMPN 7 Buittinggi	Disdikbud	2 labor	1.157.000.000	APBD		2 labor	1.272.700.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	lanjutan pembangunan RKB SMP 7	Terlaksananya lanjutan pembangunan RKB SMPN 7 Bukittinggi	Disdikbud	1 paket	200.000.000	APBD		1 paket	220.000.000
	Pembuatan Master Plan SD	Tersedianya Master Plan SD Kota Bukittinggi	Disdikbud	16 SD	200.000.000	APBD		16 SD	220.000.000
	Pembuatan Master Plan SMP	Tersedianya Master Plan SMP Kota Bukittinggi	Disdikbud	2 SMP	25.000.000	APBD		2 SMP	27.500.000
	Pembangunan WC dan Sanitasi SMP Kota Bukittinggi	Tersedianya WC dan sanitasi SMP Kota Bukittinggi	Disdikbud	2 SMP	180.000.000	APBD	Musrebang	2 SMP	198.000.000
	Pemasangan Vaping Blok SD kota Bukittinggi	Tersedianya vaping blok SD Kota Bukittinggi	Disdikbud	3 SD	210.000.000	APBD	Musrebang	3 SD	0
	Pembebasan Tanah SDN 05 Birugo	Tersedianya Lokasi LapanganUpacara dan Olahraga serta jalan ke sekola	Disdikbud	1 SD	600.000.000	APBD	Musrebang	1 SD	0
	Pengadaan Alat Musik Tradisional SD	Tersedianya alat musik tradisional SD Kota Bukittinggi	Disdikbud	6 paket	180.000.000	APBD	Musrebang	6 paket	0
	Pembuatan Sumur Bor SMPN 3 dan SMPN 4 Bukittinggi	Tersedianya sumur BOR SMP Kota Bukittinggi	Disdikbud	2 SMP	150.000.000	APBD	Musrebang	2 SMP	0
	Rehab pagar sekolah SDN 19 ATTS	Tersediaya pagar di SD 19 ATTS	Disdikbud	1 sek	150.000.000	APBD	Pokir	1 sek	0
	Pengadaan Meubiler SDB 04 Birugo	Tersedianya meubiler di sek	Disdikbud	1 sek	42.000.000	APBD	Pokir	1 sek	0
	Pembangunan Lapangan Basket SMP 7 Bkt	Tersedianya lapangan basket di sek	Disdikbud	1 sek	200.000.000	APBD	Pokir	1 sek	0
	Pembuatan dan Pemasangan Kanopi SDN 01 Benteng Pasar Atas		Disdikbud	1 sek	50.000.000	APBD	Pokir	1 sek	0
	Pembangunan RKB SDN 02 Aur Kuning	Ruang Kelas Baru	Disdikbud	1 sek	1.500.000.000	APBD			
	Pembangunan RKB SDN 09 Manggis Ganting	Ruang Kelas Baru	Disdikbud	1 sek	2.500.000.000	APBD			
	Pembangunan dan Rehabilitasi SDN 17 Pakan Kurai		Disdikbud	1 sek	2.575.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD		Disdikbud		729.900.000	APBD			
	Latihan Dasar OSIS		Disdikbud		65.000.000	APBD			
	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun</b>			<b>417.304.600</b>	<b>APBD</b>		<b>0</b>	<b>459.035.060</b>
	Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah	Kelancaran Tugas Operasional Penilik PAUDNI	Disdikbud	12 Bulan	14.159.900	APBD		12 Bulan	15.575.890
	Penyelenggaraan Operasional SKB Kota Bukittinggi	Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dan operasional kantor	Disdikbud	12 Bulan	51.970.000	APBD		12 Bulan	57.167.000
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Warga Belajar setara SMA IPS	Disdikbud	15 orang	40.000.000	APBD		15 orang	44.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Warga Belajar setara SMP	Disdikbud	20 orang	40.000.000	APBD		20 orang	44.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar setara sd	Disdikbud	20 orang	20.874.000	APBD		20 orang	22.961.400
	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II	Terlaksananya Peserta Ujian Nasional Kesetaraan Paket A,B dan C Lulus	Disdikbud	250 org	56.221.700	APBD		250 org	61.843.870
	Peningkatan Kompetensi Warga Belajar Paket C (Paket C Vokasional)	Meningkatnya pengetahuan warga belajar paket C	Disdikbud	50 org	62.007.000	APBD		50 org	68.207.700
	Apresiasi LKP Berprestasi	Meningkatnya Kompetensi LKP	Disdikbud	15 LKP	91.122.000	APBD		15 LKP	100.234.200
	Penunjang operasional BOP	Lancarnya Operasional Lembaga	Disdikbud	109 Lembaga	40.950.000	APBD		109 Lembaga	45.045.000
	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Persentase meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan</b>			<b>5.687.904.500</b>	<b>APBD</b>		<b>0</b>	<b>6.256.694.950</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaksanaan Sosialisasi dan verifikasi UKG dan PLPG	Terukurnya kemampuan guru sesuai dengan kompetensinya dan guru memperoleh	Disdikbud	300 org	40.400.000	APBD		300 org	44.440.000
	Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD dan SLTP	Termotifasinya guru untuk meningkatkan prestasi	Disdikbud	12 Bulan	232.234.000	APBD		12 Bulan	255.457.400
	Bimtek Karya Tulis Guru SD dan SLTP	Meningkatnya kemampuan guru dalam membuat karya tulis	Disdikbud	1 Kegitaan	50.865.000	APBD		1 Kegitaan	55.951.500
	Pengelolaan, Pemeriksaan berkas dan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Aneka Tunjangan Guru	Terbayarnya aneka tunjangan profesi Guru dan aneka tunjangan guru	Disdikbud	600 orang	90.000.000	APBD		600 orang	99.000.000
	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	Terbayarnya tunjangan kesejahteraan bagi guru / pendidik / tutor non PNS	Disdikbud	1000 orang	5.053.625.000	APBD		1000 orang	5.558.987.500
	Pembinaan dan seleksi OGN Tingkat SD dan SMP	Terpiluhnya Pemenang OSN Guru SD dan SMP tingkat Kota Bukittinggi	Disdikbud	12 Bulan	123.528.500	APBD		12 Bulan	135.881.350
	Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas	Termotivasi guru dalam mengajar	Disdikbud	12 Bulan	97.252.000	APBD		12 Bulan	106.977.200
	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Termotivasi guru dalam mengajar	Disdikbud	12 Bulan	131.229.000	APBD		12 Bulan	144.351.900
	<b>Program Manajemen Pelayanan</b>	<b>Persentase pelayanan pendidikan sesuai SNP</b>	Disdikbud		<b>719.799.100</b>	APBD		<b>0%</b>	<b>791.779.010</b>
	Pengelolaan Website Disdikpora Kota Bukittinggi	Untuk memudahkan pelayanan informasi tentang pendidik, sumber belajar siswa dan tenaga pendidik	Disdikbud	12 Bulan	47.285.000	APBD		12 Bulan	52.013.500
	Fasilitasi Akreditasi Sekolah	Terlaksananya penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan	Disdikbud	10 sekolah	62.500.000	APBD		10 sekolah	68.750.000
	Penyusunan Verifikasi Dapodikdas	Terlaksananya verifikasi data dapodik untuk memperoleh data yang valid / akurat sebagai	Disdikbud	240 orang	125.000.000	APBD		240 orang	137.500.000
	Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan	Operasional pengawas berjalan dengan lancar	Disdikbud	18 orang	43.381.400	APBD		18 orang	47.719.540
	Peningkatan Manajemen, Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Bansos dan Hibah	Pelaksanaan movev dan verifikasi bansos dan hibah	Disdikbud	63 lembaga	15.179.200	APBD		63 lembaga	16.697.120
	Workshop Operator Pendataan	Tertibnya hasil data pendidikan kota bukittinggi	Disdikbud	12 Bulan	38.190.000	APBD		12 Bulan	42.009.000
	Pembuatan Buku Profil dan Profil PTK	Tersedianya data yang akurat di dinas pendidikan	Disdikbud	12 Bulan	48.754.000	APBD		12 Bulan	53.629.400
	Pengelolaan Data SIPBM	Siswa putus sekolah dapat dikembalikan ke sekolah	Disdikbud	12 Bulan	39.509.500	APBD		12 Bulan	43.460.450
	Pengembangan IT Pendidikan Kota Bukittinggi	Tercapainya program pemko Bukittinggi di Bidang Pendidikan	Disdikbud	12 Bulan	300.000.000	APBD		12 Bulan	330.000.000
	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>Mengembangkan nilai adat dan tradisi Kota Bukittinggi</b>			<b>750.000.000</b>	APBD			<b>800.000.000</b>
	Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat	Peran serta Lembaga Adat dalam Membangun Adat Budaya	Disdikbud	12 Bulan	200.000.000	APBD		12 Bulan	200.000.000
	Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat	Terpeliharanya Adat dan Budaya	Disdikbud	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	50.000.000
	Festival Silek Tradisional	Terjaganya Nilai Tradisi dilingkungan Masyarakat	Disdikbud	12 Bulan	500.000.000	APBD		12 Bulan	550.000.000
	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Persentase cagar budaya yang dilestarikan</b>			<b>1.058.056.000</b>	APBD		<b>0</b>	<b>1.163.861.600</b>
	Penataan Koleksi Museum	Presentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan	Disdikbud	12 Bulan	40.000.000	APBD		12 Bulan	44.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Database Koleksi Museum Daerah	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Disdikbud	12 Bulan	34.266.000	APBD		12 Bulan	37.692.600
	Registrasi Nasional Cagar Budaya Daerah	Registrasi Cagar Budaya	Disdikbud	50% CB	35.000.000	APBD		50% CB	38.500.000
	Sosialisasi Cagar Budaya	Sosialisasi dan field trip	Disdikbud	2 kegiatan /135 peserta	69.997.000	APBD		2 kegiatan /135 peserta	76.996.700
	Pendataan Cagar Budaya	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Disdikbud	12 Bulan	44.390.000	APBD		12 Bulan	48.829.000
	Monitoring dan Evaluasi Pelestarian cagar budaya	Terjaganya cagar budaya	Disdikbud	10 CB	6.500.000	APBD		10 CB	7.150.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian cagar budaya	Stdi kelayakan, studi teknis, studi zonasi, mengikuti bimtek pelestarian CB dan Pemeliharaan CB	Disdikbud	5 CB	111.000.000	APBD		5 CB	122.100.000
	Konservasi Koleksi Museum	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Disdikbud	12 Bulan	48.701.500	APBD		12 Bulan	53.571.650
	Pemeliharaan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Disdikbud	12 Bulan	49.624.000	APBD		12 Bulan	54.586.400
	Operasional Rumah Kelahiran Bunga Hatta	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Disdikbud	12 Bulan	170.590.000	APBD		12 Bulan	187.649.000
	Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Kelahiran Bung Hatta	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Disdikbud	12 Bulan	20.000.000	APBD		12 Bulan	22.000.000
	Studi sejarah kota Bukittinggi	Terlestarikannya sejarah Kota Bukittinggi	Disdikbud	1 paket	200.000.000	APBD		1 paket	220.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bukittinggi	Cagar budaya yang ditetapkan	Disdikbud	1 tim (7 ogh)	172.082.500	APBD		1 tim (7 ogh)	189.290.750
	Perumusan kebijakan kepubakalaan	Cagar budaya yang dilindungi	Disdikbud	1 dokumen	55.905.000	APBD		1 dokumen	61.495.500
	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Jumlah event seni budaya yang di laksanakan di Kota Bukittinggi</b>	<b>Disdikbud</b>		<b>665.797.900</b>				<b>732.377.690</b>
	Mengikuti Event Seni dan Budaya se Sumatera Barat	Terlaksananya Partisipasi dalam Event	Disdikbud	12 Bulan	150.000.000	APBD		12 Bulan	165.000.000
	Lomba Duta Budaya Kota Bukittinggi	Terpilihnya duta budaya Tingkat Kota Bkt dilanjutkan ke Tingkat Sumbar	Disdikbud	100 org	286.000.000	APBD		100 org	314.600.000
	Pelatihan Budaya adat panitahan	Terlatihnya generasi muda Kota Bkt dalam memahami nilai tradisi	Disdikbud	33 org	99.797.900	APBD	Pokir	33 org	109.777.690
	Pelatihan juri silek tradisi	Terlatihnya generasi muda kota Bukittinggi dalam memahami nilai tradisi	Disdikbud	13 org	130.000.000	APBD		13 org	143.000.000
	<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Jumlah kerjasama seni budaya</b>	<b>Disdikbud</b>		<b>1.363.500.000</b>			<b>0</b>	<b>1.499.850.000</b>
	Mengikuti kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Luar Negeri	terselenggaranya kerjasama Seni Budaya antar luar Negeri	Disdikbud	12 Bulan	500.000.000	APBD		12 Bulan	550.000.000
	Festifal Seni budaya Dalam Negeri	Terlaksananya kegiatan Festival dalam Negeri	Disdikbud	12 Bulan	250.000.000	APBD		12 Bulan	275.000.000
	Mengikuti kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya	terikutinya kegiatan JKPI, BPPI dan pelestarian CB	Disdikbud	3 kegiatan	88.500.000	APBD		3 kegiatan	97.350.000
	Fasilitasi kunjungan pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan pendidikan dan kebudayaan	Disdikbud	12 Bulan	75.000.000	APBD		12 Bulan	82.500.000
	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar negara	Terlaksananya kemitraan dalam menjaga tara tradisional Indonesia di mata Dunia	Disdikbud	6 org	450.000.000	APBD		6 org	495.000.000

**Tabel 5.4**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	01.02.01.	DINAS KESEHATAN			88.932.412.143				83.890.550.602	
		NON URUSAN			2.699.135.353				2.801.166.712	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran .		100	1.403.998.304	APBD		100	1.506.029.712
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dokumen terkirim melalui Pos .	DKK	50	5.000.000			50	5.000.000
			Jumlah materai 3000 tersedia .			200			200	
			Jumlah materai 6000 tersedia .			150			150	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi,	DKK	48	200.000.000			48	200.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat yang terpelihara .	DKK	12	265.820.000			12	265.820.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang	DKK	12	72.000.000			12	72.000.000
			jumlah alat kebersihan dan bahan kebersihan yang disediakan			30				
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor .	DKK	12	85.000.000			12	85.000.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli .	DKK	45	35.000.000			50	35.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan penggandaan yang tersedia .	DKK	12	16.000.000			12	16.000.000
			Jenis barang cetakan yang dicetak .			5			10	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jaringan listrik yang dipelihara .	DKK	2	10.000.000			3	10.000.000
			Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan .			15			20	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makan minuman rapat,tamu dan lembur yang tersedia yang disediakan untuk rapat, tamu dan lembur	DKK	100	30.870.000			100	30.870.000
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan	DKK	100	160.000.000			100	160.000.000
		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah bulan Pegawai Tidak Tetap yang diberikan tunjangan penghasilan .	DKK	12	401.308.304			12	503.339.712
			Jumlah bulan premi asuransi ketenagakerjaan yang dibayar			12			12	
		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang diberikan honor	DKK	9	48.000.000			9	48.000.000
		Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah tersedianya honor untuk PPK,PP,PTK dan PPHP	DKK	80	75.000.000			50	75.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Pertemuan koordinasi DAK yang dilakukan .	DKK	4	-			4	-
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu .</b>			<b>10.357.000</b>	APBD		<b>100</b>	<b>10.357.000</b>
		Persentase ketersediaan data Standard Pelayanan Minimal							
		Persentase masyarakat yang terlayani melalui aplikasi SIK, Infokes/ P-care							
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu (2 x setahun)	DKK	10	4.440.000			10	4.440.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	DKK	5	992.000			5	992.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun tepat waktu .	DKK	25	1.725.000			25	1.725.000
	Penyusunan dokumen perencanaan , monitoring dan	Jumlah dokumen perencanaan (DPA,	DKK	3	3.200.000			3	3.200.000
	Penyusunan Profil Kesehatan dan aplikasi SIK	Jumlah Profil kesehatan yang dicetak	DKK	40	75.926.050			40	75.926.050
		Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data profil .		15				15	
	Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi e-Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan aplikasi e-Puskesmas	DKK	7	194.405.000			7	194.405.000
	Penyelenggaraan komunikasi data	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	DKK	7	43.759.500			7	43.759.500
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan		7				7	
		Persentase berita yang ditayangkan diwebsite		50				50	
		Jumlah Kegiatan workshop yang		1				1	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan		7				7	
		Jumlah Puskesmas yang		7				7	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana</b>			<b>84.516.600</b>	APBD			<b>1.641.840.000</b>
	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan		DKK		84.516.600				172.280.000
				1 ls				1 ls	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana</b>			<b>1.284.780.000</b>	APBD			<b>1.284.780.000</b>
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung DKK, UPT dan Pustu yang terpelihara .	DKK		172.280.000				172.280.000
				1 ls				1 ls	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terlaksana .	DKK		12.500.000				12.500.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung Labaoratorium air yang direhab	DKK		500.000.000				500.000.000
				1 pkt					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Hall Puskesmas Guguk Panjang	Hall Puskesmas Guguk Panjang yang dibangun (12x10 m)	DKK		600.000.000				600.000.000
	Pengadaan Mobil Ambulance	Mobil Ambulance yang diadakan	DKK	4 unit	1.000.000.000				
	<b>URUSAN WAJIB KESEHATAN</b>				<b>86.233.276.790</b>				<b>81.089.383.890</b>
	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Cakupan PHBS Tingkat Kota .</b>		77	<b>895.974.700,00</b>	APBD		77	<b>895.974.700,00</b>
		<b>Cakupan Kelurahan Siaga aktif</b>		100				100	
	Pengembangan program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah posyandu yang di revitalisasi .	DKK	40	43.398.000	APBD			43.398.000
		Jumlah sekolah, kelurahan dan sarana kesehatan yang mempunyai TOGA percontohan		55				55	
		Jumlah petugas kesehatan di Puskesmas yang dilatih untuk melaksanakan pelayanan promotif .		30				30	
		Jumlah poskestren yang dibina .		5				5	
		Persentase posyandu dengan strata mandiri .		45				45	
		Jumlah ruang promkes dan kit promkes di Puskesmas		7				7	
		Frekuensi penilaian PHBS di masyarakat .		1				1	
	Penilaian Kader Posyandu Berprestasi	Jumlah pemenang Lomba kader Posyandu berprestasi tkt. Kota	DKK	3	65.546.950	APBD		3	65.546.950
		Jumlah kader Posyandu berprestasi yang dikirim untuk tingkat Propinsi		1				1	
	Pembinaan dan Monitoring Pokjantal Posyandu dan DBD	Jumlah posyandu yang dilakukan pembinaan dan monitoring Pokjantal Posyandu dan DBD	DKK	50	53.011.550	APBD		60	53.011.550
	Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina UKS nya	DKK	50	55.000.000	APBD		50	55.000.000
		Cakupan Sekolah yang telah ber PHBS		70				75	
	Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan bagi anggota Saka Bakti Husada	Jumlah SBH tingkat ranting yang dibina .	DKK	2	153.905.000	APBD		3	153.905.000
		Jumlah pandega dan panegak tk kota yang di bina .		30				30	
		Jumlah kegiatan Tk.Propinsi dan Nasional yang diikuti		1				1	
	Pembinaan PHBS,Toga dan lingkungan sehat	Jumlah TP PKK kecamatan dan kelurahan yang dibina program PHBS, Toga dan Lingkungan Sehat .	DKK	24	29.798.000	APBD		24	29.798.000
	Fasilitasi Kota Sehat	Jumlah dokumen untuk penilaian kota sehat Kota Bukittinggi yang disusun	DKK	1	323.080.200	APBD			323.080.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengembangan media Promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak dan media elektronik	DKK	10	172.235.000	APBD		10	172.235.000
		Jumlah tema dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat		60				70	
	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar .</b>		100	<b>5.351.812.300</b>			100	<b>5.423.190.800</b>
		<b>Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
		<b>Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk</b>		<b>97</b>				<b>98</b>	
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan	UPT	4	165.070.000	APBD		4	205.606.000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan	UPT	3	117.406.000	APBD		3	124.406.000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Nilam Sari	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan .	UPT	4	159.257.500	APBD		4	183.100.000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan	UPT	2	97.380.500	APBD		2	97.380.500
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Gulai banchah	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan	UPT	1	97.837.000	APBD		1	97.837.000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tigo baleh	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan	UPT	8	147.246.700	APBD		8	147.246.700
	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan	DKK	2	120.028.400	APBD		2	120.028.400
	Peningkatan kesehatan masyarakat dasar dan rujukan	Persentase pemanfaatan ambulance siaga oleh	DKK	1,5	272.628.700	APBD		1,5	272.628.700
		Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas		7				7	
		Jumlah Puskesmas yang telah memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan		7				7	
		Jumlah Pelayanan khusus (P3k) pada hari besar, keramaian kota		50				50	
		Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas)		7				7	
		Persentase Pemanfaatan layanan kesehatan oleh warga binaan LAPAS kelas IIA		60				60	
		Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi		7				7	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer		7				7	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Gigi dan mulut		7				7	
		Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas		7				7	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan	Terlaksananya pengukuran tingkat kebugaran calon jemaah haji		100				100	
		Terlaksananya pengukuran tingkat kebugaran tenaga kerja		70				70	
		Terlaksananya status kesehatan tenaga kerja		100				100	
	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas(Dana non Kapitasi)	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan non kapitasi JKN	UPT	7	45.853.000	APBD		7	45.853.000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD (Dana	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN	UPT	3	860.000.000	APBD		3	860.000.000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial	UPT	4	862.000.000	APBD		4	862.000.000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD (Dana Kapitasi	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN	UPT	8	631.783.000	APBD		8	631.783.000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN	UPT	2	660.000.000	APBD		2	660.000.000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial	UPT	1	360.000.000	APBD		1	360.000.000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial	UPT	2	260.000.000	APBD		2	260.000.000
	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2017)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial	UPT	4	365.000.000	APBD		4	365.000.000
	Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontigensi Bencana .	DKK	1	79.716.800	APBD		1	79.716.800
		Data faktor resiko bencana yang terkumpu		100				100	
		Kit sarana pelayanan kesehatan pada daerah bencana .		1				1	
		Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana .		3				3	
		Frekwensi petugas kesehatan yang dilatih		2				2	
		Jumlah peserta pertemuan pengendalian krisis kesehatan		49				49	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah dokumen data faktor resiko krisis kesehatan		2				2	
	Pelayanan Pemeriksaan kesehatan haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes .	DKK	100	50.604.700	APBD		100	50.604.700
		Persentase jemaah yang diperiksa dan dibina kesehatannya .		100				100	
		Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air .		100				100	
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar</b>		100	<b>27.628.600</b>			100	<b>27.628.600</b>
	Peningkatan kesehatan Lansia	Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan kapasitas kader Lansia	DKK	50 org	27.628.600	APBD		50 org	27.628.600
		Jumlah petugas yang mengikuti Review program lansia		21 org				21 org	
		Jumlah kelompok lansia yang mengikuti lomba senam lansia		26				26	
		Jumlah posyandu lansia yang dibina		15				15	
	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>Prevalensi anemia ibu hamil .</b>		<b>100</b>	<b>366.052.900</b>			<b>100</b>	<b>366.052.900</b>
		Persentase balita gizi buruk .		21				20	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga		0,15				0,15	
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan .		100				100	
		Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif .		50				50	
		Persentase kekurangan gizi pada balita .		0				0	
		Persentase balita gizi lebih .		13				12	
	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Jumlah baduta gakin dpt MP ASI .	DKK	100	192.732.500			100	192.732.500
		Jumlah Puskesmas yang disupervisi pelaksanaan distribusi Vitamin A .		7				7	
		Jumlah balita gizi kurang dpt PMT .		10				10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah bumil KEK dpt PMT .		80				80	
		Jumlah balita gizi buruk dpt PMT .		100				100	
		Workshop Penyelenggaraan PMT Penyuluhan di Posyandu		30				30	
	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro lainnya.	Jumlah kelurahan yang ditingkatkan kapasitas kadernya .	DKK	24	139.100.100			24	139.100.100
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemantauan anemia gizi .		7				7	
		Jumlah Puskesmas yang disupervisi pelaksanaan distribusi tablet tambah darah .		7				7	
		Jumlah kader yang mendapatkan pelatihan Motivator ASI .		20				20	
		Jumlah petugas mendapatkan pelatihan PMBA .		24				24	
		Jumlah petugas yang menerima pemantapan dalam pemantauan pertumbuhan .		20				20	
		jumlah advokasi yang dilakukan untuk peningkatan peran LP/LS .		2				2	
		Jumlah tripot, mikrotoise dan alat ukur panjang yang diadakan .		30				30	
		Persentase bayi baru lahir mendapat IMD .		47				50	
		Jumlah sarana yang diadakan untuk klinik .		3				3	
		Jumlah sampel dalam Survey anemia dan status gizi remaja putri		800				800	
		Jumlah petugas yg mendapatkan		30				30	
		Jumlah kader yg medapatkan Peningkatan kapasitas dalam PMBA		60				60	
		Jumlah peserta yang mendapat Pelatihan Motivator ASI dan pembentukan KP ASI		20				20	
		Advokasi dan koordinasi peningkatan penggunaan Asi Eksklusif,		1				1	
		Jumlah peralatan untuk pengukuran antropometri		2				2	
		Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan evaluasi program gizi terintegrasi . .		35				35	
		Frekuensi Survelans Gizi yang dilaksanakan		12				12	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Frekuensi evaluasi program gizi yang dilakukan .		3				3	
		Jumlah Pemenang Lomba Baduta dan Ibu ASI .		3				3	
		Jumlah Puskesmas yang dibina tentang Gizi Institusi .		7				7	
		Jumlah sampel PSG Kadarzi .		900				900	
		Jumlah tenaga gizi yang ditingkatkan kapasitasnya .		7				7	
		Jumlah Puskesmas yang dimonitoring dan dievaluasi .		7				7	
		Jumlah pertemuan integrasi antar program gizi dengan program terkait .		1				1	
		Jumlah buku saku MP ASI yang diadakan .		1				1	
	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi pada Remaja	Jumlah peserta Pelatihan mendapatkan pencegahan dan penanggulangan anemi pada remaja.	DKK	24	34.220.300			24	34.220.300
		Jumlah peserta Pelatihan mendapatkan pencegahan dan penanggulangan		25				25	
	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	<b>1. Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar ( Antenatal)</b>		<b>100</b>	<b>159.793.200</b>			<b>100</b>	<b>159.793.200</b>
		<b>2. Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
		<b>3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
		<b>4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
		<b>5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ( skrining)</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
	Peningkatan Kesehatan Ibu	Jumlah BPS, Klinik KB, Poskeskel dan pustu, PAUT/TPA yang dibina	DKK	30	79.848.200			30	79.848.200
		Jumlah puskesmas yang dilakukan evaluasi, validasi data, pembinaan, monitoring		7				7	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah LP/LS yang mendapat sosialisasi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin		20				20	
		Jumlah bidan koordinator yang dievaluasi supervisi fasilitatif		21				21	
		Jumlah LP/LS yang mengikuti Rakor penurunan AKI dan AKB Kota Bukittinggi		30				30	
		Jumlah Kelurahan yang melaksanakan penguatan pemberdayaan		3				3	
		Ceatak buku KIA, Buku Lansia dan balnko ABMS		1				1	
		Jumlah Bidan yang mengikuti pelatihan Asuhan Persalinan		10				10	
	Peningkatan Kesehatan Anak	Jumlah petugas kesehatan yang mendapatkan pelatihan SDIDTK	DKK	25	79.945.000			25	79.945.000
		Jumlah petugas yang yg ditingkatkan kapasitas tentang tatalaksana		25				25	
		Jumlah peserta pertemuan pembahasan kasus AMP		15				15	
		Jumlah bidan yang ditingkatkan pengetahuan dan kompetensinya melalui pembelajaran kasus AMP		30				30	
		Jumlah bayi baru lahir yang diskirinning hipotiroid kongenital		300				300	
		Jumlah guru UKS Tk SD,SMP,SMA sederajat yg ditingkatkan kemampuan dan kapsitasnya melalui pertemuan guru UKS		50				50	
		Jumlah guru UKS Tk SD,SMP,SMA sederajat yg ditingkatkan kemampuan dan kapsitasnya melalui pelatihan guru UKS		50				50	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja</b>		<b>100</b>	<b>155.816.600</b>			<b>100</b>	<b>155.183.600</b>
	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan		DKK		130.816.600				130.183.600
		1. Jumlah Nakes yang mengikuti Pelatihan Teknis secara mandiri		15 Orang				15 Orang	
		2. Frekwensi Pertemuan koordinasi dengan Sekolah,Akademi dan perguruan tinggi		1 kali				1 kali	
		3. Jumlah tenaga Medis kesehatan teladan, Jumlah tenaga paramedis teladan,		3 org Medis,3 org paramedis, 3 org tenaga gizi, 3 org				3 org Medis,3 org paramedis, 3 org tenaga gizi, 3 org	
		4.Frekwensi Pertemuan sosialisasi hasil pelatihan tekhnis kesehatan dari tenaga		1 kali				1 kali	
	Pelaksanaan penilaian kredit fungsional medis dan paramedis	Frekuensi penilaian angka kredit bagi	DKK	2 kali	25.000.000			2 kali	25.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi .		0	5.137.000.000			0	60.000.000
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi .		0	70.060.000.000			0	70.060.000.000
		Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pembangunan RSUD		100				100	
		Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota		60				60	
		Persentase Tahapan pembangunan RSUD		100				100	
	Pengelolaan Tim Pembangunan RSUD Bukittinggi	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan dengan Tim Terkait .	DKK	10	60.000.000			10	60.000.000
		Jumlah konsultasi keluar daerah yang dilakukan		1 ls				1 ls	
	Pembangunan Rumah Sakit Daerah	Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun .	DKK	1	70.000.000.000			1	70.000.000.000
	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Jumlah item alat kesehatan yang diadakan untuk RSUD		120				40	
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan		100	30.232.500				30.232.500
	Manajemen Pengelolaan BLUD Puskesmas	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	DKK	2	30.232.500			2	30.232.500
		Jumlah rapat evaluasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan		4 kali				4 kali	
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan RBA		30				30	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi		7	308.115.250			7	229.425.250
		Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan		100				100	
	Persiapan Akreditasi Puskesmas	Jumlah dokumen akreditasi puskesmas yang dikirimkan ke pusat	DKK	4	200.000.000				200.000.000
	Sosialisasi dan Pengawasan Perizinan Tenaga/Sarana Kesehatan	Persentase tenaga medis yang direkomendasikan untuk diberikan izin	DKK	100	29.425.250			100	29.425.250
		Persentase RS Pemerintah dan swasta yang direkomendasikan untuk diberikan izin dan penetapan kelas .		100				100	
		Frekwensi sosialisasi peraturan kesehatan tentang perizinan		2				2	
		Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap tenaga/sarana/fasilitas kesehatan .		12				12	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase tenaga paramedis yang direkomendasikan untuk diberikan izin		100				100	
		Persentase sarana/fasilitas kesehatan yang direkomendasikan untuk diberikan izin		100				100	
		Persentase RS Pemerintah dan swasta yang telah bekerjasama dengan DKK .		100				100	
		Persentase tenaga kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk diberikan izin .		100				100	
		Jumlah sarana kesehatan yang diawasi							
		Jumlah sarana kesehatan yang divisitasi							
		Frekwensi pertemuan sosialisasi peraturan kesehatan							
	Akreditasi Laboratorium Air	Jumlah kegiatan penilaian akreditasi oleh survevor nusat	DKK	1	78.690.000				
		Jumlah pendampingan pra akreditasi Laboratorium air		1					
		Jumlah pendampingan akreditasi Laboratorium air		1					
		Jumlah pelaksanaan self assesment		1					
		Jumlah Laboratorium air yang terakreditasi.		1					
	<b>Program Obat dan Pembekalan Kesehatan</b>	<b>Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas</b>		<b>95</b>	<b>301.513.960</b>			<b>95</b>	<b>301.513.960</b>
		<b>Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan</b>		<b>92</b>				<b>93</b>	
	Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan	Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi	DKK	30	210.000.000			30	210.000.000
	Penunjang Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah bulan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di UPT Instalasi Farmasi yang terpenuhi .	DKK	12	91.513.960			12	91.513.960
	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar</b>		<b>100</b>	<b>344.021.880</b>			<b>100</b>	<b>345.176.880</b>
		<b>Persentase penggunaan obat secara rasional</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
		<b>Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	
		<b>Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis	Jumlah SDM Tokoh masyarakat Kecamatan dan Kelurahan yang mendapat sosialisasi tentang Gerakan Masyarakat Cerdas menggunakan Obat (Gema Cermat) di Kota Bukittinggi	DKK	120	28.088.000			120	28.393.000
		Jumlah Puskesmas / Pustu / Poskeskel yang diawasi rasionalitas penobatannya		30				30	
	Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan dan Distribusi sediaan Farmasi / Bahan berbahaya disarana kefarmasian.	Jumlah tenaga apoteker yang dibina dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan berbahaya di sarana farmasi	DKK	40	41.025.000			40	41.875.000
		Jumlah SDM pelaku usaha kosmetik yang ditingkatkan pengetahuannya		30				30	
		Jumlah terbina dan terawasinya sarana distribusi sediaan farmasi dan Alkes dalam pengelolaan sediaan farmasi dan Alkes		50				50	
		Jumlah terbina dan terawasinya sarana distribusi sediaan farmasi dan Alkes dalam pengelolaan sediaan farmasi dan Alkes		2				2	
		Terlaksananya sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar dimasyarakat		100				100	
	Pengawasan sanitasi depot air minum	Terlaksananya pengawasan sanitasi depot air minum	DKK	100	14.799.000			100	14.799.000
	Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum	Jumlah item kelengkapan kelengkapan yang tersedia	DKK	3	235.135.000			3	235.135.000
		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan/material kimia		12				12	
		Jumlah petugas yang memperoleh makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh		7				7	
		Jumlah alat laboratorium kimia air yang dikalibrasi		14				20	
		Jumlah Parameter pemeriksaan untuk program PME Laboratorium yang terpenuhi		2				2	
		Jumlah jas laboratorium untuk analis yang diadakan		7				7	
		Jumlah bulan pemeliharaan alat labor yang dilaksanakan.		12				12	
	Penunjang Pengelolaan Laboratorium	Persentase pelayanan pemeriksaan air di UPT Laboratorium terlaksana	DKK	100	24.974.880			1001	24.974.880
				100				100	
	<b>Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan</b>	<b>Persentase pangan yang memenuhi syarat .</b>		97	<b>29.531.000</b>			98	<b>29.427.600</b>
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang keamanan pangan	DKK	12	29.531.000			12	29.427.600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah sampel pangan diperiksa		96				97	
		Jumlah kader yang mendapatkan penyuluhan tentang kewaspadaan pangan		100				100	
		Jumlah industri rumah tangga yang diaudit		1				1	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan		56	200.980.000			58	200.980.000
		Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan		45				50	
		Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan		25				30	
	Pengkajian Lingkungan Sehat	Jumlah peserta pertemuan LP/LS penyehatan lingkungan.	DKK	90	200.980.000			3	200.980.000
		Jumlah Puskesmas yang dilaksanakan verifikasi STBM		7				7	
		Jumlah hotel, restoran / rumah makan yg dilaksanakan laik sehat		25				25	
		Jumlah UPTD yang melaksanakan pengangkutan limbah B3 puskesmas ke TPA		8				8	
		Frekwensi pemeriksaan limbah cair puskesmas		12				12	
		Frekwensi pemeriksaan TTU dan TPM		12				12	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penderita DBD yang ditangani		100%	1.208.525.900			100%	1.208.525.900
		Cakupan penemuan pasien baru TB BTA +		87				90	
		Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita		80				90	
		Cakupan penemuan penderita diare		100				100	
		Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)		87				90	
		Cakupan Kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI)		100				100	
		Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan		15				20	
		Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP)		0,9				0,9	
		Insiden rate HIV		0				0	
		Jumlah WPA ( Warga Peduli AIDS) yang dibina		1				1	
		Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penvelidikan		100				100	
		Persentase angka keberhasilan pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular		82				83	

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi		82				83	
				Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan.		100				100	
				Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi		100				100	
				Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard.		100				100	
			Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA	DKK	7	105.347.000			7	105.347.000
				Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat provinsi		20				20	
				Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Diare		7				7	
				Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program TB		7				7	
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan program Ispa, Diare, Filariasis/Kecacingan, Hepatitis, TB, HIV/AIDS		7				7	
				Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Filariasis dan kecacingan		7				7	
				Jumlah bahan cetak, fotokopi, KIE pencegahan penyakit menular		4				4	
				Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Hepatitis		7				7	
				Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program HIV/AIDS		0				0	
				Jumlah peserta Workshop Pencegahan dan penanggulangan hepatitis							
				Jumlah peserta Sosialisasi cuci luka gigitan HPR							
				Jumlah peserta Monev Ispa Diare Hepatitis dan Typid							
				Jumlah peserta Workshop Peningkatan Peran kelompok Masyarakat dalam Penemuan Kasus TB							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah peserta Sosialisasi Pelaksanaan Survey Tas							
		Jumlah peserta Uji survey Tas Filariasis							
		Jumlah peserta Pertemuan E-Sismal Malaria							
		Jumlah peserta Workshop LROA							
		Jumlah peserta Money KLB							
		Jumlah Sekolah yang mendapatkan penyuluhan Adaptif DBD							
		Jumlah peserta workshop Pencegahan dan PE							
	Peningkatan dan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah pemantauan semua kasus penyakit menular	DKK	5	59.984.800			5	59.984.800
		DAta / kasus penyakit potensial wabah yang ditemukan		100				100	
		Jumlah Puskesmas yang melakukan PE pada setiap kasus potensai wabah		7				7	
		Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direpson		3				3	
		Jumlah petugas Puskesmas dapat melakukan PE pada setiap kasus potensai wabah sesuai dengan protan		47				47	
		Dokumen data surveilan epidemiologi yang tersedia							
		Jumlah puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB							
		Jumlah Puskesmas, pustu dan poskeskel yang dimonitoring program surveilans epidemiologi							
	Pengendalian penyakit tidak menular	Pembinaan program penyakit tidak menular (PTM)	DKK	24	66.418.100			24	66.418.100
		Jumlah posbindu yang di monitoring							
		Data PTM ke RS							
		Frekuensi Sosialisasi IVA dan deteksi dini kanker							
		Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM .		24				24	
		Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM ternadu		7				7	
		Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama		1				1	
		Persentase perempuan usia 30 sampai 50 thn yg dideteksi dini kanker cervic dan kanker payudara .		14				17	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrinning faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku		7				7	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan imunisasi	Jumlah sekolah / kelurahan / BPS yang mendapatkan informasi / sosialisasi program imunisasi	DKK	64	503.101.500			64	503.101.500
		Jumlah lintas sektor yang mendapatkan informasi/sosialisasi program imunisasi		30				30	
		Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat propinsi		15				15	
		Jumlah narasumber non PNS yang memberikan penyuluhan imunisasi .		10				10	
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program imunisasi		7				7	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan program imunisasi		7				7	
		Jumlah pJenis bahan cetak, fotokopi, KIE pencegahan penyakit menular tersedia/tugas yang diikuti di tingkat propinsi/pusat .		4				4	
		Jumlah pelaksanaan workshop Revitalisasi Program Imunisasi		1				1	
		Penyusunan Perwako Imunisasi							
		Cakupan sosialisasi imunisasi campak		100				100	
		Workshop Revitalisasi Program Imunisasi		60				60	
		Monev Program Imunisasi		60				60	
		Pertemuan Peningkatan Cakupan Imunisasi TK Kelurahan,		60				60	
		Sosialisasi Imunisasi HB O		50				50	
	Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah perjalanan dinas luar daerah .	DKK	6	450.000.000			6	450.000.000
		Jumlah ODHA yang mengikuti medical check up		20				20	
		Malam Renungan AIDS Nusantara		1				1	
		Event Berkaitan dengan HIV/AIDS		4				4	
		Jumlah staf baru dan lama KPAK Bukittinggi yang mengikuti orientasi program		15				15	
		Jumlah Pemetaan titik hot spot		1				1	
		Jumlah mahasiswa kampus yang dibina oleh KPAK		60				60	
		Jumlah tokoh kunci dan komunitas yang mengikuti pelatihan		40				40	
		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat/sarana penunjang .		4				4	
		Jumlah sosialisasi informasi melalui media cetak, elektronik dan KIE		3				3	
		Jumlah Sekretariat KPA yang menerima honorarium dalam setahun		5				5	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah .		40				40	
		Jumlah pertemuan dan koordinasi layanan kesehatan		2				2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peringatan Hari AIDS Sedunia		1				1	
		Jumlah focus Group Diskusi		7				7	
		Jumlah staf sekretariat KPAK Bukittinggi yang mengikuti pertemuan bulanan		15				15	
		Jumlah warga yang mengikuti pembentukan Kelompok Warga Peduli AIDS		90				90	
		Jumlah siswa sekolah yang dibina oleh KPAK		60				60	
		Jumlah Warga Peduli AIDS, LSM dan KDS yang mendapat bantuan		15				15	
		Jumlah kader LKB yang mengikuti pertemuan		60				60	
		Jumlah petugas lapangan yang menerima bantuan transport dalam setahun		5				5	
		Jumlah LSM Peduli AIDS, Jaringan ODHA dan Kelompok Resti yang mengikuti pertemuan		60				60	
		Pengembangan IPWL	Terlaksananya kegiatan Pengembangan IPWL	DKK	1	23.674.500		1	23.674.500
		<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin</b>		90	<b>1.656.278.000</b>		90	<b>1.656.278.000</b>
			<b>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin</b>		100			100	
		Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk miskin	Jumlah peserta JKN PBI APBD yang di bantu pembayaran premi JKN.	DKK	9650	1.600.000.000		9660	1.600.000.000
		Pengembangan dan peningkatan Pengelolaan JKN	Jumlah konsultasi yang dilakukan	DKK	4	56.278.000		4	56.278.000
			Jumlah SK Kepesertaan JKN yang dibuat		2			2	
			Jumlah pembinaan dan supervisi JKN yang dilakukan		12			12	
			Jumlah rapat koordinasi dengan Tim yang dilaksanakan		4			4	

**Tabel 5.5**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	01.03.01.	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			160.348.616.155				176.185.477.771	
		<b>NON URUSAN</b>			3.553.839.750				3.909.223.725	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Bukittinggi	100%	3.279.887.075	APBD	-	100%	3.607.875.783
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	Bukittinggi	4 Jenis	6.050.000	APBD	-	1	6.655.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang dibayar	Bukittinggi	12 rek Tel, 12 rek Air, 12 rek listrik, 12 rek	236.000.000	APBD	-	1	259.600.000
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	Bukittinggi	88 jenis	35.000.000	APBD	-	1	38.500.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Bukittinggi	2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24	568.820.000	APBD	-	1	625.702.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	Bukittinggi	1 Paket	184.337.000	APBD	-	1	202.770.700
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Bukittinggi	68 Jenis	44.641.175	APBD	-	1	49.105.293
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	Bukittinggi	37 jenis	51.553.000	APBD	-	1	56.708.300
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	Bukittinggi	1 Paket	9.000.000	APBD	-	1	9.900.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	Bukittinggi	950 bungkus nasi, 700 bungkus snack, 80 makan	31.450.000	APBD	-	1	34.595.000
		Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Presentase Rapat-Rapat / Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	Bukittinggi	1 Tahun	250.000.000	APBD	-	1	275.000.000
		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	Bukittinggi	41 orang	1.035.600.000	APBD	-	1	1.139.160.000
		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan	Bukittinggi	1 kantor (2 OPD)	197.000.000	APBD	-	1	216.700.000
		Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Paket Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan	Bukittinggi	126 Paket	380.435.900	APBD	-	1	418.479.490
		<b>Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek</b>	<b>Jumlah Paket Honor Penunjang Operasional Pengelola</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>126 Paket</b>	<b>150.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>165.000.000</b>
		Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek /Diklat ke PU-an	Bukittinggi	15 Orang	100.000.000	APBD	-	1	110.000.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				198.000.000	APBD			217.800.000
		Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor yang diadakan	Bukittinggi	1 Paket	68.000.000	APBD	-	1	74.800.000
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor dan Landscape	Bukittinggi	100%	130.000.000	APBD	-	100%	143.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan pakaian dinas</b>			<b>14.000.000</b>	<b>APBD</b>	-		<b>15.400.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Pakaian Lapangan)	Terlaksananya Pakaian Dinas Serta Kelengkapannya	Bukittinggi	1 Paket	14.000.000	APBD	-	1	15.400.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu</b>			<b>61.952.675</b>	<b>APBD</b>	-	<b>1</b>	<b>68.147.943</b>
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD yang	Bukittinggi	2 dokumen	4.339.265	APBD	-	1	4.773.192
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Bukittinggi	1 laporan	4.155.590	APBD	-	1	4.571.149
	Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis Laporan Keuangan Semester dan Prognosis 6 Bulan	Bukittinggi	2 Jenis Laporan	3.457.940	APBD	-	1	3.803.734
	Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang ke PU an	Jumlah Paket Kegiatan yang difasilitasi	Bukittinggi	100%	49.999.880	APBD		100%	54.999.868
	<b>URUSAN</b>				<b>156.794.776.405</b>				<b>172.276.254.046</b>
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik			29.685.691.000	APBD			32.654.260.100
	Peningkatan Trotoar	Jumlah Trotoar yang ditingkatkan	Bukittinggi	1	5.911.350.000	APBD		1	6.502.485.000
	Pembangunan Trotoar	Jumlah Trotoar yang dibangun	Bukittinggi	1	2.627.458.000	APBD		1	2.890.203.800
	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Jumlah Jalan yang ditingkatkan	Bukittinggi	1	16.686.275.000	APBD		1	18.354.902.500
	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan yang dibangun	Bukittinggi	1	3.860.000.000	APBD		1	4.246.000.000
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	Bukittinggi	1 Unit	139.458.000	APBD		1	153.403.800
	Perencanaan DAK Jalan Reguler 2018	Dokumen Perencanaan Jalan	Bukittinggi	1	461.150.000	APBD		1	507.265.000
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik			6.434.945.400	APBD			7.078.439.940
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun	Bukittinggi	2575	4.126.000.000	APBD		1	4.538.600.000
	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Bukittinggi	1 Tahun	904.671.400	APBD		1	995.138.540
	Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-	Bukittinggi	1855	1.404.274.000	APBD		1	1.544.701.400
	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor			9.000.000.000				9.900.000.000
	<b>Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan</b>	<b>Panjang Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>Paket</b>	<b>8.900.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1</b>	<b>9.790.000.000</b>
	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Panjang Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Bukittinggi	1	100.000.000	APBD		1	110.000.000
	<b>Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik</b>			<b>1.958.436.305</b>				<b>2.154.279.936</b>
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	Bukittinggi	12 Bulan	937.200.130	APBD		1	1.030.920.143
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam kota	Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi / dipelihara	Bukittinggi	12 Bulan	486.954.375	APBD		1	535.649.813
	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Pekerjaan Pemeliharaan Trotoar Dalam Kota	Bukittinggi	12 Bulan	534.281.800	APBD		1	587.709.980

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan</b>	<b>Persentase pemenuhan alat berat ke PU an / Kebinamargaan</b>			<b>4.400.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>4.840.000.000</b>
	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah pengadaan alat berat	Bukittinggi	2 Jenis ( 1 unit Greder dan kendaraan	3.800.000.000	APBD		1	4.180.000.000
	Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah pemeliharaan alat berat	Bukittinggi	10 jenis	600.000.000	APBD		1	660.000.000
	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan</b>	<b>Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik</b>			<b>2.391.510.175</b>	<b>APBD</b>			<b>2.570.161.193</b>
	Rehab/ peningkatan Saluran Irigasi	Panjang saluran irigasi yang di rehab/ peningkatan	Bukittinggi	1	1.629.843.000	APBD		1	1.792.827.300
	Lanjutan Irigasi Banda taruko Tabek Gadang Aur kuning				55.000.000				
	Pemeliharaan Rutin Irigasi	Pekerjaan Pemeliharaan Irigasi Dalam Kota	Bukittinggi	12 Bulan	495.517.175	APBD		1	545.068.893
	Perencanaan DAK Irigasi	Dokumen Perencanaan Irigasi	Bukittinggi	1	211.150.000	APBD		1	232.265.000
	<b>Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman</b>			<b>1.463.046.500</b>				<b>1.609.351.150</b>
	Pembangunan Toilet Umum	Terlaksananya Pembangunan Toilet Umum	Bukittinggi	3 Paket	1.358.046.500	APBD		1	1.493.851.150
	Pembuatan Sumur Bor	Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor	Bukittinggi	1 Paket	105.000.000	APBD		1	115.500.000
	Pembangunan Bak Penampungan Air		Bukittinggi		30.000.000	APBD			
	Lanjutan Pembangunan Toilet Umum	lanjutan Pembangunan Toilet umum Ngarai Maaram dan benteng	Bukittinggi	2 paket	400.000.000				
	<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>Persentase Pengurangan titik genangan</b>			<b>378.842.150</b>				<b>279.226.365</b>
	Pembuatan Bak Resapan Penanggulangan Banjir	Pembuatan Bak Resapan Penanggulangan Banjir	Bukittinggi		125.000.000	APBD			
	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Pengendalian Banjir	Bukittinggi	1 Tahun	253.842.150	APBD		1	279.226.365
	<b>Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas</b>			<b>44.965.479.130</b>				<b>49.462.027.043</b>
	Event-Event Daerah dan Nasional	Jumlah event daerah yang dilaksanakan	Bukittinggi	1 Laporan	100.000.000	APBD		1	110.000.000
	Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangun	Bukittinggi	Paket	19.400.000.000	APBD		1	21.340.000.000
	Rehab Kantor Lurah	Jumlah Kantor lurah yang direhab	Bukittinggi	9 Paket	70.000.000	APBD		1	77.000.000
	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	Rumah Dinas yang dibangun kembali	Bukittinggi	1 Paket	6.507.141.500	APBD		1	7.157.855.650
	Rehab Gedung parkir Eks Gloria (Lanjutan)	Gedung Parkir yang direhab	Bukittinggi	1 Paket	2.000.000.000	APBD		1	2.200.000.000
	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I ( Pertama)	Terlaksananya Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 Paket	16.288.337.630	APBD		1	17.917.171.393
	Pembangunan Gapura	Jumlah Gapura yang dibangun	Bukittinggi	1 Paket	600.000.000	APBD		1	660.000.000
	Pembangunan Gudang Beras Kelurahan Belakang Balok	Gudang Beras Kelurahan Belakang	Bukittinggi	1 gedung	100.000.000	APBD			
	<b>Program Pengelolaan Pembangunan Gedung</b>	<b>Persentase Gedung negara dan swasta yang laik fungsi</b>			<b>143.323.500</b>	<b>APBD</b>			<b>157.655.850</b>
	Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Jumlah Kegiatan Operasionalisasi terlaksana	Bukittinggi	9 kali sidang, 18 SLF	143.323.500	APBD		1	157.655.850
	Penyusunan Buku Standar Harga Satuan Bangunan	Buku Standar Harga Satuan Bangunan	Bukittinggi	30 Buku	21.000.000				23.100.000
	<b>Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan</b>	<b>Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap</b>			<b>8.069.756.555</b>	<b>APBD</b>			<b>8.876.732.211</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Pekerjaan Pemeliharaan Lampu PJU	Bukittinggi	1	439.756.555	APBD		1	483.732.211
	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah	Bukittinggi	1	1.250.000.000	APBD		1	1.375.000.000
	Revitalisasi Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum direvitalisasi	Bukittinggi	1	2.750.000.000	APBD		1	3.025.000.000
	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening listrik/komunikasi yang dibayar	Bukittinggi	12 Rekening PJU	3.630.000.000	APBD		1	3.993.000.000
	<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>	<b>Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa</b>			<b>249.275.000</b>				<b>274.202.500</b>
	Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Bukittinggi	2 lokakarya	144.829.500	APBD		1	159.312.450
	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Tersedianya dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai	Bukittinggi	44 paket	48.395.500	APBD		1	53.235.050
	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Terlaksananya Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Bukittinggi	4 dokumen	56.050.000	APBD		1	61.655.000
	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>1</b>	<b>2.261.428.805</b>			<b>1</b>	<b>2.487.571.686</b>
	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	1080 Orang	296.510.400	APBD		1	326.161.440
	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	630 Orang	146.609.400	APBD		1	161.270.340
	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Terlaksananya lanjutan penyusunan perda RDTR Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 Dokumen	299.111.180	APBD		1	329.022.298
	Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang	Bukittinggi	40 Unit	30.000.000	APBD		1	33.000.000
	Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Terlaksananya Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Bukittinggi	1 Dokumen	368.894.625	APBD		1	405.784.088
	Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Bukittinggi	1 Rak, 2 UPS, 1 HDD Ext, 1 PC, 1 Jaringan Internet, 1 Printer A3, 1 Drone	90.000.000	APBD		1	99.000.000
	RTBL Kawasan Strategis	Jumlah dokumen RTBL Kawasan Strategis yang tersusun	Bukittinggi	1 Dokumen	590.000.000	APBD		1	649.000.000
	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Bukittinggi	300 KRK	70.519.625	APBD		1	77.571.588
	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Bukittinggi	20 Sertifikat	101.716.930	APBD		1	111.888.623
	Penyusunan dan Pendataan Arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Terlaksananya Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Bukittinggi	1 Dokumen	225.415.000	APBD		1	247.956.500
	Identifikasi dan pemetaan kawasan ngarai sianok	Terlaksananya Identifikasi dan pemetaan kawasan ngarai sianok	Bukittinggi	1 kegiatan	42.651.645	APBD		1	46.916.810
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan			465.506.935				512.057.629
	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah Razia Bangunan	Bukittinggi	1	199.927.810	APBD			219.920.591
	Audit Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Audit Pemanfaatan Ruang	Bukittinggi	1 Dokumen	65.579.125	APBD		1	72.137.038

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembuatan Billboard peruntukan ruang perkawasan	Pembuatan Billboard peruntukan ruang perkawasan	Bukittinggi	3 Unit	200.000.000	APBD		1	220.000.000
	<b>Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah</b>			<b>44.119.971.150</b>				<b>48.531.968.265</b>
	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah yang dapat diselesaikan / diterbitkan	Bukittinggi	5 kegiatan	156.333.925	APBD		1	171.967.318
	Sosialisasi Pengadaan Tanah	Sosialisasi UU no. 2 tahun 2012 aturan turunannya	Bukittinggi	1 paket	73.664.050	APBD		1	81.030.455
	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Tersedianya Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	3 paket	43.889.973.175	APBD		1	48.278.970.493
	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	<b>Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan</b>			<b>532.787.790</b>				<b>586.066.569</b>
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat lainnya	Masalah Tanah Konsolidasi By.Pass dan Tanah Masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	Bukittinggi	1 kegiatan	532.787.790	APBD		1	586.066.569
	<b>Program Pengembangan Sistim Informasi Pertanahan</b>	<b>Tingkat ketersediaan informasi pertanahan</b>			<b>274.776.010</b>	APBD			<b>302.253.611</b>
	Kegiatan Pembuatan Sistim Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksananya Pembuatan Aplikasi dan GIS Tanah dan Bangunan	Bukittinggi	1 Kelurahan	247.289.830	APBD		1	272.018.813
	Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Arsip Elektronik	Bukittinggi	100 arsip	27.486.180	APBD		1	30.234.798

**Tabel 5.6**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				39.953.584.545				37.567.052.540	
1	<b>NON URUSAN</b>				2.675.481.310				2.503.029.441	
1	1.04.01. 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran setiap	Bukittinggi	100%	1.940.600.000	APBD	-	100%	2.134.660.000
1	1.04.01. 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	Bukittinggi	4	13.200.000	APBD	-	100%	14.520.000
1	1.04.01. 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang dibayar	Bukittinggi	1	11.000.000	APBD	-	100%	12.100.000
1	1.04.01. 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Bukittinggi	15	302.500.000	APBD	-	100%	332.750.000
1	1.04.01. 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	Bukittinggi	12	40.700.000	APBD	-	100%	44.770.000
1	1.04.01. 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	Bukittinggi	12	16.500.000	APBD	-	100%	18.150.000
1	1.04.01. 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Bukittinggi	97	33.000.000	APBD	-	100%	36.300.000
1	1.04.01. 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	Bukittinggi	32	40.700.000	APBD	-	100%	44.770.000
1	1.04.01. 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	Bukittinggi	12	6.600.000	APBD	-	100%	7.260.000
1	1.04.01. 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan	Bukittinggi	100	29.700.000	APBD	-	100%	32.670.000
1	1.04.01. 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/koordinasi yang diikuti dan dihadiri	Bukittinggi	100	450.000.000	APBD	-	100%	495.000.000
1	1.04.01. 01 21	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	Bukittinggi	7	446.700.000	APBD	-	100%	491.370.000
1	1.04.01. 01 31	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan	Bukittinggi	47	385.000.000	APBD	-	100%	423.500.000
1	1.04.01. 01 34	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Bukittinggi	47	165.000.000	APBD	-	100%	181.500.000
1	1.04.01. 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Meningkatnya Kualitas Kerja</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>100%</b>	<b>605.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>225.500.000</b>
1	1.04.01. 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Bukittinggi	100%	400.000.000	APBD		100%	
1	1.04.01. 02 07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	100%	0	APBD		100%	
1	1.04.01. 02 09	Pengadaan Peralatan Kantor	tersedianya peralatan kantor	Bukittinggi	100%	55.000.000	APBD		100%	60.500.000
1	1.04.01. 02 10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Bukittinggi	100%	150.000.000	APBD		100%	165.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	1.04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai ()	Bukittinggi	100%	22.000.000	APBD		100%	24.200.000
1	1.04.01.03	02 Pengadaan Pakaian Khas Daerah Aparatur	Tingkat Ketersediaan Pakaian Khas Daerah Aparatur	Bukittinggi	1	22.000.000	APBD		100%	24.200.000
1	1.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian		70%	90.000.000	APBD		100%	99.000.000
1	1.04.01.05	01 Megikuti atau melaksanakan Diklat Teknis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah/jenis diklat yang dilaksanakan	Bukittinggi	0,9	90.000.000			100%	99.000.000
1	1.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Bukittinggi	100%	17.881.310	APBD		100%	19.669.441
1	1.04.01.06	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Bukittinggi	1	6.000.000			100%	6.600.000
1	1.04.01.06	03 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis enam Bulan Berikutnya	Tersedianya Jenis dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan yang tepat waktu	Bukittinggi	1	4.907.100			100%	5.397.810
1	1.04.01.06	05 Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD yang	Bukittinggi	100%	5.974.210			100%	6.571.631
1	1.04.01.06	07 Penyusunan RENSTRA SKPD dan Revisi	Tersedianya dokumen RENSTRA untuk Tahun 2017-2021 dan Dokumen RENSTRA yang direvisi	Bukittinggi	1	1.000.000			100%	1.100.000
01	1.04.01.	<b>URUSAN WAJIB</b>				37.278.103.235				35.064.023.099
01	1.04.01.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Berkembangnya	Bukittinggi		6.423.995.850			87	1.076.104.975
01	1.04.01.15	03 Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana	Bukittinggi	0,6	753.277.250	DAU		100%	828.604.975
01	1.04.01.15	07 Pengadaan Tanah Perumahan PNS	Tersedianya tanah untuk Perumahan PNS	Bukittinggi	5000 meter	5.000.000.000	APBD		100%	
01	1.04.01.15	08 Pembuatan Data Base Infra Struktur Kawasan Perumahan dan Permukiman	Tersedianya data base infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman utk perencanaan kedepan.	Bukittinggi	3	150.000.000	APBD		100%	
01	1.04.01.15	09 Penyusunan DED Implementasi skala kota program KOTAKU	DED Implementasi skala kota program KOTAKU	Bukittinggi		295.718.600	APBD			
01	1.04.01.15	10 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bukittinggi	3 Dokumen	225.000.000	APBD		100%	247.500.000
01	1.04.01.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Parsentase kualitas Perumahan dan Kawasan permukiman	Bukittinggi		8.454.707.385				9.300.178.124
01	1.04.01.17	04 Bedah Rumah	Berkurangnya Rumah Yang Tidak Layak Huni	Bukittinggi	2000%	2.515.000.000	DAU		20	2.766.500.000
01	1.04.01.17	06 Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/BBGRM	Meningkatnya Rasa Gotong Royong dan kebersamaan	Bukittinggi	24	187.050.000	DAU		24	205.755.000
01	1.04.01.17	03 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Rumah Ibadah	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Rumah Ibadah	Bukittinggi	30	3.720.475.000	DAU		30	4.092.522.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
01	1.04.01.	19 01	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Masyarakat	Terbangun dan Meningkatnya Fasilitas Kemasyarakatan di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	30	379.869.800	APBD	30	417.856.780
01	1.04.01.	19 02	Pembangunan Gedung/ Gapura	Terbangunnya Gapura di kawasan Permukiman Kota Bukittinggi	Bukittinggi	35	1.012.147.825	APBD	35	1.113.362.608
01	1.04.01.	19 03	Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Permukiman	Meningkatnya Kualitas Prasarana Sarana Permukiman Kota Bukittinggi	Bukittinggi	30	242.000.000	APBD	30	266.200.000
01	1.04.01.	19 04	Penyusunan Ranperda RP3KP	Penyusunan Ranperda mengenai RP3KP	Bukittinggi	100	75.000.000	APBD	100	82.500.000
01	1.04.01.	19 05	Penyusunan Perwako Tentang Perumahan dan Permukiman Kota Bukittinggi	Tersedianya Kebijakan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bukittinggi	100	50.000.000	APBD	100	55.000.000
01	1.04.01.	20 01	Pendamping Kegiatan (P2KP atau KOTAKU )	Persentase Luas kota kumuh yang diantaskan	Bukittinggi	20	59.986.960	APBD	20	65.985.656
01	1.04.01.	20 02	Pendamping Kegiatan BPS	Berkurangnya rumah tidak layak huni BPS	Bukittinggi	454	106.588.900	APBD	454	117.247.790
01	1.04.01.	20 03	Pendamping Kegiatan Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Pemukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP)	Berkurangnya luas permukiman kumuh perkotaan	Bukittinggi	20	106.588.900	APBD	20	117.247.790
			Perencanaan Implementasi Skala Kota Program KOTAKU		Bukittinggi		350.000.000	APBD		385.000.000
<b>01</b>	<b>1.04.01.</b>	<b>21</b>	<b>Program pengelolaan areal pemukiman</b>	<b>Persentase ketersediaan fasilitas,</b>	<b>Bukittinggi</b>		<b>36.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>88.000.000</b>
01	1.04.01.	21 02	Perawatan dan pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi	terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi	Bukittinggi	75	80.000.000	APBD	75	88.000.000
<b>01</b>	<b>1.04.01.</b>	<b>16</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>% Jalan dengan riol yang sehat</b>	<b>Bukittinggi</b>		<b>22.363.400.000</b>		<b>75%</b>	<b>24.599.740.000</b>
01	1.04.01.	16 01	Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Tersedianya Jalan Lingkungan Perumahan	Bukittinggi	0,2	8.203.900.000	DAU	20%	9.024.290.000
01	1.04.01.	16 02	Pembangunan Riol	Tersedianya riol yang baik	Bukittinggi	0,2	5.993.500.000	DAU	20%	6.592.850.000
01	1.04.01.	16 03	Rehab/ peningkatan riol	tersedianya riol yang bersih dan baik peningkatan riol	Bukittinggi	0,2	2.871.000.000	DAU	20%	3.158.100.000
01	1.04.01.	16 04	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Persentase berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan	Bukittinggi	0,2	3.500.000.000	APBD	20%	3.850.000.000
01	1.04.01.	16 05	Pengadaan Penerangan Jalan Kawasan Permukiman	Jalan di Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi menjadi terang	Bukittinggi	0,2	470.000.000	APBD	20%	517.000.000
01	1.04.01.	16 06	Pembangunan Jalan Lingkung		Bukittinggi		1.100.000.000	APBD		1.210.000.000
01	1.04.01.	16 10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana, sarana dan utilitas Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana, sarana dan utilitas Umum	Bukittinggi	30	225.000.000	APBD	3	247.500.000

**Tabel 5.7**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS KEBAKARAN**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
101.05.1	<b>DINAS KEBAKARAN</b>				5.396.612.262				8.230.013.688
	<b>NON URUSAN</b>	Jumlah Materai Terbeli			2.232.559.262	APBD	0		5.270.788.388
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				1.715.309.262				1.813.348.388
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Terbeli	Dinas Kebakaran	Materai 6000 150bh, Materai 3000 108bh,Cek	1.464.000	APBD		Materai 6000 150bh, Materai 3000 108bh,Cek	1.464.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Listri, air dan tip yang terbayar	Dinas Kebakaran	Rek telepon 1, rek air 7, rek listrik 1	49.200.000	APBD		Rek telepon 1, rek air 7, rek listrik 1	50.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang di perbaiki	Dinas Kebakaran	roda 2(6 unit), roda 4(5unit), Mobil Damkar	675.000.000	APBD		roda 2(6 unit), roda 4(5unit), Mobil Damkar	675.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat-alat kebersihan tersedia	Dinas Kebakaran	31 bh alat dan Bahan	10.000.000	APBD		31 bh alat dan Bahan	10.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantoryang diperbaiki	Dinas Kebakaran	6 macam	5.000.000	APBD		6 macam	5.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat-alat tulis kantor terbeli	Dinas Kebakaran	59 macam	31.124.000	APBD		59 macam	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetak dan Penggandaan	Dinas Kebakaran	3 item	15.000.000	APBD		3 item	15.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Dinas Kebakaran	9 macam	5.000.000	APBD		9 macam	6.000.000
	Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat	Jumlah makan dan Minum	Dinas Kebakaran	nasi 330 bungkus,snack 300 kotak	9.990.000	APBD		nasi 330 bungkus,snack 300 kotak	11.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi Dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilakukan	Dinas Kebakaran	SPPD dalam kota dan SPPD luar Kota	200.000.000	APBD		SPPD dalam kota dan SPPD luar Kota	220.000.000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non Pns Dan Jasa Pemeliharaan	Jumlah Pegawai Non PNS	Dinas Kebakaran	23 orang	711.531.262	APBD		23 orang	782.684.388
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	JumlahPenerima Honorarium tim barang dan Jasa PPHP, PPK	Dinas Kebakaran	4 orang	2.000.000	APBD		4 orang	2.200.000
	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>353.850.000</b>				<b>3.293.800.000</b>
	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Luas area Gedung yang dibangun dan direhap	Dinas Kebakaran	200"	148.000.000	APBD		150"	162.800.000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor Yang terbeli	Dinas Kebakaran			APBD		2 Macam	3.000.000
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang terbeli	Dinas Kebakaran		48.250.000	APBD		4Jenis	55.400.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas terbeli	Dinas Kebakaran			APBD		Mobil Damkar Mini dan Mobil	3.000.000.000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor terbeli	Dinas Kebakaran	6 Item	81.600.000	APBD		6 item	89.760.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah PBB dan Resevoir yang	Dinas Kebakaran	1 PBB dan 7 Resevoir	10.000.000	APBD			
	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>Jumlah PBB dan Resevoir yang terpelihara</b>	Dinas Kebakaran	<b>BB dan 7 Rese</b>	<b>60.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 PBB dan 7 R</b>	<b>66.000.000</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebleur	Terpeliharanya Mebeleur Kantor	Dinas Kebakaran	Meja, kursi, almari dll	6.000.000	APBD		Meja, kursi, almari dll	6.600.000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan</b>			<b>161.000.000</b>	-	-		<b>161.000.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Dinas Kebakaran	60 stel	161.000.000	APBD		60 stel	161.000.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>			<b>2.400.000</b>	-	-		<b>2.640.000</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Laporankinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	has Kebaka	1 Laporan	800.000	APBD		1 Laporan	880.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semester	has Kebaka	10 laporan	800.000	APBD		10 laporan	880.000
	Penyusunan Rencana Kerja Dan Keuangan Skpd	Jumlah laporan rencana kerja dan keuangan	has Kebaka	4 laporan	800.000	APBD		4 laporan	880.000
	<b>URUSAN WAJIB</b>				<b>3.164.053.000</b>				<b>2.959.225.300</b>
	<b>Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Persentase kesiapsiagaan dan tanggap terhadap pencegahan kebakaran meningkat</b>			<b>3.164.053.000</b>	0	0		<b>2.959.225.300</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan kebakaran	Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran	has Kebaka	isi ulang tabung apar, dan alat pemadam	1.049.500.000			isi ulang tabung apar, dan alat pemadam	1.206.925.000
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Bahaya Kebakaran	pendataan dan pengawasan sarana pemadam kebakaran	has Kebaka	24 kali	68.400.000	APBD		24 kali	75.240.000
	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran	Persentase Penanggulangan	has Kebaka	1	553.425.000	APBD		100%	608.767.500
	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta Diklat	Dinas Kebakaran	8 orang	222.800.000	APBD		10 orang	267.360.000
	Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Kering dan	Dinas Kebakaran	55 orang	61.835.000	APBD		55 orang	68.018.500
	Pelatihan pertolongan penyelamatan korban dan layanan medis darurat serta bencana	Pelatihan pertolongan penyelamatan korban dan layanan medis	Dinas Kebakaran	55 orang	72.535.000	APBD		55 orang	79.788.500
	Peringatan HUT Damkar	Terlaksananya Kegiatan Peringatan HUT Damkar	Dinas Kebakaran	(Upacara, 3 kegiatan Simulasi dan Demonstrasi, makan dan Minum)	71.150.000	APBD		(Upacara, 3 kegiatan Simulasi dan Demonstrasi, makan dan Minum)	78.265.000
	Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat	Persentase Penyiraman, Penyemprotan dan Penyelamatan	Dinas Kebakaran	1	114.700.000	APBD		1	126.170.000
	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	Dinas Kebakaran	24 Kelurahan (480 org), 5 sekolah (100 org) 5 ormas	311.548.000	APBD		24 Kelurahan (480 org), 5 sekolah (100 org) 5 ormas	342.702.800
	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	penyediaan Jasa Informasi Kebakaran	Dinas Kebakaran	Spanduk 28 bh, Baliho 2bh, Stiker 200Bh, Baner 8bh, dan	69.080.000	APBD			
	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	penyediaan Jasa Informasi Kebakaran	Dinas Kebakaran	Spanduk 28 bh, Baliho 2bh, Stiker 200Bh, Baner 8bh, dan	69.080.000	APBD		Spanduk 28 bh, Baliho 2bh, Stiker 200Bh, Baner 8bh, dan	75.988.000
	Pembangunan/Rehabilitasi Bak Penampungan air/Resevoir (Pokir DPRD)	Terbangunnya dan terpeliharanya resevoir	Dinas Kebakaran	pembuatan 1 resevoir dan perbaikan 3 resevoir	500.000.000	APBD		pembuatan 1 resevoir dan perbaikan 3 resevoir	30.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Quick Response Fire Fighting Kec. MKS	Terbangunnya gedung kantor	Dinas Kebakaran	1 paket		0 APBD			

**Tabel 5.8**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 01.05.02	<b>DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>				23.788.632.024				17.345.294.504
1 01.05.02	<b>NON URUSAN</b>				10.823.267.804				3.890.294.504
1 01.05.02 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>	Bukittinggi	100%	2.126.933.804	APBD	-	100%	2.359.993.504
1 01.05.02 01 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	Satpol PP	600 bh, 3 buku	2.200.000	APBD		600 bh, 4 buku	3.000.000
1 01.05.02 01 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar	Satpol PP	48 bulan	30.000.000	APBD		48 bulan	35.000.000
1 01.05.02 01 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara	Satpol PP	27 unit	500.000.000	APBD		30 unit	700.000.000
1 01.05.02 01 4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli	Satpol PP	25 jenis	5.500.000	APBD		30 jenis	6.000.000
1 01.05.02 01 5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor	Satpol PP	12 bulan	8.000.000	APBD		12 bulan	13.000.000
1 01.05.02 01 6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Pehiperl kantor terbeli dan Jenis	Satpol PP	55 jenis	12.000.000	APBD		60 jenis	14.000.000
1 01.05.02 01 7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan	Satpol PP	6 jenis/12 bulan	7.500.000	APBD		6 jenis/12 bulan	2.000.000
1 01.05.02 01 8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik terbeli	Satpol PP	5 jenis	1.500.000	APBD		5 bulan	9.000.000
1 01.05.02 01 9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan	Satpol PP	1	15.000.000	APBD		100%	16.000.000
1 01.05.02 01 10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat, koordinasi yang diikuti	Satpol PP	0,95	200.000.000	APBD		95%	160.000.000
1 01.05.02 01 11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa Pegawai Non PNS dan Terbayarnya iuran	Satpol PP	38 org/12 bln	954.993.504	APBD	Sesuai dengan	38 org/12 bln	954.993.504
1 01.05.02 01 12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan	Satpol PP	28 org	379.240.300	APBD		28 org	435.000.000
1 01.05.02 01 13	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK)	Satpol PP	7 org	11.000.000	APBD		7 org	12.000.000
1 01.05.02 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Satpol PP</b>	<b>100%</b>	<b>7.345.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>180.000.000</b>
1 01.05.02 02 1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yg diadakan	Satpol PP	4 jenis	35.000.000	APBD		3 jenis	35.000.000
1 01.05.02 02 2	Pengadaan Mebeleur	Jenis Mebeleur yang diadakan	Satpol PP	2 jenis	30.000.000	APBD		2 jenis	30.000.000
1 01.05.02 02 4	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yg diadakan	Satpol PP	2 jenis	130.000.000	APBD		2 jenis	100.000.000
1 01.05.02 02 5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Satpol PP	1 unit	150.000.000	APBD		1 unit	15.000.000
1 01.05.02 02 6	Pembangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah gedung kantor yg terbangun	Satpol PP	1 unit	7.000.000.000	APBD		-	0
1 01.05.02 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai ( )</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	01.05.02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang	Satpol PP	230 stel	350.000.000	APBD		250 stel	400.000.000
1	01.05.02	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian</b>		70%	996.734.000	APBD		100%	944.901.000
1	01.05.02	05	1	Latihan Pembinaan Kesatuan	Jumlah anggota Pol.PP yg mengikuti latihan pembinaan kesatuan	Satpol PP	150 org	93.540.000	APBD		150 org	120.000.000
			2	HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional	Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP	Satpol PP	50 org	192.900.000	APBD		50 org	180.000.000
			3	Bimbingan teknis Satpol PP	Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP	Satpol PP	150 org	126.284.000	APBD		150 org	120.000.000
			4	Pendidikan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah anggota yang mengikuti Diksar Satpol PP	Satpol PP	60 org	368.215.000	APBD		60 org	359.526.000
			5	Latihan Pengendali Huru-Hara	Jumlah anggota Pol.PP latihan pengendali Huru-hara	Satpol PP	150 org	15.795.000	APBD		150 org	15.375.000
			6	Pendidikan dan Pelatihan PPNS dan PTI	Jumlah anggota yang mengikuti Diklat PPNS serta Jumlah anggota	Satpol PP	10 org	200.000.000	APBD		10 org	150.000.000
1	01.05.02	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	Bukittinggi	100%	4.600.000	APBD		100%	5.400.000
1	01.05.02	06	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Satpol PP	3 dok	1.500.000	APBD		3 dok	1.800.000
1	01.05.02	06	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	Satpol PP	2 dok	800.000	APBD		2 dok	900.000
1	01.05.02	06	4	Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Satpol PP	1 dok.	800.000	APBD		1 dok.	900.000
1	01.05.02	06	3	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen Renja dan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Satpol PP	7 dok	1.500.000	APBD		7 dok	1.800.000
01	01.05.02			<b>URUSAN WAJIB</b>				12.965.364.220				13.455.000.000
01	01.05.02	21		<b>Program peningkatan pembantasan penyakit</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus</b>	Satpol PP		178.750.000			87	270.000.000
01	01.05.02	21	1	Razia Penyakit Masyarakat	Jumlah razia penyakit masyarakat	Satpol PP	48 kali	88.750.000	APBD		48 kali	180.000.000
01	01.05.02	21	2	Razia Warung Kelambu	Jumlah razia warung kelambu selama Bulan Ramadhan	Satpol PP	15 kali	90.000.000	APBD		15 kali	90.000.000
01	01.05.02	22		<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Penurunan kasus pelanggaran perda</b>	Satpol PP		12.231.614.220				12.530.000.000
01	01.05.02	22	1	Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Operasional Pelaksanaan keamanan dan ketertiban	Satpol PP	12 bulan	5.916.317.320	APBD		12 bulan	6.000.000.000
01	01.05.02	22	2	Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara preventif Non Yustisial	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial	Satpol PP	150 kasus	58.400.000	APBD		150 kasus	60.000.000
01	01.05.02	22	3	Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial	Satpol PP	40 kasus	200.000.000	APBD		60 kasus	270.000.000
01	01.05.02	22	4	Operasionalisasi Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bukittinggi	Jumlah anggota Sekber yang difasilitasi	Satpol PP	40 org	351.519.500	APBD		45 org	400.000.000
01	01.05.02	22	5	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan	Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan	Satpol PP	4 kegiatan	38.400.000	APBD		4 kegiatan	40.000.000
01	01.05.02	22	6	Operasional PPNS	Operasional PPNS	Satpol PP	12 bulan	402.728.400	APBD		12 bulan	410.000.000

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
01	01.05.02	22	7	Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda Trantibum	Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda	Satpol PP	12 bulan	160.000.000	APBD		12 bulan	160.000.000
01	01.05.02	22	8	Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)	Operasional SK 4	Satpol PP	12 bulan	3.959.270.000	APBD		12 bulan	4.000.000.000
01	01.05.02	22	9	Operasional Pengamanan Idul Fitri dan Idul Adha	PAM Idul Fitri, idul Adha, PAM Natal, PAM Tahun Baru, PAM Tahun baru dan Idul Fitri, untuk	Satpol PP	12 bulan	218.000.000	APBD		12 bulan	240.000.000
01	01.05.02	22	10	Operasional Pengamanan Natal dan Tahun Baru	PAM Natal, PAM Tahun Baru, untuk instansi terkait	Satpol PP	1 tahun	91.800.000	APBD		1 tahun	100.000.000
01	01.05.02	22	11	Operasional Pengamanan yang diarahkan Pimpinan	PAM VIP, VVIP, dan yang diarahkan pimpinan	Satpol PP	1 tahun	600.000.000	APBD		1 tahun	600.000.000
01	01.05.02	22	12	Operasional Petugas Tindak Internal	Jumlah PTI yang difasilitasi	Satpol PP	10 org	235.179.000	APBD		10 org	250.000.000
01	01.05.02	23		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan</b>	Satpol PP		<b>555.000.000</b>			<b>75%</b>	<b>655.000.000</b>
01	01.05.02	23	01	Sosialisasi Peraturan daerah, peraturan kepala daerah di Kota Bukittinggi di Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan daerah, peraturan kepala daerah	Satpol PP	300 org	45.000.000	APBD		360 org	50.000.000
01	01.05.02	23	02	Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah di Kota Bukittinggi di Lingkungan Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala	Satpol PP	4000 org	85.000.000	APBD		4000 org	85.000.000
01	01.05.02	23	03	Sosialisasi Perda 3 Tahun 2015 ke Pengelola Warnet dan Tempat Hiburan Malam	Jumlah Pengelola Warnet dan Tempat Hiburan Malam yang mengikuti Sosialisasi	Satpol PP	-	60.000.000			-	60.000.000
01	01.05.02	23	04	Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah anggota Linmas yang mengikuti pembinaan	Satpol PP	120 org	55.000.000			240 org	60.000.000
01	01.05.02	23	05	Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas	Jumlah anggota linmas yang difasilitasi	Satpol PP	120 org	310.000.000			240 org	400.000.000

**Tabel 5.9**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
101.05.03	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				3.365.324.400				5.105.993.940
	<b>NON URUSAN</b>				679.454.000				2.714.149.400
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				425.640.000				2.627.454.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	BPBD	1 Paket	555.000	APBD		100%	610.500
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemakaian telepon, air dan listrik	BPBD	1 Tahun	11.000.000	APBD		100%	12.100.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Servis kendaraan, suku cadang, BBM/ gas dan pelumas, STNK, pajak kendaraan	BPBD	12 Bulan	172.864.000	APBD		100%	190.150.400
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat - alat kebersihan kantor ( sekop sampah,	BPBD	23 Item	4.463.000	APBD		100%	4.909.300
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Servis komputer / PC, laptop, mesin tik, Alat Komunikasi Radio dan printer	BPBD	1 Paket	2.500.000	APBD		100%	2.750.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Alat - alat tulis kantor ( kertas HVS, dll ), Jam Dinding, Calculator	BPBD	53 Item	12.043.000	APBD		100%	13.247.300
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetak ( amplop dll ), penggandaan ( fotocopy, dll )	BPBD	1 Paket	7.015.000	APBD		100%	7.716.500
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat - alat listrik ( kabel raun, dll )	BPBD	9 Item	2.200.000	APBD		100%	2.420.000
	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Nasi, Snack	BPBD	Nasi 250 Bks Snack 250 Bks	10.000.000	APBD		100%	11.000.000
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	BPBD	1 Tahun	200.000.000	APBD		100%	220.000.000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honorarium Tim Barang dan Jasa	BPBD	12 Bulan	3.000.000	APBD		100%	3.300.000
	Penyediaan jasa pegawai Non PNS dan Jasa Pemeliharaan kesehatan NON PNS	Pegawai non PNS	BPBD	22 orang	0	APBD		100%	2.159.250.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				252.314.000				85.045.400
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Alat - alat Pemeliharaan Gedung Kantor	BPBD	1 Paket	60.000.000	APBD		100%	66.000.000
	Pembangunan Kantor PUSDALOP-PB				175.000.000	APBD			
	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur kantor	Perbaikan Mebeleur Kantor	BPBD	1 Paket	17.314.000	APBD		100%	19.045.400
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				1.500.000				1.650.000
	Penyusunan Revisi Renstra	Revisi Renstra SKPD	BPBD	1 Paket	1.500.000	APBD		100%	1.650.000
	<b>URUSAN WAJIB</b>				2.685.870.400				2.391.844.540

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>				<b>1.947.131.400</b>				<b>2.141.844.540</b>
	Sosialisasi/Penyuluhan/Pelatihan Pencegahan Penanggulangan Bencana	Kegiatan penyuluhan/sosialisasi penanggulangan	Kota Bukittinggi	1 Paket	61.495.000	APBD		100%	67.644.500
	Oprasional PUSDALOPS PB	Pesertasi bencana yang berhasil ditanggulangi	BPBD	1 Paket	1.285.896.400	APBD		100%	1.414.486.040
	Kegiatan Jambore PRB dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	Pesertasi bencana yang berhasil ditanggulangi	BPBD	1 Paket	68.350.000	APBD		100%	75.185.000
	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	Pesertasi bencana yang berhasil ditanggulangi	BPBD	1 Paket	31.390.000	APBD		100%	34.529.000
	Penggunaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana	Pesertasi bencana yang berhasil ditanggulangi	BPBD	1 Paket	500.000.000	APBD		100%	550.000.000
	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan kepada Aparatur Penyelenggara Penanggulangan Bencana</b>				<b>47.978.000</b>				<b>250.000.000</b>
	Pelatihan gabungan BPBD, SAR, TAGANA, PMI, PUSDALOPS	Terlaksananya pendidikan dasar penanggulangan bencana	BPBD	1 Paket	47.978.000	APBD		1	250.000.000
	<b>Program Sistem Kebencanaan</b>				<b>690.761.000</b>				<b>0</b>
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Penyusunan Kajian Resiko Bencana 1 Dokumen, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 1 Dokumen	BPBD	6 bulan	542.360.000	APBD		100%	0
	Penyusunan Rencana Kontijensi Gempa	Penyusunan Rencana Kontijensi Gempa 1 Dokumen	BPBD	1 Paket	148.401.000	APBD		100%	0

**Tabel 5.10**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS SOSIAL**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
101.06.01	<b>DINAS SOSIAL</b>				8.043.385.750				6.660.692.200
	<b>NON URUSAN</b>				924.023.200				988.192.200
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bukittinggi	100%	562.330.000	APBD		100%	701.692.200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan materai, perangko, dan benda pos lainnya	Bukittinggi	400 Lbr Materai 6000, 300 lbr materai 3000, 4 buku cek dan benda pos lainnya	4.000.000	APBD		400 Lbr Materai 6000, 300 lbr materai 3000, 4 buku cek dan benda pos lainnya	4.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	Bukittinggi	4 rek. 12 bulan	54.800.000	APBD		4 rek. 12 bulan	55.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Sosial/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara	Bukittinggi	5 unit kendaraan roda empat dan 12 unit kendaraan roda dua	102.250.000	APBD		5 unit kendaraan roda empat dan 12 unit kendaraan roda dua	140.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor	Bukittinggi	12 bulan	50.360.000	APBD		12 bulan	70.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bukittinggi	12 bulan	12.500.000	APBD		12 bulan	12.500.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK terbeli	Bukittinggi	24 jenis	11.330.000	APBD		24 jenis	19.192.200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas	Bukittinggi	7 jenis, 12 bulan	12.500.000	APBD		7 jenis, 12 bulan	15.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruangan Kantor	Jenis alat listrik dan elektronik terbeli	Bukittinggi	5 jenis	3.500.000	APBD		5 jenis	3.500.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur	Bukittinggi	12 bulan	12.000.000	APBD		12 bulan	12.500.000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Pelaksanaan rapat rapat koordinasi	Bukittinggi	12 bulan	140.000.000	APBD		12 bulan	200.000.000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah penyediaan jasa NON PNS	Bukittinggi	10 bulan, 3 orang	149.100.000	APBD	Penambahan 2 orang tenaga non pns	10 bulan, 3 orang	155.000.000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Jasa Pemeliharaan	Jumlah kegiatan yang dibayarkan Honor PPK, PPHP, dan PPBJ	Bukittinggi	8 kegiatan	9.990.000	APBD		8 kegiatan	15.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>100%</b>	<b>356.120.500</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>280.000.000</b>
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Bukittinggi	1 gedung	80.000.000	APBD		1 gedung	80.000.000
	Penggandaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor terbeli	Bukittinggi	3 jenis	90.850.000	APBD		-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor terbeli	Bukittinggi	5 jenis	27.500.000	APBD		5 jenis	10.000.000
	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana TMP Kusuma Bhakti	Jumlah operasional LK3	Bukittinggi	12 bulan	104.600.000	APBD		12 bulan	135.000.000
	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	Jumlah pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan	Bukittinggi	1 hari	53.170.500	APBD		1 hari	55.000.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>100%</b>	<b>5.572.700</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>6.500.000</b>
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun tersusun	Bukittinggi	2 Dokumen	1.746.800	APBD		2 Dokumen	2.000.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja tersusun	Bukittinggi	2 dokumen	2.369.400	APBD		2 dokumen	2.500.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LKPJ, LPPD, LKIP, dan Lap Triwulan tersusun	Bukittinggi	7 Dokumen	1.456.500	APBD		7 Dokumen	2.000.000
	<b>URUSAN WAJIB</b>				<b>7.119.362.550</b>				<b>5.672.500.000</b>
	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>80%</b>	<b>4.124.901.450</b>	<b>APBD</b>		<b>85%</b>	<b>1.912.500.000</b>
	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan	Bukittinggi	12 bulan	186.957.000	APBD		12 bulan	85.000.000
	Verifikasi Data PMKS Penerimaan PBI	Jumlah data verifikasi	Bukittinggi	2 dokumen	424.437.000	APBD		2 dokumen	505.000.000
	Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan	Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi	Bukittinggi	954 KK	377.439.000	APBD	Penambahan anggaran tahun 2018 sesuai dengan Surat Menteri Sosial tentang Dana Penyerahan PKH.	954 KK	450.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran bantuan pangan termonev	Jumlah penyaluran bantuan pangan termonev	Bukittinggi	12 bulan	207.682.000	APBD		12 bulan	200.000.000
	Operasional dan Penguatan Tagana	Operasional untuk kegiatan tagana	Bukittinggi	12 Bulan	97.999.000	APBD		12 Bulan	200.000.000
	Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana dibentuk	Bukittinggi	3 KSB	155.429.000	APBD		3 KSB	90.000.000
	Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai		Bukittinggi		2.573.311.450	APBD			
	Pengadaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah alat bantu khusus penyandang disabilitas terbeli	Bukittinggi	3 Jenis	26.969.000	APBD	Usulan Musrenbang Kel Campago Inuah	3 Jenis	132.500.000
	Fasilitasi dan Monev Bantuan dan Jaminan Sosial	Jumlah penerima bantuan dan jaminan sosial termonev	Bukittinggi	12 bulan	74.678.000	APBD		12 bulan	250.000.000
	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>	<b>Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>750 KK</b>	<b>870.525.600</b>	<b>APBD</b>		<b>990 KK</b>	<b>980.000.000</b>
	Updating Data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data PMKS yang diupdate	Bukittinggi	1 Dokumen	125.900.000	APBD		-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi dan Monev KUBE Perkotaan	Jumlah KUBE terfasilitasi	Bukittinggi	49 KUBE / 1 kali	294.825.600	APBD	Dana Pendampingan	64 KUBE / 1 kali	500.000.000
	Pemberangkatan PMKS	Jumlah PMKS mengikuti pelatihan yang terfasilitasi	Bukittinggi	12 bulan	49.800.000	APBD		12 bulan	80.000.000
	Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jumlah PRSE yang diberdayakan	Bukittinggi	30 PRSE	200.000.000	APBD		60 PRSE	200.000.000
	Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi bagi PMKS	Jumlah PMKS yang menerima penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi	Bukittinggi	100 orang	200.000.000	APBD		100 orang	200.000.000
	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>70%</b>	<b>369.314.000</b>	<b>APBD</b>		<b>73%</b>	<b>450.000.000</b>
	Penanggulangan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat Terlantar	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar	Bukittinggi	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	50.000.000
	Razia dan Pembinaan Serta Penyaluran PMKS	Jumlah razia yang dilakukan	Bukittinggi	8 kali	70.000.000	APBD		12 kali	150.000.000
	Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan diskriminasi	Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan	Bukittinggi	12 bulan	150.000.000	APBD		12 bulan	150.000.000
	One Day for children (Sehari Bersama Anak)	Jumlah Anak PMKS yang mengikuti kegiatan	Bukittinggi	1000 orang	99.314.000	APBD		1000 orang	100.000.000
	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma</b>	<b>Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>20%</b>	<b>18.680.000</b>	<b>APBD</b>		<b>25%</b>	<b>75.000.000</b>
	Penanganan Penyakit Kejiwaan	Jumlah penyandang penyakit kejiwaan yang terfasilitasi	Bukittinggi	20 orang	18.680.000	APBD		50 orang	75.000.000
	<b>program pembinaan panti asuhan/panti jompo</b>	<b>Panti Asuhan/ Jompo yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>75%</b>	<b>27.983.000</b>	<b>APBD</b>		<b>75%</b>	<b>90.000.000</b>
	Pembinaan panti sosial anak	Jumlah panti dibina	Bukittinggi	4 Panti	27.983.000	APBD		4 Panti	90.000.000
	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial</b>	<b>Bukittinggi</b>	<b>40%</b>	<b>711.175.000</b>	<b>APBD</b>		<b>45%</b>	<b>775.000.000</b>
	Pembinaan karang taruna	Jumlah anggota KT terbina	Bukittinggi	125 orang dan 1 Karang Taruna	123.355.000	APBD	Usulan Musrenbang Ladang Cakiah, Tarok Dipo, Koto Salayan, Campago Ipuah dan Pokir DPRD A.n Jusra Adek, S.Sos, MM	125 orang dan 2 Karang Taruna	265.000.000
	Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial. Organisasi Sosial dan Yayasan	Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina	Bukittinggi	25 orsos/yayasan	350.000.000	APBD		25 orsos/yayasan	200.000.000
	Sosialisasi dan Koordinasi Pemanfaatan Corporate Social Responsibility	Jumlah pembinaan sumber dana sosial	Bukittinggi	1 hari	50.000.000	APBD		1 hari	60.000.000
	Operasional dan Penguatan LK3	Jumlah operasional LK3	Bukittinggi	12 bulan	60.000.000	APBD		12 bulan	80.000.000
	Pembentukan dan pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	Jumlah WKSMB yang dibentuk	Bukittinggi	1 WKSMB	62.820.000	APBD		1 WKSMB	70.000.000
	Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial	Jumlah Puskesmas dibentuk	Bukittinggi	1 Puskesmas	65.000.000	APBD		1 Puskesmas	100.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>Tingkat Anak terlantar yang Terentaskan</b>	Bukittinggi	40%	70.000.000	APBD		42%	100.000.000
	Pelayanan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah pelayanan kasus anak terlantar	Bukittinggi	12 bulan	70.000.000	APBD		12 bulan	100.000.000
	<b>Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian</b>	Bukittinggi	87%	624.194.000	APBD		90%	990.000.000
	Pembinaan PSM	Jumlah peserta pelatihan	Bukittinggi	128 orang	388.894.000	APBD	Usulan Musrenbang ATTS	Jumlah PSM terbina	425.000.000
	Pemberangkatan PSKS	Jumlah PSKS mengikuti pendidikan yang terfasilitasi	Bukittinggi	25 orang	50.300.000	APBD		25 orang	365.000.000
	Sarasehan generasi muda	Jumlah peserta sarasehan	Bukittinggi	50 orang	85.000.000	APBD		50 orang	100.000.000
	Pembinaan dan Penumbuhan Family Care Unit	Jumlah Keluarga yang mendapatkan bantuan	Bukittinggi	5 keluarga	100.000.000	APBD		5 keluarga	100.000.000
	<b>Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PKS, narkoba an penyakit sosial lainnya)</b>	<b>Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya</b>	Bukittinggi	4%	302.589.500	APBD		5%	300.000.000
	Pelatihan Keterampilan bagi EKS Napza	Jumlah Eks Napza yang dilatih	Bukittinggi	15 orang	302.589.500	APBD		15 orang	300.000.000

Tabel 5.11  
PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			5.738.358.774				6.882.430.529
		NON URUSAN			841.794.524				1.010.153.429
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	627.429.024	APBD			752.914.829
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai, buku cetak dan benda pos lainnya	4.050.000	APBD			4.860.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet		Rekening telepon, air dan listrik	42.200.000	APBD			50.640.000
		Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	6.450.000	APBD			7.740.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		suku cadang, service dan BBM serta pajak kendaraan	235.248.000	APBD			282.297.600
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	45.403.600	APBD			54.484.320
		Penyediaan Alat tulis kantor		Tersedianya alat tulis kantor	7.968.200	APBD			9.561.840
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13.078.500	APBD			15.694.200
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalansi listrik	1.499.500	APBD			1.799.400
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.587.000	APBD			3.104.400
		Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan dan Minum	19.140.000	APBD			22.968.000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah		Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	150.000.000	APBD			180.000.000
		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS		Tenaga administrasi, jaga malam dan supir	85.754.224	APBD			102.905.069
		Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor		Spanduk	1.750.000	APBD			2.100.000
		Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Honor pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan	12.300.000	APBD			14.760.000
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	195.000.000	APBD			234.000.000
		Pengadaan Peralatan Kantor		penghancur kertas, brankas, mebeulair	45.000.000	APBD			54.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.587.000	APBD			3.104.400
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Gedung kantor yang nyaman	150.000.000	APBD			180.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			12.948.100	APBD			15.537.720
	Penilaian angka kredit	Terlaksananya Penilaian kredit petugas PLKB			12.948.100	APBD			15.537.720
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan laporan Keuangan			6.417.400	APBD			7.700.880
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan capaian kinerja dan keuangan			1.500.000	APBD			1.800.000
	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun berjalan			1.177.400	APBD			1.412.880
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Tersusunnya Renja dan Keuangan			1.700.000	APBD			2.040.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedinya LAKIP			2.040.000	APBD			2.448.000
	<b>URUSAN WAJIB</b>				<b>4.896.564.250</b>				<b>5.872.277.100</b>
	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>2.961.957.850</b>	APBD			<b>3.554.349.420</b>
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	persentase penurunan kasus KDRT dan TPPO			485.855.400	APBD			583.026.480
	Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)	Terlaksananya Lomba dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kota Bukittinggi,Prov,Nasiona			133.152.000	APBD			159.782.400
	Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak				133.124.000	APBD			159.748.800
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan tentang KDRT dan TPPO				65.704.400	APBD			78.845.280
	Sosialisasi & Advokasi Perlindungan Khusus Anak				88.130.000	APBD			105.756.000
	Pelayanan dan perlindungan khusus anak				65.745.000	APBD			78.894.000
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan			687.904.200	APBD			825.485.040
	Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak korban dan rentan KDRT			250.000.000	APBD			300.000.000
	Fasilitasi pengembangan dan perkuatan Forum Anak Daerah ( FORDA )	Jumlah pengurus FORDA yang didampingi,mengikuti peringatan HAN			88.996.000	APBD			106.795.200
	Penguatan Persiapan APE dan PUG PP				51.284.000	APBD			61.540.800
	Penguatan dan pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP bidang Ekonomi				43.183.000	APBD			51.819.600
	Penguatan Kelembagaan PUG				28.715.000	APBD			34.458.000
	Penyusunan informasi Gender Dan Anak				196.970.500	APBD			236.364.600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	KIE tentang kesetaraan dan keadilan Gender				28.755.700	APBD			34.506.840
	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>				<b>426.919.500</b>	<b>APBD</b>			<b>512.303.400</b>
	Peningkatan Produktifitas perempuan melalui pelatihan/bimbingan dan pameran dalam dan luar Daerah				111.660.000	APBD			133.992.000
	Forum Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi, dan trafficking				90.395.800	APBD			108.474.960
	Peningkatan ekonomi perempuan melalui industri rumahan				171.220.000	APBD			205.464.000
	Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga				53.643.700	APBD			64.372.440
	<b>Peningkatan Peran Serta &amp; Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.</b>	<b>Persentase penurunan kemiskinan</b>			<b>1.361.278.750</b>	<b>APBD</b>			<b>1.633.534.500</b>
	Peringatan Hari Ibu	lomba dan peringatan hari ibu			125.719.000	APBD			150.862.800
	Peningkatan Peran organisasi perempuan/organisasi masyarakat (GOW )	Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi			200.000.000	APBD			240.000.000
	Pembinaan tokoh perempuan inspiratif ( Pembentukan dan Pembinaan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bukittinggi				27.280.000	APBD			32.736.000
	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	PKK yang dibina, Jambore Kota yang dilaksanakan, Lomba PKK, Jambore Tingkat Propinsi yang dilaksanakan			888.279.750	APBD			1.065.935.700
	Perkuatan organisasi Dharmawanita Persatuan Kota Bukittinggi				120.000.000	APBD			144.000.000
	<b>URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>				<b>1.934.606.400</b>	<b>APBD</b>			<b>2.317.927.680</b>
	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Jumlah PUS ber KB</b>			<b>1.618.721.900</b>	<b>APBD</b>			<b>1.942.466.280</b>
	Pelayanan KIE / Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	Terlaksananya KIE /teknik motivasi baik melalui media cetak maupun elektronik			85.741.300	APBD			102.889.560
	Manunggal KB/Kesehatan	Terlaksananya Manunggal KB/Kesehatan			65.000.000	APBD			78.000.000
	Pelayanan KB serentak dan komplikasi	<b>Jumlah PUS ber KB</b>			38.125.000	APBD			45.750.000
	Pemberian penghargaan KB Teladan	Perlombaan yang dilaksanakan			82.805.000	APBD			99.366.000
	Fasilitasi koalisi kependudukan	Terlaksananya buku analisa kependudukan			250.000.000	APBD			300.000.000
	Sosialisasi / <i>grand design</i> pengendalian kuantitas penduduk	Perserta sosialisasi Grand Design kependudukan			20.866.500	APBD			25.039.800
	Penunjang Operasional PPKBK, sub PPKBK dan kader Poktan	Pemberian honorarium PPKBK dan SUB PPKBK serta kader			423.208.000	APBD			507.849.600
	Pelaksanaan harganas kota, propinsi, dan nasional	Pelaksanaan hari keluarga Nasional Tingkat kota, propinsi, dan nasional			87.330.000	APBD			104.796.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	jambore program KKBPK	Jambore yang dilaksanakan			54.132.000	APBD			64.958.400
	Fasilitasi Lapangan Program KKBPK	Jambore kader IMP dan PLKB terpadu			35.000.000	APBD			42.000.000
	fasilitasi / Pelaksanaan kampung KB	kampung KB yang dibina			60.000.000	APBD			72.000.000
	Penunjang Kegiatan updating pendataan keluarga				86.671.750	APBD			104.006.100
	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan bagi Pengurus KB	Peserta orientasi pencatatan dan pelaporan			35.781.500	APBD			42.937.800
	Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Jumlah Peserta KB baru MOP			139.345.600	APBD			167.214.720
	Orientasi petugas updating pendataan keluarga	Peserta orientasi pendataan keluarga			25.980.750	APBD			31.176.900
	promosi gelanggang dagang kelompok UPPKS	Pameran dagang yang dilaksanakan			63.045.000	APBD			75.654.000
	Sarasehan hasil Pendataan/Updating data Keluarga	Saresehan hasil 2017			31.475.500	APBD			37.770.600
	Penyelenggaraan bimbingan terpadu Program KKBPK	Jumlah kegiatan bimbingan terpadu program KKBPK			22.660.000	APBD			27.192.000
	Pelatihan motivator MOP bagi peserta KB pria				11.554.000	APBD			13.864.800
	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>				<b>171.464.000</b>	<b>APBD</b>			<b>205.756.800</b>
	Pelatihan KRR bagi PS/KS	Peserta pelatihan KRR bagi pendidik sebaya dan konselor sebaya			41.872.000	APBD			50.246.400
	Pelatihan KRR bagi Kepala Sekolah dan guru pembina PIK R/M	Peserta pelatihan KRR bagi kepala sekolah dan guru			26.435.000	APBD			31.722.000
	Fasilitasi Program Generasi Berencana	Pemilihan duta pelajar/mahasiswa genre, pengayom motivator dan kreator genre			103.157.000	APBD			123.788.400
	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>				<b>18.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>18.000.000</b>
	Penunjang operasional klinik KB	Klinik KB yang berfungsi			18.000.000	APBD			21.600.000
	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>				<b>69.137.000</b>	<b>APBD</b>			<b>82.964.400</b>
	Kancah Bhakti Saka Kencana	Peserta yang mengikuti Saka bhakti Kencana			69.137.000	APBD			82.964.400
	<b>Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>				<b>57.283.500</b>	<b>APBD</b>			<b>68.740.200</b>
	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan POKTAN	Jumlah POKTAN yang dibentuk dan didampingi			57.283.500	APBD			68.740.200



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan road sweper	Road sweper	DLH	1 paket	0	APBD			
	<b>Program Peningkatan disiplin aparat</b>				<b>378.344.000</b>				<b>350.000.000</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian kerja lapangan	DLH	206 Orang petugas lapangan, dan	378.344.000	APBD		206 Orang petugas lapangan	350.000.000
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem</b>				<b>5.307.000</b>				<b>4.737.700</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LAKIP SKPD	DLH	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar	1.000.000	APBD		Laporan capaian kinerja dan ikhtisar	1.100.000
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	DLH	Laporan keuangan semesteran 1 laporan	962.000	APBD		Laporan keuangan semesteran 1 laporan	1.058.200
	Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD	RENJA SKPD	DLH	Rencana kerja SKPD 1 kegiatan	2.345.000	APBD		Rencana kerja SKPD 1 kegiatan	2.579.500
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	DLH	Laporan keuangan akhir	1.000.000			Laporan keuangan akhir	1.000.000
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				6.591.299.200				7.200.200.600
	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Sarana dan prasarana pengolahan	DLH	1 tahun	812.535.000	APBD		1 tahun	1.650.000.000
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Sarana dan prasarana pengolahan persampahan yang terpeloharan	DLH	1 tahun	187.000.000	APBD		1 tahun	153.670.000
	Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan	Uang lembur PNS, Non PNS dan kontribusi ke	DLH	1 tahun	4.206.734.000	APBD		1 tahun	4.206.734.000
	Penunjang Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	Operasional pengelolaan rumah kompos	DLH	1 tahun	227.010.000	APBD		1 tahun	274.682.100
	Sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan	Jumlah kasus penegakan kebijakan	DLH	1 tahun	144.269.500	APBD		1 tahun	144.269.500
	Sosialisasi/kampanye peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah peserta sosialisasi/kampanye	DLH	250 orang peserta	0	APBD		1 tahun	156.485.000
	Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS	Jumlah TPSS yang disemprot	DLH	TPSS lokasi strategis se	114.313.700	APBD		TPSS lokasi strategis se	115.000.000
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah RW percontohan	DLH	3 RW percontohn	0	APBD		3 RW percontohn	73.344.000
	Penyebarluasan informasi tentang K3 dan penyuluhan keliling kepada masyarakat	Jumlah media publikasi	DLH	7 Media Publikasi	160.000.000	APBD		7 Media Publikasi	115.439.000
	Sosialisasi peningkatan peran serta anak didik dalam pengelolaan persampahan	Jumlah peserta sosialisasi	DLH	200 orang peserta	0	APBD		200 orang peserta	61.992.000
	Pembangunan Transfer depo	Transfer depo	DLH	1 paket transfer depo permanen	0	APBD			
	Penunjang operasional pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	Transpor pemunggut dan upah petugas yang dibayarkan	DLH	1 tahun	0	APBD		1 tahun	0
	Penunjang pengadaan pengelolaan retribusi daerah	Retribusi daerah	DLH	1 tahun	12.565.000	APBD		1 tahun	12.565.000
	Sosialisasi PERDA Retribusi Pelayanan Persampahan	jumlah peserta Sosialisasi		24 Kelurahan	56.872.000				
	Pengadaan sarana pemeliharaan kebersihan wilayah pasar	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan wilayah pasar	DLH	Luas wilayah pasar yang bersih/bebas sampah	0	APBD		1 tahun	126.020.000
	Fasilitasi kerjasama antar daerah dalam pengelolaan persampahan	Fasilitasi kerjasama antar daerah dalam pengelolaan	DLH	1 tahun	165.000.000				
	Pengadaan tanah untuk pembangunan transfer depo	Luas tanah untuk pembangunan transfer depo	DLH	3 paket	0	APBD			
	Pelatihan teknis SDM untuk pengelolaan persampahan	Jumlah peserta/aparatut mengikuti bimtek pengelolaan	DLH	10 orang	100.000.000	APBD		10 orang	110.000.000
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan persampahan skala kota	Laporan evaluasi pelayanan persampahan	DLH	1 dokumen	50.000.000	APBD			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Tempat Mesin Pencacah dan Tempat Pengomposan	Tempat mesin Pengomposan dan Tempat mesin	DLH	2 paket	180.000.000				
	Review Master Plan Pengelolaan Persampahan	Dokumen Review Master Plan Pengelolaan	DLH	1 Dokumen	175.000.000				
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</b>				<b>1.347.513.345</b>				<b>1.326.722.150</b>
	Pengawasan dan Pengendalian usaha/ kegiatan berdampak lingkungan hidup	Jumlah usaha yang diamati	DLH	15 badan usaha milik pemerintah/swasta	18.300.000	APBD		15 badan usaha milik pemerintah/swasta	14.300.000
	Penunjang Operasional tim koordinasi pos pengaduan lingkungan	Jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	DLH	20 Pengaduan	17.589.850	APBD		20 kasus	17.500.000
	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Rekomendasi (izin lingkungan dan izin PPLH)	DLH	12 Bulan	26.934.000	APBD		100 % dokumen yang masuk dinilai	35.000.000
	Pelayanan perizinan PPLH	Rekomendasi izin SIPAL, TPS LB 3 dan izin PPLH lainnya	DLH	12 Bulan	11.764.000			100 % dokumen yang masuk dinilai	13.513.000
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan HUT LH dan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah	DLH	HUT LH Thn 2018 dan lomba	0	APBD		HUT LH Thn 2019 dan lomba	0
	Peringatan hari lingkungan hidup	Upacara HUT LH dan kegiatan lainnya yang dapat memeriahkan acara HUT LH, lomba	DLH	1 kali HUT LH Thn 2018 dan kegiatan penunjang	116.706.945				
	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen RPPLH tersusun	DLH	1 dokumen	199.701.200			1 dokumen	199.701.200
	Penunjang operasional tim koordinasi penilaian adipura	Terlaksananya penilaian Adipura	DLH	2 kali penilaian	355.472.500	APBD		2 kali penilaian	590.700.000
	Pemantauan kualitas badan air/sungai batang agam	Jumlah titik pantau	DLH	Jumlah titik pantau	0	APBD		Jumlah titik pantau	35.563.100
	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Terpantaunya kualitas air, udara dan tanah	DLH	3 sungai, 2 titik pemantauan udara, 3 titik air sumur dan air hujan	79.100.000	APBD		3 sungai, 2 titik pemantauan udara, 3 titik air sumur dan air hujan	200.000.000
	DAK Bidang Lingkungan Hidup (sisa DAK 2010-2015)	Kendaraan khusus laboratorium dan lampu solar cell	DLH	Kendaraan khusus labor dan lampu solar cell terbeli untuk sekolah	0	APBD			
	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	Biaya operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	DLH	12 Bulan	46.000.000	APBD		1 tahun	192.300.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Reagen, PH Meter, DO Meter	DLH	1 Paket	97.800.000				
	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup	Alat Laboratorium dipelihara	DLH	12 Bulan	50.000.000				
	Penyusunan DED Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Dokumen DED Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	DLH	1 dokumen	0	APBD			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Dokumen FS, DED dan UKL/UPL	DLH	1 Dokumen	300.000.000				
	Penegakan hukum administrasi bidang Lingkungan Hidup	Menurunnya kasus pencemaran	DLH	jumlah kasus	28.144.850	APBD		jumlah kasus	28.144.850
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>				<b>879.641.060</b>				<b>1.118.615.625</b>
	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup	Sekolah mengikuti program adiwiyata	DLH	1 tahun	116.000.000	APBD		1 tahun	195.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Frekuensi informasi tentang kualitas lingkungan hidup	DLH	1 tahun	49.708.500	APBD		1 tahun	49.676.565
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Buku kondisi lingkungan hidup kota	DLH	1 buku SLHD dari 1 buku	82.019.000	APBD		1 buku SLHD dari 1 buku	94.612.500
	Saka Kalpataru	Jumlah peserta (siswa) yang mengikuti pramuka saka kalpataru	DLH	120 siswa	0	APBD		120 siswa	0
	Pendatan dan inventarisasi gas rumah kaca	Data inventarisasi gas rumah kaca tersusun	DLH	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	0
	Sosialisasi pengelolaan limbah rumah tangga	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan limbah rumah tangga	DLH	1 kali kegiatan sosialisasi	0			1 kali kegiatan sosialisasi	0
	Kegiatan Program Kampung Iklim	Jumlah peserta sosialisasi tentang kampung iklim	DLH	pembinaan 1 kelurahan	0			pembinaan 1 kelurahan	0
	Penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung	Buku kajian daya dukung dan daya tampung	DLH	1 dokumen	0			1 dokumen	219.536.000
	Sosialisasi kegiatan lingkungan bersih	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi lingkungan bersih		30 orang peserta	0			30 orang peserta	36.323.100
	Pembinaan masyarakat di sekitar Batang Agam	Jumlah anggota masyarakat yang dibina	DLH	2 kluster @ 400 orang	62.040.000			4 kali pembinaan	53.593.900
	Penyusunan Produk hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup	Produk hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup	DLH	Revisi 1 peraturan perundang-undangan dan penyusunan Perda retribusi	35.373.560			Revisi 1 peraturan perundang-undangan dan penyusunan Perda retribusi	35.373.560
	Pemberdayaan fasilitator dan kader lingkungan hidup	kader dan fasilitator yang memahami tentang penataan lingkungan	DLH	1 kelurahan	99.500.000			1 tahun	99.500.000
	Monitoring dan Evaluasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan	Monitoring dan Evaluasi peningkatan peran serta masyarakat dalam	DLH	1 laporan	0			1 laporan	50.000.000
	Penyusunan SOP Dinas Lingkungan Hidup	SOP Lingkungan Hidup tersusun	DLH	1 dokumen	50.000.000			1 dokumen	50.000.000
	Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik dan An organik	Pelatihan Daur Ulang Sampah An Organik, cara Pengomposan dan	DLH	20 Dasa Wisma	100.000.000				
	Promosi penggunaan produk daur ulang sampah	Jumlah kegiatan promosi produk daur ulang sampah	DLH	2 kali promosi	100.000.000			2 kali promosi	100.000.000
	Sosialisasi pengelolaan dan pengembangan TPS 3 R	Sosialisasi pengelolaan dan pengembangan TPS 3 R	DLH	4 kali sosialisasi	135.000.000			4 kali sosialisasi	135.000.000
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Aparatur yg mengikuti bintek pengelolaan lingkungan	DLH	25 orang	50.000.000				
	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>				<b>4.288.507.000</b>				<b>6.544.663.470</b>
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (DID 2017)	Jumlah ruang terbuka hijau yang dibangun	DLH	1 tahun	0				
	Lanjutan Pembanguan RTH Surau Gadang	Lanjutan RTH Surau Gadang	DLH	1 Paket	500.000.000				
	Pembangunan WC RTH Simpang Surau Gadang	Pembangunan WC RTH Simpang Surau Gadang	DLH	1 Paket	300.000.000	APBD		1 lokasi	500.000.000
	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	Luasan Taman yang dipelihara	DLH	8 Hektar	331.000.000	APBD		1 tahun	397.200.000
	Penunjang operasional pengelolaan RTH	Uang lembur PNS dan non PNS	DLH	52 orang dan 12 Bulan	452.000.000	APBD		1 tahun	643.500.000
	Pembuatan dekorasi dalam rangka penunjang event daerah	Dekorasi untuk penunjang even daerah	DLH	1 tahun	179.991.000	APBD		1 tahun	217.789.110
	Pemeliharaan penghijauan kota	Jumlah kegiatan pemangkasan pohon-pohon penghijauan	DLH	48 kegiatan	100.000.000	APBD		1 tahun	137.500.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan pembibitan taman kota	Jumlah bibit tanaman hias untuk penyisipan taman-taman kota	DLH	8 Hektar	315.516.000	APBD		1 tahun	381.774.360
	Revitalisasi taman tugu pahlawan tak dikenal	Revitalisasi taman tugu pahlawan tak dikenal	DLH	1 lokasi		0 APBD		1 lokasi	0
	Rehab taman BDB (depan RSAM)	Rehab taman BDB	DLH	1 lokasi		0 APBD		1 lokasi	0
	Rehabilitasi taman ngarai maaram	Rehabilitasi taman ngarai maaram terlaksana	DLH	1 lokasi	500.000.000	APBD		1 lokasi	500.000.000
	Pembuatan prasasti bersejarah monumen bung hatta	Pembuatan prasasti bersejarah monumen bung hatta	DLH	1 paket		0 APBD		1 paket	30.000.000
	Pembangunan kebun bibit dan rumah jaga kebun bibit	Pembangunan kebun bibit dan rumah jaga kebun bibit	DLH	1 paket	400.000.000	APBD		1 paket	750.000.000
	Revitalisasi bak bunga dalam kota	Revitalisasi bak bunga dalam kota	DLH	1 paket di il.sudirman	1.000.000.000	APBD		1 paket di il.sudirman	1.000.000.000
	Pengadaan pot bunga beserta bungan dan bibit pohon peneduh	Pot dan bunga	DLH	1 paket	150.000.000	APBD		1 paket	200.000.000
	Pengadaan mobil pemangkasan pohon	Pengadaan mobil pemangkasan pohon	DLH	1 unit		0 APBD		1 unit	1.600.000.000
	Penyusunan SOP pengelolaan pertamanan	Penyusunan SOP pengelolaan pertamanan	DLH	1 dokumen		0 APBD		1 dokumen	40.300.000
	Pembuatan profil taman kota	Buku profil taman kota	DLH	1 dokumen	60.000.000	APBD		1 dokumen	73.800.000
	Peningkatan kapastat aparatut pengelolaan pertamanan	Peningkatan kapastat aparatut pengelolaan pertamanan	DLH	50 orang		0 APBD		50 orang	72.800.000
	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>				<b>271.116.500</b>				<b>113.641.500</b>
	Saka Kalpataru	Jumlah Siswa Pramuka yg dibina untuk peduli lingkungan dan kemping	DLH	90 orang	96.116.500				96.116.500
	Sosialisasi pengelolaan limbah rumah tangga	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelola Limbah Rumah Tangga				0			13.525.000
	Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Kampung Iklim	DLH	3 RW	135.000.000			pembinaan 1 kelurahan	0
	Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca	Jumlah Peserta yang diberdayakan untuk pengurangan efek gas rumah kaca	DLH	20 peserta	40.000.000				4.000.000

**Tabel 5.13**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02.06.01.	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				2.767.393.756				2.912.340.124
	<b>NON URUSAN</b>				719.295.432		-	-	809.054.000
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan dibidang administrasi</b>			710.503.432				726.294.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, materai, benda pos lainnya dan buku cek materai yang terbeli	Dinas Dukcapil	3 jenis	1.654.000	APBD		100%	1.654.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Rekening telepon, air, listrik dan internet yang terbayar	Dinas Dukcapil	12 bulan	70.800.000	APBD		100%	70.800.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Service, BBM/Gas dan pelumas serta pajak yang terbayar	Dinas Dukcapil	12 bulan	145.750.000	APBD		100%	145.750.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan yang terbayar	Dinas Dukcapil	33 jenis 1 paket	104.000.000	APBD		100%	98.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Dinas Dukcapil	9 jenis	26.250.000	APBD		100%	16.800.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang terbeli	Dinas Dukcapil	18 jenis	32.500.000	APBD		100%	43.808.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Barang cetakan dan pengandaan yang terbayar	Dinas Dukcapil	2 jenis	13.800.000	APBD		100%	13.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli	Dinas Dukcapil	3 jenis	3.500.000	APBD		100%	3.200.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman lembur, rapat dan tamu yang terbeli	Dinas Dukcapil	3 paket	23.143.800	APBD		100%	26.022.000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang terbayar	Dinas Dukcapil	12 bulan	170.000.000	APBD		100%	188.760.000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa pekerja kantor dan pekerja lapangan yang	Dinas Dukcapil	4 orang	110.605.632	APBD		100%	110.000.000
	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Sarana dan prasarana kantor yang terlaksana	Dinas Dukcapil	100%	8.500.000	APBD		100%	8.500.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas</b>	Dinas Dukcapil		3.000.000				50.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang terbeli.	Dinas Dukcapil	1 jenis	3.000.000	APBD		100%	50.000.000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		Dinas Dukcapil		1.900.000				28.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas satpam yang terbeli	Dinas Dukcapil	2 stel	1.900.000	APBD		100%	28.000.000
			Dinas Dukcapil						
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		Dinas Dukcapil		3.892.000	APBD			4.760.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	Dinas Dukcapil	1 dokumen	1.550.000	APBD		100%	1.550.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersusun tepat waktu	Dinas Dukcapil	1 dokumen	1.315.000	APBD		100%	1.830.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersusun tepat waktu	Dinas Dukcapil	1 dokumen	1.027.000	APBD		100%	1.380.000
	<b>URUSAN WAJIB</b>				<b>2.048.098.324</b>				<b>2.103.286.124</b>
	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>		Dinas Dukcapil		<b>2.048.098.324</b>				<b>2.103.286.124</b>
	Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Aplikasi SIAK dan AFIS	Berfungsinya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Automated Fingerprint Identification System (AFIS) yang terintegrasi dalam jaringan pengelolaan Data Dokumen Kependudukan	Dinas Dukcapil	12 bulan	556.768.000	APBD	Regulasi UU 23 /2006 Sebagaimana diubah dengan UU No.24/2013	100%	557.138.000
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	90%	432.657.224	APBD	Tahun 2018 adanya pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak dan pengadaan Ribbon cetak KTP serta pembayaran honorarium petugas pelayanan pendaftaran penduduk	93%	432.657.224
	Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Catatan Sipil	Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	85%	165.830.000	APBD	Penambahan anggaran kegiatan diperlukan dalam rangka pembayaran honorarium petugas pelayanan pencatatan sipil (outsourshing)	90%	165.830.000
	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah mobilisasi penduduk pindah dan datang	Dinas Dukcapil	85%	40.779.000	APBD	Regulasi UU 23 /2006 Sebagaimana diubah	85%	45.500.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelayanan Pencatatan Akta Kematian	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	85%	46.340.000	APBD	Regulasi UU 23 /2006 Sebagaimana diubah dengan UU No.24/2013 (target nasional 70 % Tahun 2020)	85%	60.500.000
	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Laporan data dan informasi kependudukan yang tersusun tepat waktu	Dinas Dukcapil	85%	68.733.200	APBD	Regulasi UU 23 /2006 Sebagaimana diubah dengan UU No.24/2013	90%	70.500.000
	Penerbitan akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah dokumen akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	80%	33.820.000	APBD	Regulasi UU 23 /2006 Sebagaimana diubah dengan UU No.24/2013	90%	48.640.000
	Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki NIK dan terdata pada database kependudukan	Dinas Dukcapil	80%	25.650.000	APBD	Regulasi UU 23 /2006 Sebagaimana	100%	45.000.000
	Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dokumen dan data kependudukan yang tersedia	Dinas Dukcapil	600 KK	53.782.000	APBD	Regulasi UU 23 /2006 Sebagaimana diubah dengan UU No.24/2013	100%	53.782.000
	Digitalisasi Dokumen Akta Catatan Sipil	Data digital akta catatan sipil	Dinas Dukcapil	8500 dokumen	65.085.000	APBD	Regulasi UU 23 /2006 Sebagaimana diubah dengan UU No.24/2013 (Digitalisasi dokumen Akta Catatan Sipil)	100%	65.085.000
	Pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di Kelurahan dan Kecamatan	Laporan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di 24 Kelurahan	Kota Bukittinggi	83%	59.889.000	APBD	Regulasi UU 23 /2006 Sebagaimana diubah dengan UU No.24/2013	100%	59.889.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Layanan Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Pelayanan online bagi masyarakat Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	12 bulan	163.000.000	APBD	Penyediaan layanan informasi ini dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi (Inovasi pelayanan publik), guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan tanpa perlu datang ke Dinas	100%	163.000.000
	Bimbingan Teknis Tenaga Operator SIAK dan Kerjasama Data SIAK	Jumlah peserta Bimtek Operator SIAK	Kota Bukittinggi	40 orang	65.424.900	APBD	Kegiatan ini dilaksanakan dalam		65.424.900
	Kerjasama dan Pemanfaatan Data	Jumlah SKPD pengguna data kependudukan	Kota Bukittinggi	50 SKPD	270.340.000	APBD	(dalam rangka menjadikan data kependudukan sebagai sumber data bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan		270.340.000

**Tabel 5.14**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02.09.01	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			7.157.261.350				11.950.000.000
		<b>NON URUSAN</b>			1.645.017.237				2.366.000.000
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	DISHUB	100%	1.091.966.537		100%	1.568.000.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Pelaksanaan Surat Menyurat	Dishub	12 Bulan	3.350.000	APBD	12 Bulan	5.000.000
		Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan	Rekening Telepon, Air dan Listrik Terbayar (36 Rekening)	Dishub	12 Bulan	139.000.000	APBD	12 Bulan	175.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	Dishub	12 Bulan	148.074.433	APBD	12 Bulan	200.000.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kantor Yang Bersih	Dishub	12 Bulan	103.760.800	APBD	12 Bulan	150.000.000
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya Pekerjaan Operator	Dishub	12 Bulan	10.000.000	APBD	12 Bulan	35.000.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	Dishub	1 Paket	14.604.000	APBD	1 Paket	40.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	Dishub	1 Paket	25.960.000	APBD	1 Paket	65.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penerangan Kantor	Dishub	1 Paket	3.102.000	APBD	1 Paket	5.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Buku Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishub	1 Paket	-	APBD	1 Paket	3.000.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan	Dishub	12 Bulan	6.900.000	APBD	12 Bulan	20.000.000
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat Koordinasi Yang Diikuti	Dishub	12 Bulan	200.000.000	APBD	12 Bulan	400.000.000
		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Rekening Telepon, Air dan Listrik Terbayar (36 Rekening)	Dishub	12 Bulan	326.708.304	APBD	12 Bulan	450.000.000
		Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Lancarnya Pekerjaan Administrasi	Dishub	12 Bulan	10.507.000	APBD	12 Bulan	20.000.000
		Penyediaan jasa keamanan	Tersedianya jasa keamanan	Dishub	12 Bulan	100.000.000	APBD	12 Bulan	120.000.000
		Pendataan dan penataan arsip	Menyelamatkan dan melestarikan arsip	Dishub	i keg		APBD	1 Kegiatan	18.000.000
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Dishub</b>	<b>100%</b>	<b>549.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>460.000.000</b>
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Dishub	3 Unit		APBD	1 Unit	300.000.000
		Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan kantor	Dishub	1 Paket	49.000.000	APBD	1 Paket	50.000.000
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Dishub	1 Paket	-	APBD	1 Paket	50.000.000
		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Dishub	1 Paket		APBD	1 Paket	60.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor	Dishub	1 Paket	500.000.000				15.000.000.000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan</b>	Dishub	<b>100%</b>	-			<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terciptanya Aparatur Yang Berwibawa	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	250.000.000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Dishub	<b>100%</b>	-			<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terdidiknya dan Terlatihnya Aparatur Sesuai Dengan Kualifikasi Teknis	Dishub	1 Kegiatan		APBD		1 Kegiatan	80.000.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Dishub		<b>4.050.700</b>				<b>8.000.000</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terukurnya Capaian Kinerja SKPD	Dishub	1 Dokumen	1.487.500	APBD		1 Dokumen	2.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan SKPD Semesteran	Dishub	2 Laporan	659.400	APBD		2 Laporan	1.500.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Adanya Acuan dan Pedoman Untuk Pelaksanaan Kegiatan 1 Tahun	Dishub	2 Dokumen	1.203.000	APBD		2 Dokumen	2.000.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan	Tersedianya Informasi Keuangan SKPD	Dishub	1 Laporan	700.800	APBD		1 Laporan	2.500.000
	<b>URUSAN WAJIB</b>		Dishub		<b>7.157.261.350</b>				<b>11.950.000.000</b>
	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Yang</b>	Dishub	<b>100%</b>	<b>4.593.317.900</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>9.310.000.000</b>
	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Terminal dan Parkir	Dishub	12 Bulan	2.646.990.000	APBD		12 Bulan	3.000.000.000
	Penunjang Operasional Administrasi UPTD Terminal dan Parkir	Peningkatan Pelayanan Aparatur Terminal dan Parkir	Dishub	12 Bulan	619.277.100	APBD		12 Bulan	800.000.000
	Pengelolaan Gedung parkir	Terkelolanya Gedung Parkir Dengan Baik	Dishub	12 Bulan	531.140.000	APBD		12 Bulan	1.000.000.000
	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Petunjuk dan Larangan	Dishub	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	400.000.000
	Pengecatan Marka Jalan	Tersedianya Marka Petunjuk Jalan	Dishub	1 Paket	595.910.800	APBD		1 Paket	1.300.000.000
	Pengadaan Road Barrier	Tersedianya Road Barrier Pembatas Arus	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	260.000.000
	Pengadaan Rubber Speed Humb	Tersedianya Rubber Speed Humb Pengendali Kecepatan	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	250.000.000
	Pengadaan dan Penggantian RPPJ	Tersedianya RPPJ	Dishub	1 Paket	-	APBD		-	200.000.000
	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	Tersedianya Rel Pembatas Bahu Jalan Pada Bahu Jalan Yang Kritis	Dishub	1 Paket		APBD		-	300.000.000
	Pengadaan Warning Light	Tersedianya Peringatan Pada Lokasi Rawan Kecelakaan	Dishub	1 Paket	-	APBD		-	300.000.000
	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light Untuk Pengaturan Lalu Lintas di Persimpangan	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	1.500.000.000
	<b>Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</b>	<b>Prasarana dan fasilitas perhubungan dapat berfungsi dengan baik</b>	Dishub		<b>650.000.000</b>				<b>700.000.000</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Terpeliharanya Fasilitas LLAJ	Dishub	12 Bulan	650.000.000	APBD		12 Bulan	700.000.000
	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	Dishub	100%	249.727.250				2.000.000.000
	Pembangunan dan Pengembangan ATCS	Terciptanya Pengaturan Simpang Bersinyal Yang Terintegrasi Dengan System Smart City	Dishub	1 Paket		APBD		-	1.200.000.000
	Kajian Manajemen Persimpangan	Tersedianya Data Design Perbaikan Geometrik Simpang	Dishub	-	49.727.250	APBD		1 Dokumen	
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Tersedianya ZOSS Pada Sekolah Yang Rawan Kecelakaan	Dishub	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	300.000.000
	Pembangunan Halte	Tersedianya Halte	Dishub	1 Paket	-	APBD		1 Paket	500.000.000
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Meningkatnya pelayanan jasa angkutan umum</b>	Dishub		260.694.500				355.000.000
	Evaluasi Kinerja Angkutan Umum	Tersedianya Gambaran Kinerja Angkutan Umum	Dishub	4 Dokumen		APBD		4 Dokumen	150.000.000
	Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Meningkatnya Pengetahuan Sopir/ Juru Mudi Angkutan Umum Tentang Keselamatan	Dishub	30 Orang	66.443.000	APBD		30 Orang	80.000.000
	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum	Terlaksananya Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum	Dishub	12 Kali	9.984.000	APBD		12 Kali	10.000.000
	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	Terpilihnnya Awak Kendaraan Umum Teladan	Dishub	3 Orang	47.683.500	APBD		3 Orang	50.000.000
	Pengadaan Stiker Papan Trayek Angkutan	Meningkatnya Informasi Pelayanan Angkutan Umum	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	50.000.000
	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Meningkatnya Pengetahuan Awak Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Dishub	30 Orang	8.765.000	APBD		30 Orang	15.000.000
	Up date data perbengkelan	Lancarnya pelayanan kepada masyarakat	Dishub	dokumen	8.522.000				10.000.000
	Pemeriksaan lapangan dan pemosisan kartu pengawas angkutan kota	Lancarnya pelayanan kepada masyarakat	Dishub	539 izin	119.297.000				125.000.000
	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>Meningkatnya persentase ketertiban berlalu lintas</b>	Dishub		1.354.228.050				1.085.000.000
	Lomba Tertib Lalu Lintas	Meraih Piala WTN	Dishub	1 Kegiatan	69.730.400	APBD		1 Kegiatan	70.000.000
	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Lancarnya Lalu Lintas Kota	Dishub	12 Bulan	1.194.741.000	APBD		12 Bulan	900.000.000
	Penerangan/ Penyuluhan Lalu Lintas	Meningkatnya Kesadaran Berlalu Lintas	Dishub	12 Sekolah	30.485.050	APBD		12 Sekolah	55.000.000
	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnnya Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Dishub	1 Kegiatan	59.271.600	APBD		1 Kegiatan	60.000.000
	<b>Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Meningkatnya kelaikan kendaraan umum</b>			299.020.900				500.000.000
	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikan kendaraan umum	ishubkomin	12 Bulan	299.020.900	APBD		12 Bulan	500.000.000

**Tabel 5.15**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02.10.10	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>				12.987.374.325				9.868.150.000
	<b>NON URUSAN</b>				1.003.913.925				735.150.000
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran</b>			437.756.900				500.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Berharga	Dinas Kominfo	12 Bulan	2.475.000	APBD		12 Bulan	2.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terbayar	Dinas Kominfo	12 Bulan	30.000.000	APBD		12 Bulan	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	Dinas Kominfo	12 Bulan	137.120.000	APBD		12 Bulan	150.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Kebersihan Kantor	Dinas Kominfo	12 Bulan	1.750.000	APBD		12 Bulan	5.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki	Dinas Kominfo	12 Bulan	10.436.600	APBD		12 Bulan	15.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	Dinas Kominfo	12 Bulan	26.421.300	APBD		12 Bulan	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kominfo	12 Bulan	9.644.000	APBD		12 Bulan	7.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Dinas Kominfo	12 Bulan	1.860.000	APBD		12 Bulan	4.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Dinas Kominfo	12 Bulan	650.000	APBD		12 Bulan	1.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Rapat dan Lembur	Dinas Kominfo	12 Bulan	12.400.000	APBD		12 Bulan	10.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar kota Bukittinggi	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Dinas Kominfo	12 Bulan	190.000.000	APBD		12 Bulan	200.000.000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	PPHP, PPK dan Pejabat Pengadaan	Dinas Kominfo	12 Bulan	15.000.000	APBD		12 Bulan	20.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			561.324.125				230.000.000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang di Adakan (Paket)	Dinas Kominfo		19.500.000	APBD			50.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang Di Adakan		1 Paket	30.770.000			1 Paket	50.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan roda 2/ Roda 4 Terbeli (Persen)		1 Paket	486.054.125			1 Paket	70.000.000
	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeler Yang di Adakan		1 Paket	25.000.000			1 Paket	60.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Presentasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang</b>			<b>4.832.900</b>				<b>5.150.000</b>
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan	Dinas Kominfo	2 Laporan	762.800	APBD			800.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Dinas Kominfo	2 Dokumen	1.249.900	APBD			1.500.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dinas Kominfo	1 Dokumen	1.582.300	APBD			1.600.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan	inas Komin	1 Tahun	1.237.900	APBD			1.250.000
	<b>URUSAN WAJIB</b>				<b>11.983.460.400</b>				<b>9.133.000.000</b>
	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)</b>	<b>Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City</b>			<b>2.401.534.100</b>				<b>400.000.000</b>
	Pembuatan Aplikasi/ Sistem Informasi	Tersedianya Aplikasi/ Sistem Informasi Yang Mendukung Terwujudnya Bukittinggi Smart City (12 Aplikasi)	Bukittinggi		321.220.000	APBD			200.000.000
	Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Smartphone	Tersedianya Sistem Informasi Berbasis Smartphone Yang Mendukung Terwujudnya Bukittinggi Smart City (12 Aplikasi)	Bukittinggi		0	APBD			200.000.000
	Tersedianya Domain/ Sub Domain/ Server Hosting	Tersedianya Hosting/ Domain	Bukittinggi		0	APBD			0
	Kustomisasi dan Implementasi Aplikasi/ Sistem Informasi	Terlaksananya Kustoomisasi/ Pengembangan Aplikasi	Bukittinggi		150.000.000	APBD			0
	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>		<b>Bukittinggi</b>		<b>199.247.600</b>	<b>APBD</b>			
	Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)	Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi	Bukittinggi		120.000.000	APBD			120.000.000
	Penyusunan Rencana Induk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018 - 2023	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan TIK 2018 - 2023	Bukittinggi		150.000.000	APBD			0
	Penyusunan Master Plan Jangka Panjang Teknologi Informasi dan Komunikasi (2018 - 2043)	Tersedianya Master Plan TIK 2018 - 2048	Bukittinggi		0	APBD			0
	Penyusunan Regulasi Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Regulasi TIK	Bukittinggi		99.600.000	APBD			75.000.000
	Sosialisasi Layanan E-Government	Terlaksananya Sosialisasi E-Government	Bukittinggi		0	APBD			100.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E-Government	Terlaksananya Monev E-Government	Bukittinggi		106.510.000	APBD			100.000.000
	<b>Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik</b>			<b>830.956.500</b>				<b>850.000.000</b>
	Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Melalui Siaran Radio	Radio Komunitas Dikelola Pemko	Bukittinggi		0	APBD			450.000.000
	Kampanye Program Pemerintah	Iklan Radio, TV, Pamflet	Bukittinggi		424.000.000	APBD			400.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaksanaan Diseminasi Informasi di Kota Bukittinggi	Diseminasi Informasi	Bukittinggi		124.956.500	APBD			100.000.000
	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Bukittinggi		153.450.000	APBD			120.000.000
	Pembinaan Sosialisasi Penggunaan Warnet dan Internet Sehat	Terlaksananya Sosialisasi Internet Sehat	Bukittinggi		128.550.000	APBD			100.000.000
	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK</b>			<b>7.356.610.000</b>				<b>4.043.000.000</b>
	Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet	Terpeliharanya Jaringan Intranet dan Internet	Bukittinggi		1.458.600.000	APBD			1.400.000.000
	Pengembangan Jaringan Intranet dan Internet	Meningkatnya Layanan Jaringan Intranet dan Internet di Pemko Bukittinggi	Bukittinggi		103.500.000	APBD			300.000.000
	Peningkatan Jaringan Fiber Optik	Tersedianya Jaringan FO (seluruh SKPD Blkg Balik, Backbone Balaikota ke MKS, backbone Balaikota-Benteng)	Bukittinggi		500.000.000	APBD			1.000.000.000
	Peningkatan Jaringan Sekolah	Tersedianya Jaringan Intranet ke Sekolah	Bukittinggi		104.500.000	APBD			0
	Peningkatan Jaringan CCTV	Tersedianya Jaringan CCTV (1 Paket)	Bukittinggi		199.500.000	APBD			0
	Peningkatan Jaringan Area Publik	Tersedianya Jaringan Area Publik	Bukittinggi		104.000.000	APBD			104.000.000
	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Proses Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Bukittinggi		495.200.000	APBD			350.000.000
	Pengadaan CCTV Online	Tersedianya CCTV Yang Memantau Kondisi Kota (18 titik)	Bukittinggi		201.098.000	APBD			200.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House)	Bukittinggi		1.693.500.000	APBD			500.000.000
	Pelatihan Aplikasi dan Jaringan		Bukittinggi		241.212.000	APBD			0
	Peningkatan Keahlian Teknis SDM IT Pemko Bukittinggi		Bukittinggi		100.000.000	APBD			0
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bukittinggi Command Center (BCC)		Bukittinggi		1.446.000.000	APBD			0
	Pengelolaan Bukittinggi Command Center		Bukittinggi		260.000.000	APBD			0
	Peningkatan Sarana dan Prasarana VOIP		Bukittinggi		205.000.000	APBD			0
	Pengelolaan Bukittinggi Data Center		Bukittinggi		155.000.000	APBD			0
	Tim Teknis Komputerisasi Jaringan dan Aplikasi	Rekomendasi Produk Aplikasi dan Rekomendasi Komputerisasi dan Jaringan	Bukittinggi		0	APBD			100.000.000
	Pengelolaan SMS Center	Perangkat SMS Center	Bukittinggi		89.500.000	APBD			89.000.000
	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase Tingkat Pencapaian Pelayanan Informasi Pemda Kepada Masyarakat</b>			<b>664.789.000</b>				<b>3.330.000.000</b>
	Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	PPID Kota Bukittinggi	Bukittinggi		165.670.000	APBD			175.000.000
	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	Pengelolaan Website Bukittinggi	Bukittinggi		144.593.000	APBD			120.000.000
	Pengembangan Bukittinggi Media Center	Tersedianya Media Pengelolaan Informasi	Bukittinggi		220.000.000	APBD			190.000.000
	Pengelolaan Media Sosial	Media Sosial Yang di Kelola	Bukittinggi		45.026.000	APBD			45.000.000
	Pengelolaan Sarana Pengaduan dan Aspirasi	Jumlah Pengaduan Yang di Tindaklanjuti	Bukittinggi		89.500.000	APBD			0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Videotron Media Informasi Publik	Tersedianya Media Informasi Secara Digital	Bukittinggi		0	APBD			2.800.000.000
	<b>Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi</b>	<b>Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi</b>			<b>207.310.000</b>				<b>200.000.000</b>
	Penataan dan Pembinaan Usaha Bidang Jaringan Telekomunikasi	Tertib Administrasi Pengelolaan di Bidang Pembangunan Informasi dan Komunikasi	Bukittinggi		0	APBD			80.000.000
	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Jaringan Telekomunikasi	Tersedianya Perda Telekomunikasi	Bukittinggi		131.410.000	APBD			0
	Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi	Meningkatkan Retribusi Asli Daerah	Bukittinggi		75.900.000	APBD			0
	Pendirian dan Pengawasan Warnet dan Games Online	Terlaksananya Pengawasan Warnet	Bukittinggi		120.000.000	APBD			120.000.000
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD</b>			<b>156.000.000</b>				<b>150.000.000</b>
	Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi	Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Ter Update	Bukittinggi		156.000.000	APBD			150.000.000
	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>	<b>Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>			<b>167.013.200</b>				<b>160.000.000</b>
	Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi	Pengelolaan Persandian Pemko Bukittinggi	Dinas Kominfo		67.323.200	APBD			85.000.000
	Sosialisasi Pengamanan Informasi	Terlaksananya Sosialisasi	Bukittinggi		99.690.000	APBD			75.000.000

**Tabel 5.16**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
102.11.01	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>				11.932.579.167				522.955.706.800
	<b>NON URUSAN</b>				3.344.576.617				2.574.662.292
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)</b>		100	1.909.463.172			100	1.888.262.671
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia (paket)	Kota Bukittinggi	3	2.772.000	APBD		3	2.910.600
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening terbayar (bulan) Jumlah rekening terbayar (rekening)	Kota Bukittinggi	12 12	256.368.500	APBD		12 12	185.186.925
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	Kota Bukittinggi	12	14.934.868	APBD		12	15.681.612
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara (8 unit roda 2, 4 unit roda 4) (unit)	Kota Bukittinggi	12	246.233.903	APBD		12	227.045.598
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Retribusi sampah yang terbayar (bulan) Jenis peralatan dan bahan kebersihan kantor terbeli (jenis)	Kota Bukittinggi	12 20	55.976.920	APBD		12 20	57.638.259
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis peralatan kantor yang terbeli (jenis)	Kota Bukittinggi	40	30.397.475	APBD		40	31.812.086
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan (bulan) Jenis barang cetakan (jenis)	Kota Bukittinggi	12 8	86.892.960	APBD		12 8	91.237.608
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli (item)	Kota Bukittinggi	10	53.064.180	APBD		10	55.786.500
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu, lembur (%)	Kota Bukittinggi	100	45.603.600	APBD		100	47.883.780
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas	Persentase rapat yang diikuti (%)	Kota Bukittinggi	90	184.800.000	APBD		90	194.040.000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya iuran BPJS (bulan) Tersedianya jasa pegawai non PNS (orang)	Kota Bukittinggi	12 5	897.191.266	APBD		12 5	942.050.829
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga (%)	Kota Bukittinggi	100	23.100.000	APBD		100	24.255.000
	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Persentase kegiatan yang terpublikasi (%)	Kota Bukittinggi	100	3.465.000	APBD		100	3.638.250
	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa yang terbayar (orang)	Kota Bukittinggi	9	8.662.500	APBD		9	9.095.625
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)</b>	<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>100</b>	<b>1.298.780.000</b>			<b>100</b>	<b>639.445.149</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis) Jumlah peralatan kantor yang diadakan (jenis)	Kota Bukittinggi	10 2	247.430.000	APBD		12 2	88.195.149
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (unit)	Kota Bukittinggi	3	15.750.000	APBD		3	16.537.500
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	Kota Bukittinggi	1	757.250.000	APBD		1	490.612.500
	Pembangunan Pagar Rumah Dinas	Pagar rumah dinas (paket)	Kota Bukittinggi	1	28.350.000	APBD			
	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan (unit)	Kota Bukittinggi	2	250.000.000	APBD		2	44.100.000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai (%)</b>		<b>100</b>	<b>81.176.000</b>			<b>100</b>	<b>41.435.258</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia (stel)	Kota Bukittinggi	68	81.176.000	APBD		50	41.435.258
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)</b>		<b>100</b>	<b>55.157.445</b>			<b>100</b>	<b>5.519.214</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu (dok)	Kota Bukittinggi	3	1.979.000	APBD		3	2.181.848
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan per semester yang tepat waktu (dok)	Kota Bukittinggi	2	1.823.514	APBD		2	1.914.690
	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu (dok)	Kota Bukittinggi	2	51.354.931	APBD		2	1.422.677
	<b>URUSAN WAJIB</b>				<b>8.588.002.550</b>				<b>520.381.044.508</b>
	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>		<b>14</b>	<b>234.613.350</b>			<b>15</b>	<b>315.240.162</b>
	Penataan kelembagaan koperasi	Jumlah peserta sosialisasi peraturan kelembagaan (kop)	Kota Bukittinggi	75	73.560.750	APBD		75	107.233.935
		Jumlah koperasi yang dilakukan bimbingan dan pendampingan (kop)	Kota Bukittinggi	0		APBD		0	
	Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat (org)	Kota Bukittinggi	50	46.226.400	APBD		50	39.851.571
	Pelatihan akuntansi koperasi	Jumlah peserta pelatihan akuntansi koperasi (org)	Kota Bukittinggi	75	47.484.900	APBD		75	70.676.562
	Pengawasan koperasi	Jumlah koperasi yang terawasi (unit)		75	67.341.300			75	97.478.094
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi</b>	<b>Persentase peningkatan koperasi yang meningkat kinerja usahanya (%)</b>		<b>2</b>	<b>243.559.250</b>			<b>2</b>	<b>366.792.820</b>
	Pengembangan usaha koperasi	Peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi (kop)	Kota Bukittinggi	75	170.551.900	APBD		75	230.241.822
		Jumlah koperasi yang ikut serta pada pameran dalam rangka hari koperasi tingkat Nasional (kop)	Kota Bukittinggi	2				2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi dan money perkuatan permodalan koperasi	Koperasi yang dimonev	Kota Bukittinggi	20	45.025.400	APBD		1	67.550.998
	Monitoring Peningkatan Dana Bergulir(UEM-SP)	Laporan movev Dana Bergulir (lap)	Kota Bukittinggi	1	27.981.950	APBD		24	69.000.000
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM</b>	<b>Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil (unit)</b>		<b>20</b>	<b>607.328.250</b>			<b>20</b>	<b>831.266.100</b>
		Jumlah UMI yang meningkat kinerja usahanya		20				20	
	Pengembangan usaha mikro	Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha mikro (org)	Kota Bukittinggi	100	475.295.250	APBD		100	595.515.900
		Jumlah Umi yang ikut serta pameran (unit)	Kota Bukittinggi	6				8	0
	Penumbuhan wirausaha baru	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan (org)	Kota Bukittinggi	50	59.831.300	APBD		50	76.111.560
	Workshop Pemberdayaan toko rakyat		Kota Bukittinggi		44.150.000	APBD			
	Operasional Griya Usaha Mikro	Tersedianya Pusat Pelayanan Usaha Mikro ( unit )	Kota Bukittinggi	1	28.051.700	APBD		1	159.638.640
	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>jumlah usaha dari pelaku usaha yang terakomodir</b>		<b>400</b>	<b>869.058.300</b>			<b>450</b>	<b>1.255.770.054</b>
	Fasilitasi kegiatan pasar lelang dan kontak dagang	Jumlah pasar lelang yang diikuti (kl)	Kota Bukittinggi	7	73.850.000	APBD		7	157.113.000
		Jumlah forum dagang yang di ikuti (kl)	Kota Bukittinggi	1				1	0
	Gelar produk unggulan Kota Bukittinggi diluar propinsi	Jumlah gelar produk unggulan yang dilaksanakan (kl)	Kota Bukittinggi	0	0	APBD		2	0
	Promosi/pameran dalam negeri bersama mitra kerja	Jumah pameran dalam negeri yang diikuti (kl)	Kota Bukittinggi	6	795.208.300	APBD		6	1.098.657.054
	<b>Program Perlindungan Konsumen dan tertib niaga</b>	<b>Jumlah Pengaduan Konsumen</b>		<b>50</b>	<b>584.024.400</b>			<b>50</b>	<b>701.516.652</b>
	Pengawasan SIUP , TDP dan TDG	Jumlah perusahaan yang terawasi TDG (nersh)	Kota Bukittinggi	12	8.240.000	APBD		12	11.371.200
		Jumlah perusahaan yang terawasi SIUP dan TDP (bh)	Kota Bukittinggi	150				150	0
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pengawasan barang beredar (kl)	Kota Bukittinggi	15	29.176.000	APBD		15	40.262.880
		Update data harga sembako (kl)	Kota Bukittinggi	100				100	0
	Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen	Jumlah kasus sengketa konsumen yang terselesaikan (kasus)	Kota Bukittinggi		75.679.000	APBD			
	Bantuan paket sembako menghadapi lebaran dan kenaikan harga	Jumlah KK miskin yang dibantu (KK)	Kota Bukittinggi	1267	263.424.900	APBD		1267	363.526.362
	Pengawasan pendistribusian pupuk,gas dan BBM bersubsidi	Jumlah SPBU yang diawasi (bl)	Kota Bukittinggi	3	8.400.000	APBD		3	11.592.000
		Jumlah agen pupuk yang terawasi (bl)	Kota Bukittinggi	4				4	0
		Jumlah pangkalan yang terawasi (pangkalan)	Kota Bukittinggi	30				30	0
	Pengawasan dan pelayanan pengujian UTTP	Jumlah pengawasan UTTP	Kota Bukittinggi			APBD			
	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Operasional UPT (bl)	Kota Bukittinggi	12	199.104.500	APBD		12	274.764.210

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri (Persh)</b>		2	155.216.600			2	425.283.320
	Sosialisasi ekspor & import bagi aparat dan pelaku usaha	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan ekspor impor (org)	Kota Bukittinggi	3	150.000.000	APBD		10	375.283.320
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan ekspor impor (org)	Kota Bukittinggi	1				20	
	Monitoring dan Motivasi produk Export IKM	Data perusahaan/ IKM yang melakukan export	Kota Bukittinggi	15	5.216.600	APBD		15	50.000.000
	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>	<b>Tertatanya lokasi PKL (lokasi)</b>		1	11.650.000			1	16.077.000
	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Tersedianya lokasi PKL (lokasi)	Kota Bukittinggi	3	11.650.000	APBD		3	16.077.000
	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima	Jumlah PKL yang diberikan penyuluhan (PKL)	Kota Bukittinggi	0	0	APBD		0	0
	<b>Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar</b>	<b>Jumlah sarana dan Prasarana Pasar yang dikembangkan (lokasi)</b>		3	5.689.577.400			3	516.216.592.900
	Rehab Los Daging Pasar Bawah Bukittinggi	Penggantian/ kompensasi (paket)	Kota Bukittinggi	1	109.000.000	APBD		1	109.000.000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya pemeliharaan pasar di 3 lokasi pasar (paket)	Kota Bukittinggi	1	550.000.000	APBD		1	605.000.000
	Pembuatan profil pasar	Profil pasar Kota Bukittinggi (paket)	Kota Bukittinggi	0				0	
	Pembangunan pasar penampungan pedagang pasar bawah	Tersedianya pasar penampungan	Kota Bukittinggi	0				1	3.060.000.000
	Sosialisasi pembangunan pasar penampungan pedagang pasar bawah	diterimanya lokasi penampungan sementara oleh pedagang	Kota Bukittinggi	0				1	400.000.000
	Perencanaan Revitalisasi pasar bawah	Tersedianya DED revitalisasi pasar bawah (paket)	Kota Bukittinggi	1		APBD			
	Revitalisasi pasar bawah Kota Bukittinggi	Tersedianya pasar tradisional modern	Kota Bukittinggi	0	0			1	500.000.000.000
	Probability audit kegiatan revitalisasi pasar bawah	Kegiatan sesuai dengan regulasi	Kota Bukittinggi					1	100.000.000
	Manajemen konstruksi revitalisasi pasar bawah	Tersedianya jasa manajemen konstruksi untuk revitalisasi pasar	Kota Bukittinggi	0				1	4.000.000.000
	Perencanaan revitalisasi pasar atas	DED Revitalisasi pasar atas	Kota Bukittinggi					1	700.000.000
	Kajian dan perencanaan Rehabilitasi bangunan dan kawasan Blok C pasar atas	Tersedianya bangunan pasar yang representatif (paket)	Kota Bukittinggi	1	189.000.000	APBD		1	2.500.000.000
	Manajemen konstruksi revitalisasi pasar atas	Jasa manajemen konstruksi revitalisasi pasar atas (1 paket)	Kota Bukittinggi	0	0			1	2.560.200.000
	Penggantian jembatan penghubung Pasar Wisata	Tersedianya jembatan penghubung pasar wisata (paket)	Kota Bukittinggi	1	297.000.000	APBD		0	0
	Pengadaan dan pemasangan nomor toko/kios/lap. bulanan dan penunjuk lokasi jenis dagangan di 2 lokasi pasar	Pengadaan dan pemasangan nomor toko/kios/lap. bulanan dan penunjuk lokasi jenis dagangan di 2 lokasi pasar (paket)	Kota Bukittinggi	1	150.000.000	APBD		0	0
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Simpang Aur (peningkatan drainase pasar simpang aur )	Drainase dan mushalla pasar yang memadai (paket)	Kota Bukittinggi	1	682.000.000	APBD		1	682.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Drynase, jalan Sarana dan Prasarana Pasar Bawah (peningkatan drainase jalan dan mushalla)	Sarana dan Prasarana Pasar (paket)	Kota Bukittinggi	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Atas	Sarana dan Prasarana Pasar (paket)	Kota Bukittinggi			APBD		1	300.000.000
	Penggantian dan renovasi atap bangunan pasar di pasar atas	Atap bangunan pasar yang terbaru (item)	Kota Bukittinggi	1	700.000.000	APBD			
	Rehab WC Umum Pasar Atas	WC Umum Pasar Atas yang diperbaiki		1	65.000.000	APBD			
	Rehab los lambung pasar atas, drainase dan mushalla pasar	Bangunan pasar yang memadai (paket)	Kota Bukittinggi	1	933.500.000	APBD			
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Retribusi	Terpeliharanya sistem komputerisasi pengelolaan retribusi (aplikasi)	Kota Bukittinggi	1	95.770.000	APBD		1	132.162.600
	Operasional pemungutan retribusi lapangan harian pasar	Meningkatnya penerimaan PAD (bulan)	Kota Bukittinggi	12	86.400.000	APBD		12	90.000.000
	Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi	Pengelolaan yang baik dan transparan terhadap hasil retribusi (bulan)	Kota Bukittinggi	12	688.987.400	APBD		12	662.151.600
	Pendataan Pedagang dan Sarana Pasar	Tersedianya data pedagang dan sarana pasar	Kota Bukittinggi	2921	92.920.000	APBD		2921	116.078.700
	Perencanaan Pembangunan Blok penghubung Blok B Pasar Atas	Dokumen kajian dan dokumen perencanaan	Kota Bukittinggi	1 dokumen kajian dan 1 dokumen perencanaan	850.000.000	APBD			
	<b>Program Pengawasan dan Penertiban Pasar</b>	<b>Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar (%)</b>		<b>100</b>	<b>192.975.000</b>			<b>100</b>	<b>252.505.500</b>
	Penertiban dan Penyevelan Toko, Kios, Lap. Bulanan Yang Menunggak Retribusi	Toko, kios, lap. Bulanan yang ditertibkan dan disegel (kali)	Kota Bukittinggi	60	49.275.000	APBD		18	61.099.500
	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar (bulan)	Kota Bukittinggi	144	143.700.000	APBD		144	191.406.000

**Tabel 5.17**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01.02.12.	<b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>			10.213.773.496				4.969.688.443
		<b>NON URUSAN</b>			5.775.387.040				1.649.350.881
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	921.632.040			100%	940.514.681
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	DPMPTSP PTK 12 bulan	2.500.000	-		12 bulan	3.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	DPMPTSP PTK 12 bulan	74.160.000	-		12 bulan	75.643.200
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan terpelihara	DPMPTSP PTK 7 unit;4 unit	196.740.000	-		7 roda 4 & 14 roda 2	200.674.800
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih	DPMPTSP PTK 12 bulan	123.968.000	-		12 bulan	126.447.360
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/peralatan/perengkapan kantor	DPMPTSP PTK 1 paket	20.000.000	-		1 paket	20.400.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bacaan dan peraturan	DPMPTSP PTK 1 paket	1.500.000	-		1 paket	1.530.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis terbeli	DPMPTSP PTK 1 paket	13.000.000	-		1 paket	13.260.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah yang dijilid; Jumlah yang difotocopy	DPMPTSP PTK 1 paket	9.407.000	-		1 paket	9.595.140
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah peralatan listrik terbeli	DPMPTSP PTK 1 paket	5.000.000	-		1 paket	5.100.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	DPMPTSP PTK 12 bulan	36.500.000	-		12 bulan	37.230.000
		Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas	Persentase rapat yang diikuti/dihadiri	DPMPTSP PTK 12 bulan	250.000.000	-		12 bulan	255.000.000
		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS	DPMPTSP PTK 12 bulan; 12 bulan	125.657.040	-		12 bulan; 12 bulan	128.170.181
		Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ	DPMPTSP PTK 4 paket	7.000.000	-		4 paket	7.140.000
		Penyediaan Petugas Pengamanan Kantor (Security)	Honor Security	DPMPTSP PTK 12 bulan	56.200.000	-		12 bulan	57.324.000
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>4.755.500.000</b>			<b>100%</b>	<b>528.610.000</b>
		Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan gedung	DPMPTSP PTK 12 bulan	20.000.000	-		12 bulan	20.400.000
		Pengadaan Peralatan Kantor	Penyediaan komputer, laptop dan printer	DPMPTSP PTK 1 paket	112.500.000	-		1 paket	114.750.000
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dibangun	DPMPTSP PTK 1 paket	3.500.000.000	-		1 paket	0
		Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor direhab	DPMPTSP PTK 1 paket	700.000.000	-		1 paket	300.000.000
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	DPMPTSP PTK 4 item	23.000.000	-		4 item	23.460.000
		Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK	Kantor DPMPTSPPTK	DPMPTSP PTK 1 paket	400.000.000	-		1 paket	0
		Pengadaan Meubelair	Jenis meubelair yang diadakan	DPMPTSP PTK -	-	-		1 paket	70.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai</b>	DPMTSP PTK	100%	0			100%	30.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang tersedia	PMPTSPPT	-	0			42 stel	30.000.000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional</b>	DPMTSP PTK	80%	80.498.000			85%	132.107.960
	Bintek Pengelola Aplikasi Perizinan Online	Jumlah petugas yang profesional di bidang perizinan	PMPTSPPT	0 orang	0			4 orang	50.000.000
	Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah peserta yang mendapat diklat/bimtek/magang/so sialisasi mengenai penanaman modal	PMPTSPPT	10 orang	80.498.000			10 orang	82.107.960
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	PMPTSPPT	100%	17.757.000			100%	18.118.240
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis dokumen capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	PMPTSPPT	3 dokumen	4.628.000			3 dokumen	4.720.560
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Rencana Kerja yang tersusun tepat waktu	PMPTSPPT	7 dokumen	10.684.000			7 dokumen	10.897.680
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan persemester	PMPTSPPT	2 dokumen	2.445.000			2 dokumen	2.500.000
	<b>URUSAN WAJIB</b>				2.766.081.431				2.252.493.519
	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>Ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi</b>	DPMTSP PTK	1 dokumen	393.520.000			1 dokumen	30.000.000
	Penyusunan Kajian Sumberdaya Potensi Investasi	Jumlah buku potensi dan peluang investasi	PMPTSPPT	1 dokumen	393.520.000			-	0
	Pembuatan Buku Profil DPMTSPPTK	Jumlah pembuatan buku profil DPMTSPPTK	PMPTSPPTK	1 dokumen	0			0 dokumen	30.000.000
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat</b>	<b>Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat</b>		100%	1.317.918.031			100%	1.344.276.392
	Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	Tingkat kualitas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan	DPMTSP PTK	70 Persentase	309.450.000			75 persentase	315.639.000
	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	DPMTSP PTK	3 kali	70.000.000			3 kali	71.400.000
	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah pemeriksaan ke lapangan atas izin yang diurus masyarakat	DPMTSP PTK	150 surat tugas	138.967.500			150 surat tugas	141.746.850
	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	DPMTSP PTK	60 kasus	50.000.000			65	51.000.000
	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen perizina yang sesuai dengan aturan yang berlaku	DPMTSP PTK	3 dokumen	30.000.000			4 dokumen	30.600.000
	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Kualitas pelayanan terhadap masyarakat	DPMTSP PTK	1	75.000.000			1	76.500.000
	Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Laporan Perizinan yang diterbitkan	DPMTSP PTK	24 buku	45.000.000			30 buku	45.900.000
	Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan Sektor A dan B	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi	DPMTSP PTK	3000 berkas	34.999.000			4000 berkas	35.698.980
	Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B	Tingkat pemenuhan kebutuhan perizinan administrasi dan penyerahan izin sektor B	DPMTSP PTK	1	24.759.620			1	25.254.812
	Pelayanan Perizinan I Sektor B	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan	DPMTSP PTK	1200 surat izin	95.052.800			1250 surat izin	96.953.856

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelayanan Perizinan II Sektor B	Tingkat ketersediaan Data yang Valid Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan	DPMPTSP PTK	0,85	43.890.000			0,9	44.767.800
	Tim Koordinasi Perizinan	Jumlah laporan koordinasi perizinan	DPMPTSP PTK	1 dokumen	21.801.111			1 dokumen	22.237.133
	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Ketersediaan Data Informasi tentang Jumlah dan Jenis Perizinan yang Dikelola Pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi	DPMPTSP PTK	0,85	80.000.000			0,9	81.600.000
	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	laporan Perizinan secara online	DPMPTSP PTK	3000 berkas izin	149.998.000			4000 berkas izin	152.997.960
	Survei indek Kepuasan Masyarakat	Laporan Indeks kepuasan masyarakat	DPMPTSP PTK	1 dokumen	99.000.000			1 dokumen	100.980.000
	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	DPMPTSP PTK	60 kali	50.000.000			70 kali	51.000.000
	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Meningkatnya Realisasi Investasi</b>		<b>2.073 Milyar</b>	<b>340.502.000</b>			<b>2.280 Milyar</b>	<b>124.317.767</b>
	Mengikuti Promosi Investasi dalam dan luar negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	BP2TPM	3 kali	340.502.000	-		2 kali	124.317.767
	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Peningkatan Jumlah Investor</b>		<b>215 Perusahaan</b>	<b>61.203.000</b>			<b>220 Perusahaan</b>	<b>80.427.060</b>
	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Usaha Besar dan UKM	Jumlah pengusaha yang mengikuti sosialisasi	BP2TPM	60 orang	23.140.000	-		70 orang	23.602.800
	Sosialisasi/ Kebijakan Penanaman Modal	Persentase Pengusaha yang memahami Kebijakan Penanaman Modal	BP2TPM	75 persen		-		75 persen	18.000.000
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Tenaga kerja	Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM	BP2TPM	1 dokumen	38.063.000	-		1 dokumen	38.824.260
	<b>Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan</b>	<b>Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas</b>	<b>DPMPTSP PTK</b>	<b>90%</b>	<b>85.150.000</b>			<b>95%</b>	<b>86.853.000</b>
	Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Jumlah diklat teknis yang diikuti	DPMPTSP PTK	3 kali	85.150.000			4 kali	86.853.000
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian</b>	<b>DPMPTSP PTK</b>	<b>60%</b>	<b>397.573.400</b>			<b>65%</b>	<b>413.000.000</b>
	Pelatihan Kiwirausahaan	Terlaksananya Pelatihan Kiwirausahaan pengusaha kecil	DPMPTSP PTK	16 orang	38.713.500			16 orang	42.500.000
	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas LLS	Jumlah lembaga latihan swasta yang dibina	DPMPTSP PTK	13 lembaga	19.789.000			15 lembaga	22.000.000
	Pelatihan Menjahit	Peserta Pelatihan Menjahit	DPMPTSP PTK	16 orang/30 hari	73.854.200			16 orang/30 hari	75.500.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelatihan Elektronika	Peserta Pelatihan Elektronika	DPMPTSP PTK	16 orang/30 hari	77.272.600			16 orang/30 hari	80.500.000
	Pelatihan Memasak	Peserta Pelatihan Memasak	DPMPTSP PTK	16 orang/30 hari	51.555.800			16 orang/30 hari	52.500.000
	Monev Eks.siswa Pelatihan	Jumlah siswa ex pelatihan yang dimonev	DPMPTSP PTK	64 orang	3.933.000			70 orang	4.000.000
	Pelatihan Instruktur lembaga latihan Swasta	Jumlah peserta pelatihan indstruktur lembaga latihan swasta	DPMPTSP PTK	30 orang	49.725.600			30 orang	50.500.000
	Pelatihan Salon	Peserta Pelatihan Salon	DPMPTSP PTK	16 orang/30 hari	82.729.700			16 orang/30 hari	85.500.000
	<b>Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan</b>	<b>DPMPTSP PTK</b>	<b>7%</b>	<b>120.586.000</b>			<b>8%</b>	<b>122.997.720</b>
	Penanganan Kasus PHI	Jumlah Kasus PHI yang Tertangani	DPMPTSP PTK	30 kasus	48.865.000			30 kasus	49.842.300
	Penerapan Sistem Deteksi Dini kasus PHI di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang terdeteksi	DPMPTSP PTK	10 perusahaan	24.815.000			10 perusahaan	25.311.300
	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pembentukan PP/PKB	DPMPTSP PTK	10 perusahaan	28.863.000			10 perusahaan	29.440.260
	Pembentukan Tim khusus Ketenagakerjaan	Jumlah Posko Khusus Ketenagakerjaan	DPMPTSP PTK	1 posko	18.043.000			1 posko	18.403.860
	<b>Program Peningkatan kesempatan Kerja</b>	<b>Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja</b>	<b>DPMPTSP PTK</b>	<b>19%</b>	<b>49.629.000</b>			<b>21%</b>	<b>50.621.580</b>
	Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja	laporan Informasi Pasar kerja	DPMPTSP PTK	12 Laporan	49.629.000			12 Laporan	50.621.580
	<b>URUSAN WAJIB</b>				<b>1.672.305.025</b>				<b>1.067.844.044</b>
	<b>Program Pengembangan Industri Kecil Menengah</b>	<b>Jumlah industri kecil menengah yang berkembang</b>	<b>DPMPTSP PTK</b>	<b>15 unit usaha</b>	<b>741.019.400</b>			<b>20 unit usaha</b>	<b>501.044.706</b>
	Fasilitasi bagi Indutstri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi	Jumlah peserta peltaihan tingkat terampil bordir KK kurang mampu	DPMPTSP PTK	30 orang	47.738.300			30 orang	48.693.066
	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Fasilitasi Mitra Kerja Industri: jumlah rapat koordinasi (rakor) yang diikuti; jumlah peserta study pembelajaran bagi IKM kerajinan; jumlah peserta pameran	DPMPTSP PTK	3 rakor; 3 IKM; 4 IKM	443.482.000			3 rakor; 3 IKM; 4 IKM	452.351.640
	Rencana Pengembangan Industri Kota Tahun 2015-2035	Jumlah dokumen yang dihasilkan tentang kebijakan di sektor industri	DPMPTSP PTK	1 dokumen	249.799.100				
	<b>Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial</b>	<b>Peningkatan pendapatan anggota KUB</b>	<b>DPMPTSP PTK</b>	<b>30%</b>	<b>111.980.350</b>			<b>40%</b>	<b>114.219.957</b>
	Penumbuhan Sentra Potensial	Jumlah IKM yang melakukan pendampingan/perkuatan KUB; IKM mengikuti produk unggulan daerah	DPMPTSP PTK	15 IKM; 1 IKM	111.980.350			15 IKM; 1 IKM	114.219.957
	<b>Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksi</b>	<b>Peningkatan nilai produksi IKM</b>	<b>DPMPTSP PTK</b>	<b>2%</b>	<b>27.053.200</b>			<b>2%</b>	<b>27.594.264</b>
	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi Pengujian dan Kualitas	Jumlah peserta sosialisasi dan penerapan GMP	DPMPTSP PTK	25 orang	12.738.200			25 orang	12.992.964
	Monitoring Garam Beryodium	Jumlah monitoring garam beryodium	DPMPTSP PTK	24 kali	14.315.000			24 kali	14.601.300
	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	<b>Penambahan nilai penjualan IKM</b>	<b>DPMPTSP PTK</b>	<b>2%</b>	<b>679.694.250</b>			<b>2%</b>	<b>310.176.135</b>
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah IKM yang difasilitasi label halal; jumlah peserta sosialisasi	DPMPTSP PTK	10 IKM; 25 orang	99.828.750			10 IKM; 25 orang	101.825.325
	Pengadaan Peralatan Packing	Jumlah peralatan packing yang diadakan	DPMPTSP PTK	1 unit	125.600.000			-	0
	Perkuatan Asosiasi Makanan	Jumlah pameran yang diikuti	DPMPTSP PTK	1 kali	70.665.000			1 kali	72.078.300
	Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur	Jumlah peserta sosialisasi penerapan konvensi	DPMPTSP PTK	15 orang, 5 IKM	63.204.500			15 orang, 5 IKM	64.468.590

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya bahan baku	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aneka kerajinan	DPMPTSP PTK	20 orang	70.396.000			20 orang	71.803.920
	Penunjang operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri	Operasional pengelolaan UPTD kerajinan industri berjalan baik	DPMPTSP PTK	12 bulan	250.000.000			12 bulan	255.000.000
	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>	<b>Pertumbuhan industri non formal mekadi indutsri formal</b>	DPMPTSP PTK	7%	112.557.825			7%	114.808.982
	Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu Hilir	Jumlah buku data industri	DPMPTSP PTK	4 buku	112.557.825			4 buku	114.808.982

Tabel 5.18  
PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02.17.01.	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	Bukittinggi		2.979.624.102	APBD			3.147.766.635
		<b>NON URUSAN</b>			988.554.790				1.043.766.635
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			696.866.635				696.866.635
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	benda pos	3 Jenis	1.950.000			3 Jenis	1.950.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		48 Rekening	48.000.000			48 Rekening	48.000.000
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara	12 jenis	7.700.000			12 jenis	7.700.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	5 Unit kendaraan dinas roda 4	140.920.000			5 Unit kendaraan dinas roda 4	140.920.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli (paket)	1 Paket	97.016.200			1 Paket	97.016.200
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (paket)	44 Jenis	20.248.473			44 Jenis	20.248.473
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan (bulan), Jenis barang	2 Paket	16.492.500			2 Paket	16.492.500
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (bulan)	4 jenis	1.699.550			4 jenis	1.699.550
		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Presentase rapat, tamu dan lembur yang	3 Paket	12.670.000			3 Paket	12.670.000
		Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi Dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%)	2 Paket	150.000.000			2 Paket	150.000.000
		Penyediaan Jasa Pegawai Non Pns	Tersedianya jasa non PNS (orang),	2 Orang	50.169.912			2 Orang	50.169.912
		Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar	1 Paket	10.000.000			1 Paket	10.000.000
		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah jasa pengamatan kantor	4 orang	140.000.000			4 orang	140.000.000
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			234.000.000				284.000.000
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang akan dibeli (paket)	1 Paket	0			1 Paket	50.000.000
		Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (jenis)	1 Paket	59.000.000			1 Paket	59.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	175.000.000			1 Paket	175.000.000
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b>			55.913.900				56.000.000
		Pengembangan Sumber Daya Pengelola Perpustakaan	- Jumlah aparatur mengikuti bintek/diklat	40 Orang	55.913.900			40 Orang	56.000.000
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>			1.774.255				6.900.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah LKIP yang tepat waktu (dokumen)		8 Eksemplar	531.175			8 Eksemplar	600.000
	Penyusunan Rencana Kerja Dan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu		8 Eksemplar	737.905			8 Eksemplar	750.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen renja dan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu (dokumen)		8 Eksemplar	505.175			8 Eksemplar	5.550.000
	<b>URUSAN WAJIB</b>				<b>1.991.069.312</b>				<b>2.104.000.000</b>
	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan</b>	<b>Meningkatnya minat baca, pembinaan,</b>			<b>698.058.975</b>				<b>711.000.000</b>
	Bukittinggi Library Fiesta	Lomba Mewarnai dan bercerita bagi Siswa/i		6 lomba, 1 pameran dan	159.666.215			6 lomba, 1 pameran dan	160.000.000
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	- Penambahan koleksi monograf - Penambahan koleksi		2000 eks	138.500.000			2000 eks	140.000.000
	Pembinaan Perpustakaan	- perpustakaan sekolah - perpustakaan kelurahan - perpustakaan mesjid - TBM		100 Kunjungan	34.765.400			100 Kunjungan	35.000.000
	Lomba Perpustakaan Terbaik	Jumlah perpustakaan yang dinilai		81 Perpustakaan	25.686.395			81 Perpustakaan	26.000.000
	Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka	Terolahnya koleksi monograf perpustakaan yang siap		5000 eks	49.260.805			8000 eks	50.000.000
	Layanan Perpustakaan Keliling	Jumlah anggota pustaka keliling		115 kunjungan	49.776.435			115 kunjungan	50.000.000
	Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah	Layanan operasional perpustakaan, layanan lembur di hari sabtu, minggu dan hari libur		12 bulan	82.236.900			12 bulan	85.000.000
	Bintek Tenaga Literasi	Bertambahnya pengetahuan peserta bintek		30 orang	106.828.520			30 orang	110.000.000
	Seminar Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah peserta seminar		300 orang	51.338.305			300 orang	55.000.000
	<b>Program Pengembangan Data Dan Informasi Perpustakaan</b>	<b>Tingkat Tersedianya data dan informasi perpustakaan.</b>			<b>97.610.325</b>				<b>105.000.000</b>
	Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	Jumlah waktu layanan teknologi informasi perpustakaan		12 bulan	58.200.000			12 bulan	60.000.000
	Alih Media Koleksi Perpustakaan	jumlah alih media koleksi minang kabau		30 Eks	28.300.000			30 Eks	30.000.000
	Pelaksanaan Stop Opname Koleksi Bahan Pustaka	Data koleksi perpustakaan		1 Paket	11.110.325				15.000.000
	<b>Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan</b>			<b>14.173.690</b>				<b>20.000.000</b>
	Perawatan Berkala Dan Koleksi Arsip	Jumlah arsip dinamis dan statis yang terawat		110 Boks	14.173.690			110 Boks	20.000.000
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informaasi</b>	<b>Tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>			<b>501.678.745</b>				<b>548.000.000</b>
	Pembinaan Langsung Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis Pada Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kota	Jumlah SKPD yang dibina		5 SKPD	31.586.600			6 SKPD	35.000.000
	Bimbingan Teknis Kearsipan	Jumlah aparatur mengikuti bintek/diklat		30 orang	55.246.800			30 orang	58.000.000
	Layanan Informasi Arsip	Jumlah layanan pemanfaatan informasi dokumen yang bernilai		40 orang	154.066.515			40 orang	160.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Promosi Dan Pameran Arsip Statis	Jumlah promosi dan pameran yang dilaksanakan/diikuti		1 Paket	100.775.565			1 Paket	125.000.000
	Sosialisasi Pengetahuan Tentang Perda Kearsipan	Jumlah peserta sosialisasi		60 orang	33.162.000			60 orang	35.000.000
	Penelusuran Tokoh-Tokoh Pemerintahan Kota Bukittinggi	Jumlah dokumen tokoh yang ditelusuri		5 Dokumen	104.623.265			5 Dokumen	110.000.000
	Sosialisasi Pengelolaan Arsip SKPD	Jumlah peserta sosialisasi		60 Orang	22.218.000			60 Orang	25.000.000
	<b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	<b>Tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>			<b>127.051.585</b>				<b>135.000.000</b>
	Pembangunan / Pemeliharaan Data Base Informasi Kearsipan	Jumlah terbangun dan terpeliharanya data base kearsipan		25 SKPD	36.692.275			25 SKPD	40.000.000
	Pemusnahan Arsip In Aktif	Jumlah arsip yang dimusnahkan		70 Box	80.144.510			70 Box	83.000.000
	Monitoring Dan Evaluasi Kearsipan	Jumlah monitoring dan evaluasi penyuluhan kearsipan yang dilakukan		12 SKPD	10.214.800			12 SKPD	12.000.000
	<b>Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	<b>Tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>			<b>552.495.992</b>				<b>585.000.000</b>
	Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Persubstantif	Jumlah buku JRA Persubstantif		5 buku	54.315.970			5 buku	55.000.000
	Sistem Informasi Kearsipan Kota Bukittinggi	Pembuatan sistem informasi kearsipan		1 Paket	67.436.675			1 Paket	70.000.000
	Pengelolaan Arsip Elektronik ( E-Arsip) SIKN, JIKN	Jumlah arsip elektronik		500 lembar	69.585.575			500 lembar	72.000.000
	Pemeliharaan Dan Perawatan Dokumen Daerah	Jumlah dokumen daerah yang terpelihara dan terselamatkan		72 Dokumenn	23.520.197			72 Dokumenn	25.000.000
	Pengumpulan Data (Akuisisi) Statis	Jumlah dokumentasi daerah		3 SKPD	37.200.825			3 SKPD	38.000.000
	Pengadaan Dan Pengumpulan Dokumentasi Daerah	Jumlah dokumen daerah		1 bundel	195.979.250			1 bundel	200.000.000
	Lomba Arsip Bernilai Sejarah	Jumlah dokumen arsip bernilai sejarah		1 Dokumenn	104.457.500			1 Dokumenn	125.000.000

**Tabel 5.19**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
200.03.01.	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>				13.904.558.472				14.719.245.510
	<b>NON URUSAN</b>				1.416.711.982				1.539.133.180
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi			1.247.567.257	APBD	-	100%	1.372.323.983
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko 3000, Perangko 6000, Materai 3000, Materai 6000, Buku Cek, Kiriman Paket/ Kilat Khusus	Bukittinggi	25 buah, 20 buah, 458 buah, 395 buah, 4 buah, LS	4.559.000	APBD	-	25 buah, 15 buah, 150 buah, 100 buah, 2 buah	5.014.900
	Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik	Telepon, Air dan Listrik	Bukittinggi	1 tahun	46.300.000	APBD		1 tahun	50.930.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.Dinas/Operasional	Service, Suku cadang, BBM dan pelumas, Jasa Kir, STNK Kendaraan dinas/ Operasional	Bukittinggi	12 bulan	257.078.867	APBD		12 bulan	282.786.754
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Bukittinggi	1 paket	125.689.500	APBD		12 bulan	138.258.450
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Bukittinggi	1 paket	12.000.000	APBD		1 paket	13.200.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor sesuai dengan rincian belanja	Bukittinggi	45 item	29.472.810	APBD		12 bulan	32.420.091
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak penggandaan sesuai dengan rincian	Bukittinggi	1 paket	17.402.200	APBD		1 paket	19.142.420
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Baterai	Bukittinggi	10 lusin	3.280.800	APBD		10 lusin	3.608.880
	Instalasi listrik/penerangan	Bola lampu		80 buah				80 buah	
	Bagunan Kantor	Alat listrik, Alat Elektronik		16 buah/51 meter, 4 buahn				16 buah/51 meter, 4 buah	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Nasi, Snack	Bukittinggi	300 bks, 250 ktk	9.750.000	APBD		300 bks, 250 ktk	10.725.000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi ke luar	Bukittinggi	12 bulan	300.000.000	APBD		12 bulan	330.000.000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya Honor Pekerja Harian Lepas dan Pekerja kontrak	Bukittinggi	10 orang	251.314.080	APBD		10 orang	276.445.488
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Honor Pekerja Pengamanan Kantor	Bukittinggi	12 bulan	180.000.000	APBD		10 orang	198.000.000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honorarium pengadaan barang dan jasa pemerintah	Bukittinggi	4 jenis	10.720.000	APBD		4 jenis	11.792.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja</b>			17.500.000				
	Pengadaan Peralatan Kantor		Bukittinggi		2.500.000	APBD		1 paket	2.750.000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah APAR yang terbeli	Bukittinggi	2 unit	0	APBD		1 paket	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	pemeliharaan rutin/berkala	Bukittinggi	1 paket	15.000.000	APBD		1 paket	16.500.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian Kinerja sesuai rencana kerja yang telah disusun</b>			<b>65.085.450</b>				<b>71.593.995</b>
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen tersusun	Bukittinggi	2 dokumen	2.596.800	APBD		2 dokumen	2.856.480
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan LPPD	Jumlah dokumen tersusun	Bukittinggi	5 dokumen	1.743.900	APBD		5 dokumen	1.918.290
	Penyusunan laporan keuangan semester	Jumlah Dokumen yang tersusun	Bukittinggi	2 dokumen	1.439.250	APBD		2 buah	1.583.175
	Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	Jumlah dokumen tersusun	Bukittinggi	1 dokumen	59.305.500	APBD		100%	65.236.050
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pertanian</b>				<b>86.559.275</b>				<b>95.215.203</b>
	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah pegawai yang dinilai angka kreditnya	Bukittinggi	2 buah	20.718.350	APBD		2 buah	22.790.185
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan	Bukittinggi	1	65.840.925	APBD		100%	72.425.018
	<b>URUSAN WAJIB</b>				<b>12.487.846.490</b>				<b>13.180.112.330</b>
	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan)</b>	<b>Ketersediaan energi dan protein perkapita</b>			<b>3.424.319.800</b>				<b>3.760.099.500</b>
	Koordinasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan		2	27.481.500				30.000.000
	Pemantauan dan Informasi Harga Pangan	Jumlah laporan, Jasa informasi media elektronik		12 laporan, 60 kali di TV dan 104 kali di	69.849.500			12 laporan	70.099.500
	Pengadaan dan Penunjang Biaya Operasional Raskin Otonomi	Jumlah KK yang diberikan raskin		1600	3.102.147.450			0%	3.400.000.000
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan yang tersusun		1	12.099.250			100%	30.000.000
	Koodinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana		4 kali	11.708.000				25.000.000
	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	Jumlah KK yang diberi bantuan		150	50.000.000				100.000.000
	Updating Database Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi	Jenis data yang diupdate			5.883.350				
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jenis komoditi yang diuji dan jumlah peserta		15 jenis	65.155.000				60.000.000
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah pangan yang dicadangkan		7500 kg	79.995.750			200	45.000.000
	<b>Program Diversifikasi Pangan</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan</b>		<b>8450%</b>	<b>538.862.300</b>			<b>84,7</b>	<b>918.000.000</b>
	Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	Jumlah Dokumen yang tersusun		1 dokumen	12.959.300				
	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Luas Lahan pekarangan yang dimanfaatkan		400	100.000.000			500	100.000.000
	Penyuluhan Makanan B2SAH	Jumlah guru dan kader yang mengikuti penyuluhan; Temu kemitraan yang		220; 1 kali; 3 kali	58.370.000			270	70.000.000
	Lomba Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Jumlah lomba yang diikuti		5	97.533.000			4	25.000.000
	Promosi Percepatan Pengankaragaman dan Konsumsi Pangan (P2KP)	Jenis media dan promosi yang diikuti		6 jenis dan 6 kali pameran	220.000.000			6	150.000.000
	Pemeliharaan Galeri Pangan Bukittinggi	Jumlah galeri yang dipelihara		1 unit	50.000.000			1	150.000.000
	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan</b>				<b>3.478.576.140</b>				<b>7.321.500.000</b>
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Dana Sinergis TP)	Dana pendukung kegiatan TP prasarana dan sarana pertanian		1 paket	305.174.500			1 paket	350.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penangkaran Jabal Benih Padi	Luas lahan pertanian yang ditanami benih berlabel		0,2 Ha	25.310.300			0,2 Ha	16.000.000
	Pengembangan Tanaman Hias	Pelaksanaan Pelatihan Tanaman Hias		2 kelompok	31.484.750			2 kelompok	3.000.000
	Penunjang Operasional Laboratorium Kultur Jaringan	Jumlah Bibit tanaman yang dihasilkan		10 jenis	30.920.000				
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah pengendalian hama dan tikus		2 lokasi	6.696.000			2 lokasi	7.500.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Bukittinggi		12 bulan	43.151.000			2 kali	40.000.000
	Pemberian Bantuan Alat dan Mesin Pertanian	Jumlah sarana alsintan untuk petani			175.000.000				
	Pembinaan Lanjutan Pengembangan Komoditi Kopi	Penyulaman bibit kopi, perbaikan budidaya komoditi Kopi		100 btg, 1000 btg	10.429.000				20.000.000
	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK 2018)	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional		3 paket	2.060.000.000			4 paket	3.420.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diperbaiki		1 paket	79.100.000			4 paket	3.420.000.000
	Optimalisasi Lahan Kering untuk pengembangan palawija	Luas lahan yang ditanami palawija		2 ha	25.625.000				
	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian	Laporan Data Statistik dan Informasi Pertanian, Laporan Data Ubinan pangan, Palawija,		12 laporan dan 15 sampel	59.305.500			12 laporan dan 15 sampel	45.000.000
	Pengadaan Bibit Buah-buahan	Jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan		9800 btg	302.673.500				
	Pengembangan Budidaya Pisang	Jumlah kelompok tani yang melaksanakan pengembangan budidaya Pisang		1 kelompok tani	49.075.000				
	Penunjang Kegiatan UPSUS tanaman Pertanian	Jumlah dokumen tersusun	Bukittinggi	1 dokumen	33.827.500				
	Penyusunan Kebijakan Pencegahan alih fungsi lahan pertanian (LP2B)	Jumlah dokumen draft LP2B yg tersusun		1 dokumen	147.893.000				
	Pemberdayaan dan Pembinaan P3A	Jumlah sosialisasi dan pembinaan P3A		1 tahun	12.912.750				
	Pembinaan, peningkatan kelas kemampuan kelompok dan penilaian/pemberian penghargaan kelompok tani	- Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut		5 kelompok	30.000.000			0%	0
		- Jumlah Pokdakan yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut		2 kelompok					
		- Jumlah UP3HP yang ditingkatkan kelas kemampuannya dari pemula ke lanjut		3 kelompok					
	Pelatihan, Pembinaan dan Temu Teknis Gapoktan dan LKMA	Jumlah temu teknis/pelatihan Gapoktan dan LKMA yang terlaksana		1 tahun	49.998.340			0	0
	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan</b>				<b>49.365.000</b>				<b>80.000.000</b>
	Festival/Pameran Hortikultura dan Pangan	Jumlah festival/pameran hortikultura di tingkat kota yang terlaksana		1 kali	49.365.000			3	80.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan</b>				<b>292.157.400</b>				<b>190.754.000</b>
	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP)	Jumlah Dokumen RKPP yang tersusun		17 dokumen	14.999.850			16 dokumen	19.380.000
	Pelaksanaan training dan review kegiatan	Jumlah training penyuluhan pertanian lapangan yang terlaksana		24 kali	59.992.650			26 kelompok, 26 kelompok	80.754.000
		Temu teknis Petani yang terlaksana		2 kali					
		KTNA yang terlaksana		2 kali					
	Penunjang Operasional BPP Model	Operasional BPP, Jumlah demplot		1 tahun	67.486.900			1 tahun	90.620.000
	Peningkatan Kompetensi Penyuluhan	Jumlah Bimtek Penyuluhan			149.678.000				
	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>				<b>59.532.400</b>				
	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha (UP3HP)	Jumlah Pelatihan kelompok UP3HP yang terlaksana		1 kali	29.988.400				29.988.400
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos	Jumlah peserta pelatihan		50 orang	29.544.000				
	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak</b>				<b>350.228.600</b>				<b>388.000.000</b>
	Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	Pengungkapan anjing liar		1 kali	49.852.000			1 Paket	70.000.000
		Pengawasan kesmavet		1 kali					
	Sosialisasi Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	Jumlah peserta sosialisasi		2 kali	19.528.400			2 kali	20.000.000
	Penunjang Operasional Poskeswan	Pelayanan kesehatan di UPTD Poskeswan;		2750 ekor	226.557.300			1 tahun	248.000.000
		vaksinasi rabies di Kota Bukittinggi;		1100 ekor					
		Pemeriksaan kesehatan hewan besar di Kota Bukittinggi;		285 ekor					
		Sterilisasi HPR di Kota Bukittinggi;		40 ekor					
		Pemeriksaan Hewan Kurban Kota Bukittinggi		848 ekor					
	Pelatihan pemotongan hewan kurban di mesjid/mushalla	Jumlah peserta pelatihan pemotongan hewan kurban		75 orang	19.935.000			3 Mesjid	50.000.000
	Sosialisasi Perda No. 6 tahun 2015 tentang rabies	jumlah pelaksanaan sosialisasi		1 kali	19.355.900				
	Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH	Jumlah pengambilan sampel bahan pangan asal hewan		2 kali	15.000.000				
	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>				<b>2.694.438.550</b>				
	Pengadaan dan Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan	Jumlah kuda bibit pejantan yang terbeli		1 ekor	2.496.767.425			1 kali	165.000.000
		Jumlah Kuda Bibit Pejantan yang terpelihara		2 ekor					
	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah acara yang diikuti pada Promosi Peternakan ditingkat Provinsi Sumbar		2 cabang	53.700.000				
	Pelatihan dan Pembinaan Ternak Bantuan Pemerintah dan Ternak Masyarakat	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan		5 orang	74.105.600				
		Jumlah peternak yang dibina		25 orang					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengumpulan/Penyusunan Data Statistik Populasi Ternak	Jumlah database peternakan yang tersusun		1 dokumen	25.000.000				
	Penunjang UPSUS SIWAB	Jumlah kelompok yang dibina		4 kelompok	44.865.525				
		Jumlah ternak yang di IB		50 Ekor					
	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>				<b>259.176.650</b>				<b>271.758.830</b>
	Penunjang Operasional RPH	Jumlah Pemotongan Sapi dan Kerbau		6300 ekor	252.089.150			1 tahun	271.758.830
	Operasional Pasar Ternak	Jumlah pengoperasian pasar ternak		52 minggu	7.087.500				
	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>				<b>289.839.500</b>				<b>250.000.000</b>
	Penunjang Operasional BBIH	jumlah produksi benih ikan			229.992.000			1 tahun	250.000.000
	Peningkatan Produksi Ikan Air Tawar	Pengadaan Benih Ikan		60000 ekor	59.847.500				
		Pengadaan Pakan Ikan		600 kg					
	<b>Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan</b>				<b>35.842.950</b>				<b>0</b>
	Pelatihan budidaya ikan	jumlah pelatihan budidaya ikan		1 kali	35.842.950				
	<b>Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>				<b>132.868.700</b>				
	Promosi dan Lomba Gemar Ikan	Promosi, Lomba Rumah Makan, PAUD, Lomba Masak Ikan, Lomba Jingga, Lomba Forikan		2 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 1 kali, 2 kali	132.868.700				
	<b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	<b>Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan</b>		<b>600 batang</b>	<b>882.638.500</b>				
	Penghijauan Turus Jalan	Jumlah pohon pelindung yang ditanami		600 batang	882.638.500				

**Tabel 5.20**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	01.01.03	SEKRETARIAT DAERAH			32.147.617.433				41.519.349.194
		NON URUSAN			7.771.858.608				10.255.709.835
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			5.794.851.608				6.925.647.835
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat	Setda	1 tahun	25.000.000	APBD		1 tahun 28.750.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik	Terpenuhi penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Setda	1 tahun	339.000.000	APBD		1 tahun 389.850.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Usia teknis kendaraan dinas dapat lebih lama dimanfaatkan	Setda	roda 4 dan roda 2	1.802.000.000	APBD		roda 4 dan roda 2 2.359.800.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Usia teknis kantor dapat lebih lama dimanfaatkan	Setda	1 tahun	700.315.632	APBD		1 tahun 700.600.000
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Usia teknis peralatan dapat lebih lama dimanfaatkan	Setda	1 tahun	200.000.000	APBD		1 tahun 230.000.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Setda	1 tahun	150.000.000	APBD		1 tahun 172.500.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terjadinya barang cetakan dan penggandaan	Setda	1 tahun	250.000.000	APBD		1 tahun 287.500.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Setda	1 tahun	100.000.000	APBD		1 tahun 115.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terjadinya kebutuhan rumah tangga	Setda	1 tahun	150.000.000	APBD		1 tahun 172.500.000
		Penyediaan makan dan minum	Lancarnya tugas -tugas kantor	Setda	1 tahun	135.000.000	APBD		1 tahun 155.250.000
		Rapat - rapat Koordinasi , Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Lancarnya tugas -tugas kantor	Setda	1 tahun	1.150.000.000	APBD		1 tahun 1.322.500.000
		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai Non PNS	Setda	24 orang	552.890.976	APBD		24 orang 699.407.085
		Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya pelayanan kesehatan KDH dan WKDH	Setda	8 orang	30.000.000	APBD		8 orang 34.500.000
		Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Tersedianya dokumentasi pemerintahan Pemko bukittinggi	Setda	400 keg	87.250.000	APBD		400 keg 115.586.500
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya langganan media cetak harian nasional , harian, mingguan dan majalah	Setda	3 koran nasional dan 9 majalah	71.645.000	APBD		3 koran nasional dan 9 majalah 82.391.750
		Pembuatan Buku Kerja Pemko	Tersedianya buku kerja Pemko Bkt	Setda	200 buku	51.750.000	APBD		200 buku 59.512.500
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			1.809.000.000			3.132.425.000
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor	Setda	1 tahun	200.000.000	APBD		1 tahun 230.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	Setda		-	APBD		1 tahun	253.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan operasional	Setda		-	APBD		roda 4 dan roda 2	721.050.000
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Peralatan rumah dinas / jabatan	Setda	1 tahun	150.000.000	APBD		1 tahun	189.750.000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Setda	1 tahun	248.000.000	APBD		1 tahun	352.500.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas / jabatan	Usia teknis rumah dinas lebih lama dimanfaatkan	Setda	1 tahun	85.000.000	APBD		1 tahun	151.500.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Usia teknis gedung / kantor lebih lama dimanfaatkan	Setda	1 tahun	646.000.000	APBD		1 tahun	950.000.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Perlengkapan rumah dinas / jabatan terpelihara secara rutin	Setda	1 tahun	25.000.000	APBD		1 tahun	31.625.000
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Setda	2 tahun	255.000.000	APBD			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Usia teknis perlengkapan gedung / kantor lebih lama dimanfaatkan	Setda	1 tahun	200.000.000	APBD		1 tahun	253.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai</b>			-				<b>151.800.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Lancarnya pelaksanaan tugas - tugas pegawai	Setda		-	APBD		1 kali	151.800.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>			<b>168.007.000</b>				<b>197.637.000</b>
	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	Setda	1 laporan	4.389.000	APBD		1 laporan	4.389.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Laporan rencana kerja Sekretariat Daerah	Setda	12 bulan	14.443.000	APBD		12 bulan	14.443.000
	Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan pengelolaan keuangan Setda	Setda	12 bulan	13.030.000	APBD		12 bulan	13.030.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	Setda	1 laporan	8.775.000	APBD		1 laporan	8.775.000
	Penyusunan Lakip Kota Bukittinggi serta Capaian Kinerja Keuangan	Capaian Sakip Kota Bukittinggi tingkat Nasional	Setda	30 buku	101.409.000	APBD		30 buku	130.000.000
	Pelaporan percepatan Kinerja ( TAPKIN ) Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017	Jumlah SKPD yang telah melakukan perjanjian kinerja sampai ke Eselon IV	Setda	26 SKPD	25.961.000	APBD		26 SKPD	27.000.000
	<b>FUNGSI PENDUKUNG</b>				<b>24.375.758.825</b>				<b>31.263.639.359</b>
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH</b>			<b>7.867.700.000</b>				<b>9.993.010.500</b>
	Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan	honor staf penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan	Setda	1 tahun	320.000.000	APBD		1 tahun	368.000.000
	Fasilitasi Acara dan Upacara Nasional dan Kedaerahan	Honor dan peralatan pelaksanaan upacara	Setda	1 tahun	700.000.000	APBD		1 tahun	725.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah	Penerimaan tamu pemerintah daerah	Setda	1 tahun	1.435.000.000	APBD		1 tahun	2.152.500.000
	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan KDH	Pelayanan kedinasan KDH	Setda	1 tahun	2.599.800.000	APBD		1 tahun	3.288.747.000
	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan WKDH	Pelayanan kedinasan WKDH	Setda	1 tahun	1.846.400.000	APBD		1 tahun	2.335.696.000
	Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Honor staf penunjang operasional pimpinan	Setda	1 tahun	579.500.000	APBD		1 tahun	733.067.500
	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Sarana dan prasarana yang disediakan	Setda	1 kali	387.000.000			1 kali	390.000.000
	<b>Program Penataan Organisasi Perangkat daerah</b>	<b>Pemenuhan struktur organisasi perangkat daerah</b>			<b>459.101.000</b>				<b>310.000.000</b>
	Penyusunan Standar Oprasional Prosedur	Jumlah SKPD yang telah membuat SOP	Setda	26 SKPD	99.101.000	APBD			-
	Revisi Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP SKPD yang telah terevaluasi	Setda		-	APBD		27 SKPD	100.000.000
	Evaluasi Analisis Beban Kerja	Jumlah jabatan yang telah dievaluasi	Setda	1dokumen	60.000.000	APBD			-
	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah peserta Bimtek Evaluasi Jabatan /	Setda		-	APBD		595 jabatan eselon	80.000.000
	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial	Jabatan struktural yang memiliki standar kompetensi	Setda	1dokumen	75.000.000	APBD			-
	Penyusunan Standar Kompetensi teknis	Persentase jabatan pelaksana yang memiliki	Setda	1dokumen	65.000.000	APBD		1dokumen	70.000.000
	Evaluasi Kelembagaan dan Tusi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan tupoksi yang telah dievaluasi	Setda	SKPD	80.000.000	APBD		SKPD	-
	Penyusunan Revisi Tupoksi sesuai Hasil Evaluasi	Tupoksi jabatan yang telah direvisi	Setda	SKPD	80.000.000	APBD		SKPD	-
	Penyusunan SOTK sesuai hasil Evaluasi Kelembagaan	Persentase SOTK yang telah sesuai dengan evaluasi kelembagaan	Setda		-	APBD		80%	60.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Jumlah inovasi pelayanan publik</b>			<b>208.564.000</b>				<b>370.000.000</b>
	Survey IKM	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Setda	6 SKPD	67.781.000	APBD		0	100.000.000
	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah SKPD yang telah membuat Inovasi Pelayanan Publik	Setda	26 SKPD	60.000.000	APBD		1 Inovasi	70.000.000
	Pelaporan Percepatan dan Penerapan SPM Pemerintah Kota Bukittinggi	Jumlah urusan pelayanan publik yang telah memenuhi standar nasional	Setda	6 SKPD	80.783.000	APBD		6 SKPD	100.000.000
	Monitoring dan Evaluasi SPM Kota Bukittinggi	Persentase SPM yang terevaluasi	Setda	0	0			0	100.000.000
	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN</b>	<b>Persentase penetapan peraturan perundang - undanag</b>			<b>1.355.732.400</b>				<b>1.643.636.710</b>
	Penanganan Perkara - perkara Pemda	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan	Setda	2 perkara	170.139.400	APBD		2 perkara	205.868.674
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah aparatur / masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Setda	200 orang	75.947.600	APBD		200 orang	91.896.596
	Penataan dan Pengembangan Dokumentasi Hukum	Jumlah dokumen produk hukum yang tersedia	Setda	3 jenis dokumen	40.354.750	APBD		3 jenis dokumen	48.829.825

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penelitian dan Evaluasi Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga / Masyarakat	Jumlah perjanjian yang diteliti	Setda	30 perjanjian	23.008.250	APBD		30 perjanjian	27.839.900
	Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang dihasilkan ( Perda , Perwako dan PP DPRD ) sesuai aturan yang berlaku	Setda	39 produk	523.954.000	APBD		36 produk	633.984.340
	Rencana aksi Nasional Hak Azasi Manusia	Laporan aksi HAM, dan jumlah peserta sosialisasi	Setda	160 orang	38.496.100	APBD		160 orang	46.580.270
	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang terhimpun dalam WEB	Setda	50 bh	61.286.000	APBD		50 peraturan	74.156.060
	Pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum	jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan	Setda	240 orang	53.669.500	APBD		300 orang	64.940.095
	Advokasi Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Daerah	laporan advokasi / penyelesaian masalah hukum dalam pembangunan	Setda	12 laporan	212.775.000	APBD		12 laporan	257.457.750
	Pembuatan Buku Lembaran Daerah , Berita Daerah dan pendistribusiannya	Jumlah buku lembaran daerah dan buku berita daerah	Setda	220 + 220 buku	76.101.800	APBD		220 + 220 buku	92.083.200
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah produk hukum daerah yang dilakukan pengkajian	Setda		80.000.000	APBD			100.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah</b>			<b>152.765.000</b>				<b>255.500.000</b>
	Fasilitasi Pembentukan Perkuatan Kerjasama antar Daerah	Jumlah MoU , sosialisasi dan laporan movev	Setda	3 MoU	54.935.000	APBD		3 MoU	107.000.000
	Kegiatan Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas / Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah Propinsi dengan Kab / Kota se Sumbar	Jumlah rakesnas dan rakor	Setda	5 kali	97.830.000	APBD		5 kali	148.500.000
	<b>PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	<b>Peningkatan capaian kinerja daerah</b>			<b>571.378.500</b>				<b>778.000.000</b>
	Penyusunan LPPD	LPPD Kota Bukittinggi	Setda	9 buku	89.282.500	APBD		9 buku	160.000.000
	Penunjang Penyusunan LKPJ	LKP Walikota Kota Bukittinggi	Setda	45 buku	92.650.400	APBD		45 buku	160.000.000
	Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah inventarisasi nama rupa bumi	Setda	208 unsur buatan	31.145.100	APBD		208 unsur buatan	43.000.000
	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( EKPPD )	Laporan EKPPD	Setda	75%	26.407.500	APBD		75%	70.000.000
	Sosialisasi Penyusunan LKPJ dan LPPD	Jumlah peserta sosialisasi	Setda	50 orang peserta	21.573.000	APBD			-
	Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kota Bukittinggi	Laporan sekretariat hari jadi kota	Setda	1 kali	160.320.000	APBD		1 kali	185.000.000
	Rapat Koordinasi Pemerintah Kota/Kecamatan/Kelurahan		Setda		150.000.000	APBD			160.000.000
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI</b>	<b>Meningkatnya tingkat perekonomian</b>			<b>122.855.100</b>				<b>126.000.000</b>
	Penyelenggaraan Pekan Inovasi Perkembangan ( PIN ) Desa / Kelurahan Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna ( TTG )	Diikutinya PIN TK Prop dan Nasional	Setda	2 kali	122.855.100	APBD		2 kali	126.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN</b>	<b>Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur</b>			<b>547.874.500</b>				<b>906.500.000</b>
	Penunjang Operasional DPD LPM	Jumlah raker dan keikutsertaan dalam munas dan musda DPD LPM	Setda	1 tahun	19.000.000	APBD		1 tahun	21.000.000
	Penyusunan Evaluasi Perkembangan desa/Kelurahan EPDesKel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan	Tersedianya data profil kelurahan yang akurat dan lengkap	Setda	24 kelurahan	42.634.050	APBD		24 kelurahan	59.000.000
	Penilaian Kelurahan Berprestasi	Juara lomba kelurahan berprestasi tingkat propinsi dan regional dan terpilihnya	Setda	3 tingkat perlombaan	157.701.350	APBD		3 tingkat perlombaan	148.500.000
	Penilaian Kompetensi Lurah	Lurah juara lomba kompetensi lurah tingkat kota Bukittinggi dan prop Sumbar	Setda	2 lomba	71.811.100	APBD		2 lomba	75.000.000
	Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Bukittinggi	Camat berprestasi tingkat Kota Bukittinggi	Setda	1 orang Camat	74.495.900	APBD		1 orang Camat	98.000.000
	Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang Administrasi Pemerintahan	Jumlah Peserta Bimtek dan studi lapangan bagi aparatur bidang administrasi	Setda	35 ortang	150.000.000	APBD		35 orang	450.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN di Kecamatan	Laporan monev	Setda	3 Kecamatan	32.232.100	APBD		3 Kecamatan	55.000.000
	<b>PROGRAM PENEKASAN BATAS WILAYAH</b>	<b>Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan</b>			<b>80.415.500</b>				<b>85.000.000</b>
	Penegasan Batas Administrasi Wilayah kota Bukittinggi	Peta batas kecamatan dan kelurahan	Setda		80.415.500	APBD			85.000.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Terwujudnya admnistrasi pembangunan</b>			<b>911.404.400</b>				<b>1.007.500.000</b>
	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal	Laporan program Belanja Modal	Setda	70 laporan	80.000.000	APBD		70 laporan	120.000.000
	Pelaksanaan proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang dilelangkan	Setda	120 paket	672.750.000	APBD		120 paket	700.000.000
	Asistensi Penyusunan RUP Pengadaan Barang atau Jasa pemerintah Pelaksanaan Monitoring dan Belanja Modal	Jumlah asistensi dan konsultasi penyusunan RUP, pengadaan barang jasa pemerintah pelaksanaan monitoring dan belanja modal	Setda	28 SKPD	52.654.400	APBD		28 SKPD	62.500.000
	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran ( TEPR ) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi	Laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Pemerintah daerah Kota Bukittinggi	Setda	12 laporan	106.000.000	APBD		12 laporan	125.000.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN STABILITAS PEREKONOMIAN</b>	<b>Tingkat inflasi daerah</b>			<b>319.617.000</b>				<b>386.000.000</b>
	Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi	Laporan pelaksanaan kegiatan tpid	Setda	12 rekomendasi	139.740.000	APBD		12 rekomendasi	200.000.000
	Koordinasi dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Laporan pembinaan lembaga keuangan Mikro ( LKM ) Kota BKT	Setda	1 Laporan	63.814.000	APBD		1 Laporan	65.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	laporan hasil monev	Setda	2 laporan	35.063.000	APBD		2 laporan	40.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan Buku Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi	Buku standar harga barang dan jasa kebutuhan Pemko Bukittinggi	Setda	250 buku dan 1 Perwako	60.000.000	APBD		250 buku dan 1 Perwako	60.000.000
	Penyusunan Buku Standar Harga Satuan Bangunan	Buku standar harga satuan bangunan	Setda	30 buku	21.000.000	APBD		30 buku	21.000.000
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI</b>	<b>Meningkatnya tingkat perekonomian</b>			<b>378.993.000</b>				<b>595.000.000</b>
	Penunjang Opreasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi	Laporan tentang pengembangan potensi ekonomi	Setda	1 rekomendasi	72.916.000	APBD		1 rekomendasi	200.000.000
	Koordinasi dan Sosialisasi bidang Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi	Setda	200 orang	120.541.000	APBD		200 orang	200.000.000
	Monitoring , Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan BUMD	laporan monev dan pembinaan BUMD	Setda	10 laporan	89.000.000	APBD		10 laporan	80.000.000
	Koordinasi Investasi Pasar	jumlah pasar murah/ bazar	Setda	2 kali	96.536.000	APBD		2 kali	115.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT</b>	<b>Tingkat aktifitas keagamaan di lingkungan masyarakat</b>			<b>8.919.668.550</b>				<b>11.444.695.250</b>
	Monitoring, Evaluasi Verifikasi dan pelaporan Penyerahan Bantuan Tunjangan Opreasional Guru MDTA, TPQ / TKQ / TPSA, Ponpes, Garin Mesjid / Mushalla	Jumlah penerima bantuan	Setda	530 guru dan garin	4.188.000.000	APBD		530 guru dan garin	4.823.400.000
	Wirid Pengajian dan Halal Bi Halal	Jumlah wirid pengajian dan halal bi halal	Setda	20 x Wirid pengajian	49.000.000	APBD		20 x Wirid pengajian	62.400.000
	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jemaah Haji Kota Bukittinggi	Jumlah peserta	Setda	1 kl pelepasan , 1 kl penyambutan	349.730.000	APBD		1 kl pelepasan , 1 kl penyambutan	360.851.000
	Pengadaan Kalender Hijriah	Kalender hijriah	Setda	900 bh	23.733.050	APBD		900 bh	23.733.050
	MTQ Tingkat Propinsi	Jumlah kafilah yang dikirim	Setda	-	-	APBD		55 kafilah utusan Kota	1.998.000.000
	MTQ Tingkat Kota Bukittinggi	Jumlah MDTA/TPA/TPQ yang dibantu	Setda	450 kafilah MTQ	331.771.000	APBD		-	-
	Lomba DDS Kota Bukittinggi	Ikut sertanya mengikuti MTQ ke 37 tingkat Propinsi	Setda	6 lembaga DDS	61.097.000	APBD		6 lembaga DDS	66.761.200
	Opreasional Kunjungan Tim Ramadhan	Jumlah mesjid dan mushalla yang dikunjungi	Setda	45 mesjid dan 105 mushalla	3.065.150.000	APBD		45 mesjid dan 105 mushalla	3.115.150.000
	Fasilitator Kegiatan Pengiriman Kafilah dan Peninjau Lomba Tingkat Propinsi dan Nasional	Jumlah utusan Bukittinggi yang mengikuti lomba tingkat provinsi	Setda	60 Kafilah MTQ	85.400.000	APBD		60 Kafilah MTQ	89.800.000
	Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Alqur'an	Jumlah lembaga keagamaan yang dibantu	Setda	40 MDTA,20 TPA/TPQ	195.674.600	APBD		40 MDTA,20 TPA/TPQ	171.600.000
	Pelatihan Da'i dan Pengamalan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah peserta pelatihan Dai	Setda	25 orang	32.000.000	APBD		30 orang	35.000.000
	Pelatihan Guru MDTA, TPQ, Pondok Qur'an	Jumlah peserta pelatihan	Setda	150 org guru	72.000.000	APBD		160 org guru	75.000.000
	Penunjang Kegiatan Organisasi Keagamaan	Jumlah peserta Birteknologi Keagamaan	Setda	6 mesjid	189.491.900	APBD		150 org	310.000.000
	Pelatihan Guru Didikan Subuh	Jumlah peserta pelatihan guru didikan	Setda	74 guru didikan subuh	53.000.000	APBD		85 guru didikan subuh	55.000.000
	Tablig Akbar	Jumlah peserta tablig akbar	Setda	1000 jamaah	180.000.000	APBD		1300 jamaah	190.000.000
	Lomba Penyelenggaraan Jenazah dan Penerapan Ibadah Bagi Remaja Mesjid	Jumlah peserta lomba	Setda	24 group	31.000.000	APBD		24 group	33.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Monitoring Evaluasi , Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah	Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial	Setda	70 lembaga	12.621.000	APBD		70 lembaga	35.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN KEHUMASAN</b>	<b>Cakupan pelayanan informasi daerah</b>			<b>1.632.533.250</b>				<b>2.291.402.251</b>
	Kegiatan Penunjang Pers dan Kehumasan	Terlaksananya kegiatan jumpa pers	Setda	10 kali pertemuan	119.892.500	APBD		10 kali pertemuan	290.806.972
	Pengumpulan Data Informasi , Kliping dan Penelaah Berita	Data dan kliping	Setda	12 bulan	19.111.050	APBD		12 bulan	25.386.777
	Promosi Melalui Mass Media , Profil dan Dokumentasi Daerah	Promosi dan liputan	Setda	12 bulan	627.092.400	APBD		12 bulan	829.329.699
	Kegiatan Penyebaran Informasi Pemabangunan Daerah melalui Media Cetak	Tersedianya bahan informasi pembangunan daerah	Setda	7 media cetak harian, 19 mingguan	815.444.000	APBD		7 media cetak harian, 19 mingguan	1.078.424.690
	Kegiatan Pers Release	Pers release atau berita tentang kebijakan, program dan kegiatan Pemko Bukittinggi	Setda	12 bulan	50.993.300	APBD		12 bulan	67.454.113
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Jumlah inovasi pelayanan publik</b>			<b>847.156.625</b>				<b>1.071.394.648</b>
	Kegiatan Dialog Interaktif Selamat pagi Walikota	Pertemuan / dialog interaktif Selamat pagi Walikota	Setda	48 kali dialog	45.723.600	APBD		48 kali dialog	60.469.461
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat melalui Media elektronik dan mobil unit	Informasi langsung melalui media	Setda	2 radio, 2 TV nasional	258.410.000	APBD		2 radio, 2 TV nasional	341.747.225
	Kegiatan Pembuatan Majalah Pemko Bukittinggi	Majalah Pemko Bukittinggi	Setda	4 edisi	184.608.100	APBD		4 edisi	244.144.212
	Kegiatan Pemasangan Spanduk , Brosur, Leaflet dan Pamflet	Spanduk dan Baliho	Setda	Spanduk baliho	181.500.000	APBD		Spanduk baliho	240.033.750
	Pembuatan Tabloid Internal Pemko Bukittinggi	Adanya tabloid Pemko Bukittinggi	Setda	12 bulan	176.914.925	APBD		12 bulan	185.000.000

**Tabel 5.21**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 01.01.04	SEKRETARIAT DPRD				19.167.245.850				21.633.970.435
3 01.01.04	NON URUSAN				6.072.426.950				6.679.669.645
3 01.01.04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	Sekr. DPRD	670%	4.491.154.800			6,7	4.940.270.280
3 01.01.04 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai, perangko dan buku cek	Sekr. DPRD	Materai 500 buah,perangko 22 sheet dan buku 20 cek	5.800.000	DAU		Materai 500 buah,perangko 22 sheet dan 20 buku	6.380.000
3 01.01.04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon,air, listrik dan TV kabel	Sekr. DPRD	4 item rekening	315.700.000	DAU		4 item rekening	347.270.000
3 01.01.04 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pembayaran jasa pemeliharaan, perizinan kendaraan operasional	Sekr. DPRD	22 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2	655.930.000	DAU		12 bulan	721.523.000
3 01.01.04 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan kantor dan pembayaran jasa kebersihan kantor	Sekr. DPRD	12 bulan	210.222.200	DAU		12 bulan	231.244.420
3 01.01.04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Sekr. DPRD	46 item	23.511.800	DAU		46 item	25.862.980
3 01.01.04 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Sekr. DPRD	12 bulan	50.039.000	DAU		1 paket	55.042.900
3 01.01.04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Komponen alat listrik dan elektronik	Sekr. DPRD	12 bulan	17.311.800	DAU		1 paket	19.042.980
3 01.01.04 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Sekr. DPRD	1 paket	6.100.000	DAU		1 paket	6.710.000
3 01.01.04 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kebutuhan informasi dari surat kabar & majalah serta bertambahnya pengetahuan tentang peraturan perundang - undangan	Sekr. DPRD	12 bulan	350.000.000	DAU		1 paket	385.000.000
3 01.01.04 01 16	Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD	Terfasilitasinya tamu DPRD	Sekr. DPRD	12 bulan	300.000.000	DAU		1 paket	330.000.000
3 01.01.04 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum pegawai lembur	Sekr. DPRD	12 bulan	20.000.000				22.000.000
3 01.01.04 01 18	Rapat - rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Terlaksananya belanja perjalanan dinas dalam daerah,luar daerah dan luar negeri	Sekr. DPRD	3 item perjalanan dinas	1.850.000.000	DAU		3 item perjalanan dinas	2.035.000.000
3 01.01.04 01 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tersedianya honorarium dan premi asuransi pegawai non PNS	Sekr. DPRD	11 orang	276.440.000	DAU		11 orang	304.084.000
3 01.01.04 01 28	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terpenuhinya kesejahteraan satpam	Sekr. DPRD	6 orang	200.000.000	DAU		6 orang	220.000.000
3 01.01.04 01 31	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Honorarium PPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Sekr. DPRD	12 orang	10.100.000	DAU		12 orang	11.110.000
3 01.01.04 01 52	Pengembangan pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	Jasa perawatan kesehatan anggota DPRD dan keluarga	Sekr. DPRD	100 orang	200.000.000	DAU		100 orang	220.000.000
3 01.01.04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			1.525.145.600	APBD			1.677.660.160

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	01.01.04	02 01	Pengadaan perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	Sekr. DPRD	1 paket	198.795.000	DAU	1 paket	218.674.500
3	01.01.04	02 04	Pengadaan mebeleur	Mebeleur gedung kantor	Sekr. DPRD	5 item pengadaan	202.500.000	DAU	5 item pengadaan	222.750.000
3	01.01.04	02 05	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Sekr. DPRD	1 paket	420.140.000	DAU	1 paket	462.154.000
3	01.01.04	02 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Peralatan rumah jabatan/ dinas	Sekr. DPRD	1 paket	30.000.000	DAU	1 paket	33.000.000
3	01.01.04	02 09	Pengadaan peralatan kantor	Peralatan gedung kantor	Sekr. DPRD	1 paket	121.600.000	DAU	1 paket	133.760.000
3	01.01.04	02 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Sekr. DPRD	1 unit rumah jabatan	72.110.600	DAU	1 paket	79.321.660
3	01.01.04	02 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	Sekr. DPRD	1 unit gedung kantor	210.000.000	DAU	1 paket	231.000.000
3	01.01.04	02 14	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan	Sekr. DPRD	12 bulan	10.000.000	DAU	1 paket	11.000.000
3	01.01.04	02 15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor	Sekr. DPRD	12 bulan	20.000.000	DAU	1 paket	22.000.000
3	01.01.04	02 16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan peralatan rumah tangga	Sekr. DPRD	12 bulan	15.000.000	DAU	1 paket	16.500.000
3	01.01.04	02 17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Sekr. DPRD	12 bulan	25.000.000	DAU	1 paket	27.500.000
3	01.01.04	02 28	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas	Rehabilitasi bangunan rumah jabatan/dinas	Sekr. DPRD	1 paket	200.000.000	DAU	Rehab taman Rumah Dinas	220.000.000
3	01.01.04	06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>25%</b>	<b>56.126.550</b>		<b>25%</b>	<b>61.739.205</b>
3	01.01.04	06 01	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Pelaporan keuangan semesteran	Sekr. DPRD	2 dokumen	1.594.500	DAU	12 bulan	1.753.950
3	01.01.04	06 02	Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD	Rencana kerja dan keuangan SKPD	Sekr. DPRD	1 dokumen	1.956.850	DAU	1 dokumen	2.152.535
3	01.01.04	06 03	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LAKIP SKPD	Sekr. DPRD	12 bulan	1.568.800	DAU	12 bulan	1.725.680
3	01.01.04	06 04	Pengelolaan keuangan SKPD	Penyusunan laporan keuangan bulanan	Sekr. DPRD	12 laporan	51.006.400	DAU	12 laporan	56.107.040
			<b>FUNGSI PENDUKUNG</b>				<b>13.094.818.900</b>			<b>14.954.300.790</b>
3	01.01.04	06	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Prosentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>		<b>10</b>	<b>13.094.818.900</b>		<b>10</b>	<b>14.404.300.790</b>
3	01.01.04	06 02	Penyelenggaraan kegiatan alat - alat kelengkapan dewan	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Sekr. DPRD	10 bulan	6.047.657.400	DAU	12 bulan	6.652.423.140
			Rapat - rapat paripurna istimewa DPRD	Rapat - rapat paripurna istimewa	Sekr. DPRD	6 kali	420.185.500	DAU	6 kali	462.204.050
			Kegiatan reses	Reses ke daerah pemilihan	Sekr. DPRD	3 kali masa sidang	655.754.500	DAU	3 kali	721.329.950
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimtek/ sosialisasi/ pelatihan/ seminar yang diikuti	Sekr. DPRD	8 bimtek/ sosialisasi/ pelatihan/ seminar	3.092.000.000	DAU	26 orang	3.401.200.000
			Publikasi/sosialisasi produk kebijakan & kegiatan DPRD kota Bukittinggi	Publikasi dan sosialisasi	Sekr. DPRD	12 bulan	252.017.000	DAU	12 bulan	277.218.700
			Promosi melalui media massa, profil & dokumentasi kegiatan DPRD	Tersedianya sarana promosi bagi kegiatan dan peraturan daerah yang ditetapkan	Sekr. DPRD	12 bulan	311.950.000	DAU	1 paket	343.145.000
			Penunjang operasional pimpinan DPRD kota Bukittinggi	Pembayaran honorarium sopir, ajudan dan staf TUP	Sekr. DPRD	5 orang	45.039.600	DAU	5 orang	49.543.560
			Penunjang tenaga ahli fraksi/staf ahli	Tenaga ahli fraksi	Sekr. DPRD	7 orang Tenaga Ahli	139.000.000	DAU	7 fraksi	152.900.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan standarisasi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Jasa appraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Sekr. DPRD	1 dokumen	50.000.000	DAU		1 paket	55.000.000
	Penunjang kegiatan kerjasama sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia	Terikutinya kegiatan ADEKSI/ASDEKSI	Sekr. DPRD	3 kali ADEKSI, 3 kali ASDEKSI	1.486.000.000	DAU		1 kali	1.634.600.000
	Penyusunan produk hukum inisiatif DPRD	Produk hukum DPRD	Sekr. DPRD	5 produk hukum	450.214.900				495.236.390
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pakaian dinas anggota DPRD	Sekr. DPRD	100 stel	145.000.000	DAU		100 stel	159.500.000
	<b>Program Peningkatan Kemitraan Legislatif dan Eksekutif</b>	<b>Prosentase rapat - rapat legislatif dan eksekutif</b>			0				<b>250.000.000</b>
	Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan eksekutif dan legislatif	Rapat - rapat legislatif dan eksekutif	Sekr. DPRD		0				250.000.000
	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Prosentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</b>			0				<b>300.000.000</b>
	Pengelolaan pengaduan masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Sekr. DPRD		0				300.000.000

**Tabel 5.22**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
200.02.01	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>				108.803.476.340				80.783.570.000
	<b>NON URUSAN</b>				1.914.659.240				3.233.475.000
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi</b>	Disparpora		1.691.385.240	-	-		1.955.675.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah materai 6000, materai 3000, buku cek, benda pos lainnya terbeli	Disparpora	12 bulan	1.600.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	12 bulan	4.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik)	Disparpora	36 rekening/12 bulan	472.500.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	36 rekening/12 bulan	500.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah kendaraan dinas roda2 roda3, dan roda4 yang terbayar	Disparpora	24 unit	10.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	24 unit	18.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	jumlah kendaraan dinas terpelihara	Disparpora	12 bulan	113.675.000	APBD	Dilakukan setiap	12 bulan	113.675.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jasa cleaning service yang tersedia	Disparpora	3 jenis	65.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	3 jenis	70.000.000
	Penyediaan Alat Tukis kantor	jenis ATK terbeli	Disparpora	38 item	25.000.000	APBD	Dilakukan setiap	38 item	30.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah barang pengadaan, jumlah barang cetakan	Disparpora	12 bulan, 11 item	10.393.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	12 bulan, 11 item	20.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah peralatan listrik terbeli	Disparpora	10 item	3.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	10 item	4.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya	Disparpora	100%	25.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	100%	32.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi yang diikuti	Disparpora	75%	200.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	75%	270.000.000
	Penyediaan Jasa Non PNS	iuran bpjs terbayar, jumlah pegawai non	Disparpora	12 bulan, 30 orang	753.942.240	APBD	Dilakukan setiap	12 bulan, 30 orang	834.000.000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah pejabat pengadaan barang jasa (pphp, ppk, ppjb, ptk) yang dibayar	Disparpora	8 orang	11.275.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	8 orang	60.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang representatif</b>	Disparpora		188.500.000	-	-		1.239.000.000
	Penyediaan Perlengkapan Kantor	jenis perlengkapan kantor yang disediakan	Disparpora	2 jenis	70.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	2 jenis	80.000.000
	Penyediaan Peralatan kantor	jenis peralatan kantor yang disediakan	Disparpora	2 jenis	70.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	2 jenis	84.000.000
	Pengadaan Mebeleur	jumlah mobiler terbeli	Disparpora	3 macam		APBD	Dilakukan setiap tahun	3 macam	125.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas roda2 roda3, roda4 terbeli	Disparpora	2 jenis	-	APBD	Dilakukan setiap tahun	2 jenis	900.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	Disparpora	1 unit gedung	48.500.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	1 unit gedung	50.000.000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>	Disparpora		-				<b>150.000.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang terbeli	Disparpora	133 Orang		APBD	Dilakukan setiap tahun	133 Orang	150.000.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan</b>	Disparpora		<b>34.774.000</b>				<b>38.800.000</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lakip, LKPJ, LPPD yang tersusun tepat waktu	Disparpora	3 dokumen	1.524.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	3 dokumen	1.600.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	Disparpora	2 dokumen	31.500.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	2 dokumen	35.000.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Renja, renja perubahan yang tersusun tepat waktu	Disparpora	2 dokumen	1.750.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	2 dokumen	2.200.000
	<b>URUSAN PILIHAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				<b>29.046.047.100</b>				<b>125.000.000</b>
	<b>Program Pembinaan Kepemudaan</b>	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	Disparpora		<b>1.391.603.750</b>				<b>0</b>
	Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka Tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan paskibra	Disparpora	105 orang	481.527.750	APDB	Dilakukan setiap tahun	105 orang	0
	Pemberian Penghargaan Kepada Pelajar, Atlit, Pemuda dan Pelatih Berprestasi dibidang Pemuda dan Olahraga	Kategori prestasi yang diberikan penghargaan	Disparpora	tingkat nasional	80.000.000	APDB	Dilakukan setiap tahun	tingkat nasional	0
	Penyelenggaraan Upacara Hari-hari Besar Nasional dan Hari Olahraga	Jumlah upacara hari-hari besar nasional hari olahraga yang diselenggarakan	Disparpora	2 upacara	77.800.000	APDB	Dilakukan setiap tahun	2 upacara	0
	Traning Dasar Pembentukan Karakter Untuk remaja	Jumlah remaja yang ikut training	Disparpora	80 orang	56.153.000	APDB	Dilakukan setiap tahun	80 orang	0
	Perlombaan Paskibraka antar sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti perlombaan paskibra	Disparpora	20 sekolah	85.000.000	APDB	Dilakukan setiap tahun	20 sekolah	0
	Fasilitasi Operasional KNPI	Operasional KNPI yang terfasilitasi	Disparpora	12 Bulan	100.000.000	APBD	Dilakukan setiap	12 Bulan	0
	Achievement Motivation Training (AMT) untuk pengurus Osis dan Lembaga Intra Sekolah	Jumlah pelajar yang mengikuti Training	Disparpora	50 Orang	49.123.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	50 Orang	0
	Fasilitasi Kegiatan Marchingband		Disparpora		410.000.000	APBD			
	Pendidikan dan Pelatihan Pemuda Pelopor Pembangunan Kelurahan	jumlah peserta pelatihan	Disparpora	50 Orang	52.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	50 Orang	0
	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>Persentase peningkatan peran serta kepemudaan</b>	Disparpora		<b>52.599.000</b>				<b>0</b>
	Kegiatan Kepemudaan(PPAN,BPAN/JPI,Pemuda Pelopor, PSP3)	Jumlah Kegiatan PPAN,BPAN/JPI serta PSP3	Disparpora	4 kegiatan	52.599.000	APDB	Dilakukan setiap tahun	4 kegiatan	0
	<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>	<b>Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan</b>	Disparpora		<b>65.000.000</b>				<b>0</b>
	Workshop Kepemudaan	Jumlah peserta workshop	Disparpora	40 orang	65.000.000	APBD		40 orang	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pembinaan</b>	Disparpora		<b>1.056.844.350</b>				<b>125.000.000</b>
	Kejurda Cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	Disparpora	5 cabang	100.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	5 cabang	125.000.000
	Fasilitasi kegiatan olahraga masyarakat	senam masal dan jalan santai	Disparpora	2 kegiatan	125.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	2 kegiatan	0
	Pelaksanaan Kegiatan Divabel kota Bukittinggi, Propinsi dan Nasional	Jumlah atlet divabel yang mengikuti kegiatan	Disparpora	3 Cabang	86.917.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	3 Cabang	0
	Invitasi Bola Basket (Walikota Cup)	Jumlah tim yang mengikuti perlombaan	Disparpora	24 tim	69.927.350	APBD	Dilakukan setiap tahun	24 tim	0
	Perlombaan/ Pertandingan Olahraga	Jumlah lomba/pertandingan olahraga dalam rangka PHBN	Disparpora	6 macam lomba/pertandingan olahraga	500.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	6 macam lomba/pertandingan olahraga	0
	Pekan olahraga Pelajar daerah TK Propinsi dan Nasional	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	Disparpora	5 cabang olahraga	175.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	5 cabang olahraga	0
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai</b>	Disparpora		<b>26.480.000.000</b>				<b>0</b>
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang terpelihara	Disparpora	6 lapangan	480.000.000	APDB	Dilakukan setiap tahun	6 lapangan	0
	Pembangunan dan revitalisasi sarana olahraga	jumlah sarana olahraga yang terbangun	Disparpora	2 sarana	26.000.000.000	APDB		2 sarana	0
	<b>URUSAN PILIHAN PARIWISATA</b>				<b>77.842.770.000</b>				<b>77.425.095.000</b>
	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>meningkatnya jumlah wisatawan</b>	Disparpora		<b>7.813.095.000</b>				<b>8.663.095.000</b>
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam Dan Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata yang diikuti	Disparpora	6 Kali	540.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	6 Kali	1.000.000.000
	Pembuatan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata	Jumlah sarana promosi yang dibuat atau diwujudkan	Disparpora	15000000 lembar	300.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	15000000 lembar	500.000.000
	Pendataan Tingkat Kunjungan Wisata	jumlah hotel yang didata	Disparpora	74 Hotel	25.000.000	APBD	Dilakukan setiap tahun	74 Hotel	30.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen IT	Pengelolaan sistem informasi dan manajemen IT	Disparpora	12 bulan	40.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	12 bulan	50.000.000
	Fasilitasi Even event Pariwisata	jumlah event-event pariwisata yang difasilitasi	Disparpora	5 kali	550.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	5 kali	700.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif	jumlah kegiatan ekonomi kreatif yang difasilitasi	Disparpora	5 sub sektor ekraf	1.000.000.000	APBD	Kegiatan Baru	5 sub sektor ekraf	1.200.000.000
	Pembinaan Guide	Jumlah guide yang mengikuti pembinaan	Disparpora	200 orang	150.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	200 orang	175.000.000
	Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian	Jumlah penampilan tim kesenian yang difasilitasi	Disparpora	44 Kali	350.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	44 Kali	400.000.000
	Pembinaan Sadar Wisata	Jumlah peserta sadar wisata	Disparpora	200 orang	150.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	200 orang	200.000.000
	Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata dan fasilitasi sertifikasi hallal	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	Disparpora	20 sertifikat hallal	350.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	20 sertifikat hallal	500.000.000
	Peringatan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Jumlah kegiatan dalam rangka peringatan hari jadi kota Bukittinggi	Disparpora	3 kegiatan	350.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	3 kegiatan	400.000.000
	Pemilihan Duta Wisata kota Bukittinggi	Jumlah peserta yang terpilih sebagai duta wisata	Disparpora	10 pasang	175.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	10 pasang	200.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Festival Multi Etnis	Jumlah etnis yang mengikuti festival	Disparpora	5 etnis	175.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	5 etnis	200.000.000
	Lomba cerdas cermat wisata	Jumlah peserta/group cerdas cermat wisata	Disparpora	50 group	175.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	50 group	175.000.000
	Lomba lintas alam jelajah wisata	Jumlah peserta lomba	Disparpora	200 peserta	463.791.500	APBD	Kegiatan tahunan	200 peserta	463.791.500
	Lomba dalam rangka Hari Cinta Puspa	Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam rangka Hari Cinta Puspa	Disparpora	3 lomba	200.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	3 lomba	200.000.000
	Dukungan terhadap pelaksanaan Tour de Singkarak	Jumlah sub event TDS yang dilaksanakan	Disparpora	1 kali	800.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	1 kali	800.000.000
	Fasilitasi atraksi wisata dan minat khusus	Jumlah atraksi wisata dan minat khusus yang difasilitasi	Disparpora	5 jenis	501.870.000	APBD	Kegiatan tahunan	5 jenis	501.870.000
	Peringatan Hari Bukittinggi Sebagai kota Wisata	Jumlah kegiatan dalam rangka peringatan Bukittinggi sebagai kota wisata	Disparpora	3 Kegiatan	250.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	3 Kegiatan	250.000.000
	Lomba Fotografi wisata Tingkat Propinsi dan Cipta Lagu Pariwisata	Jumlah Peserta	Disparpora	200 Peserta	150.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	200 Peserta	150.000.000
	Pengadaan Baju adat tradisi	jumlah pakaian yang dibeli	Disparpora	1000 orang	600.000.000	APBD	usulsn		
	Ramadhan Fair	jumlah kegiatan selama lebaran	Disparpora	3 kegiatan	267.433.500	APBD	Kegiatan tahunan	3 kegiatan	267.433.500
	Pembuatan Kalender Pemerintah kota Bukittinggi	Jumlah kalender yang dibuat	Disparpora	500 buah	250.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	500 buah	300.000.000
	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>Rata - Rata lama tinggal wisatawan</b>	Disparpora		<b>70.029.675.000</b>				<b>68.762.000.000</b>
	Pengelolaan Jam Gadang	Kawasan Jam Gadang yang dikelola	Disparpora	1 kawasan	800.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	1 kawasan	800.000.000
	Operasional Taman Panorama dan Lobang Japang, Jam gadang dan Medan Nan Balinduang	Jenis lembur yang dibayarkan	Disparpora	3 kategori (hari kerja, libur biasa, libur khusus)	500.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	3 kategori (hari kerja, libur biasa, libur khusus)	500.000.000
	Pengelolaan Taman Panorama Lobang japang	Taman Panorama Lobang Jepang yang dikelola	Disparpora	1 kawasan	2.500.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	1 kawasan	2.500.000.000
	Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata	Kecelakaan pengunjung di objek wisata yang dibayarkan	Disparpora	12 bulan	50.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	12 bulan	50.000.000
	Pembuatan Sarana dan prasarana minat khusus	Pembuatan Sarana Skade Board, Sepatu Roda dan Climbing	Disparpora	3 unit	300.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	3 unit	350.000.000
	Revitalisasi jenjang wisata/jenjang tua/BCB (lanjutan)	jenjang wisata /jenjang tua/BCB yang direvitalisasi	Disparpora	22 jenjang	1.200.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	22 jenjang	1.250.000.000
	Revitalisasi TMS_BK	jumlah sarana yang dibangun	Disparpora	7 kandang	15.000.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	7 kandang	15.000.000.000
	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang	jumlah sarana yang dibangun	Disparpora	1 kawasan	20.000.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	1 kawasan	20.000.000.000
	Pembangunan kantor informasi	jumlah gedung yang bangun	Disparpora	1 Unit	20.000.000.000	APBD	Kegiatan tahunan	1 Unit	20.000.000.000
	Pemeliharaan Rumah Adat Nan Baanjung	Rumah Adat yang terpelihara	Disparpora	1 unit	400.000.000	APBD	dilakukan setiap tahun	1 unit	50.000.000
	Pemeliharaan dan Perawatan Satwa	Jumlah satwa yang terpelihara	Disparpora	133 spesies	2.969.000.000	APBD	dilakukan setiap tahun	133 spesies	3.000.000.000
	Pemeliharaan Kandang Satwa	Jumlah kandang terpelihara	Disparpora	50 Unit	248.875.000	APBD	dilakukan setiap tahun	50 Unit	200.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan TMS-BK	jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Disparpora	10 sarana	1.400.000.000	APBD	dilakukan setiap tahun	10 sarana	1.400.000.000
	Penyediaan Iuran Organisasi/Keanggotaan	Iuran keanggotaan PKBSI	Disparpora	12 bulan	11.000.000	APBD	dilakukan setiap tahun	12 bulan	12.000.000
	Pemeliharaan Museum Zoologi dan Aquarium Ikan	Museum dan Aquarium Ikan yang terpelihara	Disparpora	2 bangunan	45.800.000	APBD	dilakukan setiap tahun	2 bangunan	30.000.000
	Revitalisasi kawasan panorama baru	terbangunnya obyek wisata panorama baru	Disparpora	1 kawasan	2.700.000.000	APBD	dilakukan setiap tahun	1 Kawasan	2.700.000.000
	Operasional dan Pengamanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK)	Jenis lembur yang dibayarkan	Disparpora	3 kategori (hari kerja, libur biasa, libur khusus)	1.680.000.000	APBD	dilakukan setiap tahun	3 kategori (hari kerja, libur biasa, libur khusus)	800.000.000
	Penambahan Koleksi satwa	Jumlah satwa yang bertambah	Disparpora	6 spesies	225.000.000	APBD	dilakukan setiap tahun	6 spesies	120.000.000
	Pengadaan Pohon TMSBK	Pohon Pelindung	Disparpora	250 batang	500.000.000	APBD			

**Tabel 5.23**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
302.01.01	<b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				5.546.931.150				7.230.106.188
	<b>NON URUSAN</b>				868.465.500				1.728.192.594
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		100%	728.539.500			100%	304.300.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	biaya pos lainnya; Buku cek yang terbeli; Jumlah Materai 3000 yang terbeli; Jumlah Materai 6000 yang terbeli	SKPD ()	1 ls;1 ls;100 lembar;200 lembar	2.750.000	APBD		1 ls;1 ls;100 lembar;200 lembar	5.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon terbayar; Jumlah Rekening Listrik terbayar; Jumlah rekening Internet terbayar	SKPD ()	2 rekening;1 rekening;1 rekening	59.600.000	APBD		2 rekening;1 rekening;1 rekening	52.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda dua yang dipelihara; Jumlah Kendaraan empat yang dipelihara	SKPD ()	6 unit;4 unit	148.480.000	APBD		6 unit;4 unit	14.500.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor; Jumlah bahan Kebersihan yang terbeli	SKPD ()	1 paket;6 item	133.796.000	APBD		1 paket;6 item	169.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laptop yang diperbaiki; jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang diperbaiki; Jumlah komputer yang diperbaiki; Jumlah printer yang diperbaiki	SKPD ()	15 unit;1 ls;20 unit;25 unit	15.000.000	APBD		20 unit;1 ls;25 unit;30 unit	16.500.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang terbeli	SKPD ()	34 item	23.553.500	APBD		35 item	24.300.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penggandaan; Terlaksananya	SKPD ()	1 ls;6 item	16.380.000	APBD		1 ls;6 item	17.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terbeli	SKPD ()	15 item	5.000.000	APBD		15 item	5.500.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman lembur yang disediakan; Makanan dan minuman rapat yang disediakan; Makanan dan minuman tamu yang disediakan	SKPD ()	1 ls;1 ls;1 ls	22.000.000	APBD		1 ls;1 ls;1 ls	16.500.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase Rapat / Koordiasi yang dihadiri ; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas keluar daerah dapat diikuti	SKPD ()	100 Persen;12 bulan	233.000.000	APBD		100 Persen;12 bulan	198.000.000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Tenaga Caraka ; Jumlah Tenaga Sopir; Terbayarnya iuran BPJS	SKPD ()	1 orang/bulan;1 orang/bulan;12 bulan	53.480.000	APBD		1 orang/bulan;1 orang/bulan;12 bulan	60.000.000
	Pelaksanaan Proses Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terbayar, PPTK	SKPD ()	12 orang/paket	15.500.000	APBD		12 orang/paket	17.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>90.500.000</b>				<b>102.000.000</b>
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor				47.500.000				52.000.000
	Pengadaan Peralatan Kantor				43.000.000	APBD			50.000.000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi</b>		<b>50%</b>	<b>45.000.000</b>	APBD		<b>40%</b>	<b>85.000.000</b>
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perencanaan dan penelitian		50%	45.000.000	APBD		10 orang	85.000.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang</b>		<b>50%</b>	<b>4.426.000</b>			<b>100%</b>	<b>8.200.000</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP Bapelitbang Tahun 2017	SKPD ()	50%	625.500	APBD		1 dokumen	1.200.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keungan semester I Tahun 2018	SKPD ()	50%	400.000	APBD		8 Buku	800.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	RENJA Bapelitbang tahun 2018 dan Renja Perubahan 2017	SKPD ()	50%	2.650.500	APBD		2 dokumen	5.000.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD ()	50%	750.000	APBD		8 Buku	1.200.000
	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>				<b>4.678.465.650</b>				<b>5.501.913.594</b>
	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		<b>68%</b>	<b>1.622.469.100</b>			<b>100%</b>	<b>1.365.692.594</b>
	Penyusunan Rancangan Dan Penetaan RKPD Kota Bukittinggi	Perwako RKPD kota Bukittinggi Tahun 2018	Kota ()	100%	124.611.000	APBD		4 Triwulan	110.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD	Rumusan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional berdasarkan prioritas pembangunan Kota	Kota ()	100%	223.099.000	APBD		5 Rumusan	165.000.000
	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2018	Perwako Perubahan RKPD kota Bukittinggi Tahun 2018	Kota ()	100%	74.286.500	APBD		1 dokumen	120.000.000
	Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018	Kota ()	100%	106.770.000	APBD		4 Triwulan	180.000.000
	Penyusunan kalender Penyelenggaraan pemerintah	Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2018	Kota ()	100%	3.697.000	APBD		1 dokumen	5.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Kota ()	100%	14.947.300	APBD		4 Triwulan	20.000.000
	Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2018	Laporan movev berkala pengelola DAK	Kota ()	50%	63.843.500	APBD		4 laporan	70.000.000
	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	KUA PPAS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019	Kota ()	100%	276.119.000	APBD		2 dokumen	245.692.594
	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	Kota ()	2 dokumen	270.976.000	APBD		2 dokumen	220.000.000
	Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021	Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021	Kota ()	100%	174.725.000	APBD		1 Dokumen	180.000.000
	Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021				243.723.000	APBD			
	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan RAD PPK	Kota ()		45.671.800	APBD		4 triwulan	50.000.000
	Eksistensi Pembanguna Daerah				-	APBD			-
	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi		<b>100%</b>	<b>556.246.600</b>			<b>100%</b>	<b>605.000.000</b>
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat	Kota ()	100%	99.271.000	APBD		1 Laporan	70.000.000
	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kota ()	100%	216.727.100	APBD		1 dokumen	235.000.000
	Rencana Pengembangan Produk Unggulan daerah	Dokumen Rencan Pengembangan Produk Unggulan Daerah		100%	240.248.500	APBD		1 dokumen	300.000.000
	<b>Program perencanaan sosial budaya OK</b>	<b>Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya</b>			<b>1.000.305.700</b>			<b>100%</b>	<b>1.121.000.000</b>
	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Kota ()	50%	147.448.000	APBD		1 Laporan	165.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitas tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	Laporan kemajuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi	Kota ()	100%	212.510.100	APBD		4 triwulan	255.000.000
	Koordinasi Pengurusutamakan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender serta	Kota ()	100%	72.077.550	APBD		4 triwulan	100.000.000
	Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi	Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kota ()	100%	266.031.100	APBD		1 Dokumen	291.000.000
	Fasilitasi Kota Sehat	Tersedianya Fasilitas untuk Pembinaan Forum Kota Sehat di Bukittinggi	Kota ()	100%	302.238.950	APBD		4 triwulan	310.000.000
	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>	<b>Pemenuhan pengembangan infrastruktur air</b>		<b>33%</b>	<b>378.631.500</b>			100%	<b>497.253.000</b>
	Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	Laporan Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga		85%	271.473.000	APBD		1 Laporan	300.000.000
	Koordinasi Perencanaan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan pelaksanaan kegiatan dan data perumahan dan kawasan pemukiman	Kota ()	80%	61.384.000	APBD		1 laporan	97.253.000
	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Laporan Pelaksanaan koordinasi air minum, drainase, sanitasi dan acara city summit	Kota ()	100%	45.774.500	APBD		1 laporan	100.000.000
	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota</b>			<b>464.374.500</b>				<b>533.221.000</b>
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Laporan kegiatan bidang Infrastruktur	Kota ()	70%	67.837.000	APBD		1 Laporan	74.621.000
	Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	Kota ()	70%	66.000.000	APBD		1 Dokumen	72.600.000
	Koordinasi Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Laporan koordinasi Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Kota ()	100%	32.372.000	APBD		1 Laporan	35.000.000
	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Laporan Koordinasi yang intensif terhadap penataan ruang daerah Kota Bukittinggi tahun 2018	Kota ()	85%	159.500.000	APBD		1 Laporan	200.000.000
	Koordinasi dan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP)	Laporan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP)	Kota ()	85%	86.336.500	APBD		1 Laporan	94.000.000
	Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Irigasi	Kota ()	70%	52.329.000	APBD		1 Laporan	57.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</b>	<b>Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana</b>		75%	179.346.000			75%	299.000.000
	Koordinasi Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Geospasial dan Peta Kawasan Rawan Bencana	Kota ()	75%	179.346.000	APBD		1 Tahun	299.000.000
	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan untuk pengambilan kebijakan pemerintah daerah</b>		65%	288.000.000			100%	883.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Kelitbangan	Kota ()	65%	150.000.000	APBD		5 kl DD, 1 KL LD	80.000.000
	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021	Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2017- 2021	Kota ()	65%	0	APBD		1 Dokumen	66.000.000
	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan	Kota ()	100%	138.000.000	APBD		1 Rekomendasi	140.000.000
	Penelitian Kerjasama Bidang Sosial dan Pemerintahan	Rekomendasi Indeks kepuasan pelayanan di Kota Bukittinggi	Kota ()	100%	-	APBD		2 Rekomendasi	160.000.000
	Kajian Faktor Determinan Kematian Anak dan Bayi di Kota Bukittinggi	1 (satu) Rekomendasi hasil riset bidang kesehatan	Kota ()	65%	-	APBD		1 dokumen	70.000.000
	Kajian Profil Wisatawan Kota Bukittinggi	1 (satu) Rekomendasi hasil kajian bidang pariwisata	Kota ()	65%	-	APBD		1 dokumen	110.000.000
	Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kota Bukittinggi	1 (satu) Rekomendasi hasil kajian bidang Perencanaan dan Penganggaran	Kota ()	65%	-	APBD		1 dokumen	132.000.000
	Kajian Pemetaan Kepemilikan Tanah Di Kota Bukittinggi	1 (satu) Rekomendasi hasil Pemetaan Tanah di Kota Bukittinggi	Kota ()	65%	-	APBD		1 dokumen	125.000.000
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Terpenuhinya Data dan Informasi yang Valid dan Akurat untuk Perencanaan Pembangunan</b>		43%	567.723.750			80%	695.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan tingkat kota		100%	239.008.250	APBD		3 dokumen	250.000.000
	Penyusunan Profil Daerah	Profil Kota Bukittinggi	Kota, SKPD ()	1 Dokumen	-	APBD		0 Dokumen	280.000.000
	Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) dan Forum Data	DATA Base Pembangunan Kota Bukittinggi		1 Dokumen	173.000.000	APBD			
	Penyusunan E Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS	Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS		70%	155.715.500	APBD		1 Aplikasi	165.000.000

**Tabel 5.24**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**BADAN KEUANGAN**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	02.02.02.	<b>BADAN KEUANGAN</b>			15.355.184.747				14.934.461.764
		<b>NON URUSAN</b>			6.752.632.607				6.872.049.507
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100%	6.533.972.607			100%	6.765.045.507
		Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	500 lembar;600 lembar;10 buku;	3.058.000	APBD		500 lembar;600 lembar;12 buku;	3.058.000
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	12 bulan	109.148.619	APBD		12 Bulan	109.148.619
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	SKPD	12 bulan	243.285.400	APBD		12 bulan	243.285.400
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	12 bulan	219.960.000	APBD		12 Bulan	219.960.000
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	12 bulan	4.737.967.000	APBD		12 Bulan	5.000.000.000
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	12 Bulan;	17.998.000	APBD		12 bulan	17.998.000
		Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	85 jenis;	55.000.000	APBD		85 jenis;	40.000.000
		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	SKPD	12 bulan	295.000.000	APBD		12 Bulan	260.000.000
		Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	SKPD	50 buah;35 buah;1 gulung;10 Buah;5 kotak;	10.000.000	APBD		50 buah;35 buah;1 gulung;10 Buah;5 kotak;	10.000.000
		Penyediaan makan minum kantor	SKPD	500 bungkus;500 kotak;500 bungkus;500	70.150.000	APBD		500 bungkus;500 kotak;500 bungkus;500	70.150.000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	SKPD	100%	255.000.000	APBD		100%	300.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa non PNS dan Jaminan kesehatan	SKPD	12 bulan	276.445.488	APBD		12 bulan	276.445.488
	Penyediaan Jasa Pengadaan pengamanan kantor	Jasa pengamanan kantor	SKPD	12 Bulan;	220.000.000	APBD		12 Bulan	200.000.000
	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Pengadaan barang dan jasa pemerintah	SKPD	12 Bulan;	20.960.100	APBD		12 Bulan	15.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>tingkat kelengkapan sarana dan prasarana</b>		<b>100%</b>	<b>102.500.000</b>			<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	SKPD	1 paket	0	APBD		1 paket	20.000.000
	Pengadaan Peralatan Kantor		SKPD	1 paket	2.500.000	APBD		1 paket	20.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	SKPD	1 paket	100.000.000	APBD		1 paket	50.000.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>116.160.000</b>			<b>100%</b>	<b>17.004.000</b>
	Penyusunan Rencana kerja dan keuangan SKPD	renja	SKPD	1 dokumen;	4.500.000	APBD		1 dokumen;	4.000.000
	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya	laporan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya	SKPD	1 dokumen;	107.160.000	APBD		1 dokumen;	9.004.000
	Penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan SKPD	Lakip	SKPD	1 dokumen;	4.500.000	APBD		1 dokumen;	4.000.000
	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>				<b>8.602.552.140</b>				<b>8.062.412.257</b>
	<b>Program peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah</b>	<b>persentase pengelolaan keuangan daerah yang terotimisasi</b>		<b>80%</b>	<b>444.070.000</b>			<b>100%</b>	<b>452.070.000</b>
	Implementasi dan kustomisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (dana pendamping SIPKD)	sistem informasi pengelolaan keuda	SKPD	1 aplikasi	444.070.000			1 aplikasi	452.070.000
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian laporan Keuangan Pemerintah</b>		<b>100%</b>	<b>3.376.587.384</b>			<b>100%</b>	<b>2.874.309.151</b>
	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD	Ranperda APBD	SKPD	1 dokumen;	98.580.000	APBD		1 dokumen;	83.500.000
	asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	asistensi dan rekonsiliasi keuangan	SKPD	29 SKPD;	72.030.000	APBD		29 SKPD;	6.363.000
	Pengelolaan tunjangan daerah dengan sistem profesi	administrasi tunjangan daerah terlaksana	SKPD	12 Bulan;	391.415.000	APBD		12 Bulan;	426.454.000
	Peningkatan akuntansi berbasis akrual	Laporan keuangan sesuai dengan SAP	SKPD	29 OPD	207.500.000	APBD		12 Bulan;	140.000.000
	Asistensi pengesahan DPA dan DPPA	Asistensi pengesahan DPA dan DPPA	SKPD	29 SKPD;	99.978.000	APBD		29 SKPD;	96.915.000
	Penyusunan ranperwako tentang penjabaran APBD	Ranperwako penjabaran perubahan APBD	SKPD	1 dokumen;	293.000.000	APBD		1 dokumen	273.000.000
	Pengelolaan administrasi gaji PNS	pengelolaan administrasi gaji PNS	SKPD	12 Bulan;	103.357.000	APBD		12 bulan	112.897.000
	Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD	Perda pertanggungjawaban SKPD	SKPD	1 dokumen;	310.030.000	APBD		1 dokumen	281.545.000
	Pengelolaan administrasi anggaran daerah	administrasi anggaran terlaksana	SKPD	12 Bulan;	42.608.660	APBD		12 Bulan;	49.353.660
	Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah	Informasi keuangan daerah untuk pihak internal dan external	SKPD	1 dokumen;	60.895.000	APBD		1 dokumen	38.323.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan Ranperwako tentang pergeseran penjabaran APBD	Ranperwako pergeseran APBD	SKPD	1 dokumen;	80.000.000	APBD		1 dokumen;	65.850.000
	Penyusunan perwako tentang Standar Biaya	Perwako Standar Biaya	SKPD	1 dokumen;	71.912.650	APBD		1 dokumen;	72.495.391
	Pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	SKPD	12 Bulan;	137.301.000	APBD		12 Bulan;	137.301.000
	Penyusunan Ranperwako tentang penjabaran perubahan APBD	Ranperwako penjabaran APBD	SKPD	1 dokumen;	293.500.000	APBD		1 dokumen;	273.000.000
	Pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah	tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah	SKPD	3 kasus;	129.625.000	APBD		3 kasus;	75.000.000
	Penyusunan rancangan Perwako tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD	Perwako pertanggungjawaban APBD	SKPD	1 dokumen;	31.905.000	APBD		1 dokumen	21.020.000
	Penyusunan analisa standar belanja	analisa standar belanja	SKPD	1 dokumen;	91.800.000	APBD		1 dokumen	68.960.000
	Penyediaan Data Sinergi dan simpatik	data sinergi dan simpatik	SKPD	1 dokumen;	119.880.000	APBD		1 dokumen;	246.840.000
	Penyusunan ranperda perubahan APBD	Ranperda Perubahan APBD	SKPD	1 dokumen;	85.900.000	APBD		1 dokumen;	83.500.000
	Sosialisasi dan BinteK penyusunan APBD	jumlah peserta sosialisasi dan binteK	SKPD	222 orang;	210.091.000	APBD		jumlah peserta sosialisasi dan binteK 222 orang;	224.193.000
	Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	SKPD	12 Bulan;	31.354.000	APBD		12 Bulan;	34.354.000
	Pegelolaan administrasi pelaporan keuangan daerah	administrasi pelaporan keuda	SKPD	12 Bulan;	24.811.400	APBD		12 Bulan;	26.936.800
	Peningkatan kompetensi aparatur penganggaran		SKPD		352.605.374	APBD			
	Asistensi pengelolaan administrasi hibah dan bansos	administrasi hibah bansos	SKPD	12 bulan	36.508.300	APBD			36.508.300
	<b>Program Peningkatan Penerimaan PAD</b>	<b>Jumlah penerimaan pajak daerah</b>			<b>38.432.000.000</b>	<b>2.728.093.556</b>		<b>34.927 Rupiah (Milyar)</b>	<b>2.434.234.556</b>
	Pendataan ulang objek PBB-P2	dokumen hasil pendataan	SKPD	1 dokumen	383.555.000	APBD		2 dokumen;	383.555.000
	Pengawasan pajak dan retribusi daerah	optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi	SKPD	100%	505.314.056	APBD		0 persen;	469.314.056
	Sosialisasi PBB P2 BPHTB	wajib pajak yang paham terhadap aturan pajak dan melaksanakan kewajibannya	SKPD	250 wajib pajak;	32.840.000	APBD		250 wajib pajak;	32.840.000
	Penyusunan daftar usulan penghapusan data piutang PBB P2 yang kadaluarsa	daftar usulan penghapusan PBB-P2	SKPD	1 dokumen;	3.945.000	APBD		1 dokumen;	32.225.000
	verifikasi dan validasi BPHTB	dokumen hasil penelitian SSPD-BPHTB	SKPD	1 dokumen;	24.840.000	APBD		1 dokumen;	24.840.000
	Pengelolaan administrasi pajak daerah	administrasi pajak daerah	SKPD	12 Bulan;	82.185.000	APBD		12 Bulan;	26.765.000
	Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2	dokumen pendistribusian dan pengembalian penerimaan PBB triwulan	SKPD	1 dokumen;	50.677.500	APBD		1 dokumen;	50.677.500
	Manajemen pengelolaan PBB dan BPHTB	administrasi PBB dan BPHTB	SKPD	12 bulan	193.140.000	APBD		1 dokumen;	199.140.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pencetakan masal SPPT PBB-P2	PBB yang dipungut ke wajib pajak	SKPD	29.200 wajib pajak;	14.800.000	APBD		29.200 wajib pajak;	14.800.000
	Peningkatan dan pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)	aplikasi online wajib pajak	SKPD	1 aplikasi;	94.960.000	APBD		1 aplikasi;	23.185.000
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	optimalisasi penerimaan pajak dari wajib pajak ,penambahan jumlah potensi pajak	SKPD	100%	1.027.140.000	APBD		100%	856.376.000
	Peningkatan penerimaan capaian PBB-P2	peningkatan jumlah wajib pajak	SKPD	100%	44.250.000	APBD		100%	44.250.000
	Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak	dokumen hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak	SKPD	1 dokumen;	69.537.000	APBD		1 dokumen;	69.537.000
	Penyusunan daftar usulan penghapusan data piutang PBB-P2 yang kadaluarsa	daftar usulan PBB P2 yang kadaluarsa	SKPD	1 dokumen	3.945.000	APBD		0 persen;	3.945.000
	Implementasi dan kustomisasi sistem informasi PBB dan BPHTB	laporan bulanan PAD yang akurat	SKPD	12 dokumen;	134.180.000	APBD		12 dokumen;	140.000.000
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi BPHTB	dokumen monitoring evaluasi	SKPD	2 dokumen	4.736.000	APBD		2 dokumen	4.736.000
	Pemutakhiran data piutang Pajak	data piutang pajak yang valid	SKPD	1 dokumen;	38.324.000	APBD		1 dokumen;	38.324.000
	Pemutakhiran data PBB-P2	data PBB yang valid	SKPD	1 dokumen;	19.725.000	APBD		1 dokumen;	19.725.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukitinggi</b>		<b>30%</b>	<b>2.053.801.200</b>			<b>20%</b>	<b>2.301.798.550</b>
	Penghapusan gedung dan tanah	gedung dan tanah yang dihapuskan berdasarkan usulan SKPD	SKPD	6 unit;	21.225.000	APBD		6 unit;	21.225.000
	Pelaksanaan administrasi hibah barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang dihibahkan	SKPD	12 Bulan;	31.269.900	APBD		12 Bulan;	34.454.900
	Penaksiran BMD	sewa aset milik daerah	SKPD	7 dokumen;	52.455.900	APBD		7 dokumen;	32.105.900
	Penyusunan laporan BMD tahunan	Laporan BMD tahunan	SKPD	1 dokumen;	93.882.500	APBD		1 dokumen;	48.606.000
	Pelaksanaan administrasi HGB diatas HPL	HGB diatas HPL	SKPD	60 dokumen;	31.269.900	APBD		60 dokumen;	91.200.000
	Penghapusan barang inventaris selain tanah dan bangunan	barang inventaris selain tanah dan bngunan yang dihapuskan	SKPD	5 unit;	27.435.000	APBD		5 unit;	27.613.900
	Penjualan/lelang barang milik daerah	jml barang milik daerah yang dilelang	SKPD	100%	34.471.000	APBD		100%	34.891.000
	Pengelolaan administrasi aset	pengelolaan administrasi aset	SKPD	12 Bulan;	154.385.000	APBD		12 Bulan;	118.771.000
	Penatausahaan BMD	penyimpan dan pengurus barang SKPD	SKPD	180 orang;	980.285.000	APBD		180 orang;	1.328.817.000
	Pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset	objek-objek pemanfaatan aset yang terdata	SKPD	2 Objek ;	81.950.000	APBD		2 Objek ;	47.580.000
	Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	jumlah aset daera yang diawasi dan dikendalikan	SKPD	100%	44.990.000	APBD		100%	47.046.350
	Penyusunan laporan BMD semesteran	laporan BMD semesteran	SKPD	2 dokumen;	44.858.000	APBD		2 dokumen;	14.163.500
	Pengelolaan SIMDA BMD	aplikasi Simda BMD	SKPD	1 aplikasi	191.064.000	APBD		2 dokumen;	191.064.000
	Sensus BMD	Laporan sensus BMD	SKPD	1 laporan	264.260.000	APBD		2 dokumen;	264.260.000

**Tabel 5.25**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
302.03.01	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				9.510.609.470				17.047.196.802
	<b>NON URUSAN</b>				561.205.940				6.928.573.434
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Tingkat Kesiapan Layanan Administrasi Perkantoran	BKPSDM	100%	507.065.500	APBD		100%	557.772.050
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan buku cek	BKPSDM	250 lembar materai, 8 buku cek dan pengiriman	1.863.000	APBD		250 lembar materai, 8 buku cek dan pengiriman	2.049.300
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik dan telepon yang dibayarkan	BKPSDM	2 rekening telepon, 3 rekening listrik	15.100.000	APBD		2 rekening telepon, 3 rekening listrik	16.610.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	BKPSDM	4 unit kendaraan roda empat 9 unit kendaraan roda dua	95.163.600	APBD		4 unit kendaraan roda empat 9 unit kendaraan roda dua	104.679.960
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	BKPSDM	1 paket	6.000.000	APBD		1 paket	6.600.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	BKPSDM	22 komputer, 7 mesin tik, 1 infokus, 1 handycam, 1 camera digital, 1 organ	5.000.000	APBD		22 komputer, 7 mesin tik, 1 infokus, 1 handycam, 1 camera digital, 1 organ	5.500.000
	Kegiatan Penyediaan Alat-alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	BKPSDM	49 item	13.108.200	APBD		49 item	14.419.020
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BKPSDM	8 item (Amplop kop walikota, sekda,	10.000.000	APBD		8 item	11.000.000
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	BKPSDM	12 item	2.680.700	APBD		12 item	2.948.770
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat, tamu dan lembur kerja pegawai Badan yang disediakan	BKPSDM	12 bulan	9.500.000	APBD		12 bulan	10.450.000
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas keluar kota Bukittinggi yang dilaksanakan	BKPSDM	12 bulan	265.100.000	APBD		12 bulan	291.610.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	(Jumlah) Jasa tenaga petugas di Pusido yang disediakan	BKPSDM	3 orang	80.000.000	APBD		3 orang	88.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan yang disediakan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada BKD	BKPSDM	1 tahun kegiatan pengadaan	3.550.000	APBD		1 tahun kegiatan pengadaan	3.905.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>100%</b>	<b>49.321.000</b>	<b>APBD</b>			<b>6.365.500.000</b>
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional	BKPSDM	1 unit kendaraan roda dua	0	APBD		1 unit kendaraan roda empat dan dua	350.000.000
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan Kantor yang Diadakan	BKPSDM	12 item	44.321.000	APBD		50 item	500.000.000
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis Peralatan Kantor yang Diadakan	BKPSDM	5 item	0	APBD		50 item	500.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dipelihara	BKPSDM	1 unit	0	APBD		1 unit	5.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Genset dan peralatan kerja di Pusido yang dipelihara	BKPSDM	1 paket	5.000.000	APBD		1 paket	10.500.000
	Pembangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Kantor	BKPSDM	1 unit	0	APBD		1 unit	5.000.000.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>% Laporan Capaian Kinerja</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>1</b>	<b>4.819.440</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>5.301.384</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	BKPSDM	3 Dokumen	1.432.100	APBD		3 Dokumen	1.575.310
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan persemester	BKPSDM	2 Laporan	1.087.955	APBD		7 Laporan	1.196.751
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Rencana	BKPSDM	7 Dokumen	2.299.385	APBD		5 Dokumen	2.529.324
	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>				<b>8.949.403.530</b>				<b>10.118.623.368</b>
	<b>URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		<b>BKPSDM</b>		<b>3.849.610.380</b>				<b>4.325.809.693</b>
	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Jumlah Aparatur yang Difasilitasi Mengikuti Pendidikan Kedinasan</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>530 orang</b>	<b>2.970.435.890</b>	<b>APBD</b>		<b>660 orang</b>	<b>3.358.717.754</b>
	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III	ASN yang telah Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Diklat Pim Tk. III	BKPSDM	5 orang, 8 orang	556.184.750	APBD		10 orang	611.803.225
	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	ASN yang telah Mengikuti Diklat, Assesment, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dan Sejenisnya	BKPSDM	350 orang	1.501.868.390	APBD		500 orang	1.652.055.229
	Kegiatan Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV	ASN yang telah Mengikuti Diklat Pim Tk.IV	BKPSDM	30 orang	825.825.600	APBD		150 orang	990.990.720
	Evaluasi Diklat	Laporan Hasil Evaluasi Program Diklat	BKPSDM	2 Diklat	28.841.250	APBD		2 Diklat	34.609.500
	Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi	Calon Taruna STTD yang Lulus Seleksi Administrasi	BKPSDM	4 orang	57.715.900	APBD		10 orang	69.259.080
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>0,8</b>	<b>879.174.490</b>	<b>APBD</b>			<b>967.091.939</b>
	Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS	CPNS Gol. II dan III yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	BKPSDM	29 orang	301.946.190				332.140.809
	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	PNS yang mengikuti Pendidikan D3, D4, S1, S2/Profesi dan S3	BKPSDM	150 orang	526.811.900	APBD		40 orang	579.493.090
	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Melaksanakan Pembekalan Peserta Ujian, Melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	BKPSDM	50 orang	50.416.400				55.458.040
	<b>URUSAN KEPEGAWAIAN</b>				<b>5.099.793.150</b>				<b>5.792.813.675</b>
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>% Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>0,8</b>	<b>1.648.592.555</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>1.813.451.811</b>
	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	Surat Keputusan Jabatan Fungsional Tertentu	BKPSDM	15 orang	56.973.460	APBD		2 periode	62.670.806
	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak lanjut	Rekomendasi untuk ASN yang memenuhi Syarat untuk Menduduki Jabatan Tertentu atau Naik	BKPSDM	5 paket rekomendasi	101.010.750	APBD		12 bulan	111.111.825

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	Rekomendasi untuk ASN yang memenuhi Syarat untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	BKPSDM	3 dokumen	300.255.295	APBD		300 dokumen	330.280.825
	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	Terpetaknya Potensi ASN	BKPSDM	12 bulan	346.849.500	APBD		12 bulan	381.534.450
	Penelusuran Potensi Bakat Minat dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Laporan Hasil Penelusuran Potensi Bakat, Minat dan Kompetensi Kerja ASN	BKPSDM	2 laporan	43.256.550	APBD		10 paket	47.582.205
	Penyusunan Formasi PNS	Usulan Formasi ASN Kota Bukittinggi	BKPSDM	1 dokumen	62.856.600	APBD		100 kartu	69.142.260
	Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS	Usulan CPNS TA 2018	BKPSDM	1 kegiatan	532.321.875	APBD		2 periode	585.554.063
	Pengangkatan/Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Jumlah Pegawai yang Diterima dengan Perjanjian Kerja	BKPSDM	120 orang	108.029.375	APBD		1 Paket	118.832.313
	Pengadaan CPNS dari tenaga honorer K2	Usulan CPNSD TH K2	BKPSDM	1 kegiatan	81.868.625	APBD		12 kali	90.055.488
	Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	Rekomendasi Pindah Masuk ASN ke Pemko Bukittinggi	BKPSDM	100 orang	15.170.525				16.687.578
	<b>Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>608.525.380</b>	<b>APBD</b>		<b>5 kegiatan</b>	<b>669.377.918</b>
	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan	BKPSDM	600 SK	153.531.445			600 SK	168.884.590
	Fasilitasi Pengurusan KPE	Jumlah KPE yang diterbitkan	BKPSDM	100 dokumen	23.995.000			100 dokumen	26.394.500
	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	Frekuensi updating data SIMPEG ()	BKPSDM	12 bulan	109.071.525			12 bulan	119.978.678
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Frekuensi updating data SAPK ()	BKPSDM	12 bulan	156.941.450			12 bulan	172.635.595
	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	Jumlah SK Pensiun yang Diterbitkan	BKPSDM	130 orang	83.929.100	APBD		100 orang	92.322.010
	Pengelolaan Arsip Pegawai	Frekuensi pengelolaan arsip pegawai ()	BKPSDM	12 bulan	81.056.860			12 bulan	89.162.546
	<b>Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Reward</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>1500 orang</b>	<b>2.842.675.215</b>	<b>APBD</b>		<b>2000 orang</b>	<b>3.309.983.947</b>
	Penilaian Pegawai Berprestasi	Jumlah PNS Berprestasi yang diberi Reward	BKPSDM	15 orang	356.674.900	APBD		15 orang	365.000.000
	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Dokumen SLKS yang diserahkan pada ASN	BKPSDM	500 piagam	54.254.500	APBD		300 piagam	59.679.950
	Medical Check Up	Jumlah Pejabat yang Mendapat Jaminan Kesehatan	BKPSDM	3 orang	0	APBD		5 orang	5.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Magang kewirausahaan bagi ASN Gol. I dan II	Jumlah ASN gol. I dan II yang mengikuti pelatihan wirausaha	BKPSDM	35 orang	361.243.000	APBD		35 orang	395.000.000
	Pemberian Pesangon (Uang Lepas) dan Tunjangan Kematian bagi Pekerja Harian	Jumlah Pekerja Harian yang menerima Pesangon (Uang Lepas) dan Tunjangan Kematian	BKPSDM	15 orang	0	APBD		20 orang	215.000.000
	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS	Tunjangan kesejahteraan tenaga honorer dan PNS di lingk. Pemko Bukittinggi	BKPSDM	1000 orang	915.681.000	APBD	* (Pembayaran THR non PNS)	1000 orang	1.000.000.000
	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan Purna Tugas	BKPSDM	70 orang	803.015.200	APBD		80 orang	883.316.720
	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Laporan Pelanggaran Disiplin PNS	BKPSDM	30 laporan	81.638.900		Pokir DPRD Kota Bukittinggi An. M.		89.802.790
	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin	BKPSDM	12 paket rekomendasi	119.134.800				131.048.280
	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan dan Konseling Pranikah	BKPSDM	1 laporan	101.028.125				111.130.938
	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Formulir, Capaian dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Individu pada SKPD	BKPSDM	25 SKPD	50.004.790				55.005.269

**Tabel 5.26**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**INSPEKTORAT**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 02.06.01.	<b>INSPEKTORAT</b>				2.677.814.800				3.188.709.630
3 02.06.01.	<b>NON URUSAN</b>				961.950.000				1.046.991.500
3 02.06.01. 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Percepatan pelaksanaan administrasi</b>	Inspektora t	100%	716.236.000	APBD		1	797.741.500
3 02.06.01. 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Buku Cek, Benda Pos lainnya yang terbeli	Inspektora t	4 paket	1.320.000	APBD		4 paket	1.452.000
3 02.06.01. 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Jumlah Rekening Telp dan Listrik terbayar	Inspektora t	12 bulan	19.800.000	APBD		12 bulan	25.000.000
3 02.06.01. 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang terpelihara	Inspektora t	4 Kendaraan Roda 4, 4 Kendaraan	165.000.000	APBD		4 Kendaraan R	184.426.200
3 02.06.01. 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan, Bahan serta Peralatan	Inspektora t	8 Item	125.000.000	APBD		8 Item	139.501.000
3 02.06.01. 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan yang diperbaiki	Inspektora t	7 Item	8.750.000	APBD		7 Item	15.400.000
3 02.06.01. 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	Inspektora t	55 Item	19.750.000	APBD		55 Item	26.914.000
3 02.06.01. 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Tercetak, Jumlah	Inspektora t	5 Item, 19. 900 Lembar, 24	8.500.000	APBD		5 Item, 19. 900	12.171.800
3 02.06.01. 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik,	Inspektora t	12 item	2.250.000	APBD		12 item	3.022.500
3 02.06.01. 01 13	Penilaian angka kredit	Jumlah Dupak Yang Dinilai	Inspektora t	54 Dupak	14.866.000	APBD		54 Dupak	19.354.000
3 02.06.01. 01 14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum Lembur, Rapat,	Inspektora t	12 Bulan	22.500.000	APBD		12 Bulan	25.000.000
3 02.06.01. 01 15	Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan	Persentase Rapat Koordinasi, Konsultasi,	Inspektora t	0,75	325.000.000	APBD		1	340.000.000
3 02.06.01. 01 16	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah pembayaran honor PPK, PPHP, dan	Inspektora t	5 Orang	3.500.000	APBD		5 Orang	5.500.000
3 02.06.01. 02	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja</b>	<b>Inspektora t</b>	<b>100%</b>	<b>209.100.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1</b>	<b>208.100.000</b>
3 02.06.01. 02 05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Inspektora t		25.000.000	APBD			27.500.000
	Pengadaan Peralatan Kantor		Inspektora t	13 unit	98.100.000	APBD	jumlah peralatan	13 unit	106.000.000
3 02.06.01. 02 07	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang terbeli	Inspektora t	3 paket	40.000.000	APBD	Jumlah mebeleur	3 paket	25.000.000
3 02.06.01. 02 09	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		Inspektora t	1 gedung kantor	35.000.000	APBD	Perbaikan / Penggantian	1 gedung kanto	37.500.000
3 02.06.01. 02 10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Penggantian bagian mebeleur yang rusak	Inspektora t	1 ls	11.000.000	APBD	Jumlah mebeleur	1 ls	12.100.000
3 02.06.01. 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terselenggaranya keseragaman pakaian dinas</b>	<b>Inspektora t</b>	<b>100%</b>	<b>32.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1</b>	<b>35.750.000</b>
3 02.06.01. 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Aparatur Inspektorat	Inspektora t	50 orang	32.500.000	APBD	Tersedianya pakaian dinas	45 orang	35.750.000
3 02.06.01. 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terukurnya kinerja Inspektorat</b>	<b>Inspektora t</b>	<b>100%</b>	<b>4.114.000</b>	<b>APBD</b>		<b>1</b>	<b>5.400.000</b>
3 02.06.01. 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lakip, LPPD, LKPJ Inspektorat	Inspektorat	3 Dokumen	1.477.000	APBD		3 Dokumen	1.650.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
3	02.06.01.06	03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	Inspektorat	2 Dokumen	551.000	APBD		2 Dokumen	1.500.000
3	02.06.01.06	05	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen renja, dan keuangan yang tersusun	Inspektorat	7 Dokumen	2.086.000	APBD		7 Dokumen	2.250.000
3	02.06.01.		<b>FUNGSI PENUNJANG</b>				<b>1.715.864.800</b>				<b>2.141.718.130</b>
3	02.06.01.	15	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Berkurangnya tingkat penyimpangan aparatur pemerintah</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>1</b>	<b>1.195.878.300</b>	<b>APBD</b>		<b>1</b>	<b>1.387.095.630</b>
3	02.06.01.	15	03 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	laporan hasil pemeriksaan reguler	Inspektorat	84 LHP	453.475.000	APBD		129 LHP	610.357.000
3	02.06.01.	15	04 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus	Jumlah LHP kasus/pengaduan di Lingkungan Pemko	Inspektorat	30 LHP khusus / kasus	105.180.000	APBD		40 LHP khusus	131.467.000
3	02.06.01.	15	05 Reviu Laporan Keuangan Pemko	Jumlah laporan reviu atas LKPD	Inspektorat	1 laporan	23.416.500	APBD		1 laporan	25.778.830
3	02.06.01.	15	06 Monitoring Kegiatan lainnya	Jumlah objek yang dimonitoring	Inspektorat	8 Objek	6.450.000	APBD		8 Objek	10.276.200
3	02.06.01.	15	07 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat	4 laporan	97.069.800	APBD	penggabungan 4 kegiatan,	4 laporan	86.250.000
3	02.06.01.	15	08 Gelar Pengawasan	Jumlah SOPD menindak lanjuti hasil pemeriksaan dalam gelar	Inspektorat	28 SOPD	15.083.000	APBD		28 SOPD	25.000.000
3	02.06.01.	15	09 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	Data hasil pemeriksaan antar lembaga pengawasan	Inspektorat	5 Dokumen	48.695.500	APBD		5 Dokumen	
3	02.06.01.	15	10 Evaluasi LAKIP	Jumlah lapran hasil evaluasi Lakip, LKIP SOPD	Inspektorat	25 laporan	26.869.000	APBD		25 laporan	47.075.000
3	02.06.01.	15	11 Reviu LKIP	Laporan reviu LKIP Pemko	Inspektorat	1 laporan	28.250.000	APBD		1 laporan	30.000.000
3	02.06.01.	15	12 Reviu Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan reviu Perencanaan dan Penganggaran	Inspektorat	8 LHR	110.000.000	APBD		8 LHR	168.000.000
3	02.06.01.	15	13 Pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah SOPD dalam pembinaan SPIP	Inspektorat	7 SOPD	25.143.500	APBD		7 SOPD	60.000.000
3	02.06.01.	15	14 Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah wajib LHKPN dan LHKASN	Inspektorat	1200 laporan	56.246.000	APBD		1200 laporan	61.870.600
3	02.06.01.	15	15 ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Jumlah SOPD yang dijadikan pilot project	Inspektorat	2 SOPD	125.000.000	APBD		2 SOPD	53.521.000
3	02.06.01.	15	16 Unit Pengendali Gratifikasi	- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tugas UPG.	Inspektorat	100 orang 1 laporan	75.000.000	APBD		100 orang 1	77.500.000
3	02.06.01.	17	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur</b>	<b>Tersedianya SDM yang profesional di bidang pengawasan</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>1</b>	<b>519.986.500</b>	<b>APBD</b>		<b>1</b>	<b>754.622.500</b>
3	02.06.01.	17	04 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Kinerja	Jumlah ASN yang terkirim mengikuti pelatihan teknis	Inspektorat	35 orang	334.500.000	APBD		35 orang	403.707.500
3	02.06.01.	17	06 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah ASN yang terkirim untuk pelatihan pengembangan aparatur	Inspektorat	6 orang	151.040.000	APBD		6 orang	255.915.000
3	02.06.01.	17	03 Pelatihan Kantor Mandiri	Jumlah ASN mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri	Inspektorat	45 orang	17.164.000	APBD		45 orang	40.000.000
3	02.06.01.	19	01 Peningkatan kapabilitas dan Profesional APIP	Jumlah APIP dalam Peningkatan Kapabilitas	Inspektorat	45 orang	17.282.500			45 orang	55.000.000

**Tabel 5.27**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN**  
**KOTA BUKITINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
303.01.01	<b>KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>				8.347.356.724				8.914.397.150
	<b>NON URUSAN</b>				2.824.375.224				2.706.754.200
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>		100%	1.357.004.724			100%	1.425.292.400
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 6.000, materai 3.000, materai teraan, buku cek	Kec. MKS	100 buah, 203 buah, 1 ls, 1 ls	1.909.000	APBD		100 buah, 203 buah, 1 ls, 1 ls	2.200.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, rekening listrik	Kec. MKS	2 rekening/ 12 bulan	29.250.000	APBD		2 rekening/ 12 bulan	32.210.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4; Jumlah kendaraan dinas roda 2	Kec. MKS	2 unit, 6 unit/ 12 bulan	86.500.000	APBD		2 unit, 6 unit/ 12 bulan	96.433.400
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec. MKS	34 item	23.750.000	APBD		34 item	23.722.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. MKS	35 unit/ 12 bulan	40.000.000	APBD		35 unit/ 12 bulan	14.300.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor	Kec. MKS	48 item	41.208.900	APBD		48 item	41.207.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Kec. MKS	9 item	28.050.000	APBD		9 item	21.160.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat-alat listrik	Kec. MKS	8 item	5.920.000	APBD		8 item	3.375.300
	Penyediaan Makanan dan Minuman	nasi; minum; snack	Kec. MKS	1250 porsi;1250 porsi;1000	64.000.000	APBD		1250 porsi;1250 porsi;1000	60.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kec. MKS	12 bulan	250.000.000	APBD		12 bulan	300.000.000
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	pegawai non pns	Kec. MKS	3 orang/ 12 bulan	75.574.224	APBD		3 orang/ 12 bulan	95.793.000
	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Dokumentasi, publikasi dan spanduk	Kec. MKS	12 bulan	28.445.000	APBD		12 bulan	29.392.900
	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	jumlah paket pekerjaan	Kec. MKS	1 tahun	9.523.000	APBD		1 tahun	13.497.400
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan koto selayan	kebutuhan operasional kelurahan	Koto Selayan ()	1 kelurahan, 12 bulan	57.930.500	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	60.000.000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago ipuh	kebutuhan operasional kelurahan	campago ipuh ()	1 kelurahan, 12 bulan	93.374.300	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	95.000.000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan manggis ganting	kebutuhan operasional kelurahan	Manggis Ganting ()	1 kelurahan, 12 bulan	74.319.700	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	76.000.000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pulai anak air	kebutuhan operasional kelurahan	Pulai Anak Air ()	1 kelurahan, 12 bulan	61.246.200	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	72.000.000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pahun pintu kabun	kebutuhan operasional kelurahan	Pahun Pintu Kabun ()	1 kelurahan, 12 bulan	77.200.000	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	78.000.000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pahun tembok	kebutuhan operasional kelurahan	Pahun Tembok ()	1 kelurahan, 12 bulan	104.655.900	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	105.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan kubu gulai bancah	kebutuhan operasional kelurahan	Kubu Gulai Bancah ()	1 kelurahan, 12 bulan	63.355.300	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	64.000.000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago guguk bulek	kebutuhan operasional kelurahan	Campago Guguk Bulek ()	1 kelurahan, 12 bulan	69.258.500	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	70.000.000
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan garegeh	kebutuhan operasional kelurahan	Garegeh ()	1 kelurahan, 12 bulan	71.534.200	APBD		1 kelurahan, 12 bulan	72.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>1.443.500.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.190.889.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 2;	Kec. MKS	0 unit;0 unit;1 unit	0	APBD		6 unit	360.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kecamatan (perlengkapan paten kecamatan)	perlengkapan paten terbeli	Kec. MKS	.... Item	120.000.000	APBD	Pokir Ir. AISYAH	18 item	293.589.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan	Peralatan dan perlengkapan kerja kantor lurah terbeli	Kec. MKS	9 kelurahan	0	APBD		9 kelurahan	327.300.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	rumah dinas yang dipelihara	Kec. MKS	1 unit/ 12 bulan	30.000.000	APBD		1 unit/ 12 bulan	10.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang dipelihara	Kec. MKS	1 unit/ 12 bulan	151.000.000	APBD		1 unit/ 12 bulan	200.000.000
	Pembuatan tempat parkir kantor camat MKS	tempat parkir yang tersedia	Kec. MKS	1 unit	0	APBD		1 unit	0
	Pembuatan Taman Kantor Kecamatan MKS	taman kantor terbuat	Kec. MKS	1 paket	0	APBD		1 paket	0
	Peningkatan pembangunan kantor camat MKS (Pembangunan Hall serbaguna Kantor Camat MKS, Pembangunan ruang pelayanan kantor camat MKS)	hall serbaguna dan ruangan pelayanan terbangun	Kec. MKS	1 unit	0	APBD	Musrenbang Kecamatan 2017	1 unit	0
	Peningkatan pembangunan kantor camat MKS (Pembangunan Hall serbaguna Kantor Camat MKS, Pembangunan ruang pelayanan kantor camat MKS)		Kec. MKS		800.000.000		Musrenbang Kecamatan 2017		
	Pembuatan tempat parkir kantor camat MKS		Kec. MKS		65.000.000				
	Pembuatan Taman Kantor Kecamatan MKS		Kec. MKS		80.000.000				
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan puhun tembok (lemari arsip, lanjutan rehab lantai 2 kantor lurah (plaster dan keramik) dan pemasangan terali lantai dua, pembuatan sumur		Kelurahan		129.500.000				
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pulai anak air		Kelurahan Pulai Anak Air		68.000.000				
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat kedisiplinan aparatur dalam</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>			<b>100%</b>	<b>65.000.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	pakaian dinas	Kec. MKS	118 orang	0	APBD		121 orang	65.000.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan</b>		<b>100%</b>	<b>23.870.500</b>			<b>100%</b>	<b>25.572.800</b>
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	Kec. MKS	2 dokumen	3.009.000	APBD		2 dokumen	3.461.500
	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Dokumen Renja, Renja-P, RKA, DPA, DPPA	Kec. MKS	5 dokumen	5.200.500	APBD		5 dokumen	6.176.500
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKIP, LPPD, LKPJ	Kec. MKS	3 dokumen	15.661.000	APBD		3 dokumen	15.934.800
	<b>KEWILAYAHAN</b>				<b>5.522.981.500</b>				<b>6.207.642.950</b>
	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja Lembaga</b>		<b>90%</b>	<b>1.106.903.400</b>			<b>90%</b>	<b>1.120.082.500</b>
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan tingkat kecamatan	karang taruna, pembekalan LPM, RT/RW, penunjang operasional DPC-LPM	Kec. MKS	3 kegiatan/ 12 bulan	89.131.900	APBD		3 kegiatan/ 12 bulan	94.853.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan koto selayan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Koto Selayan	4 kegiatan/ 12 bulan	66.868.000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	66.984.000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago ipuh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Campago Ipuh	4 kegiatan/ 12 bulan	140.925.000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	141.025.000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan manggis ganting	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Manggis Ganting	4 kegiatan/ 12 bulan	89.126.000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	89.226.000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pulai anak air	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	kelurahan pulai anak air	4 kegiatan/ 12 bulan	102.246.000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	108.619.000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pahun pintu kabun	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Pahun Pintu Kabun	4 kegiatan/ 12 bulan	108.164.000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	108.266.000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pahun tembok	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Pahun Tembok	4 kegiatan/ 12 bulan	131.547.500	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	131.874.000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu gulai bancah	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	4 kegiatan/ 12 bulan	118.853.000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	118.965.000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago guguk bulek	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Campago Guguk	4 kegiatan/ 12 bulan	192.928.000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	193.044.000
	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan garegeh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	kelurahan garegeh	4 kegiatan/ 12 bulan	67.114.000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	67.226.000
	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Persentase keberdayaan masyarakat dalam</b>		<b>85%</b>	<b>1.811.368.600</b>			<b>85%</b>	<b>1.877.315.800</b>
	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	laporan monitoring	MANDIANGIN KOTO	9 kelurahan/ 12 bulan	80.000.000	APBD		9 kelurahan/ 12 bulan	82.500.000
	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kecamatan	FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit	Kecamatan Mandiangi	4 kegiatan/ 12 bulan	65.664.400	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	102.304.000
	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kelurahan koto selayan	kebutuhan operasional FKPM tersedia	Kelurahan Koto Selayan	12 bulan	15.000.000	APBD	Musrenbang Kecamatan	12 bulan	15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kelurahan campago ipuh	kebutuhan operasional FKPM tersedia	Kelurahan Campago Ipuh	12 bulan	15.000.000	APBD	Musrenbang Kecamatan	12 bulan	15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kelurahan manggis ganting	kebutuhan operasional FKPM tersedia	Kelurahan Manggis Ganting	12 bulan	15.000.000	APBD	Musrenbang Kecamatan 2017	12 bulan	15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kelurahan pulai anak air	kebutuhan operasional FKPM tersedia	Kelurahan Pulai Anak Air	12 bulan	15.000.000	APBD	Musrenbang Kecamatan 2017	12 bulan	15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kelurahan pahun pintu kabun	kebutuhan operasional FKPM tersedia	Kelurahan Pahun Pintu Kabun	12 bulan	15.000.000	APBD	Hasil Musrenbang Tk. Kecamatan	12 bulan	15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kelurahan pahun tembok	kebutuhan operasional FKPM tersedia	Kelurahan Pahun Tembok	12 bulan	17.632.400	APBD	Hasil Musrenbang Tk. Kecamatan	12 bulan	15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kelurahan kubu gulai bancah	kebutuhan operasional FKPM tersedia	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	12 bulan	29.100.000	APBD	Musrenbang Kecamatan 2017	12 bulan	15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kelurahan campago guguk bulek	kebutuhan operasional FKPM tersedia	Kelurahan Campago Guguk Bulek	12 bulan	15.000.000	APBD	Musrenbang Kecamatan 2017	12 bulan	15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas kelurahan garegeh	kebutuhan operasional FKPM tersedia	kelurahan garegeh	12 bulan	15.000.000	APBD	Musrenbang Kecamatan 2017	12 bulan	15.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan koto selayan	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan	Koto Selayan ()	4 kegiatan/ 12 bulan	109.869.600	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	109.869.600
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan campago ipuh	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan	campago ipuh ()	4 kegiatan/ 12 bulan	169.218.000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	169.218.000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan manggis ganting	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan	Manggis Ganting ()	4 kegiatan/ 12 bulan	131.653.500	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	131.653.500
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan pulai anak air	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan	Pulai Anak Air ()	4 kegiatan/ 12 bulan	133.852.900	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	133.852.900
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan puhun pintu kabun	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan	Puhun Pintu Kabun ()	4 kegiatan/ 12 bulan	157.472.900	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	157.472.900
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan puhun tembok	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan	Puhun Tembok ()	4 kegiatan/ 12 bulan	144.576.500	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	144.576.500
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan kubu gulai bancah	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan	Kubu Gulai Bancah ()	4 kegiatan/ 12 bulan	149.153.500	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	149.153.500
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan campago guguk bulek	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan	Campago Guguk Bulek ()	4 kegiatan/ 12 bulan	142.712.500	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	142.712.500
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan garegeh	jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan	Garegeh ()	4 kegiatan/ 12 bulan	103.403.900	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	103.403.900
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	jenis kegiatan 10 program PKK kecamatan	Kec. MKS	5 kegiatan/ 12 bulan	203.121.000	APBD		5 kegiatan/ 12 bulan	214.075.500
	Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan se-kecamatan	data profil kependudukan, gambaran demografis, gambaran geografis, perkembangan wilayah	Kec. MKS	1 dokumen	27.457.000	APBD		1 dokumen	27.457.000
	Monitoring dan evaluasi Updating profil kelurahan koto selayan	data profil kependudukan	Koto Selayan ()	80 form isian/KK	0	APBD		50 form isian/KK	5.576.000
	Monitoring dan evaluasi Updating profil kelurahan Campago ipuh	data profil kependudukan	Campago Ipuh ()	241 form isian/KK	12.000.000	APBD		167 form isian/KK	11.350.000
	Monitoring dan evaluasi Updating profil kelurahan Manggis Ganting	data profil kependudukan	Manggis Ganting ()	106 form isian/ KK	0	APBD		75 form isian/ KK	7.450.000
	Monitoring dan evaluasi Updating profil kelurahan Pulai Anak Air	data profil kependudukan	Pulai Anak Air ()	124 form isian/KK	9.500.000	APBD		97 form isian/KK	8.640.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Monitoring dan evaluasi Updating profil kelurahan Puhun Pintu Kabun	data profil kependudukan	Puhun Pintu Kabun ()	134 form isian/ KK	9.750.000	APBD		98 form isian/ KK	8.650.000
	Monitoring dan evaluasi Updating profil kelurahan Puhun Tembok	data profil kependudukan	Puhun Tembok ()	148 form isian/ KK	10.230.500	APBD		91 form isian/ KK	8.200.000
	Monitoring dan evaluasi Updating profil kelurahan Kubu Gulai Bancah	data profil kependudukan	Kubu Gulai Bancah ()	102 form isian/ KK	0	APBD		75 form isian/ KK	7.450.000
	Monitoring dan evaluasi Updating profil kelurahan Guguk Bulek	data profil kependudukan	Campago Guguk Bulek ()	178 form isian/ KK	0	APBD		102 form isian/ KK	9.300.000
	Monitoring dan evaluasi Updating profil kelurahan Garegeh	data profil kependudukan	Garegeh ()	91 form isian/ KK	0	APBD		75 form isian/ KK	7.450.000
	<b>Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat</b>		<b>6%</b>	<b>74.821.000</b>			<b>6%</b>	<b>81.726.500</b>
	Monev UEM-SP dan dana bergulir	laporan monitoring	Kec. MKS	19 kelompok usaha	18.244.000	APBD		19 kelompok usaha	21.726.500
	Pendataan/ updating UMKM	data UMKM	Kec. MKS	1 dokumen	56.577.000	APBD		1 dokumen	60.000.000
	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>		<b>90%</b>	<b>2.529.888.500</b>			<b>90%</b>	<b>3.128.518.150</b>
	Musrenbang Kelurahan Koto Selayan	usulan rencana pembangunan	Koto Selayan ()	11 usulan/kelurahan	9.245.000	APBD		11 usulan/kelurahan	12.000.000
	Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh	usulan rencana pembangunan	Campago Ipuh ()	11 usulan/kelurahan	9.570.000	APBD		11 usulan/kelurahan	12.000.000
	Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting	usulan rencana pembangunan	Manggis Ganting ()	11 usulan/kelurahan	9.280.000	APBD		11 usulan/kelurahan	12.000.000
	Musrenbang Kelurahan Pulau Anak Air	usulan rencana pembangunan	Pulau Anak Air ()	11 usulan/kelurahan	9.270.000	APBD		11 usulan/kelurahan	12.000.000
	Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun	usulan rencana pembangunan	Puhun Pintu Kabun ()	11 usulan/kelurahan	8.500.000	APBD		11 usulan/kelurahan	12.000.000
	Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok	usulan rencana pembangunan	Puhun Tembok ()	11 usulan/kelurahan	11.139.500	APBD		11 usulan/kelurahan	12.000.000
	Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah	usulan rencana pembangunan	Kubu Gulai Bancah ()	11 usulan/kelurahan	9.520.000	APBD		11 usulan/kelurahan	12.000.000
	Musrenbang Kelurahan Campago Guguk Bulek	usulan rencana pembangunan	Campago Guguk Bulek ()	11 usulan/kelurahan	9.110.000	APBD		11 usulan/kelurahan	12.000.000
	Musrenbang Kelurahan Garegeh	usulan rencana pembangunan	Garegeh ()	11 usulan/kelurahan	9.210.000	APBD		11 usulan/kelurahan	12.000.000
	Musrenbang Kecamatan MKS	usulan dan partisipasi masyarakat	Kecamatan Mandiangin Koto	9 kelurahan	17.226.800	APBD		9 kelurahan	18.088.200
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan MKS	laporan monitoring pelaksanaan manunggal	Kec. MKS	9 kelurahan/ 30 dokumen	31.290.000	APBD		9 kelurahan/ 30 dokumen	36.322.000
	Manunggal Sakato Kel. Koto Selayan	Jenis kegiatan pembangunan	Koto Selayan ()	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	72.737.500	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	76.374.400
	Manunggal Sakato Kel. Campago Ipuh	Jenis kegiatan pembangunan	Campago Ipuh ()	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	72.155.600	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	75.763.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Manunggal Sakato Kel. Manggis Ganting	Jenis kegiatan pembangunan	Manggis Ganting ()	1 proyek pokok, 2 proyek	70.626.000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek	74.172.300
	Manunggal Sakato Kel. Pulau Anak air	Jenis kegiatan pembangunan	Pulau Anak Air ()	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	71.634.500	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	75.216.300
	Manunggal Sakato Kel Puhun Pintu Kabun	Jenis kegiatan pembangunan	Puhun Pintu Kabun ()	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	70.840.000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	74.382.000
	Manunggal Sakato Kel Puhun Tembok	Jenis kegiatan pembangunan	Puhun Tembok ()	1 proyek pokok, 2 proyek	72.496.000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek	76.241.600
	Manunggal Sakato Kel Kubu Gulai Bancah	Jenis kegiatan pembangunan	Kubu Gulai Bancah ()	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	67.397.000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	70.766.900
	Manunggal Sakato Kel. Campago Guguk Bulek	Jenis kegiatan pembangunan	Campago Guguk Bulek ()	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	71.852.000	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	75.444.600
	Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh	Jenis kegiatan pembangunan	Garegeh ()	1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	64.321.500	APBD		1 proyek pokok, 2 proyek tambahan	76.374.450
	Penilaian dan pembinaan Kelurahan berprestasi	kelurahan yang ikut lomba, pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota	Kec. MKS	2 kegiatan	50.000.000	APBD		2 kegiatan	71.452.000
	koordinasi dan fasilitasi kecamatan sehat	fasilitasi kecamatan sehat, fasilitasi uks, dan pembinaan pokja kelurahan sehat	Kec. MKS	12 bulan	154.461.700	APBD		12 bulan	160.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Koto selayan	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	Koto Selayan ()	2 tim, 12 bulan	30.000.000	APBD		2 tim, 12 bulan	30.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Campago lpuh	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	Campago lpuh ()	2 tim	30.000.000	APBD		2 tim	30.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Manggis ganting	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	Manggis Ganting ()	2 tim, 12 bulan	30.000.000	APBD		2 tim, 12 bulan	30.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Pulau anak air	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	Pulau Anak Air ()	2 tim, 12 bulan	30.000.000	APBD		2 tim, 12 bulan	30.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Puhun pintu kabun	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	Puhun Pintu Kabun ()	2 tim, 12 bulan	30.000.000	APBD		2 tim, 12 bulan	30.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Puhun tembok	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	Puhun Tembok ()	2 tim, 12 bulan	30.401.500	APBD		2 tim, 12 bulan	30.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Kubu gulai bancah	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	Kubu Gulai Bancah ()	2 tim, 12 bulan	20.092.600	APBD		2 tim, 12 bulan	30.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Campago guguk bulek	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	Campago Guguk Bulek ()	2 tim, 12 bulan	30.000.000	APBD		2 tim, 12 bulan	30.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Garegeh	tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota	Garegeh ()	2 tim, 12 bulan	34.753.200	APBD		2 tim, 12 bulan	30.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat tingkat kecamatan	tim olahraga (bolakaki, voli) kecamatan	Kec. MKS	3 tim	110.000.000	APBD		3 tim	230.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Gelar Perayaan HUT RI dan Hari Jadi Kota Bukittinggi di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kec. MKS	5 kegiatan	0	APBD		5 kegiatan	33.075.000
	Gelar Perayaan HUT RI dan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kel. Koto Selayan	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	Koto Selayan ()	2 kegiatan	0	APBD		2 kegiatan	26.565.000
	Gelar Perayaan HUT RI dan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kel. Campago Ipuh	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	Campago Ipuh ()	2 kegiatan	0	APBD		2 kegiatan	26.565.000
	Gelar Perayaan HUT RI dan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kel. Manggis Ganting	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	Manggis Ganting ()	2 kegiatan	0	APBD		2 kegiatan	26.565.000
	Gelar Perayaan HUT RI dan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kel. Pulau Anak Air	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	Pulai Anak Air ()	2 kegiatan	0	APBD		2 kegiatan	26.565.000
	Gelar Perayaan HUT RI dan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kel. Puhun Pintu Kabun	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	Puhun Pintu Kabun ()	2 kegiatan	0	APBD		2 kegiatan	26.565.000
	Gelar Perayaan HUT RI dan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kel. Puhun Tembok	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	Puhun Tembok ()	2 kegiatan	0	APBD		2 kegiatan	26.565.000
	Gelar Perayaan HUT RI dan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kel. Kubu Gulai Banchah	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	Kubu Gulai Banchah ()	2 kegiatan	0	APBD		2 kegiatan	26.565.000
	Gelar Perayaan HUT RI dan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kel. Campago Guguk Bulek	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	Campago Guguk Bulek ()	2 kegiatan	0	APBD		2 kegiatan	26.565.000
	Gelar Perayaan HUT RI dan Hari Jadi Kota Bukittinggi Kel. Garegeh	Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba	Garegeh ()	2 kegiatan	0	APBD		2 kegiatan	26.565.000
	Pengawasan Pelaksanaan IMB dan Pelaksanan Retribusi Sampah	Monitoring kelapangan	Kec. MKS	9 kelurahan/ 12 bulan	13.756.000	APBD		9 kelurahan/ 12 bulan	13.850.000
	Training Center (TC) dan pengiriman khafilah kecamatan untuk mengikuti MTQ kota	khafilah terkirim	Kec. MKS	80 orang	106.238.000	APBD		80 orang	0
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda kecamatan	peserta lomba didikan subuh	Kec. MKS	60 orang/kelurahan	54.456.650	APBD		60 orang/kelurahan	59.724.000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Koto Selayan	pembinaan generasi muda	Koto Selayan ()	120 orang/ 3 kali	15.192.000	APBD		120 orang/ 3 kali	15.750.000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Ipuh	Jenis Kegiatan yang diselenggarakan	Campago Ipuh ()	2 jenis	15.026.600	APBD		2 jenis	15.750.000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Manggis Ganting	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	Manggis Ganting ()	2 jenis	14.712.900	APBD		2 jenis	15.750.000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pulau Anak Air	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	Pulai Anak Air ()	2 jenis	15.250.000	APBD		2 jenis	15.750.000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	Puhun Pintu Kabun ()	2 jenis	13.750.000	APBD		2 jenis	15.750.000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Tembok	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	Puhun Tembok ()	3 jenis	16.529.800	APBD		3 jenis	15.750.000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kubu Gulai Banchah	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	Kubu Gulai Banchah ()	2 jenis	15.233.500	APBD		2 jenis	15.750.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Guguk Bulek	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	Campago Guguk Bulek ()	2 jenis	13.968.000	APBD		2 jenis	15.750.000
	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Garegeh	Jenis kegiatan yang diselenggarakan	Garegeh ()	2 jenis	10.065.000	APBD		2 jenis	15.750.000
	Fasilitasi kegiatan lomba-lomba dan acara pemerintahan kecamatan	acara/ lomba tingkat kecamatan, kota, propinsi, nasional	Kec. MKS	10 Acara	29.000.000	APBD		10 Acara	35.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa		0,12				0,12	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Koto Selayan	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	Koto Selayan ()	3 kali	13.121.900	APBD		3 kali	18.750.000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Campago Ipuah	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	Campago Ipuah ()	4 kali	16.468.600	APBD		4 kali	18.750.000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Manggis Ganting	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	Manggis Ganting ()	4 kali	16.488.000	APBD		4 kali	18.750.000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Pulau Anak Air	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	Pulau Anak Air ()	4 kali	14.655.200	APBD		4 kali	18.750.000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Puhun Pintu Kabun	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	Puhun Pintu Kabun ()	4 kali	14.890.000	APBD		4 kali	18.750.000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Puhun Tembok	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	Puhun Tembok ()	4 kali	13.397.500	APBD		4 kali	18.750.000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	Kubu Gulai Bancah ()	4 kali	16.379.400	APBD		4 kali	18.750.000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Campago Guguk Bulek	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	Campago Guguk Bulek ()	3 kali	14.610.000	APBD		3 kali	18.750.000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Garegeh	Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan	Garegeh ()	5 kali	12.257.750	APBD		5 kali	18.750.000
	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Kec. MKS	5 pertemuan	28.480.300	APBD		5 pertemuan	39.374.000
	Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah	penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan propinsi	Kec. MKS	3 jenis	51.397.000	APBD		3 jenis	58.812.000
	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan	Partisipan Pelatihan	Kec. MKS	45 orang	64.000.000	APBD		45 orang	75.000.000
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Tk kecamatan	kegiatan lembaga adat, kebutuhan operasional bundo kanduang dan LKAAM	Kec. MKS	2 kegiatan/ 12 bulan	55.000.000	APBD		2 kegiatan/ 12 bulan	182.000.000
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan koto selayan	pembinaan, kebutuhan operasional bundo kanduang	Kec. MKS	4 kegiatan/ 12 bulan	15.000.000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	15.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan campago ipuh	kebutuhan operasional bundo kundang	Kelurahan Campago Ipuh	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.000.000
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan manggis ganting	kebutuhan operasional bundo kundang	Kelurahan Manggis Ganting	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.000.000
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan pulai anak air	kebutuhan operasional bundo kundang	Kelurahan Pulai Anak Air	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.000.000
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan puhun pintu kabun	kebutuhan operasional bundo kundang	Kelurahan Puhun Pintu Kabun	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.000.000
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan puhun tembok	pembinaan, kebutuhan operasional bundo kundang	Kelurahan Puhun Tembok	4 kegiatan/ 12 bulan	21.934.000	APBD		4 kegiatan/ 12 bulan	15.000.000
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu gulai bancah	kebutuhan operasional bundo kundang	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.000.000
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan campago guguk bulek	kebutuhan operasional bundo kundang	kelurahan campago guguk bulek	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.000.000
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan	kebutuhan operasional bundo kundang	kelurahan garegeh	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	15.000.000
	Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jenis Pelayanan Terpadu	Kec. MKS	6 jenis/ 12 bulan	376.500.000	APBD		6 jenis/ 12 bulan	378.500.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah jasa pihak ketiga untuk pengamanan terbayar	GUGUAK PANJANG ()	12 bulan	23.500.000	-		12 bulan	22.000.000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo	Tersenyelenggaranya pemerintahan kelurahan	Tarok Dipo	12 bulan	86.733.000			12 bulan	100.000.000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun	Tersenyelenggaranya pemerintahan kelurahan	Bukit Apit Puhun	12 bulan	66.100.000			12 bulan	85.000.000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Tersenyelenggaranya pemerintahan kelurahan	Bukit Cangang kayu Ramang	12 bulan	84.576.900			12 bulan	85.000.000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas	Tersenyelenggaranya pemerintahan kelurahan	Benteng Pasar Atas	12 bulan	72.370.400			12 bulan	85.000.000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai	Tersenyelenggaranya pemerintahan kelurahan	Pakan Kurai	12 bulan	82.172.650			12 bulan	85.000.000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu	Tersenyelenggaranya pemerintahan kelurahan	Kayu Kubu	12 bulan	87.575.000			12 bulan	85.000.000
	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Tersenyelenggaranya pemerintahan kelurahan	Aur Tajungkang Tengah Sawah	12 bulan	76.526.500			12 bulan	85.000.000
	Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tersenyelenggaranya	Rakor Kecamatan Guguk Panjang	12 bulan	33.904.000			12 bulan	35.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>13.868.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>742.500.000</b>
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	GUGUAK PANJANG ()	10 jenis	60.000.000	-		10 jenis	130.000.000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	GUGUAK PANJANG ()	10 jenis	248.000.000	-		10 jenis	130.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terbeli	GUGUAK PANJANG ()	8 unit	0			8 unit	180.000.000
	Pembangunan tempat/ gedung parkir	Jumlah Tempat Parkir Terbuat	GUGUAK PANJANG	0 unit	0	-		0 unit	0
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	GUGUAK PANJANG ()	1 unit	25.000.000	-		1 unit	27.500.000
	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang direhabilitasi	GUGUAK PANJANG ()	1 unit	500.000.000	-		1 unit	0
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Tarok Dipo	Jenis peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Tarok Dipo						35.000.000
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan BAP	Jenis peralatan perlengkapan kantor	Bukit Apit Puhun						35.000.000
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jenis peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Bukit Cangang kayu Ramang						35.000.000
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jenis peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Benteng Pasar Atas						35.000.000
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Pakan Kurai	Jenis peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Pakan Kurai						35.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Kayu Kubu	Jenis peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Kayu Kubu						35.000.000
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah	Jenis peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Aur Tajungkang Tengah Sawah						35.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		Guguk Panjang		25.000.000				30.000.000
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Lurah Tarok Dipo		Tarok Dipo		10.000.000		Pokir		-
	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Lurah		Pakan Kurai/ATT S		10.000.000.000				
	Pembangunan Kantor Lurah		Kayu Kubu dan BCKR		3.000.000.000				
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai</b>		1	0			1	75.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya tersedia	GUGUAK PANJANG ()	90 stel	0	-		90 stel	75.000.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu</b>		100%	14.500.000			100%	16.000.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD tersusun tepat waktu	GUGUAK PANJANG ()	3 dokumen	3.500.000	-		3 dokumen	4.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan persemester yang tersusun tepat waktu	GUGUAK PANJANG ()	2 dokumen	3.500.000	-		2 dokumen	4.000.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah RENJA dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	GUGUAK PANJANG ()	6 dokumen	7.500.000	-		6 dokumen	8.000.000
	<b>KEWILAYAHAN</b>				<b>5.157.745.400</b>				<b>5.095.600.000</b>
	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>			<b>1.149.215.000</b>				<b>1.532.000.000</b>
	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Usulan Prioritas Kelurahan kecamatan	Guguk Panjang		16.660.000				18.000.000
	Musrenbang Tingkat Tarok Dipo	Usulan Prioritas Kelurahan kelurahan	Tarok Dipo		9.954.000				14.000.000
	Musrenbang Kelurahan Bukit Apit Puhun	Usulan Prioritas Kelurahan kelurahan	Bukit Apit Puhun		11.415.000				12.000.000
	Musrenbang Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Usulan Prioritas Kelurahan kelurahan	Bukit Cangang Kayu		6.429.000				12.000.000
	Musrenbang Kelurahan Benteng Pasar Atas	Usulan Prioritas Kelurahan kelurahan	Benteng Pasar Atas		8.298.000				12.000.000
	Musrenbang Kelurahan Pakan Kurai	Usulan Prioritas Kelurahan kelurahan	Pakan Kurai		11.500.000				12.000.000
	Musrenbang Kelurahan Kayu Kubu	Usulan Prioritas Kelurahan kelurahan	Kayu Kubu		11.765.000				12.000.000
	Musrenbang Kelurahan ATTS	Usulan Prioritas Kelurahan kelurahan	ATTS		10.551.000				12.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato diwilayah Kecamatan	Laporan harian perkembangan kegiatan manunggal sakato	Guguk Panjang		21.949.000				23.000.000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah proyek manunggal sakato	Tarok Dipo		60.000.000				70.000.000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah proyek manunggal sakato	Bukit Apit Puhun		58.915.000				70.000.000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah proyek manunggal sakato	Bukit Cangang kayu Ramang		60.000.000				70.000.000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah proyek manunggal sakato	Benteng Pasar Atas		65.515.000				70.000.000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah proyek manunggal sakato	Pakan Kurai		60.000.000				70.000.000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah proyek manunggal sakato	Kayu Kubu		64.535.000				70.000.000
	Manunggal Sakato di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah proyek manunggal sakato	ATTS		62.816.000				70.000.000
	Fasilitasi acara-acara Kecamatan dan penunjang keikut sertaan kecamatan dalam acara-acara tingkat kota/ prov/ nasional	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi untuk menunjang penyelenggaraan	Guguk Panjang		40.910.000				
	Gelar Perayaan hari jadi Kota Bukittinggi di Kecamatan	Jumlah kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota			0				30.000.000
	Gelar Perayaan hari jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	Tarok Dipo		0				30.000.000
	Gelar Perayaan hari jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	Bukit Apit Puhun		0				30.000.000
	Gelar Perayaan hari jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan BCKR	Jumlah kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	Bukit Cangang kayu Ramang		0				30.000.000
	Gelar Perayaan hari jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Benteng Pasar atas	Jumlah kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	Benteng Pasar Atas		0				30.000.000
	Gelar Perayaan hari jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	Pakan Kurai		0				30.000.000
	Gelar Perayaan hari jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan kayu Kubu	Jumlah kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	Kayu Kubu		0				30.000.000
	Gelar Perayaan hari jadi Kota Bukittinggi di Kelurahan ATTS	Jumlah kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota	ATTS		0				30.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat kelurahan tarok dipo	Jumlah Tim Olah Raga Kelurahan	Tarok Dipo		30.000.000				40.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat kelurahan bukit apit puhun	Jumlah Tim Olah Raga Kelurahan	Bukit Apit Puhun		30.000.000				40.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat kelurahan bukit cangang kayu ramang	Jumlah Tim Olah Raga Kelurahan	Bukit Cangang kayu Ramang		30.000.000				40.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat kelurahan benteng pasar atas	Jumlah Tim Olah Raga Kelurahan	Benteng Pasar Atas		30.000.000				40.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat kelurahan pakan kurai	Jumlah Tim Olah Raga Kelurahan	Pakan Kurai		30.000.000				40.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat kelurahan kayu	Jumlah Tim Olah Raga Kelurahan	Kayu Kubu		30.000.000				40.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat kelurahan atts	Jumlah Tim Olah Raga Kelurahan	ATTS		30.000.000				40.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Tk Kecamatan	Tim Olah raga ( Bola Kaki dan Volley ) Kecamatan	Guguk Panjang		140.790.000				160.000.000
	Pengawasan Perda IMB dan Perda Retribusi Sampah	Laporan Kegiatan	Guguk Panjang		30.000.000				30.000.000
	MTQ Kecamatan	Jumlah juara MTQ Tk. Kecamatan guguk panjang	Guguk Panjang		0				150.000.000
	TC dan Pengiriman Kafilah Kecamatan untuk mengikuti MTQ Kota	Kafilah MTQ Kecamatan Guguk panjang yang akan dikirim ke MTQ Kota	Guguk Panjang		110.493.000				0
	Penunjang acara kecamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, propinsi dan nasional				28.710.000				
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan	0	Guguk Panjang		48.010.000				55.000.000
	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah</b>			<b>1.648.725.500</b>				<b>1.820.000.000</b>
	Lomba Adat dan Budaya Minang kabau Tingkat Kecamatan	Jumlah Lomba adat dan Budaya yang diadakan	Guguk Panjang		51.655.000				55.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Lembaga - lembaga Adat	Jumlah pembinaan Lembaga Adat di	Guguk Panjang		12.000.000				15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Guguk Panjang		36.000.000				40.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Tarok Dipo		12.000.000	Musrenbang			15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Bukit Apit Puhun		12.000.000	Musrenbang			15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan BCKR	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Bukit Cangang kayu Ramang		12.000.000	Musrenbang			15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Benteng Pasar Atas		12.000.000	Musrenbang			15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Pakan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Pakan Kurai		12.000.000	Musrenbang			15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Kayu Kubu		12.000.000	Musrenbang			15.000.000
	Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS Kelurahan ATTS	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	ATTS		12.000.000	Musrenbang			15.000.000
	Sosialisasi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana	Masyarakat yang siaga dan tanggap terhadap bencana			15.000.000				15.000.000
	Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan dan Cakil	Masyarakat yang Paham Tertib Administrasi Kependudukan dan Cakil			15.000.000				15.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan	Generasi Muda yang aktif	Tarok Dipo		48.010.000				12.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Tarok Dipo	Generasi Muda yang aktif	Tarok Dipo		10.000.000				12.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Bukit Apit Puhun	Generasi Muda yang aktif	Bukit Apit Puhun		10.000.000				12.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Cangang kayu ramang	Generasi Muda yang aktif	Bukit Cangang kayu Ramang		10.000.000				12.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Benteng pasar Atas	Generasi Muda yang aktif	Benteng Pasar Atas		10.000.000				12.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pakan Kurai	Generasi Muda yang aktif	Pakan Kurai		10.000.000				12.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kayu Kubu	Generasi Muda yang aktif	Kayu Kubu		10.000.000				12.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan ATTS	Generasi Muda yang aktif	ATTS		9.999.500				12.000.000
	Pembinaan masyarakat / Kelompok sadar wisata	Masyarakat / kelompok yang sadar wisata	Guguk Panjang		7.000.000				0
	Pembinaan dan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK di Kecamatan	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	Guguk Panjang		180.000.000				200.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Tarok Dipo	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	Tarok Dipo		252.000.000				300.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	Bukit Apit Puhun		89.813.000				100.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	Bukit Cangang kayu Ramang		91.000.000				100.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Kelurahan Benteng Pasar Atas	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	Benteng Pasar Atas		61.136.000				70.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Pakan Kurai	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	Pakan Kurai		123.500.000				135.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Kayu Kubu	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	Kayu Kubu		112.004.000				125.000.000
	Pembinaan dan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan	ATTS		149.804.000				160.000.000
	Koordinasi Kecamatan Sehat (UKS, Kec sehat, Pokja Kelurahan Sehat)	Laporan Kegiatan Penunjang Kecamatan Sehat	Guguk Panjang		15.000.000				17.000.000
	Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	Guguk Panjang		46.050.000				50.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan se Kecamatan	Buku profil Kecamatan	Guguk Panjang		10.056.000				12.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan TD	Buku profil Kelurahan	Tarok Dipo		7.500.000				10.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan BAP	Buku profil Kelurahan	Bukit Apit Puhun		7.500.000				10.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan BCKR	Buku profil Kelurahan	Bukit Cangang kayu Ramang		7.500.000				10.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan BPA	Buku profil Kelurahan	Benteng Pasar Atas		7.498.000				10.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan PK	Buku profil Kelurahan	Pakan Kurai		7.500.000				10.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan KK	Buku profil Kelurahan	Kayu Kubu		7.500.000				10.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan ATTS	Buku profil Kelurahan	ATTS		7.500.000				10.000.000
	Pengadaan Baju Seragam Kader Posyandu, Puskesmas, sekecamatan Guuk Panjang	Baju Seragam yang tersedia			112.200.000		Musrenbang		125.000.000
	Pengadaan Peralatan Umum untuk Aktifitas Kemasyarakatan ( Tenda, Kursi, Soundsystem serta peralatan penyelenggaraan jenazah) untuk 7 kelurahan	Jumlah Peralatan yang tersedia	Guguk Panjang		0		Musrenbang		
	Pengadaan Merk Jalan dan Gerbang	Jumlah Merk Jalan dan Gerbang yang tersedia	Pakan Kurai		15.000.000		Pokir		15.000.000
	<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan</b>	<b>Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah</b>			<b>216.489.900</b>				<b>0</b>
	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah desa				201.489.900				
	Peningkatan Peran wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS)		Guguk Panjang		15.000.000				
	<b>Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>			<b>265.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.600.000</b>
	Pendataan/updated UMKM	Jumlah kelompok keuangan mikro yang didata	Guguk Panjang		130.000.000				
	Penguatan Kelompok Keuangan Mikro Pedesaan/ Kelurahan	Jumlah kelompok keuangan mikro yang dibina	Guguk Panjang		0				40.000.000
	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah UMKM yang dibina	Tarok Dipo		21.000.000				21.000.000
	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah UMKM yang dibina	Bukit Apit Puhun		21.000.000				21.000.000
	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan BCKR	Jumlah UMKM yang dibina	Bukit Cangang kayu Ramang		13.200.000				13.200.000
	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah UMKM yang dibina	Benteng Pasar Atas		13.200.000				13.200.000
	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah UMKM yang dibina	Pakan Kurai		21.000.000				21.000.000
	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah UMKM yang dibina	Kayu Kubu		13.200.000				13.200.000
	Pembekalan dan Motivasi Pengembangan UMKM di Kelurahan ATTS	Jumlah UMKM yang dibina	ATTS		21.000.000				21.000.000
	Monev UEM SP dan Dana Bergulir yang dibina	Jumlah dana bergulir yang dibina	Guguk Panjang		12.000.000				15.000.000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat</b>			<b>963.869.000</b>				<b>520.000.000</b>
	Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan lainnya	Guguk Panjang		520.000.000		pokir Rp. 120.000.000,-		450.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan Aparatur Penyelenggara PATEN	Aparatur penyelenggara PATEN yang kompeten	Guguk Panjang		354.000.000				0
	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Alas Hak Tanah	Aparatur Pengelola Administrasi Alas hak Tanah yang kompeten	Guguk Panjang		12.000.000				0
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bagi aparatur dan masyarakat Guguk Panjang	Aparatur yang paham perauran perundang-undangan	Guguk Panjang		20.000.000				0
	Penilaian Pembinaan Kelurahan Berprestasi ( Lomba, Pembinaan, persiapan penilaian untuk tk selanjutnya)	Kelurahan yang akan dibina	Guguk Panjang		28.800.000				35.000.000
	Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah	Kelurahan yang akan dibina	Guguk Panjang		25.569.000				35.000.000
	Pelatihan Kehumasan	Kehumasan yang aktif	Guguk Panjang		3.500.000				0
	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>			<b>877.846.000</b>				<b>1.005.000.000</b>
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang dibina	Guguk Panjang		87.000.000				90.000.000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan TD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang dibina	Tarok Dipo		152.705.000				175.000.000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan BAP	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang dibina	Bukit Apit Puhun		106.160.000				125.000.000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan BCKR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang dibina	Bukit Cangang kayu Ramang		126.052.000				135.000.000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan BPA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang dibina	Benteng Pasar Atas		72.276.000				100.000.000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan PK	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang dibina	Pakan Kurai		119.940.000				130.000.000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan KK	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang dibina	Kayu Kubu		87.661.000				100.000.000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ATTS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang dibina	ATTS		126.052.000				150.000.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Sapiran	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kel. Sapiran	3 program	64.604.000	DAU		3 program	65.104.000
	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Ladang cakah	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kel. Ladang Cakah	3 program	47.804.500	DAU		3 program	48.304.500
	Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Aur Kuning	jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Kel. Aur Kuning	3 program	65.132.000	DAU		3 program	65.632.000
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan parit antang	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Parit Antang	12 bulan	9.980.000	DAU		12 bulan	10.480.000
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan belakang balok	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Belakang Balok	12 bulan	10.000.000	DAU		12 bulan	10.500.000
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan pakan labuah	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Pakan Labuah	12 bulan	9.990.000	DAU		12 bulan	10.490.000
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan birugo	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Birugo	12 bulan	12.000.000	DAU		12 bulan	12.500.000
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sapiran	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Kubu Tanjung	12 bulan	10.000.000	DAU		12 bulan	10.500.000
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sapiran	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Sapiran	12 bulan	9.995.000	DAU		12 bulan	10.495.000
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ladang cakah	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Kel. Ladang Cakah	12 bulan	9.995.000	DAU		12 bulan	10.495.000
	Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan aur kuning	terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan	Aur Birugo Tigo Baleh	12 bulan	10.790.000	DAU		12 bulan	11.290.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>86.500.000</b>	<b>DAU</b>		<b>0%</b>	<b>50.500.000</b>
	Pengadaan peralatan kantor				36.500.000				
	Pembangunan/ rehabilitasi gedung kantor	tersedianya taman kantor yang representatif	Kel. Aur Kuning	90%	50.000.000	DAU		90%	50.500.000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai</b>			<b>50.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>0%</b>	<b>50.500.000</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kec. ABTB		50.000.000	DAU		0%	50.500.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu</b>			<b>7.400.000</b>	<b>DAU</b>		<b>0%</b>	<b>8.900.000</b>
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersedianya laporan keuangan semesteran	Kec. ABTB	4 laporan	1.200.000	DAU		4 laporan	1.700.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	tersedianya renja	Kec. ABTB	1 laporan	4.500.000	DAU		1 laporan	5.000.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. ABTB	<b>1 laporan</b>	1.700.000	DAU		1 laporan	2.200.000
	<b>KEWILAYAHAN</b>				<b>4.063.238.535</b>				<b>3.876.740.925</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Presentase LPM yang aktif Presentase Posyandu yang aktif Presentase TP PKK yang aktif Presentase Posyandu yang aktif Presentase TP PKK yang aktif Presentase Dasawisma yang aktif			1.201.021.600,00	DAU			1.208.521.600
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Tk. Kecamatan	1. Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kec. ABTB	12 bulan	48.828.000	DAU		12 bulan	49.328.000
		2. monitoring Posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. Laporan kegiatan pembinaan PKDRT dan Pola Asuh Anak		12 bulan				12 bulan	
		4. Monitoring TPA dan PAUD		12 bulan				12 bulan	
		5. Jumlah peserta pembinaan hatinya PKK		176 peserta				176 peserta	
		6. Laporan kegiatan monitoring Toga dan PHBS		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Parit Antang	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Parit Antang	16 kelompok	118.249.500	DAU		16 kelompok	118.749.500
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Belakang Balok	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Belakang Balok	13 kelompok	94.510.000	DAU		13 kelompok	95.010.000
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Pakan Labuah	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Pakan Labuah	29 kelompok%	82.280.000	DAU		29 kelompok%	82.780.000
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Birugo	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Birugo	56 kelompok	84.200.000	DAU		56 kelompok	84.700.000
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Kubu Tanjung	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Kubu Tanjung	16 kelompok	71.054.000	DAU		16 kelompok	71.554.000
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Sapiran	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Sapiran	32 kelompok	102.859.000	DAU		32 kelompok	103.359.000
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Aur Kuning	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Aur Kuning	70 kelompok	128.922.000	DAU		70 kelompok	129.422.000
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Ladang Cakiah	1. jumlah peserta pembinaan dasawisma	Kel. Ladang Cakiah	22 kelompok	71.102.000	DAU		22 kelompok	71.602.000
		2. monitoring posyandu		12 bulan				12 bulan	
		3. pertemuan bulanan PKK		12 bulan				12 bulan	
	Lomba jambore kader PKK Kecamatan	jumlah pemenang lomba	Kec. ABTB	3 pemenang/lomba	64.600.000	DAU		3 pemenang/lomba	65.100.000
	Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas Tk. kecamatan ABTB	1. jumlah poskamling yang mendapat peralatan dan perlengkapan linmas	Kec. ABTB	8 kelurahan	136.642.000	DAU		8 kelurahan	137.142.000
		2. Jumlah peserta Pelatihan Poskamling dan Satlinmas Kelurahan		100 peserta				100 peserta	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. jumlah peserta sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana		150 peserta				150 peserta	
		4. laporan monitoring kegiatan FKPM		12 bulan				12 bulan	
		5. jumlah peserta yang dibina (narkoba)		100				10000%	
		5. laporan monitoring keamanan, ketertiban dan kebersihan		12 bulan				12 bulan	
		6. laporan kegiatan monitoring IMB		12 bulan				12 bulan	
	Penunjang kegiatan kemasyarakatan kecamatan	Tersedianya penunjang kegiatan-kegiatan masyarakat kecamatan	Kec. ABTB	12 bulan	8.000.000			12 bulan	8.500.000
	Koordinasi kecamatan sehat	1. laporan kegiatan forum kecamatan sehat	Kec. ABTB	12 bulan	40.000.000			12 bulan	40.500.000
		2. laporan kegiatan uks		12 bulan			12 bulan		
	Penunjang operasional KOTAKU	Jumlah laporan kegiatan dan hasil evaluasi	Kec. ABTB	12 bulan	79.775.100			12 bulan	80.275.100
	monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan se kecamatan	jumlah profil kecamatan dan kelurahan	Kec. ABTB	9 buku	70.000.000			9 buku	70.500.000
	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	<b>Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat</b>			<b>78.307.250</b>				<b>79.307.250</b>
	Monev UEM-SP dan dana bergulir	Laporan pengurus UEM SP dan PDM-DKE	Kec. ABTB	12 bulan	8.307.250			12 bulan	8.807.250
	Pendataan / updating UMKM	jumlah laporan hasil pendataan	Kec. ABTB	8 laporan	70.000.000			8 laporan	70.500.000
	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>Presentase peningkatan jumlah swadaya masyarakat</b>			<b>1.365.884.075</b>				<b>1.298.389.075</b>
		jumlah bangunan fisik yang dibiayai dengan swadaya masyarakat							
	Musrenbang Tingkat kecamatan	hasil musrenbang kecamatan	Kec. ABTB	1 laporan	10.140.000			1 laporan	10.640.000
	Musrenbang kelurahan parit antang	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Parit Antang	1 laporan	8.200.000			1 laporan	8.700.000
	Musrenbang kelurahan belakang balok	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Belakang Balok	1 laporan	8.000.000			1 laporan	8.500.000
	Musrenbang kelurahan pakan labuah	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Pakan Labuah	1 laporan	6.995.000			1 laporan	7.495.000
	Musrenbang kelurahan birugo	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Birugo	1 laporan	8.000.000			1 laporan	8.500.000
	Musrenbang kelurahan kubu taniung	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Kubu Taniung	1 laporan	7.980.000			1 laporan	8.480.000
	Musrenbang sapiran	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Sapiran	1 laporan	8.879.000			1 laporan	9.379.000
	Musrenbang kelurahan ladang cakiah	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Ladang Cakiah	1 laporan	7.278.000			1 laporan	7.778.000
	Musrenbang kelurahan aur kuning	hasil musrenbang kelurahan	Kel. Aur Kuning	1 laporan	7.997.500			1 laporan	8.497.500
	koordinasi monitoring dan evaluasi Manunggal Sakato Tk. Kecamatan	rekap laporan harian manunggal sakato	Kec. ABTB	30 laporan	24.660.250			30 laporan	25.160.250
	Manunggal Sakato kelurahan kelurahan parit antang	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Parit Antang	100%	69.100.000			100%	69.600.000
	Manunggal Sakato kelurahan belakang balok	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Ke. Belakang Balok	100%	66.763.000			100%	67.263.000
	Manunggal Sakato pakan labuah	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Pakan Labuah	100%	62.987.000			100%	63.487.000
	Manunggal Sakato kelurahan birugo	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Birugo	100%	63.600.000			100%	64.100.000
	Manunggal Sakato kubu taniung	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Kubu Tanjung	100%	61.868.000			100%	62.368.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Manunggal Sakato kelurahan sapiran	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Sapiran	100%	65.590.000			100%	66.090.000
	Manunggal Sakato ladang cakiah	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Ladang Cakiah	100%	62.343.000			100%	62.843.000
	Manunggal Sakato aur kuning	presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan	Kel. Aur Kuning	100%	68.227.000			100%	68.727.000
	Monitoring pemungutan PBB di Kelurahan	Terlaksananya peningkatan pemungutan PBB	Kec. ABTB	8 Kelurahan	10.000.000				10.500.000
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Parit Antang	jumlah cabang olah raga	Kel. Parit Antang	1 cabang	30.000.000			1 cabang	30.500.000
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Belakang Balok	jumlah cabang olah raga	Kel. Belakang Balok	1 cabang	30.000.000			1 cabang	30.500.000
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Labuah	jumlah cabang olah raga	Kel. Pakan Labuah	1 cabang	30.000.000			1 cabang	30.500.000
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Birugo	jumlah cabang olah raga	Kel. Birugo	1 cabang	27.800.000			1 cabang	28.300.000
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Kubu Tanjuang	jumlah cabang olah raga	Kel. Kubu Tanjung	1 cabang	30.000.000			1 cabang	30.500.000
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Sapiran	jumlah cabang olah raga	Kel. Sapiran	1 cabang	30.000.000			1 cabang	30.500.000
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah	jumlah cabang olah raga	Kel. Ladang Cakiah	1 cabang	28.368.000			1 cabang	28.868.000
	Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Aur Kuning	jumlah cabang olah raga	Kel. Aur Kuning	1 cabang	29.751.000			1 cabang	30.251.000
	Pembinaan dan fasilitasi olah raga masyarakat Tk. Kecamatan	jumlah cabang olah raga	Kec. ABTB	2 cabang	94.372.475			2 cabang	94.872.475
	Penunjang acara kecamatan dan penunjang keikutsertaan masyarakat dalam acara-acara tingkat kecamatan, kota, provinsi dan nasional	Presentase keikutsertaan masyarakat dalam acara-acara tingkat kecamatan, kota, provinsi dan nasional	Kec. ABTB	90%	38.972.850			90%	39.472.850
	Pengiriman kafilah kecamatan	jumlah kafilah MTQ	Kec. ABTB	100 peserta	80.000.000			100 peserta	80.500.000
	Training Centre kafilah MTQ	jumlah peserta TC	Kec. ABTB	150 peserta	35.000.000			150 peserta	35.500.000
	Lomba didikan subuh	tersedianya pemenang lomba	Kec. ABTB	3 pemenang	33.717.000			3 pemenang	34.217.000
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Tk. Kecamatan	1. jumlah peserta pembinaan keluarga sakinah	Kec. ABTB	80 peserta	49.300.000			80 peserta	49.800.000
		2. jumlah peserta pembinaan guru MDA dan didikan subuh		80 peserta				80 peserta	
		3. jumlah peserta pelatihan sholat jenazah		80 peserta				80 peserta	
		4. laporan kegiatan monitoring		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Parit Antang	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Parit Antang		5.000.000			0%	
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Belakang Balok	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Belakang Balok		5.000.000			0%	
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Birugo	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Birugo		5.000.000			0%	
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Ladang Cakiah	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Ladang Cakiah		4.995.000			0%	
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Pakan Labuah	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Pakan Labuah		5.000.000			0%	
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Aur Kuning	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Aur Kuning		5.000.000			0%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Kubu Tanjung	Laporan Kegiatan Monitoring	Kel. Kubu Tanjung		5.000.000			0%	
	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Sapiran	1. jumlah peserta yang dibina (karakter generasi muda)	Kel. Sapiran	120 peserta	50.000.000			120 peserta	50.500.000
		2. jumlah peserta yang dibina (remaja masjid dan mushalla)		240 peserta				240 peserta	
	Fasilitasi kegiatan Lembaga lembaga adat (LKAAM)	laporan kegiatan	Kec. ABTB	12 bulan	35.000.000			12 bulan	35.500.000
	Gelar Perayaan Hari Jadi Kota Kelurahan Parit Antang	jumlah peserta yang ikut perayaan	Kel. Parit Antang		25.000.000			0%	
	Gelar Perayaan Hari Jadi Kota Sapiran	jumlah peserta yang ikut perayaan	Kel. Sapiran		25.000.000			0%	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Presentase RW yang aktif</b>			<b>599.002.610</b>			<b>0%</b>	<b>467.000.000</b>
		Presentase RT yang aktif						0%	
	Penunjang operasional PATEN	Laporan paten	Kec. ABTB	12 bulan	360.000.000			12 bulan	360.500.000
	Penilaian dan pembinaan kelurahan berprestasi	jumlah pemenang lomba	Kec. ABTB	3 pemenang	20.000.000			3 pemenang	20.500.000
	Penilaian dan pembinaan kompetensi Lurah	tersedianya pemenang lomba	Kec. ABTB	3 pemenang	20.000.000			3 pemenang	20.500.000
	kompetensi Sekretaris lurah		Kec. ABTB					0%	
	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah desa				134.002.610				
	Rapat koordinasi kecamatan dengan unsur terkait	Tersedianya notulen rapat dan laporan rapat	Kec. ABTB	12 bulan	65.000.000			12 bulan	65.500.000
	<b>Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT</b>	<b>Tingkat capaian kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan RT</b>			<b>819.023.000</b>			<b>0%</b>	<b>823.523.000</b>
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Tk. kecamatan	1. jumlah peserta yang dina (peran dan fungsi LPM)	Kec. ABTB	64 peserta	18.496.000			64 peserta	18.996.000
		2. operasional DPC LPM		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Parit Antang	1. Monitoring RT/RW	Kel. Parit Antang	12 bulan	75.000.000			12 bulan	75.500.000
		2. Honor LPM		12 bulan				12 bulan	
		3. Honor RT/RW		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Belakang Balok	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Belakang Balok	12 bulan	95.900.000			12 bulan	96.400.000
		2. Honor LPM		12 bulan				12 bulan	
		3. Honor RT/RW		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Pakan Labuah	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Pakan Labuah	12 bulan	113.582.000			12 bulan	114.082.000
		2. Honor LPM		12 bulan				12 bulan	
		3. Honor RT/RW		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Sapiran	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Sapiran	12 bulan	95.900.000			12 bulan	96.400.000
		2. Honor LPM		12 bulan				12 bulan	
		3. Honor RT/RW		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Aur Kuning	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Aur Kuning	12 bulan	120.475.000			12 bulan	120.975.000
		2. Honor LPM		12 bulan				12 bulan	
		3. Honor RT/RW		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Ladang Cakiah	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Ladang Cakiah	12 bulan	69.828.000			12 bulan	70.328.000
		2. Honor LPM		12 bulan				12 bulan	
		3. Honor RT/RW		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Birugo	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Birugo	12 bulan	136.800.000			12 bulan	137.300.000
		2. Honor LPM		12 bulan				12 bulan	
		3. Honor RT/RW		12 bulan				12 bulan	
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Tanjung	1. Monitoring lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kel. Kubu Tanjung	12 bulan	93.042.000			12 bulan	93.542.000
		2. Honor LPM		12 bulan				12 bulan	
		3. Honor RT/RW		12 bulan				12 bulan	

**Tabel 5.30**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
400.01.01	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				5.121.535.200				4.995.888.700
	<b>NON URUSAN</b>				318.739.200				318.739.200
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	Bukittinggi		316.719.200	APBD			316.719.200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Materai dan Buku Cek	Bukittinggi	400 Lbr Materai dan 2 Buku Cek, dan Perangko	2.000.000	APBD		400 Lbr Materai dan 2 Buku Cek, dan Perangko	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening Telepon dan Internet	Bukittinggi	24 Tagihan	7.800.000	APBD		24 Tagihan	7.800.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Bukittinggi	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 -	53.256.000	APBD		1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 -	53.256.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Kantor / Jumlah Ruangan yang dilayani	Bukittinggi	2 Ruangan	31.658.200	APBD		2 Ruangan	31.658.200
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat jasa	Bukittinggi	4 unit komputer, 5 unit laptop, 4	3.300.000	APBD		4 unit komputer, 5 unit laptop, 4	3.300.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	Bukittinggi	1 Paket	13.795.000	APBD		1 Paket	13.795.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bukittinggi	10 Macam Barang Cetak dan 1	10.010.000	APBD		10 Macam Barang Cetak dan 1	10.010.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	Bukittinggi	1 Paket	1.750.000	APBD		1 Paket	1.750.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman yang disediakan	Bukittinggi	1 paket	10.650.000	APBD		1 paket	10.650.000
	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang difasilitasi	Bukittinggi	1 Tahun	180.000.000	APBD		1 Tahun	180.000.000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	Bukittinggi	4 Paket	2.500.000	APBD		4 Paket	2.500.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD</b>	<b>Bukittinggi</b>		<b>2.020.000</b>	<b>APBD</b>			<b>2.020.000</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	Bukittinggi	10 Eks	568.000	APBD		10 Eks	568.000
	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	Bukittinggi	10 Eks	965.000	APBD		10 Eks	965.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Bukittinggi	18 Eks	487.000	APBD		18 Eks	487.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>4.802.796.000</b>				<b>4.677.149.500</b>
	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah</b>	<b>Bukittinggi</b>		<b>1.369.159.500</b>				<b>1.369.159.500</b>
	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Laporan Kominda	Bukittinggi	12 laporan	371.680.000	APBD		12 laporan	371.680.000
	Pengawasan Orang Asing	Laporan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan Non Government Organization	Bukittinggi	12 Laporan	292.750.000	APBD		12 Laporan	292.750.000
	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Laporan FKDM	Bukittinggi	12 Laporan	55.847.500	APBD		12 Laporan	55.847.500
	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Laporan Tim Terpadu Penanganan Penanganan Konflik Sosial	Bukittinggi	5 berkas	184.681.000	APBD		5 berkas	184.681.000
	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian	Laporan evaluasi	Bukittinggi	12 Laporan	50.000.000	APBD		12 Laporan	50.000.000
	Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Di Daerah	Laporan Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Di Daerah	Bukittinggi	1 kegiatan	25.000.000	APBD		1 kegiatan	25.000.000
	Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana	Laporan Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Ketahanan Bencana Kt B. Tinggi	Bukittinggi	1 kegiatan, 12 kali pengawasan	25.000.000	APBD		1 kegiatan, 12 kali pengawasan	25.000.000
	SATGAS Saber Pungli	Laporan Saber Pungli	Bukittinggi	12 laporan	364.201.000	APBD	Pindah ke Inspektorat	12 laporan	364.201.000
	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase jumlah gangguan keamanan yang dapat diredam akibat gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain</b>	<b>Bukittinggi</b>		<b>419.965.500</b>				<b>419.965.500</b>
	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Bukittinggi	150 Orang	71.305.500	APBD		150 Orang	71.305.500
	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Laporan Forum Pembauran Kebangsaan	Bukittinggi	4 Laporan	99.330.000	APBD		4 Laporan	99.330.000
	Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara	Laporan Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara	Bukittinggi	30 orang	99.330.000	APBD		30 orang	99.330.000
	Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	Peserta Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	Bukittinggi	100 orang	150.000.000	APBD		100 orang	150.000.000
	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum</b>	<b>Bukittinggi</b>		<b>1.397.540.000</b>				<b>1.397.540.000</b>
	Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Laporan Forum Diskusi Politik	Bukittinggi	12 Laporan	998.085.000	APBD		12 Laporan	998.085.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Hasil Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Bukittinggi	11 Parpol	12.636.000	APBD		11 Parpol	12.636.000
	Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat	Laporan Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Ormas	Bukittinggi	12 ormas	35.000.000	APBD		12 ormas	35.000.000
	Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Laporan Bimtek	Bukittinggi	40 orang	30.000.000	APBD		40 orang	30.000.000
	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Peserta Sosialisasi	Bukittinggi	50 orang	31.860.500	APBD		50 orang	31.860.500
	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Database Ormas/ LSM dan Parpol	Bukittinggi	40 eks	22.138.500			40 eks	22.138.500
	Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Peserta Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Bukittinggi	100 Orang	17.820.000	APBD		100 Orang	17.820.000
	Pembinaan kepada kader Parpol	Laporan pembinaan	Bukittinggi	1 Laporan	250.000.000	APBD		1 Laporan	250.000.000
	<b>Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada</b>	<b>Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum</b>	<b>Bukittinggi</b>		<b>500.000.000</b>				<b>500.000.000</b>
	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif	Bukittinggi	1 Laporan	200.000.000	APBD		1 Laporan	200.000.000
	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Laporan Fasilitasi dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Legislatif	Bukittinggi	9 Laporan	300.000.000	APBD		9 Laporan	300.000.000
	<b>Program Pencegahan, Penanganan Dan Rehabilitasi Narkoba</b>	<b>Jumlah kasus narkoba di Bukittinggi</b>	<b>Bukittinggi</b>		<b>644.283.500</b>				<b>518.637.000</b>
	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Bukittinggi	100 Orang	74.549.000	APBD		100 Orang	74.549.000
	Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Pelaksanaan Peringatan HANI	Bukittinggi	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	100.000.000
	Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Laporan Kompani	Bukittinggi	1 Laporan	44.088.000	APBD		1 Laporan	44.088.000
	Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Laporan hasil tes urine	Bukittinggi	1250 orang	250.000.000	APBD		1250 orang	250.000.000
	Pencegahan, penanganan dan rehabilitasi narkoba				125.646.500				
	Sosialisasi Melalui Media Elektronik dan media massa lainnya bahaya Narkoba	terlaksananya sosialisasi melalui media elektronik	Bukittinggi	1 kegiatan	50.000.000	APBD		1 kegiatan	50.000.000
	<b>Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar</b>	<b>Tingkat pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan</b>			<b>76.000.000</b>				<b>76.000.000</b>
	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Kegiatan Upacara Kesadaran Nasional	Bukittinggi	12 kali	76.000.000	APBD		12 kali	76.000.000
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama</b>	<b>Tingkat Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama</b>			<b>395.847.500</b>				<b>395.847.500</b>
	Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Peserta Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Bukittinggi	100 orang/ 4 kali pengawasan	350.000.000	APBD		100 orang/ 4 kali pengawasan	350.000.000
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Laporan Dewan Penasehat FKUB	Bukittinggi	4 laporan	45.847.500	APBD		4 laporan	45.847.500



## Bab VI

### **PENUTUP**

---

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi tahun 2018 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen tahunan, penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lain, baik dokumen perencanaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, hasil analisis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2017. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 bersifat sangat strategis karena merupakan pelaksanaan rencana kerja Walikota terpilih yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan hal diatas, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bukittinggi Tahun 2018. RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun dengan melibatkan berbagai pihak melalui koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, karena RKPD merupakan komitmen dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bukittinggi.

Akhirnya harapan kita bersama, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan bermanfaat. Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, khususnya dalam pencapaian Visi Kota Bukittinggi ***“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”***

WALIKOTA BUKITTINGGI,



M. RAMLAN NURMATIAS